



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA DAMPAK RENCANA PERUBAHAN
FORMULASI DANA ALOKASI UMUM:
STUDI KASUS PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN**

TESIS

**JULIAN ONG
0806430191**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI, 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISA DAMPAK RENCANA PERUBAHAN
FORMULASI DANA ALOKASI UMUM :
STUDI KASUS PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Ekonomi (M.E.)

**JULIAN ONG
0806430191**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2012**

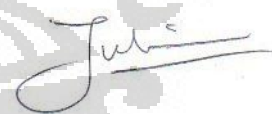
SURAT PERNYATAAN BEBAS *PLAGIARISME*

Saya yang bertandatangan di bawah ini, dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan *plagiarisme* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan *plagiarisme*, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan siap menerima sanksi yang dijatuhkan oleh pihak Universitas Indonesia kepada saya.



Jakarta, 26 Januari 2012



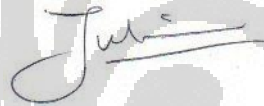
Julian Ong
0806430191

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Julian Ong
NPM : 0806430191
Tanggal : 26 Januari 2012

Tanda Tangan :



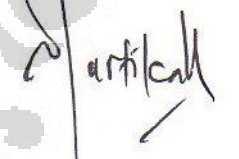


HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Julian Ong
NPM : 0806430191
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisa Rencana Perubahan Formulasi Dana Alokasi Umum :
Studi Kasus Provinsi Berciri Kepulauan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Nurkholis, SE, MSE ()
Penguji : Arindra A. Zainal, PhD ()
Penguji : Dr. Sartika Djamaluddin ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 26 Januari 2012

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Tesis ini berjudul **Analisa Dampak Rencana Perubahan Formulasi Dana Alokasi Umum: Studi Kasus Provinsi Berciri Kepulauan**, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini adalah sebuah analisa kebijakan pemerintah yakni adanya rencana revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah khususnya wacana yang memasukkan unsur kepulauan sebagai pertimbangan rencana perubahan formulasi Dana Alokasi Umum. Simulasi kebijakan reformulasi dengan memasukkan unsur kepulauan dilakukan dengan menggunakan skenario adanya luas wilayah laut sebagai pembanding atas kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa perhatian dan bantuan yang tulus dan ikhlas dari berbagai pihak, penulis sulit menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat waktu, oleh karena itu dengan rendah hati pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada:

1. Arindra A. Zainal, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
2. Dr. Andi Fahmi Lubis, selaku Sekretaris Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
3. Dr. Sartika Djamaluddin, selaku anggota penguji pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
4. Nurkholis, SE, MSE, selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, pengertian dan kesabaran di dalam menyediakan waktu bimbingan, pemikiran dan arahan yang konstruktif di dalam penyelesaian tesis ini.
5. Para dosen pengajar pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia yang telah banyak memberikan pengetahuan yang mendasar selama proses studi.

6. Para staf Tata Usaha Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia yang dengan sabar dan penuh pengertian di dalam memberikan pelayanan administrasi selama studi.
7. Orang tua dan kakak kandung penulis yang senantiasa memberikan doa dan restu dengan tanpa pamrih kepada penulis.
8. Rekan-rekan seangkatan penulis dan selama studi yakni MPKP-XVIII, MPKP-XIX A dan B, MPKP-XX dan MPKP-XXI Pagi dan Sore pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dan dalam bentuk apapun juga dalam penyelesaian tesis ini.

Akhirul kata, penulis kembali sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga senantiasa berkenan memberikan rahmat berlimpah kepada semua atas tuntunan, kekuatan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Jakarta, 26 Januari 2012

Penulis

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika pada Universitas Indonesia, yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Julian Ong
NPM : 0806430191
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya Ilmiah : Tesis

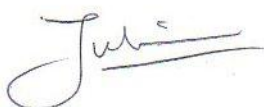
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **ANALISA DAMPAK RENCANA PERUBAHAN FORMULASI DANA ALOKASI UMUM: STUDI KASUS PROVINSI BERCIRI KEPULAUAN**.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, maka berarti pihak Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Tugas Akhir berupa Tesis ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Januari 2012

Saya yang menyatakan,



Julian Ong
NPM 0806430191

ABSTRAK

Nama : Julian Ong
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisa Dampak Rencana Perubahan Formulasi Dana Alokasi Umum : Studi Kasus Provinsi Berciri Kepulauan

Penelitian ini menganalisa dampak dari rencana perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) dengan mengangkat kasus provinsi berciri kepulauan sebagai pokok bahasan dan menggunakan analisa regresi data panel untuk tahun 2003-2010.

Selama ini formulasi DAU lebih mengandalkan luas daratan dan baru memulai memasukkan komponen lautan dalam formulasi DAU dengan bobot yang rendah. Rencana perubahan formulasi DAU sudah mulai bergulir untuk perencanaan anggaran, dan khususnya bagi provinsi berciri kepulauan diharapkan berdampak yang positif ke depan berupa peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah, khususnya pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisa menunjukkan bahwa IPM berpengaruh positif namun belum signifikan, penerimaan/pendapatan daerah (PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK) dan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan, luas wilayah berpengaruh negatif dan signifikan, dan, *dummy* provinsi berciri kepulauan berpengaruh negatif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Perubahan formulasi DAU, yaitu dengan meningkatkan bobot luas laut dalam perhitungan luas wilayah dari 30 persen sampai dengan 80 persen memberikan efek yang semakin memmeratakan kondisi keuangan daerah provinsi dan meningkatkan penerimaan daerah Provinsi yang berciri kepulauan. Namun, peningkatan penerimaan akibat perubahan formulasi DAU tersebut belum signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi berciri kepulauan, sehingga diperlukan alternatif cara lain dalam mengoptimalkan kinerja pembangunan daerahnya.

Kata kunci:

Desentralisasi fiskal, dana alokasi umum, provinsi berciri kepulauan, pemerataan keuangan daerah, pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

Name : Julian Ong
Study Program : Magister of Public Planning and Policy
Title : An Analyze of the Impact on General Allocation Fund (Dana Alokasi Umum-DAU) Reformulation Plan : Study Case of Islanding (Archipelagic) Province

This study analyzes the impact of general allocation fund reformulation plan with study case of islanding (archipelagic) province using the panel data regression model from 2003-2010.

So far the DAU formulation has relied more on land spatial measurement and newly started to insert the sea spatial component into the DAU formulation with a low weight. The DAU reformulation plan has already run for running budget planning and onward, and an expectation to bring positive impact in the future for the islanding provinces through the regional economic development, especially its economic growth.

The analyze shows that human development index (HDI) has positive covers but insignificant, local government revenue (originally local government revenue (PAD), and transfer funds (DAU, revenue sharing (dana bagi hasil-DBH), and special allocation fund (dana alokasi khusus-DAK)) and the previous year regional gross domestic product (RGDP) have positive covers and significant, spatial measures have negative covers and significant, and, dummy of islanding province has negative covers and insignificant, in supporting the provincial economic growth. The DAU reformulation, which to increase the weight of sea spatial measures from 30% to 80% provides a more distributional equality of provincial financial condition and improves the provincial revenue of islanding provinces. The increase revenue due from the DAU reformulation was insignificant to boost the islanding province economic growth, therefore other ways as alternative are needed to optimalised the local economic development performances.

Key words:

Fiscal decentralization, general allocation fund, islanding provinces, equalization fund, economic growth.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME		ii
PERNYATAAN ORISINALITAS		iii
LEMBAR PENGESAHAN		iv
KATA PENGANTAR		v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH		vi
ABSTRAK		viii
ABSTRACT		ix
DAFTAR ISI		x
DAFTAR TABEL		xii
DAFTAR LAMPIRAN		xiv
1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Perumusan Masalah	5
	1.3. Tujuan Penelitian.....	6
	1.4. Ruang Lingkup Penelitian.....	6
	1.5. Hipotesa Studi	7
	1.6. Manfaat Penelitian.....	7
	1.7. Sistematika Penulisan.....	8
2	TINJAUAN PUSTAKA	10
	2.1. Teori tentang Desentralisasi	10
	2.2. Teori Makroekonomi yang Terkait	17
	2.3. Dana Perimbangan	20
	2.4. Dana Alokasi Umum	25
	2.4.1. Prinsip Dasar DAU	26
	2.4.2. Beberapa Faktor Penting dalam Desain DAU	28
	2.4.3. Formulasi DAU	29
	2.4.4. Mekanisme Distribusi dan Aspek Teknis Terkait	38
	2.5. Pemerataan Dana Alokasi Umum	40
	2.6. Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004	42
	2.7. Provinsi Berciri Kepulauan	43
	2.8. Studi sejenis sebelumnya	46
3	METODOLOGI	53
	3.1. Kerangka Pikir Konseptual	53
	3.2. Metode Analisa	53
	3.2.1. Analisa Statistik Deskriptif	54
	3.2.2. Metode Ekonometrika: Data Panel.....	54
	3.2.3. Indikator Pemerataan/Ketimpangan/Kesenjangan	62
	3.3. Beberapa Pemikiran Terkait Simulasi Dana Alokasi Umum .	64
	3.4. Metode Pengumpulan Data	70
	3.5. Jenis dan Sumber Data	70

4	GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI	72
	4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk	72
	4.2. PDRB per Kapita	78
	4.3. Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional	81
	4.4. Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum	86
	4.5. Indeks Kapasitas Fiskal	93
	4.6. Tingkat Kemiskinan	98
	4.7. Indeks Pembangunan Manusia	98
	4.8. Infrastruktur Dasar	103
	4.9. Rekapitulasi Kinerja Provinsi Kepulauan	108
5	HASIL DAN PEMBAHASAN	110
	5.1. Model Analisa Data Panel	110
	5.1.1. Hasil Estimasi	111
	5.1.2. Pengujian Model Panel	114
	5.1.3. Evaluasi Ekonometrika: Pengujian Asumsi Klasik	115
	5.1.4. Evaluasi Statistik: Uji Signifikansi Hasil Regresi	118
	5.1.5. Evaluasi Ekonomi: Interpretasi Hasil	119
	5.2. Analisa Dampak Perubahan Formulasi DAU	122
	5.2.1. Kondisi Eksisting	122
	5.2.2. Simulasi Perubahan Formulasi DAU	128
	5.2.3. Dampak Perubahan Formulasi DAU	129
6	PENUTUP	134
	6.1. Kesimpulan	134
	6.2. Saran/Rekomendasi Kebijakan	136
	6.3. Keterbatasan Studi	137
	DAFTAR PUSTAKA	138
	LAMPIRAN	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perkembangan Penggunaan Variabel dalam Perumusan DAU	33
Tabel 2.2	Korelasi DAU dengan Variabel-Variabel Potensial	47
Tabel 2.3	Korelasi DAU dengan Variabel-Variabel Kebutuhan	47
Tabel 3.1	Uji Statistik Durbin-Watson d	60
Tabel 3.2	Komponen, Variabel dan Bobot Penyusunan DAU Tahun 2000-2011	69
Tabel 3.3	Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan	70
Tabel 4.1	Luas Wilayah Daratan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Tahun 1990, 2000, 2010	74
Tabel 4.2	Luas Wilayah Tujuh Provinsi Kepulauan	76
Tabel 4.3	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2009-2010	79
Tabel 4.4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi	82
Tabel 4.5	Pertumbuhan Ekonomi (Laju Pertumbuhan PDRB-Harga Konstan 2000) Menurut Provinsi Tahun 2001-2010	83
Tabel 4.6	Perkembangan Jumlah Total Alokasi DAU dan Dana Penyeimbang, 2001 – 2010	87
Tabel 4.7	DAU Se-Provinsi Tahun 2003-2010 (%)	91
Tabel 4.8	DAU Per-Provinsi Tahun 2003 – 2011 (%)	92
Tabel 4.9	Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Menurut Provinsi 2010	94
Tabel 4.10	Langkah-langkah Formulasi IKFD dan Pengkaitan dengan IPM	96
Tabel 4.11	Kelompok Daerah Rekomendasi Menkeu 2011 (Keseimbangan Pendanaan di Daerah berdasarkan IKFD dan IPM)	97
Tabel 4.12	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi	99
Tabel 4.13	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 1999-2009	100
Tabel 4.14	Rumah Milik Sendiri, 2002-2010 (%)	102
Tabel 4.15	Sumber Penerangan Listrik Menurut Provinsi Tahun 2002-2010, (%)	104
Tabel 4.16	Sanitasi Layak Menurut Provinsi Tahun 2002-2010, (%)	105
Tabel 4.17	Air Minum Layak Menurut Provinsi Tahun 2002-2010 (%)	107
Tabel 4.18	Rekapitulasi Kinerja Pembangunan Provinsi Berciri Kepulauan	109
Tabel 4.19	Peringkat Provinsi Berciri Kepulauan	109
Tabel 5.1	Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas	111
Tabel 5.2	Hasil Estimasi dengan Metode PLS	112
Tabel 5.3	Hasil Estimasi dengan Model Random Effect	113
Tabel 5.4	Hasil Pengujian Fixed atau Random Effects	115
Tabel 5.5	Daerah Kritis Uji Durbin Watson	116
Tabel 5.6	Nilai Koefisien Variasi Kondisi Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2003-2011	122
Tabel 5.7	Nilai Indeks Williamson Kondisi Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2003-2011	123
Tabel 5.8	Distribusi Alokasi DAU Provinsi Tahun 2003-2011 (dalam Persen)	124
Tabel 5.9	Struktur Pendapatan Provinsi Tahun 2011 (dalam Persen)	125

Tabel 5.10	Distribusi Pendapatan Daerah Menurut Provinsi Tahun 2011 (dalam Persen)	126
Tabel 5.11	Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Tahun 2010 dan Perkiraanannya untuk Tahun 2011	127
Tabel 5.12	Komponen, Variabel dan Bobot Penyusun Simulasi DAU 2011 ...	128
Tabel 5.13	Nilai Koefisien Variasi Kondisi Keuangan Daerah Hasil Simulasi untuk Provinsi Tahun 2011	130
Tabel 5.14	Nilai Indeks Williamson Kondisi Keuangan Daerah Hasil Simulasi untuk Provinsi Tahun 2011	130
Tabel 5.15	Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Provinsi Hasil Simulasi Tahun 2011 (dalam Persen)	131
Tabel 5.16	Distribusi DAU dalam Pendapatan Daerah Provinsi Hasil Simulasi Tahun 2011 (dalam Persen)	132
Tabel 5.17	Dampak Perubahan Formulasi DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Tahun 2011 (dalam Persen)	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Konsep General Purpose Transfers (GPT)	24
Gambar 2.2	Kebijakan Jumlah Alokasi DAU Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004	31
Gambar 2.3	Formula Umum DAU Menurut UU No. 33 Tahun 2004	34
Gambar 2.4	Penentuan Alokasi DAU Berdasarkan Kesenjangan Fiskal Setiap Daerah	36
Gambar 2.5	Pembagian DAU bagi Daerah Pemekaran	37
Gambar 2.6	Integritas Wilayah Teritorial	44
Gambar 2.7	Perbatasan Indonesia dan 12 Pulau Terdepan Prioritas	45
Gambar 3.1	Kerangka Pikir Konseptual	53
Gambar 4.1	Kepadatan Penduduk Per Provinsi, 1990, 2000, 2010, (Jiwa/km ²) .	75
Gambar 4.2	Luas Wilayah Daratan (km ²)	76
Gambar 4.3	Luas Lautan Provinsi-Provinsi di Indonesia	77
Gambar 4.4	Perbandingan Luas Daratan dan Lautan Provinsi-Provinsi di Indonesia (%)	77
Gambar 4.5	Jumlah Sebaran Pulau Per Provinsi	78
Gambar 4.6	PDRB Provinsi Kepulauan 2000-2010 (Harga Konstan 2000, Miliar Rp)	80
Gambar 4.7	PDRB Provinsi Kepulauan 2000-2010 (Harga Berlaku, Miliar Rp)	81
Gambar 4.8	Kontribusi PDRB Kepulauan terhadap Perekonomian, 2000-2010, % .	84
Gambar 4.9	Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 2006-2010 Per Provinsi (Laju Pertumbuhan PDRB-Harga Konstan 2000)	85
Gambar 4.10	Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah	88
Gambar 4.11	Pendapatan Daerah 7 Provinsi Kepulauan (Persentase)	89
Gambar 4.12	DAU Se-Provinsi (Provinsi dan Kabupaten/Kota), 2003-2011 (Juta Rupiah)	91
Gambar 4.13	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan 2005-2010 (Juta Rp)	95
Gambar 4.14	DBH Provinsi Kepulauan 2005-2011, (Miliar Rp)	95
Gambar 4.15	Kepemilikan Rumah Sendiri Provinsi Kepulauan, 2005-2010, % ..	103
Gambar 5.1	Daerah Uji Durbin Watson	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1-1	Data Panel	142
Lampiran 2-1	Koefisien Variasi PAD 2003-2011	148
Lampiran 2-2	Koefisien Variasi DAU 2003-2011	149
Lampiran 2-3	Koefisien Variasi PAD+DAU 2003-2011	150
Lampiran 2-4	Koefisien Variasi PAD+DAU+DBH 2003-2011	151
Lampiran 2-5	Koefisien Variasi PAD+DAU+DBH+DAK 2003-2011	152
Lampiran 3-1	Indeks Williamson PAD 2003-2011	153
Lampiran 3-2	Indeks Williamson DAU 2003-2011	155
Lampiran 3-3	Indeks Williamson PAD+DAU 2003-2011	157
Lampiran 3-4	Indeks Williamson PAD+DAU+DBH 2003-2011	159
Lampiran 3-5	Indeks Williamson PAD+DAU+DBH+DAK 2003-2011	161
Lampiran 4-1	Distribusi Alokasi DAU Kepulauan Dan Non Kepulauan (%)	163
Lampiran 5-1	Simulasi Luas Wilayah (Km ²)	164
Lampiran 5-2	Simulasi Indeks Luas Wilayah	165
Lampiran 5-3	Simulasi Indeks Luas Wilayah Laut	166
Lampiran 5-4	Simulasi Nilai Kebutuhan Fiskal	167
Lampiran 6-1	Koefisien Variasi PAD, DP, DBH, DAU, DAK 2011	168
Lampiran 6-2	Simulasi dan Koefisien Variasi DAU	169
Lampiran 6-3	Simulasi dan Koefisien Variasi PAD+DAU	170
Lampiran 6-4	Simulasi dan Koefisien Variasi PAD+DAU +DBH	171
Lampiran 6-5	Simulasi dan Koefisien Variasi PAD+DAU+DBH+DAK	172
Lampiran 6-6	Simulasi Indeks Williamson PAD	173
Lampiran 6-7	Simulasi Indeks Williamson DAU	174
Lampiran 6-8	Simulasi Indeks Williamson PAD+DAU	176
Lampiran 6-9	Simulasi Indeks Williamson PAD+DAU+DBH	178
Lampiran 6-10	Simulasi Indeks Williamson PAD+DAU+DBH+DAK	180
Lampiran 7-1	Simulasi Kebutuhan Fiskal	182
Lampiran 7-2	Belanja PNSD dan IKF	184
Lampiran 7-3	Celah Fiskal dan Alokasi Dasar (dalam jutaan Rupiah)	185
Lampiran 8-1	Simulasi Kontribusi DAU Berdasarkan APBD 2011 (dalam milyar Rupiah) (1)	187
Lampiran 8-2	Simulasi Kontribusi DAU Berdasarkan APBD 2011 (dalam milyar Rupiah) (2)	188
Lampiran 8-3	Simulasi Struktur DAU Berdasarkan APBD 2011 (%)	189
Lampiran 8-4	Simulasi Distribusi DAU Dalam Pendapatan Daerah Provinsi Berdasarkan APBD 2011 (%) (1)	191
Lampiran 8-5	Simulasi Distribusi DAU Dalam Pendapatan Daerah Provinsi Berdasarkan APBD 2011 (%) (2)	192
Lampiran 9-1	Peta Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	193
Lampiran 9-2	Peta Provinsi Kepulauan Riau	194
Lampiran 9-3	Peta Provinsi Nusa Tenggara Barat	195
Lampiran 9-4	Peta Provinsi Nusa Tenggara Timur	196
Lampiran 9-5	Peta Provinsi Sulawesi Utara	197
Lampiran 9-6	Peta Provinsi Maluku	198
Lampiran 9-7	Peta Provinsi Maluku Utara	199

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendanaan pembangunan melalui transfer ke daerah merupakan salah satu sumber utama pembangunan daerah yang didukung oleh Pemerintah Pusat. Dana transfer ke daerah terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi khusus, serta dana penyesuaian. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal 1 angka 19 menyebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; dan selanjutnya Pasal 10 ayat 1 menyebutkan dana perimbangan dapat dikategorikan ke dalam 3 (tiga) jenis dana transfer, yaitu: (a) dana bagi hasil (DBH), (b) dana alokasi umum (DAU), dan (c) dana alokasi khusus (DAK).

Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu sumber dominan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di banyak daerah yang mana cukup berperan penting didalam pembangunan daerah.¹ Saat ini muncul aspirasi dari daerah provinsi kepulauan yang menilai bahwa formulasi penghitungan DAU dirasa kurang mendukung provinsi-provinsi kepulauan yang sebagian besar dari wilayah berupa perairan. Tujuh daerah provinsi yang memiliki kepentingan serupa yang wilayahnya didominasi lautan untuk mengusung usulan ini terdiri dari Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Ketujuh provinsi tersebut membentuk Badan Kerjasama Daerah Kepulauan sebagai forum yang menyuarakan aspirasi tersebut. Daerah kepulauan menuntut keadilan dalam pembagian DAU agar memperoleh DAU yang lebih besar.

¹ Pada tahun 2010, DAU menyumbang 62,5% dan 35,1% dari total pendapatan pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam APBD. (Lihat Gambar 4.10).

Penghitungan DAU yang selama ini memperhitungkan luas daratan dan jumlah penduduk dinilai tidak adil.² Khususnya bagi daerah yang jumlah penduduknya sedikit tetapi mayoritas wilayahnya berupa lautan, dirasa perlu diberikan perlakuan khusus.³ Tuntutan daerah kepulauan tersebut adalah agar setiap provinsi kepulauan menerima DAU yang besarnya satu persen dari total DAU dalam jangka waktu 20 tahun. Sedangkan tuntutan lainnya adalah bagi hasil sektor perikanan lebih besar daripada daerah-daerah lainnya karena sebagai daerah produksi ikan, sementara prosedur yang berlaku saat ini adalah bagi hasil diberlakukan sama bagi semua daerah meski banyak daerah bukan daerah produksi ikan.

Berkaitan dengan hal tersebut, revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan draft rancangan pengganti UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang saat ini sedang dibahas, mencoba mengakomodir aspirasi pemerintah daerah provinsi kepulauan.⁴ Pada draft revisi UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 33⁵ dan khususnya dalam penjelasan Pasal 34 ayat (3) menyinggung tentang kewenangan unsur provinsi berciri kepulauan diatur dalam Peraturan Pemerintah, dan Pasal 164 ayat (3), formulasi DAU perlu dipertimbangkan untuk daerah berciri kepulauan.

Pada draft rancangan pengganti UU No. 33 Tahun 2004 tersebut, Pasal 15 mencoba memasukkan usulan yang berhubungan dengan wilayah laut pada dana

² Kompas, 7 *Provinsi Tuntut DAU – Daerah Kepulauan Tuntut Keadilan Pembagian*, Sabtu 26 November 2011, hal. 23.

³ Perlakuan khusus mengarah pada pemetaan antara kebutuhan fiskal dan ketersediaan anggaran (kapasitas fiskal), berbeda dengan provinsi Aceh dan Papua yang kawasannya bergejolak dan berpotensi disintegrasi.

⁴ Draft rancangan Revisi UU No. 33 Tahun 2004 ini ditulis dengan judul “Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah”, beserta penjelasannya dan telah dirilis sejak Januari 2011 oleh Kementerian Dalam Negeri, sementara masih dalam tahap pembahasan untuk memperoleh masukan dari para *stakeholder*.

⁵ Draft rancangan Revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang “Pemerintahan Daerah”, beserta penjelasannya, pada Bagian Keenam: Kewenangan Daerah di Laut, Pasal 33 memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola sumber daya laut diluar migas untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengelolaan, pengaturan administrative, tata ruang, penegakan hukum, membantu memelihara keamanan, dan mempertahankan kedaulatan Negara. Kewenangan provinsi mengelola sumberdaya laut sejauh maksimal 12 mil laut dari garis pangkal kearah laut lepas atau perairan kepulauan. Sementara Pasal 28, ayat (1) urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menimbulkan dampak ekologis melewati batas-batas administrasi pemerintahan kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi; ayat (2) -meliputi urusan kehutanan dan kelautan; ayat (5 dan 6) penentuan penghitungan bagi hasil kelautan 4 mil laut untuk kabupaten/kota.

bagi hasil yang bersumber dari pajak, khususnya dari pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan yang diperoleh dari wilayah laut yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Pasal 15 ayat (2)) dan kewenangan provinsi (Pasal 15 ayat (3)), serta kewenangan pemerintah pusat (Pasal 15 ayat (4)).

Sementara pada Pasal 32 ayat (4) draft rancangan pengganti UU tersebut mencoba memasukkan unsur wilayah laut sebagai salah satu unsur dalam pertimbangan kebutuhan fiskal daerah, selengkapnya – *“kebutuhan pendanaan ... dipengaruhi oleh jumlah penduduk, luas wilayah daratan dan perairan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kondisi geografis Daerah yang dicerminkan oleh Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)”*. Apabila aspirasi pemerintah daerah provinsi kepulauan yang diajukan akan dituangkan dalam revisi atas usulan pemerintah dalam draft tersebut, khususnya yang berhubungan dengan DAU dimana hasil dari revisi tersebut tentunya berdampak pada perubahan formulasi penghitungan DAU.

Perubahan formulasi penghitungan DAU tersebut diperkirakan akan memperbesar alokasi DAU untuk provinsi-provinsi yang bercirikan kepulauan dan juga berdampak pada APBD. Perubahan ini juga dimaksudkan untuk lebih memeratakan dan memberikan keadilan kepada provinsi kepulauan untuk memajukan daerahnya.

Selain itu landasan hukum yang pernah dibuat Pemerintah terkait dengan kelautan adalah berupa UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1996 disebutkan bahwa perairan laut (perairan) sebagai bagian integral dari wilayah daratan. Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, wilayah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat terdiri dari wilayah darat dan laut. Daerah provinsi yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan mengelola sumber daya di wilayah laut (Pasal 18 ayat 1) hingga 12 mil laut dari garis pantai ke arah laut, sementara kabupaten/kota 4 mil laut. Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, beserta perubahannya hingga kini, hanya memperhitungkan luas daratan saja (khususnya Pasal 40 ayat (3) dalam PP tersebut), serta dalam peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Mendagri setiap tahunnya dan hanya menentukan luas wilayah daratan, sementara sudah ada penetapan batas

kewenangan laut daerah yang diterbitkan pemerintah melalui Permendagri No. 1 Tahun 2006.

Ketentuan lain yang juga dibuat Pemerintah terkait parameter luas wilayah laut termuat dalam PP No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, beserta perubahannya. Kedua PP ini dianggap daerah yang memiliki pengelolaan laut sebagai inkonsisten dan kurang adil karena untuk menghadapi kondisi geografis yang lebih luas di laut daripada di darat tidak tercermin dalam perhitungan DAU, dan mendorong usulan perubahan tersebut dalam revisi UU dimaksud. Belum lagi dari sisi penentuan teknis pengukuran garis dasar⁶ 12 mil laut yang dapat mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004, Permendagri No. 1 Tahun 2006, atau UNCLOS 1982.

Perkembangan yang ada saat ini, sejak dimulainya ide provinsi berciri kepulauan tahun 2006 oleh Forum Kerjasama Antar Pemerintah Provinsi Kepulauan⁷ adalah, ketujuh gubernur dari masing-masing provinsi kepulauan telah mengajukan usulan rancangan undang-undang (RUU) Perlakuan Khusus Provinsi Kepulauan⁸ ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang didalamnya memperhitungkan luasan wilayah laut sebagai ruang publik yang menghubungkan satu pulau ke pulau lainnya dalam satu provinsi kepulauan, dan pemberian otonomi khusus ke daerah untuk mengelola sumberdaya alamnya di laut, dengan mencabut pembatasan kewenangan batas pengelolaan laut untuk provinsi dan kabupaten⁹, serta yang tidak sekedar mengejar besaran DAU¹⁰. Sementara sambutan dari DPR-RI, melalui Badan Legislasi DPR-RI akan

⁶ Iswara (2009), *Penentuan Batas Kewenangan Laut dan Luas Kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Institut Teknologi Bandung.

⁷ Berita internet “Komisi IV Kunker ke Maluku” (16-21 September 2006), terungkap ide ‘Model Pembangunan pada Provinsi Kepulauan’ yang telah disampaikan kepada Presiden. (diakses Desember 2011), http://dprd-sumbarprov.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=25

⁸ Berita internet, BeritaManado.com, 7 Gubernur Serahkan Draft RUU Provinsi Kepulauan kepada Ketua DPR-RI (6 Oktober 2011), (diakses Desember 2011), <http://jurnalpatrolinews.com/2011/10/07/7-gubernur-serahkan-draft-ruu-provinsi-kepulauan-kepada-ketua-dpr-ri/>

⁹ Berita internet, Antara Maluku, “Batasan Kewenangan Pengelolaan Laut Harus Dihilangkan” (26 November 2011) (diakses Desember 2011), <http://www.antaramaluku.com/berita/16858/batasan-kewenangan-pengelolaan-laut-harus-dihilangkan>

¹⁰ Berita internet, Antara Maluku, “UU Provinsi Kepulauan Bukan Kejar Besaran DAU” (12 Desember 2011) (diakses Desember 2011), <http://www.antaramaluku.com/berita/16947/uu-provinsi-kepulauan-bukan-kejar-besaran-dau>

memasukkannya dalam agenda pembahasan RUU DPR-RI dan pemerintah pada 2012.¹¹

Studi ini ditujukan untuk mendapat gambaran dan analisis secara lebih mendalam tentang rencana perubahan formulasi penghitungan DAU, yang saat ini diperjuangkan oleh pemerintah provinsi kepulauan, khususnya di provinsi berciri kepulauan. Melalui studi ini, diharapkan dapat dianalisa bagaimana perubahan penghitungan DAU tersebut dapat mengoptimalkan kinerja perekonomian di daerah, khususnya di daerah provinsi berciri kepulauan.

1.2. Perumusan Masalah

Definisi yang diajukan dalam rancangan revisi UU No. 32 Tahun 2004 khususnya pada penjelasan Pasal 34 dan Pasal 164¹², provinsi berciri kepulauan adalah provinsi yang memiliki karakteristik secara geografis dengan wilayah lautan lebih luas dari daratan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau yang membentuk gugusan pulau sehingga menjadi satu kesatuan geografis, ekonomi, dan sosial budaya. Sementara yang diajukan dalam rancangan revisi UU No. 33 Tahun 2004 dengan memasukkan unsur wilayah laut dalam pembagian DBH yang bersumber dari penerimaan Pajak, dan pertimbangan luas wilayah perairan dalam formulasi penghitungan DAU. Keduanya akan berdampak bagi penerimaan daerah yang berasal dari transfer pusat kepada pemerintahan daerah. Namun demikian dalam kesempatan ini penulis lebih berfokus hanya pada permasalahan yang berkaitan dengan formulasi DAU.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dikaji lebih jauh dari pelaksanaan studi tentang tentang analisa perubahan formulasi DAU dengan studi kasus provinsi berciri kepulauan ini antara lain adalah:

¹¹ Berita internet Antara Maluku, “Baleg-Pemprov Maluku Bahas Draft RUU Kepulauan”, (25 November 2011), (diakses Desember 2011), D251111001076, dan Berita internet Kompas.com, “RUU Provinsi kepulauan Tuntas tahun 2012”, (25 november 2011), (diakses Desember 2011), <http://regional.kompas.com/read/2011/11/25/17344776/RUU.Provinsi.Kepulauan.Tuntas.Tahun.2012>.

¹² Rancangan revisi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 yang diajukan pada tahun 2011 menyebutkan: Pasal 34: Ketentuan lebih lanjut mengenai daerah provinsi berciri kepulauan dan penugasan pelaksanaan kewenangan di bidang kelautan diatur dalam Peraturan Pemerintah; Pasal 164: Formula dan penghitungan dana alokasi umum mempertimbangkan juga daerah yang berciri kepulauan.

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja perekonomian daerah provinsi di Indonesia, khususnya pada provinsi berciri kepulauan?;
- b. Bagaimana dampak dari perubahan formulasi DAU terhadap kinerja ekonomi dan keuangan daerah provinsi di Indonesia, khususnya terhadap provinsi berciri kepulauan?; dan
- c. Saran/kebijakan yang dapat diberikan untuk mengoptimalkan kinerja perekonomian daerah provinsi di Indonesia, khususnya provinsi berciri kepulauan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari penjelasan dalam latar belakang dan perumusan masalah, studi tentang analisa perubahan formulasi DAU – studi kasus provinsi berciri kepulauan ini bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian daerah provinsi di Indonesia, khususnya pada provinsi kepulauan;
- b. Mengetahui dampak dari perubahan formula DAU terhadap kinerja pembangunan ekonomi dan keuangan daerah provinsi di Indonesia, khususnya di provinsi berciri kepulauan?; dan
- c. Memberikan saran/rekomendasi kebijakan terkait dengan upaya untuk mengoptimalkan kinerja perekonomian daerah provinsi di Indonesia, khususnya provinsi berciri kepulauan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Secara rinci, batasan pelaksanaan studi tentang analisa rencana perubahan formulasi DAU – studi kasus provinsi berciri kepulauan ini antara lain:

- a. Studi ini dilakukan dengan menggunakan data panel dari 33 provinsi dan dalam periode tahun 2000 hingga tahun 2010. Namun, berdasarkan ketersediaan data, beberapa variabel hanya lengkap tersedia antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2010;
- b. Analisa rencana perubahan formulasi DAU dilakukan pada tingkatan provinsi;

- c. Variabel untuk indikator kinerja pembangunan ekonomi daerah yang dimaksudkan adalah pertumbuhan ekonomi daerah provinsi; dan
- d. Pembahasan terfokus pada aspek ekonomi dan desentralisasi fiskal, serta tidak terkait permasalahan politik.

1.5. Hipotesa Studi

Pada studi ini, terkait dengan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah (yaitu pertumbuhan ekonomi), beberapa hipotesa yang akan diuji antara lain:

1. Hipotesa: Indeks Pembangunan Manusia signifikan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi;
2. Hipotesa: Penerimaan dalam APBD (yaitu berupa PAD dan Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK)), signifikan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi;
3. Hipotesa: Luas Wilayah sebagai cerminan dari potensi wilayah (yang berupa Luas Daratan dan Luas Lautan) signifikan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi;
4. Hipotesa: Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM, yaitu Jumlah Penduduk) signifikan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi;
5. Hipotesa: Pola perubahan PDRB tahun sebelumnya signifikan secara positif berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi; dan
6. Hipotesa: Pertumbuhan ekonomi daerah provinsi berciri kepulauan secara rata-rata signifikan lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain.

1.6. Manfaat Penelitian

Studi tentang analisa rencana perubahan formulasi DAU – studi kasus provinsi berciri kepulauan ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain:

- a. Menjelaskan kondisi dan perkembangan terkini tentang kinerja pembangunan ekonomi daerah provinsi di Indonesia, khususnya kinerja provinsi berciri kepulauan;
- b. Menyediakan bahan pertimbangan dalam rencana revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, yang terkait dengan formulasi DAU, khususnya untuk provinsi berciri kepulauan; dan
- c. Memberikan saran/rekomendasi kebijakan di dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah provinsi di Indonesia, khususnya di wilayah provinsi berciri kepulauan.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan studi tentang analisa perubahan formulasi DAU – studi kasus provinsi berciri kepulauan ini disusun dalam 6 (enam) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup, manfaat, dan sistematika penulisan dari pelaksanaan penelitian ini.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Menguraikan tentang landasan teori tentang DAU, perkembangan kebijakan desentralisasi, kerangka hubungan pusat dan daerah, dana perimbangan (khususnya DAU), rencana revisi UU No. 32 dan 33 Tahun 2004, dan studi sejenis sebelumnya.

Bab 3 Metodologi

Menjelaskan tentang kerangka pikir konseptual, metode analisa, metode pengumpulan data, serta jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan studi ini.

Bab 4 Gambaran Umum Perekonomian Daerah Provinsi

Menguraikan tentang kondisi dan perkembangan kinerja pembangunan daerah secara umum, khususnya untuk di tingkat provinsi, dan provinsi berciri kepulauan yang menjadi fokus penelitian ini, mulai dari luasan

wilayah, jumlah penduduk, kontribusi terhadap perekonomian nasional, pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan khususnya DAU, indeks kapasitas fiskal, tingkat kemiskinan, dan sebagainya.

Bab 5 Hasil dan Pembahasan

Menguraikan analisa dan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan menggunakan model yang dijelaskan dalam bagian metodologi penelitian.

Bab 6 Penutup

Menyampaikan kesimpulan umum penulisan, saran/rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan, dan keterbatasan dari pelaksanaan studi ini.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori tentang Desentralisasi

Piliang (2003) mencatat desentralisasi di Indonesia dirumuskan pertama kali oleh Muhammad Hatta pada tahun 1933.¹³ Menurutnya desentralisasi juga sudah tercantum dalam Penjelasan pasal 18 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, terbagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil, dimana daerah yang bersifat otonom atau bersifat administrasi belaka ditetapkan dengan undang-undang. Pada masa berlakunya UUD Sementara 1950, telah ditetapkan UU No. 1 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 6 Tahun 1957) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 yang berlaku tanggal 18 Januari 1957.¹⁴

Sementara Hanson (1998) dan Bray (1999) mengetengahkan tiga jenis desentralisasi, yakni dekonsentrasi (*deconcentration*) – *transfer of tasks and work but not authority*, delegasi (*delegation*) – *transfer of decision-making authority from higher to lower levels but authority can be withdrawn by the center*, dan devolusi (*devolution*) – *transfer of authority to an autonomous unit which can act independently without permission from the center*. Maddick (1963) dalam Wibowo, Dendi dan Zulhanif (2011), mendefinisikan desentralisasi sebagai proses dekonsentrasi dan devolusi atau penyerahan kekuasaan. Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999 sebagai landasan hukum awal semangat desentralisasi dan otonomi daerah di era reformasi di Indonesia menyebutkan bahwa desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sedangkan dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.¹⁵

¹³ “Autonomi dan Centralisasi dalam Partai”, Daulat Rakyat, No. 76 tanggal 20 Oktober 1933, dalam Muhammad Hatta, 1976 (Cetakan Kedua), Kumpulan Karangan. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, hal. 261-263, dalam Piliang, (2003), *Otonomi Daerah-evaluasi & proyeksi*, Divisi Kajian Demokrasi Lokal, Yayasan Harkat Bangsa.

¹⁴ *Ibid.*, p.iii.

¹⁵ Wibowo, Dendi and Zulhanif (2011), *Is Specific Grant Really “Specific”? : Case of Indonesia Provinces, 2003-2010*, p.6.

Sehingga bisa dipahami bahwa, dekonsentrasi adalah delegasi wewenang dari pusat ke daerah.

Schneider (2002) mengungkapkan konsep desentralisasi ini mengacu pada teori federalisme fiskal (*fiscal federalism*), administrasi publik (*public administration*) dan ilmu politik (*political science*). *Fiscal federalism* melihat desentralisasi dari sisi *welfare effect* yang dilakukan melalui pengalihan sumber daya (*resources*) diantara tingkatan pemerintahan, melalui desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*). Desentralisasi fiskal ditunjukkan oleh adanya proporsi alokasi sumber daya pada level pemerintahan diluar pemerintah pusat (Oates, 1972:17; 1999). Administrasi publik melihat desentralisasi dari sisi *administrative effect* oleh pemberian kewenangan atau otonomi kepada pemerintahan lokal/daerah dari pemerintah pusat berupa kewenangan umum untuk membuat kebijakan dan mengatur personel, termasuk mengatur sendiri keuangan publiknya (Rondinelli, 1984). Dari sisi ilmu politik, desentralisasi melihat efek kegiatan politik (*political activities effect*) seperti organisasi kemasyarakatan, keikutsertaan masyarakat, pemilihan umum, dan keterwakilan pada tingkatan daerah yang berbeda dengan tingkatan nasional. Isu-isu mengenai aktor politik di tingkat daerah, yang dapat berbeda dari aktor politik di tingkat pusat (Fox dan Aranda, 1996).¹⁶

Pendelegasian wewenang memiliki konsekuensi pendelegasian fiskal sehubungan dengan pembiayaan tugas-tugas yang akan dijalankan daerah. Ini sesuai dengan prinsip desentralisasi fiskal yakni "*money follows function.*" Pendelegasian fiskal ini sendiri memiliki 2 aspek dasar, yakni keadilan dan efisiensi (Schneider, 2002). Aspek keadilan memiliki dua konsep, yaitu persamaan keadilan horizontal dan persamaan kapasitas fiskal. Keadilan horizontal menempatkan keadilan individual ke dalam yurisdiksi daerah (misalnya penghasilan minimum, standar kualitas pelayanan publik, standar kesejahteraan, standar upah, dan lain sebagainya). Sementara konsep kapasitas fiskal berdasarkan keadilan antar yurisdiksi, umumnya berupa penentuan standar pajak yang diperlukan untuk membiayai standar pelayanan publik.¹⁷

¹⁶ Schneider (2002), *Decentralization and the Poor*, Institute of Development Studies, University of Sussex, England, p.7-8.

¹⁷ Wibowo, Dendi, Zulhanif (2011), *op. cit.*, p.6.

Intensitas dari desentralisasi fiskal berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melaksanakan otonomi daerah. Salah satu modal awal kemampuan daerah dalam membiayai daerahnya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun Thoha (1994) menyangsikan kinerja PAD ini, mengingat kurang berkembangnya sektor-sektor utama penopang pembangunan, seperti perdagangan, industri/manufaktur, dan jasa-jasa yang disebabkan rendahnya usaha penarikan investasi dari luar daerah, ditambah minimnya infrastruktur pendukung, buruknya administrasi pajak daerah serta rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintah di daerah. Dalam hal ini, Wibowo, Dendi dan Zulhanif (2011) berpendapat, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bagian mekanisme transfer yang merupakan bentuk dari *cooperative decentralization* terutama dalam konteks terbatasnya kemampuan mobilisasi pendapatan (PAD) dari pemerintah daerah. Alokasi dan penyaluran transfer dalam konteks otonomi daerah ditentukan oleh keterlibatan dari Pemda atau dalam arti luas dapat diartikan sebagai tingkat keterlibatan *stakeholder* di daerah.¹⁸

Ide desentralisasi fiskal bukanlah hal baru dalam isu pemerataan pertumbuhan antar daerah. Di Indonesia, sebelum adanya UU No. 22 Tahun 1999 telah muncul produk perundang-undangan yang mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Undang-undang tersebut adalah UU No. 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dan Daerah-daerah yang Berhak Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, serta UU No. 4 Tahun 1975 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dalam UU No. 32 Tahun 1956 tersebut ditetapkan sumber-sumber penerimaan daerah, yakni PAD, bagi hasil pajak, dan bantuan pemerintah.

Besarnya proporsi bantuan pemerintah dalam struktur anggaran penerimaan daerah dibandingkan kemampuan daerah tersebut menggali potensi wilayahnya sendiri mencerminkan besarnya ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat. Selama masa pemerintahan Orde Baru terdapat kecenderungan semakin besarnya proporsi *specific grants* dibandingkan *block grants*. Ini mencerminkan semakin kecilnya pendelegasian pembangunan di daerah kepada

¹⁸*Ibid.*, p.6.

pemerintah daerah itu sendiri. Studi Aziz (1990) menemukan bahwa dalam Pelita IV terbukti alokasi Inpres mengabaikan kebutuhan, kapasitas, dan potensi daerah, serta tidak berhubungan dengan tujuan dan kriteria yang telah dirumuskan secara eksplisit dalam dokumen perencanaan. Sehingga disimpulkan bahwa tidak ada perencanaan sistematis dalam alokasi sumberdaya.

Setidaknya terdapat empat alasan menurut Oates (1999) dalam Wibowo et. al. (2011)¹⁹ untuk melaksanakan kebijakan desentralisasi, yaitu efisiensi ekonomi, efisiensi biaya, akuntabilitas, dan mobilisasi sumber dana. Efisiensi ekonomi mengacu pada efisiensi alokasi sumber daya, yaitu keputusan yang dilakukan oleh lingkup pemerintahan yang lebih kecil menghasilkan jenis dan tingkat pelayanan publik yang lebih sesuai dengan preferensi lokal terutama jika kebutuhan antar daerah relatif berbeda (Oates 1972, 1999). Desentralisasi diterapkan di berbagai negara umumnya karena potensinya dalam memperbaiki kinerja sektor publik. Tekanan untuk dilaksanakannya kebijakan desentralisasi pada dasarnya dimotivasi oleh alasan dukungan terhadap pembangunan ekonomi (Brodjonegoro, 2006) dan kebutuhan untuk memperbaiki sistem pelayanan publik (Dillinger, 1994). Sementara itu, efisiensi biaya dari kebijakan desentralisasi dapat diwujudkan dalam bentuk internalisasi dari biaya pelayanan publik atau penilaian dari kapasitas basis pajak yang lebih optimal jika dilakukan dalam lingkup pemerintahan yang lebih kecil (Bahl dan Linn 1994)²⁰. Peningkatan akuntabilitas dari kebijakan desentralisasi terkait dengan visibilitas pelayanan publik dan kedekatan *stakeholder* pada tingkat pemerintahan yang lebih rendah sehingga memudahkan proses pengawasan dari kegiatan pemerintah.

Menurut Bird dan Vaillancourt (1998), alasan bahwa desentralisasi dapat membantu menyelesaikan masalah perekonomian nasional dimulai dari prinsip dasar bahwa pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan layanan publik bagi masyarakat dengan biaya yang lebih rendah atau lebih efisien dibandingkan dengan pemerintah pusat, dikarenakan pemerintahan daerah: (a) lebih mengetahui kebutuhan masyarakatnya sekaligus bagaimana cara memenuhi kebutuhan

¹⁹ Wibowo, Dendi, Zulhanif (2011), *op. cit.*, hal. 7.

²⁰ Salah satu contoh adalah penyerahan *property tax* ke pemerintah lokal, dalam konteks Indonesia adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berdasarkan penerapan di negara-negara maju maupun negara berkembang umumnya disertai dengan peningkatan penerimaan pemerintah daerah dari pajak tersebut (Bahl dan Linn 1994).

tersebut dengan cara yang paling efisien dan (b) lebih dekat terhadap masyarakatnya, sehingga akan bereaksi lebih cepat apabila kebutuhan tersebut muncul, dan pada akhirnya masyarakat akan merasa puas atas pelayanan pemerintah daerah-nya. Apabila hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat berjalan baik, maka kepuasan tersebut akan mendorong produktivitas masyarakat setempat yang pada akhirnya dapat memicu pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih tinggi dan mencapai tingkat kesejahteraan yang maksimal.

Dalam teorema desentralisasi, Oates (1972) menyatakan bahwa apabila biaya untuk menyediakan barang dan pelayanan publik oleh tingkat pemerintah daerah (yang lebih rendah) dan tingkat pemerintahan di atasnya (yang lebih tinggi) sama besarnya, maka akan lebih efektif dan efisien apabila tingkat pemerintah daerah (yang lebih rendah) yang melakukannya untuk mencapai tingkat *pareto-optimality* dalam penyediaan barang dan pelayanan publik di wilayah yurisdiksinya. Menurut Wallis dan Oates (1988), kebijakan desentralisasi memiliki potensi untuk membuat pemerintah daerah lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dengan memenuhi kebutuhan yang memiliki tingkat perbedaan preferensi yang lebih rendah, dan terhadap kelompok yang lebih homogen.

Wibowo, Dendi dan Zulhanif (2011) melanjutkan, transfer dana pusat ke daerah untuk mencapai stabilisasi pemerintah pusat, yakni untuk mengatasi beberapa persoalan, antara lain: (i) ketimpangan fiskal vertikal; (ii) ketimpangan fiskal horizontal; (iii) kurangnya penyediaan standar pelayanan minimum yang wajib dicapai oleh daerah; (iv) efek dampak lanjutan pelayanan publik dalam lintas batas kewenangan (*inter jurisdictional spillover effects*); dan (v) rehabilitasi. Transfer dana pemerintah pusat ini bertujuan untuk (i) meminimumkan ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari sentralisasi administrasi pajak (*vertical fiscal disparity*), (ii) meminimumkan ketimpangan fiskal antar pemerintah daerah pada tingkat pemerintahan yang berada dalam satu level, (iii) meningkatkan akses dan level kualitas pelayanan publik (*horizontal disparity*), dan (iv) menginternalisasi sebagian atau seluruh limpahan manfaat dan biaya penyediaan jasa dan barang publik di daerah (*internalized spillovers*), serta (v) menjamin koordinasi kinerja fiskal dari pemerintah yang berbeda.

Devas (2003) dan Simanjuntak (2003) memberikan sintesa kriteria dalam merancang suatu kebijakan yang berhubungan dengan transfer antar pemerintah pusat-daerah. *Pertama*, kecukupan, elastisitas, dan stabilitas penerimaan. Transfer dari pemerintah pusat seharusnya sesuai dengan tanggung jawab dan beban yang diberikan kepada pemerintah daerah. Selain beban, transfer juga harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri sesuai kondisi masing-masing daerah, seperti tingkat pertumbuhan, inflasi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan indeks transfer yang mengacu pada indikator-indikator tersebut. Transfer harus stabil dan memiliki konsep dan konsistensi yang jelas dalam penyalurannya. Ini diperlukan pemerintah daerah dalam merancang anggaran belanja sesuai transfer yang akan diterima. Agar stabilitas transfer dapat dilakukan maka mekanisme transfer haruslah pula bersifat transparan dan sederhana.

Kedua, keadilan antar wilayah yurisdiksi. Bagi hasil pendapatan pajak umumnya memperparah kesenjangan antar daerah. Dan biasanya hal ini diisi dengan adanya bantuan dari pemerintah pusat. Agar bantuan tersebut mencapai sasarannya perlu mempertimbangkan kapasitas fiskal (KpF) dan kebutuhan fiskal (KbF) pemerintah daerah sehingga transfer dapat membiayai selisihnya (*fiscal gap*). Meski demikian, dalam prakteknya, menurut Bird dan Vaillancourt (1992) rancangan bantuan dapat diduga dari deviasi kebutuhan daerah dan stabilitas politik.

Ketiga, efisiensi dan insentif ekonomi. Transfer haruslah mampu memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk mengejar efisiensi melalui penggunaan sumber daya. Devas (2003) berargumen bahwa transfer haruslah menargetkan output, bukan input. Misalnya daripada sekedar memberikan subsidi kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat dapat memberikan bantuan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan publik.

Keempat, sederhana. Dasar perhitungan pemberian insentif haruslah sederhana, sehingga pemerintah daerah atau rekanan lain dapat dengan mudah melakukan penghitungan jumlah transfer mereka. Sederhananya disini maksudnya pola penghitungan menggunakan data dasar obyektif yang tidak dapat diatur atau dipengaruhi.

Kelima, otonomi daerah. Otonomi sebagai motif utama desentralisasi berdampak pada setiap transfer ke daerah harus sesuai dengan tingkat otonomi suatu daerah. Untuk itu, pemberian besaran transfer berdasar penerimaan nasional atau “*piggy back*” digunakan untuk menetapkan bagian dari tarif yang ditentukan oleh pemerintah pusat (Davey, 1983:136). “*Piggy back*” dalam bagi hasil pajak/penerimaan dan *block grants* merupakan tujuan otonomi paling tepat. Meski demikian, dalam setiap transfer mesti ada keseimbangan antara tujuan otonomi dan nasional. Dan keseimbangan ini bukan hal mudah untuk diinterpretasikan sehingga menjadi kebijakan yang berbeda-beda di tiap negara.

Transfer pada dasarnya didesain untuk mengeliminir ketidakseimbangan fiskal horizontal, yang bisa disebabkan oleh bagi hasil pajak atau sumber daya. Berbeda dengan bagi hasil pajak atau sumber daya, transfer sepenuhnya merupakan hak pemerintah pusat sehingga mereka umumnya kurang potensial dibandingkan bagi hasil dan kadangkala kurang bisa diprediksi.

Secara umum, terdapat dua jenis transfer pusat ke daerah, yaitu *non-matching transfers* dan *matching transfers*. *Non-matching transfers* diberikan kepada Pemerintah Daerah tanpa adanya dana pendamping dari daerah, dan *matching transfers* dilakukan jika daerah mampu menyediakan dana pendamping. Umumnya, semua jenis *matching transfers* masuk dalam *specific transfers*, karena adanya transfer tersebut hanya untuk membiayai jasa dan pelayanan publik tertentu. *Matching transfers* juga dapat dirinci lagi dalam *open-ended matching transfers* (apabila dana yang disediakan tidak ada batasan) dan *close-ended matching transfers* (apabila dana yang disediakan dibatasi sampai tingkat tertentu). Masing-masing jenis tranfer tersebut memiliki dampak yang berbeda-beda dalam penyediaan jasa dan pelayanan publik, dan lebih lanjut kesejahteraan sosial.

Dari penentuan program apakah turut melibatkan penerima transfer dalam penentuan penggunaan transfer, suatu alokasi dana (transfer) antar pemerintah disebut sebagai *general (un-conditional)* atau *block grants transfers* jika transfers yang dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah daerah dilakukan tanpa ada ketentuan penggunaan dari alokasi dana oleh pemberi transfer. Sementara itu, apabila penggunaan dari transfer dilakukan setelah adanya penentuan program

spesifik oleh pemerintah sebelum disalurkan dana transfer oleh pemerintah pusat, maka jenis transfer seperti ini merupakan *specific transfers*.

Block grants adalah jenis transfer yang paling umum diadopsi oleh negara-negara yang menjalankan desentralisasi (Bahl, 1986). Untuk jenis *block grants*, pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam penggunaan dana tersebut dan karenanya *block grants* tidak mempengaruhi pilihan-pilihan lokal. Selain itu, jika tujuan dari transfer adalah untuk peningkatan kesejahteraan secara umum, maka *unconditional non-matching grant* atau *block grants* seperti DAU adalah yang terbaik (Shah (1994) dalam Wuryanto, 1996). Distribusi *block grants* membutuhkan formula yang memperhitungkan dua faktor penting yaitu kapasitas dan kebutuhan fiskal. Jenis transfer ini lebih sejalan dengan konsep otonomi daerah karena memberikan diskresi atas penggunaan transfer oleh pemerintah daerah yang diasumsikan lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas daerahnya sehingga akan memperbaiki efisiensi alokasi sumber daya. Argumen yang menentang *block grants* umumnya berpusat pada akuntabilitas pemerintah terhadap penduduk lokal. *Block grants* menurunkan hubungan akuntabilitas antara pemerintah lokal dan penduduknya dalam hal jasa publik yang dibiayai oleh transfer ini relatif tidak mudah diawasi oleh pemerintah pusat sebagai pemberi transfer sementara penduduk lokal cenderung tidak memiliki insentif untuk melakukan pengawasan mengingat pembiayaan dari transfer tidak berasal dari pajak yang harus dibayar oleh penduduk setempat.

2.2. Teori Makroekonomi yang Terkait

Jumlah barang dan jasa yang diproduksi di suatu perekonomian sangat bergantung pada faktor produksi dan fungsi produksi.²¹ Dimana, faktor produksi adalah sejumlah input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam sebuah perekonomian. Terdapat dua buah faktor produksi yang penting dalam perekonomian yaitu modal (*capital-K*) dan tenaga kerja (*labor-L*). Modal (*capital-K*) adalah sejumlah alat yang digunakan oleh para pekerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Tenaga kerja (*labor-L*) adalah jumlah orang yang membelanjakan (menggunakan) waktunya untuk bekerja. Sedangkan fungsi

²¹ Mankiw, Gregory N., (2000), *Macroeconomics*, 4th Edition, New York Publisher, hal. 44.

produksi adalah kemampuan mengubah *input* menjadi *output*, atau bagaimana faktor produksi yang berupa modal dan tenaga kerja diubah menjadi produk barang dan jasa. Secara matematis fungsi produksi atau *aggregate production function*²² dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = f(K, L) \quad (2.1)$$

Atau sebagaimana dirumuskan oleh Charles Cobb dan Paul Douglas pada 1928 yang menjelaskan relasi antara *output*, *physical capital* dan *labor* dari data Amerika Serikat untuk periode 1899 hingga 1922, dan dikenal sebagai fungsi produksi Cobb-Douglas²³, dimana nilai α , berada $0 < \alpha < 1$, sebagai berikut:

$$Y = K^\alpha L^{1-\alpha} \quad (2.2)$$

Dari fungsi produksi tersebut, besarnya *output* (Y) sangat dipengaruhi oleh besarnya modal dan tenaga kerja yang digunakan. Selain itu, fungsi produksi dapat bersifat *increasing return to scale*, *decreasing return to scale*, dan *constant return to scale*. Dengan asumsi tidak terdapat perubahan dalam teknologi, perubahan *output* dalam suatu perekonomian sebagai akibat dari perubahan modal dan tenaga kerja, dirumuskan sebagai berikut:

$$\frac{\partial Y}{\partial K} = MPK ; \frac{\partial Y}{\partial L} = MPL \quad (2.3)$$

$$MPK = f(K + 1, L) - f(K, L) \quad (2.4)$$

$$MPL = f(K, L + 1) - f(K, L) \quad (2.5)$$

$$\partial Y = MPK * \partial K ; \partial Y = MPL * \partial L \quad (2.6)$$

Jika perubahan terjadi bersama-sama antara modal dan tenaga kerja, maka perubahan *output* (Y) -nya adalah:

$$\partial Y = (MPK * \partial K) + (MPL * \partial L) \quad (2.7)$$

$$\frac{\partial Y}{Y} = \left(\frac{MPK * K}{Y} \right) \frac{\partial K}{K} + \left(\frac{MPL * L}{Y} \right) \frac{\partial L}{L} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial Y}{Y} = \alpha \frac{\partial K}{K} + (1 - \alpha) \frac{\partial L}{L} \quad (2.9)$$

Dimana α adalah *capital share*; dan $(1 - \alpha)$ adalah *labor share*.

Bilamana asumsi diubah dan memasukkan perubahan teknologi (*state of technology-A*)²⁴, fungsi produksi akan berubah menjadi:

²² Blanchard, Olivier (2009), *Macroeconomics*, 5th Edition, Pearson International Edition, New Jersey, USA, hal. 237.

²³ Blanchard, Olivier, (2009), *ibid.*, hal. 267.

²⁴ Blanchard, Olivier, (2009), *ibid.*, hal. 270.

$$Y = f(K, L, A) \quad (2.10)$$

$$Y = A K^\alpha L^{1-\alpha} \quad (2.11)$$

$$\frac{\partial Y}{Y} = \alpha \frac{\partial K}{K} + (1 - \alpha) \frac{\partial L}{L} + \frac{\partial A}{A} \quad (2.12)$$

Dimana A adalah ukuran dari tingkat teknologi yang digunakan yang dinamakan *total factor productivity*.

Dalam hal ekonomi berada pada kondisi *steady state*, dimana tabungan per tenaga kerja (*saving per worker*) harus sama dengan depresiasi per tenaga kerja (*depreciation per worker*). Tabungan per tenaga kerja diperoleh dengan menurunkan menggunakan persamaan matematika dari *output per worker* (Y/L) dari persamaan (2.2) dibagi dengan jumlah tenaga kerja (L), sebagai berikut:

$$\frac{Y}{L} = \frac{K^\alpha L^{1-\alpha}}{L} \quad (2.13)$$

$$\text{Dengan: } \frac{L^{1-\alpha}}{L} = L^{1-\alpha} L^{-1} = L^{-\alpha} \quad (2.14)$$

$$\text{Substitusikan (2.13) dan (2.14): } \frac{Y}{L} = K^\alpha L^{-\alpha} = \left(\frac{K}{L}\right)^\alpha \quad (2.15)$$

Dan mengalikannya dengan *saving rate* (s) pada saat modal berada dalam kondisi *steady state* (K^*) per tenaga kerja (L), atau (K^*/L), persamaan (2.16). Demikian halnya untuk *depreciation per worker*, dengan mengalikan *depreciation rate* (δ) dengan (K^*/L), persamaan (2.17). Dari kedua hal ini maka (K^*/L) dapat dikenali sebagai hubungan tabungan dengan depresiasi, persamaan (2.19).

$$s \left(\frac{K^*}{L}\right)^\alpha \quad (2.16)$$

$$\delta \left(\frac{K^*}{L}\right) \quad (2.17)$$

$$s \left(\frac{K^*}{L}\right)^\alpha = \delta \left(\frac{K^*}{L}\right) \rightarrow s = \delta \left(\frac{K^*}{L}\right)^{1-\alpha} \rightarrow \left(\frac{K^*}{L}\right)^{1-\alpha} = \frac{s}{\delta} \quad (2.18)$$

$$\left(\frac{K^*}{L}\right) = \left(\frac{s}{\delta}\right)^{1/(1-\alpha)} \quad (2.19)$$

Sehingga *output per worker* (Y^*/L) pada saat kondisi *steady state* melalui fungsi produksi Cobb-Douglas, adalah:

$$\left(\frac{Y^*}{L}\right) = \left(\frac{K^*}{L}\right)^\alpha = \left(\frac{s}{\delta}\right)^{\alpha/(1-\alpha)} \quad (2.20)$$

Menghubungkan fungsi produksi Cobb-Douglas sebagai pendekatan *source of growth* dengan desentralisasi, dapat dilakukan dengan menyederhanakan

(1- α) dari kondisi *constant return to scale* tersebut sebagai β dari persamaan fungsi produksi Cobb-Douglas.

$$Y = A K^{\alpha} L^{\beta} \quad (2.21)$$

Fungsi Cobb-Douglas tersebut menjadi dasar dari permodelan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah provinsi di Indonesia, dalam hal ini adalah pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya menganalogikan masing-masing variabel dalam penelitian ini yang menjadi komponen perhitungan dana alokasi umum, menurut fungsi produksi tersebut, sebagai berikut:

- *Output per kapita (Y/L)* dapat digambarkan sebagai indikator kinerja daerah yang diwakili oleh produk domestik regional bruto per kapita (PDRB per kapita) harga konstan (YHKMIG).
- Faktor teknologi (A) yang disebut *total factor productivity* yang digerakkan oleh kemampuan manusia dapat diwakilkan oleh variabel indeks pembangunan manusia (IPM).
- Faktor modal (K) yang dapat diwakilkan oleh variabel luas daratan (LD), luas lautan (LL), sebagai modal fisik, dan pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum se-provinsi (DAUSP), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), sebagai modal finansial, termasuk PDRB per kapita (harga konstan) dari tahun sebelumnya (YHKMIG1) yang dapat dianggap sebagai modal awal.
- Faktor tenaga kerja (L) yang dapat diwakilkan oleh variabel populasi (POP).

2.3. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat, berupa penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Pemerintahan Daerah dalam mendanai operasional kegiatan yang menjadi kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan (kesenjangan fiskal) sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta merupakan satu kesatuan yang utuh. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan Daerah.

Desentralisasi fiskal tercermin dalam *intergovernmental transfer relations*, yaitu transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Transfer dari pemerintah pusat dapat berupa transfer tanggung jawab (kewajiban) dan hak otoritas pemerintahan yang disertai dengan pembiayaannya, dimana aliran dana semuanya diwujudkan dalam pola pengeluaran dan penerimaan dana di anggaran daerahnya. Perlunya transfer dana pusat ke daerah²⁵ adalah:

Pertama, untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal vertikal (*vertical fiscal disparity*). Di banyak negara, pemerintah pusat menguasai sebagian besar sumber-sumber penerimaan (pajak) untuk negara yang bersangkutan dan Pemda hanya menguasai sebagian kecil sumber-sumber penerimaan negara atau hanya berwenang untuk memungut pajak-pajak yang basis pajaknya bersifat lokal dan mobilitasnya yang rendah dengan karakteristik besaran penerimaan relatif kurang signifikan.

Kedua, untuk mengatasi ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal disparity*). Kemampuan daerah untuk menghimpun pendapatan sangat bervariasi, tergantung kepada kondisi daerah bersangkutan yang memiliki kekayaan sumber daya alam atau tidak, ataupun daerah dengan intensitas kegiatan ekonomi yang tinggi atau rendah. Di sisi lain, daerah-daerah juga sangat bervariasi dilihat dari kebutuhan belanja untuk pelaksanaan berbagai fungsi dan pelayanan publik. Ini

²⁵ Robert A. Simanjuntak, "Transfer Pusat ke Daerah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara" dalam Machfud Sidik et al (eds.), Dana Alokasi Umum (DAU): Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm. 24-26.

mencerminkan tinggi-rendahnya kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dari daerah-daerah yang bersangkutan.

Ketiga, adanya kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM, *minimum standard of basic public services*) di setiap daerah. Daerah-daerah dengan sumber daya yang sedikit memerlukan subsidi agar mencapai SPM itu. Jika dikaitkan dengan postulat Musgrave (1983), yang menyatakan bahwa peran redistributif dari sektor publik akan lebih efektif dan cocok jika dijalankan oleh pemerintah pusat, maka penerapan SPM di setiap daerah pun akan lebih bisa dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah pusat.

Keempat, untuk mengatasi persoalan yang timbul dari menyebar atau melimpahnya efek pelayanan publik (*inter-jurisdictional spill over effects*). Beberapa jenis pelayanan publik di satu wilayah memiliki efek menyebar atau eksternalitas ke wilayah-wilayah lainnya. Misalnya, pendidikan tinggi (universitas), pemadaman kebakaran, jalan raya penghubung antar daerah, sistem pengendali polusi (udara dan air), dan rumah sakit daerah, tidak bisa dibatasi manfaatnya hanya untuk masyarakat daerah tertentu saja. Namun tanpa adanya “imbalan” (dalam bentuk pendapatan) yang berarti dari proyek-proyek serupa di atas, biasanya Pemda enggan berinvestasi di sini. Oleh karena itulah, pemerintah pusat perlu memberikan semacam insentif ataupun menyerahkan sumber-sumber keuangan publik ke daerah agar kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik dapat terpenuhi di daerah.

Kelima, untuk rehabilitasi, yaitu untuk mencapai tujuan stabilisasi pemerintah pusat. Transfer dana dapat ditingkatkan oleh pemerintah ketika aktivitas perekonomian sedang lesu. Di saat lain, bisa saja dana transfer ke daerah dikurangi manakala perekonomian sedang *booming*. Transfer untuk dana-dana pembangunan (*capital grants*) adalah merupakan instrumen yang cocok untuk tujuan ini.

Jadi, secara prinsip tujuan umum transfer dana pemerintah pusat adalah untuk meminimumkan ketimpangan fiskal vertikal, meminimumkan ketimpangan fiskal horizontal, dan menginternalisasikan/memperhitungkan sebagian atau seluruh limpahan manfaat (biaya) kepada daerah yang menerima limpahan manfaat (yang menimbulkan biaya) tersebut. Selain itu, kerap pula dikemukakan

bahwa pertimbangan pemberian transfer pusat adalah dalam rangka menjamin tetap baiknya kinerja fiskal Pemda. Artinya, transfer ini dimaksudkan agar Pemda terdorong untuk intensif menggali sumber-sumber penerimaannya (sesuai dengan kriteria yang berlaku), sehingga hasil yang diperoleh menyamai (bahkan melebihi) kapasitasnya. Dengan kata lain, transfer ini dimaksudkan sebagai “sarana edukasi” bagi Pemda. Pemda akan mendapat transfer jika upayanya dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang menjadi wewenangnya sama atau melebihi kapasitasnya. Sementara daerah tidak akan mendapat transfer apabila upayanya menghasilkan penerimaan yang lebih rendah dari kapasitas fiskalnya.²⁶

Kriteria umum dalam desain transfer pusat ke daerah yang biasa digunakan di banyak negara di dunia antara lain:²⁷

1. Otonomi. Ini merupakan prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal, apakah suatu negara itu berbentuk federal maupun negara kesatuan. Intinya adalah bahwa Pemda harus memiliki independensi dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritas mereka. Tidak boleh ada pembatasan yang sedemikian ketat sehingga sebagian besar keputusan di Daerah harus mengikuti atau mengacu pada ketentuan pusat;
2. Penerimaan yang memadai (*revenue adequacy*). Pemda semestinya memiliki pendapatan (termasuk transfer) yang cukup untuk menjalankan segala kewajiban atau fungsi yang diembannya;
3. Keadilan (*equity*). Besarnya dana transfer pusat ke daerah ini seyogyanya berhubungan positif dengan kebutuhan fiskal daerah dan sebaliknya, berkebalikan dengan besarnya kapasitas fiskal daerah yang bersangkutan;
4. Transparan dan stabil. Formula transfer mesti diumumkan sehingga dapat diakses masyarakat. Hal yang lebih penting lagi adalah bahwa setiap daerah dapat memperkirakan berapa penerimaan totalnya (termasuk transfer) sehingga memudahkan penyusunan anggaran. Formula tersebut seyogyanya dipakai untuk jangka menengah (misalnya 3-5 tahun), agar perencanaan jangka menengah dan panjang dapat dilakukan oleh daerah;
5. Sederhana (*simplicity*). Alokasi dana kepada Pemda semestinya didasari pada faktor-faktor obyektif dimana unit-unit individual tidak memiliki

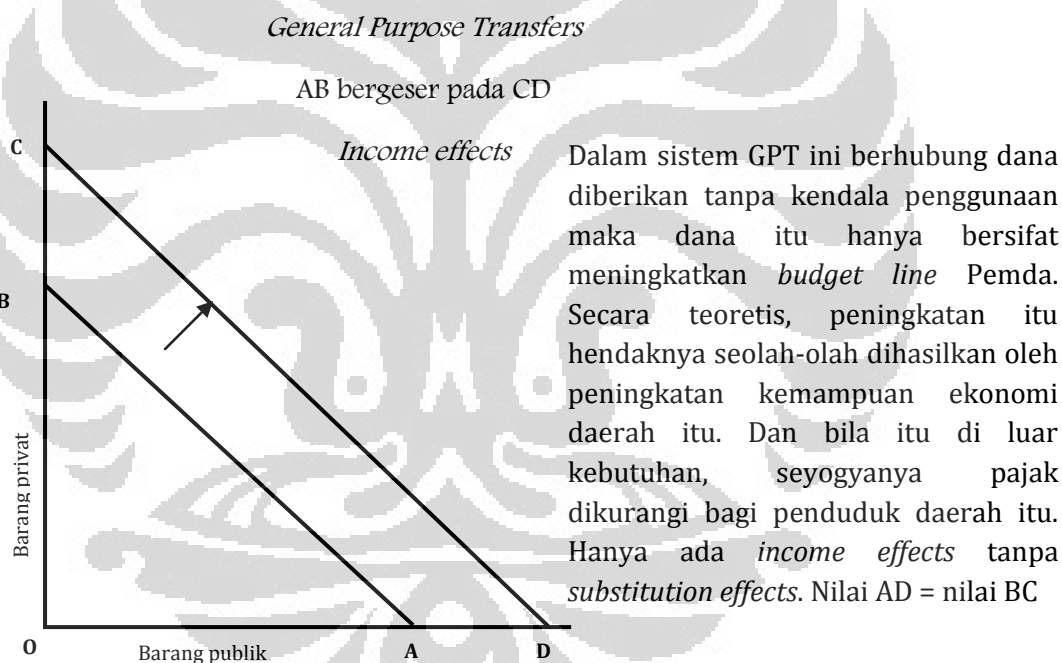
²⁶*Ibid*, hal. 27

²⁷*Ibid*, hal. 28-30

kontrol atau tidak dapat mempengaruhinya. Di samping itu, formula yang dipakai seyogyanya relatif mudah dipahami;

6. Insentif. Desain transfer ini harus sedemikian sehingga memberikan semacam insentif untuk daerah dengan manajemen fiskal yang baik dan sebaliknya menangkalkan praktik-praktik yang tidak efisien.

Wibowo, Dendi dan Zulhanif (2011) menulis, dengan merujuk studi Anwar Shah (2006)²⁸ dan Stiglitz (1988) terdapat dua jenis *intergovernmental transfer*, yaitu *General Purpose Transfer* (GPT) dan *Specific Purpose Transfers* (SPT). Analog dengan Stiglitz, Shah juga menyatakan bahwa penggunaan GPT diserahkan sepenuhnya pada pemerintah subnasional atau pemerintahan daerah, sedangkan SPT harus mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat atau nasional.



Gambar 2.1

Konsep *General Purpose Transfers* (GPT)

Sumber: Wibowo, Dendi dan Zulhanif (2011), Gambar 1, hal 8.

Agak berbeda dari Stiglitz, Shah membagi GPT dalam kelompok *block transfers* dan *block grants*. *Block transfers* bebas digunakan dalam pengeluaran

²⁸ Shah, Anwar, (2006), A practitioner's guide to intergovernmental fiscal transfers, Policy Research Working Paper Series No. 4039, The World Bank.

tertentu seperti pendidikan dalam wilayah nasional tetapi setiap daerah penerima bebas menggunakan dalam kelompok pengeluaran tadi. Selanjutnya *block grants* bebas digunakan oleh daerah penerima tetapi terbatas dalam wilayahnya. Kelihatannya hal ini tidak terlalu menjadi masalah sebab tiap daerah adalah memang wilayah tertentu yang menjadi penerima transfer fiskal tersebut. **Gambar 2.1** menggambarkan konsep GPT yang dibawakan Shah.

2.4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi mengandung pengertian penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Implikasinya, DAU dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. DAU yang merupakan transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah bersifat "*block grant*", yang berarti kepada Pemerintahan Daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah atau bisa dikatakan DAU sebagai alat pemerataan (*equalization grants*).

Sementara itu, dasar hukum dari pelaksanaan DAU antara lain:

- a. Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Ketentuan mengenai DAU dalam UU ini berlaku sampai dengan tahun anggaran (T.A.) 2005 untuk penggunaan variabel DAU. Sedangkan untuk besaran DAU sekurang-kurangnya 25% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto dalam APBN berlaku sampai dengan T.A. 2007;
- b. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. UU ini merupakan pengganti dari UU

No. 25 Tahun 1999 yang mulai diberlakukan pada T.A. 2006 untuk formula dan variabel DAU, serta besaran DAU sekurang-kurangnya 26% dari PDN Netto dalam APBN berlaku mulai T.A. 2008;

- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 84 tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. PP ini berlaku sampai dengan T.A. 2005, dan selanjutnya akan diganti dengan PP atas pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2004;
- d. PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, (Lembaran Negara Tahun 2005 No. 137). PP ini berlaku 9 Desember 2005. PP ini menetapkan besaran DAU sekurang-kurangnya 26% dari PDN Netto.

DAU terdiri dari DAU untuk Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Besarnya proporsi untuk Daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangannya kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bilamana proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporsi antara provinsi dan kabupaten kota ditetapkan dengan imbangannya 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen), sesuai Pasal 37 PP No. 55 Tahun 2005.

2.4.1. Prinsip Dasar DAU

Beberapa prinsip dasar dalam pengalokasian DAU antara lain adalah:

- i. Kecukupan (*adequacy*). Prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan daerah, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Dalam hal ini, perkataan cukup diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi. Sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
- ii. Netralitas dan efisiensi (*neutrality and efficiency*). Desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus

diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru memperbaiki (bukannya menimbulkan) distorsi dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi DAU tidak boleh menciptakan distorsi dalam struktur harga input. Untuk itu, sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternative relevan yang tersedia.

- iii. Akuntabilitas (*accountability*). Sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum, maka penggunaan dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah.
- iv. Relevansi dengan tujuan (*relevance*). Sistem alokasi DAU sejauh mungkin mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam UU. Alokasi DAU layak ditujukan untuk membiayai sebagian dari a) beban fungsi yang dijalankan, dan b) hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai. Perlu diingat bahwa kedua UU telah mencantumkan secara eksplisit beberapa hal yang menjadi tujuan yang ingin dicapai lewat program desentralisasi, yakni: (1) stimulasi ekonomi daerah; (2) peningkatan demokrasi; (3) keadilan/pemerataan; (4) kemampuan daerah dalam melayani masyarakat.
- v. Keadilan (*equity*). Kaitan penting dengan isu pemerataan ini adalah: apa yang ingin diratakan lewat instrumen DAU? Pendapat umum terhadap DAU: bertujuan untuk meratakan pendapatan antar daerah (dalam pengertian nominal ataupun perkapita). Meskipun tujuan ini menarik, namun secara konseptual dan praktis tujuan tersebut bukanlah tujuan yang secara langsung dapat dicapai oleh instrumen DAU. Pertimbangannya, tujuan pemerataan pendapatan antar daerah hanya baik untuk dipakai sebagai referensi ideal (atau, tujuan pemerataan yang sifatnya primer) tapi bukan tujuan yang bisa dicapai secara fungsional.
- vi. Objektivitas dan transparansi (*objectivity dan transparency*). Sebuah sistem alokasi DAU yang baik harus didasarkan pada upaya untuk meminimumkan kemungkinan manipulasi. Untuk itulah maka sistem alokasi DAU harus dibuat sejelas mungkin dan formulanya pun dibuat setransparan mungkin. Prinsip transparansi akan dapat dipenuhi bila formula tersebut bisa dipahami oleh khalayak umum. Dalam kaitan itulah maka indikator yang digunakan

sedapat mungkin adalah indikator yang sifatnya obyektif sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ambivalen.

- vii. Kesederhanaan (*simplicity*). Rumusan alokasi DAU harus sederhana (tidak kompleks). Rumusan yang kompleks akan sulit dimengerti umum, namun tidak boleh pula terlalu sederhana sehingga menimbulkan perdebatan dan kemungkinan ketidak-adilan. Rumusan sebaiknya tidak memanfaatkan sejumlah besar variabel dimana jumlah variabel yang dipakai menjadi relatif terlalu besar ketimbang jumlah dana yang ingin dialokasikan.

2.4.2. Beberapa Faktor Penting dalam Desain DAU²⁹

Tiga faktor penting dalam desain DAU adalah sumber dana untuk alokasi DAU (*distributable pool*), formula distribusi, dan kondisionalitas (*condicionality*). Sumber Dana, ciri yang baik dari sistem transfer keuangan pusat ke daerah adalah stabilitas dan juga fleksibilitas. Meski terkesan bertentangan bukan tidak mungkin hal tersebut dapat dicapai. Berdasarkan contoh di banyak negara, ada tiga cara untuk menentukan jumlah dana yang akan dialokasikan: i) proporsi tertentu dari penerimaan pemerintah atau persentase tertentu dari Produk Domestik Bruto (PDB); ii) secara *ad hoc*, seperti halnya belanja yang lain dan iii) berdasarkan formula, misalnya sebagai proporsi dari pengeluaran tertentu atau dikaitkan dengan berbagai karakteristik umum daerah penerima transfer.

Formula Distribusi, meskipun fokus utama kepada hasil atau efek dari distribusi, desain formula yang baik tetap harus diupayakan. Desain yang baik akan memberikan efisiensi dan akuntabilitas daerah. Transfer yang terjadi jangan hanya bertujuan untuk mengisi celah fiskal dalam rangka mencapai pemerataan. Tetapi hal yang penting adalah bagaimana mendefinisikan kebutuhan belanja dan kapasitas fiskal secara akurat dengan menggunakan faktor-faktor yang obyektif. Database yang baik tentunya akan mendukung untuk terciptanya hal tersebut.

Kondisionalitas, jika dana untuk transfer, baik jumlah maupun sumbernya sudah ditentukan dan formula sudah ditetapkan maka hal selanjutnya yang harus ditentukan dalam sistem transfer adalah apakah transfer tersebut akan dilakukan

²⁹ Simanjuntak, Robert A. dan Hadiyanto, Djoko (2002), dalam Sidik, Machfud (2002), Dana Alokasi Umum (DAU): Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal. 158-160.

bersyarat (*conditional*) dalam arti terkait dengan penyediaan standar pelayanan publik tertentu. Oleh karena dana DAU adalah *unconditional block grant*, maka tidak ada persyaratan apapun dimana tujuan dari DAU adalah untuk menjamin semua daerah memiliki sumber dana dalam menyediakan pelayanan publik dengan standar tertentu. Dalam pengalaman beberapa negara, penggunaan transfer bersyarat sangat efektif digunakan sebagai sarana mencapai sasaran diberbagai sektor tertentu, misalnya kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Dana Perimbangan merupakan satu kesatuan yakni transfer pusat untuk mengatasi sekaligus ketimpangan vertikal (pusat-daerah) dan ketimpangan horisontal (antar-daerah). Saat ini DAU merupakan komponen utama dari dana perimbangan. Hal ini terlihat dari kebijakan alokasi Dana Transfer ke Daerah yang terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian pada Tahun 2011 sebesar Rp 392.980,3 miliar. Dana Perimbangan tahun 2011 dialokasikan sebesar Rp 334.324,0 miliar, terdiri dari DBH sebesar Rp 83.558,4 miliar, DAU sebesar Rp 225.532,8 miliar dan DAK sebesar Rp 25.232,8 miliar.³⁰

2.4.3. Formulasi DAU

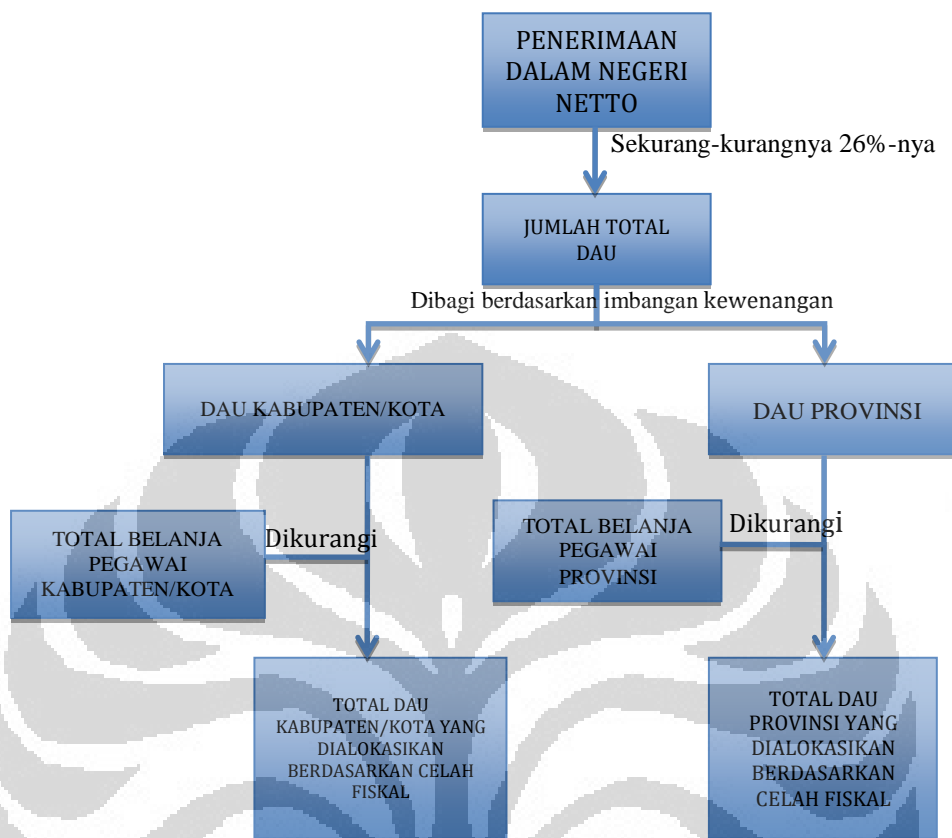
Dalam penyusunan formula DAU, terdapat 3 (tiga) tahapan umum yang dilakukan, yaitu:

- a. Tahapan Akademis. Dalam tahap pertama ini, konsep awal penyusunan formula DAU dilakukan oleh Tim Independen dari berbagai Universitas dengan tujuan untuk memperoleh Formula DAU yang sesuai dengan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.
- b. Tahapan Administratif. Penghitungan DAU berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan UU dengan memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis termasuk didalamnya konsolidasi, verifikasi, dan validasi data DAU yang bersumber dari instansi terkait dan daerah.
- c. Tahapan Politis. Tahapan akhir pembahasan formula dan penghitungan DAU antara pemerintah dengan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk menyetujui formula dan hasil penghitungan DAU.

³⁰ Kementerian Keuangan (2011), *Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, Buku Pelengkap 2011*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal. III-52.

Jika dalam UU No. 25 Tahun 1999 dinyatakan bahwa jumlah DAU total sekurang-kurangnya 25% dari Penerimaan Dalam Negeri (PDN) Netto, pada UU No. 34 Tahun 2004 telah meningkatkan persinya menjadi sekurang-kurangnya 26% dari PDN Netto. Jumlah ini juga telah diterapkan dalam alokasi DAU Tahun 2006 yang mencapai lebih dari Rp 145,66 triliun. Berbeda dengan UU No. 25 Tahun 1999 yang secara tegas menyatakan proporsi bagian Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu masing-masing sebesar 10% (untuk Provinsi) dan 90% (untuk Kabupaten/Kota), dalam UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa proporsi DAU antara daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkanimbangan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal ini mungkin akan menimbulkan masalah baru, yaitu ketidakjelasan dalam penentuan alokasi DAU bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun, pada tahun 2006, bagian 10% untuk Provinsi dan bagian 90% untuk kabupaten/kota tersebut masih dipergunakan. Dan selama perkembangannya hingga 2011 masih belum berubah.

Formula yang baru tidak mengenal istilah Alokasi Minimum (AM) yang berganti nama menjadi Alokasi Dasar (AD). Jika pada Alokasi Minimum terdapat komponen *lumpsum*, maka dalam Alokasi Dasar tidak terdapat komponen ini lagi dan hanya terdiri dari Belanja Pegawai, yang diukur dengan menggunakan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan penggajian PNS. Perbedaan mendasar dalam penentuan jumlah juga terjadi. Pada formula sebelumnya, jumlah Alokasi Minimum dan alokasi berdasarkan kesenjangan (celah) fiskal ditetapkan terlebih dahulu dan dibagi berdasarkan proporsi, dan dalam formula yang baru, Alokasi Dasar tersebut harus dapat menjamin bahwa keseluruhan Belanja Pegawai dapat terpenuhi. Implikasinya, sisa dari total DAU dikurangi dengan Alokasi Dasar adalah jumlah alokasi yang akan dibagikan kepada setiap daerah berdasarkan formula celah fiskal (*fiscal gap*).



Gambar 2.2

Kebijakan Jumlah Alokasi DAU Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004

Sumber: Kementerian Keuangan, 2011³¹

Bentuk umum formula³² alokasi DAU kepada masing-masing daerah secara formula dapat ditunjukkan pada persamaan berikut ini:

$$DAU = AD + CF \quad (2.1)$$

Dimana:

- DAU = Dana Alokasi Umum
- AD = Alokasi Dasar = Gaji PNS Daerah
- CF = Celah Fiskal = KbF – KpF
- KbF = Kebutuhan Fiskal
- KpF = Kapasitas Fiskal

³¹ Kementerian Keuangan, (2011), *Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Gambar 3.13, hal. 97.

³² Kementerian Keuangan, (2011), *ibid.*, hal. 99-103.

Dari persamaan di atas, perbedaan pertama dengan rumusan UU No. 25 Tahun 1999 adalah digantikannya Alokasi Minimum menjadi Alokasi Dasar yang tidak memiliki komponen *lumpsum*. Sedangkan komponen kedua, yaitu alokasi DAU berdasarkan celah (kesenjangan) fiskal secara prinsip tidak terjadi perbedaan dengan rumusan dalam UU No. 25 Tahun 1999. Secara indikatif, terjadi perubahan indikator dan proses perhitungan untuk kapasitas dan kebutuhan fiskal. Sesuai dengan revisinya, terdapat sedikit perubahan dalam perhitungan kebutuhan dan kapasitas fiskal. Indeks kemiskinan relatif tidak lagi mempengaruhi kebutuhan fiskal, digantikan dengan dua jenis indeks yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Indeks Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Sedangkan dari sisi kapasitas fiskal, PAD estimasi bukan lagi menjadi komponen kapasitas fiskal, namun nilai PAD aktual-lah yang menjadi indikasi dari kapasitas fiskal tersebut.

Variabel jumlah penduduk (populasi) merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di setiap daerah. Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah. Untuk variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan cerminan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar-Daerah. PDRB merupakan cerminan potensi dan aktivitas perekonomian suatu Daerah yang dihitung berdasarkan total seluruh output produksi kotor dalam suatu wilayah. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan variabel yang mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan penduduk atas layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.³³ Dalam bentuk diagram, formula umum dari DAU menurut UU No. 33 Tahun 2004 digambarkan dalam **Gambar 2.3**.

³³ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang sedapat mungkin mencerminkan berbagai segi kehidupan manusia yang banyak dan kompleks. Namun ditahap awal diukur dari usia harapan hidup, pengetahuan dan standar hidup yang layak sebagai bentuk cerminan dari layanan dasar masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan.

Tabel 2.1
Perkembangan Penggunaan Variabel dalam Perumusan DAU

UU 25/1999	DAU 2003 & 2004	DAU 2005	UU 33/2004
<u>Kebutuhan Fiskal</u> - Penduduk - Wilayah - Kondisi geografis - Pendapatan penduduk miskin	<u>Kebutuhan Fiskal</u> - Penduduk - Wilayah - Indeks Kemiskinan - Indeks Kemahalan Konstruksi	<u>Kebutuhan Fiskal</u> - Penduduk - Wilayah - Indeks Kemiskinan - Indeks Kemahalan Konstruksi	<u>Kebutuhan Fiskal</u> - Penduduk - Wilayah - Indeks Kemahalan Konstruksi - PDRB per kapita - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
<u>Kapasitas Fiskal</u> - Potensi Industri - Potensi Sumber Daya Alam (SDA) - Potensi Sumber Daya Manusia (SDM) - PDRB	<u>Kapasitas Fiskal</u> - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Penerimaan SDA	<u>Kapasitas Fiskal</u> - Pendapatan Asli Daerah (PAD) - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Penerimaan SDA	<u>Kapasitas Fiskal</u> - Pendapatan Asli Daerah (realisasi dua tahun sebelumnya) - Bagi Hasil Pajak - Bagi Hasil Penerimaan SDA

Sumber : Kementerian Keuangan, diolah

Sebagai catatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan jenis data yang pertama kali diperkenalkan oleh United Nation Development Program (UNDP) tentang aspek pembangunan manusia.³⁴ Hasil perhitungan menunjukkan bahwa daerah dengan PDRB per kapita yang tinggi akan selalu memiliki kualitas sumber daya manusia (SDM) atau nilai IPM yang baik pula. Indeks PDRB per kapita adalah indeks sebagai proksi dari pendapatan masyarakat secara rata-rata merupakan data yang secara reguler diterbitkan oleh BPS.

³⁴ Fukuda-Parr, Sakiko (2003), *The Human Development Paradigm: "Operationalizing Sen's Idea on Capabilities"*, *Feminist Economics*, 9(2 – 3), 2003, 301 – 317.

Laporan Pembangunan Manusia pertama kali disusun oleh Mahbub ul Haq untuk UNDP sejak 1990 bertujuan untuk: "to shift the focus of development economics from national income accounting to people centered policies" (Mahbub ul Haq, 1995).

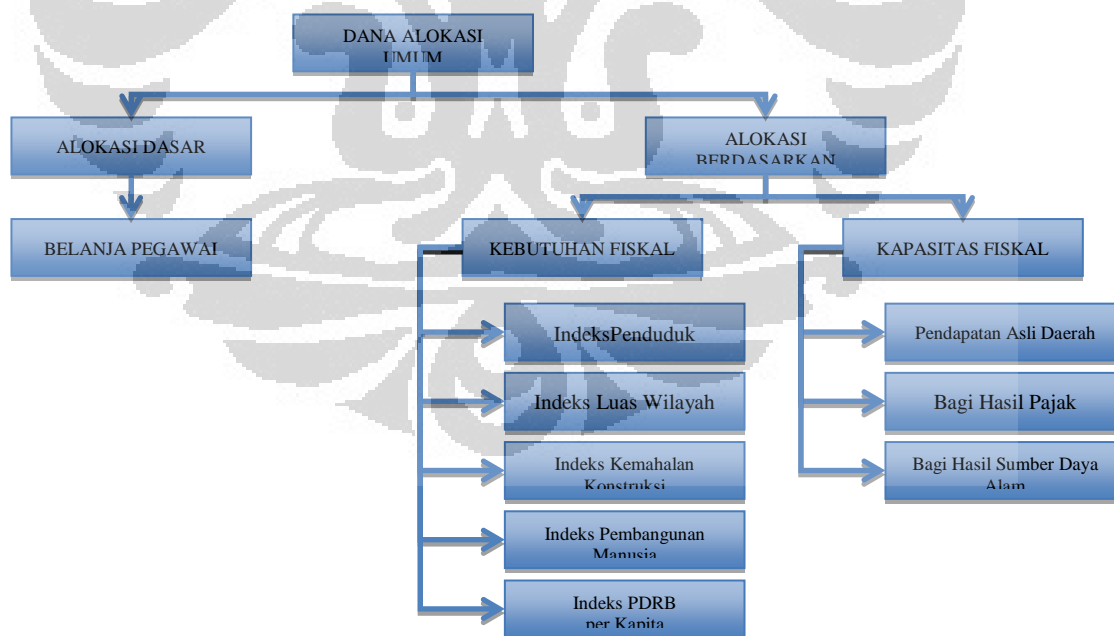
Rumusan tentang kebutuhan fiskal (KbF)³⁵ ditunjukkan sebagai berikut:

$$KbF = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB/kap) \quad (2.22)$$

Dimana:

TBR	= Total Belanja Rata-rata APBD
IP	= Indeks Jumlah Penduduk
IW	= Indeks Luas Wilayah
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IKK	= Indeks Kemahalan Konstruksi
IPDRB/kap	= Indeks Produk Domestik Regional Bruto per kapita
α	= Bobot Indeks

Sebagai ilustrasi, bobot untuk tahun 2006 telah disepakati bahwa Indeks Penduduk (IP) memiliki bobot 30%, Indeks Luas Wilayah (IW) 15%, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 30%, Indeks PDRB per kapita (IPDRB/kap) 15% dan IPM sebesar 10%. Selain itu, TBR dihitung berdasarkan total belanja daerah dalam realisasi APBD T.A. 2004 (dua tahun sebelumnya) dibagi dengan jumlah daerah dengan mengecualikan daerah-daerah yang memiliki data belanja yang *outlier* (pencilan) sangat tinggi seperti DKI Jakarta.



Gambar 2.3
Formula Umum DAU Menurut UU No.33 Tahun 2004
 Sumber : Kementerian Keuangan, Buku Pelengkap 2011³⁶

³⁵ Kementerian Keuangan, (2011), *ibid.*, hal. 99.

³⁶ Kementerian Keuangan, (2011), *ibid.*, Gambar 3.14, hal. 104.

Sedangkan rumusan tentang kapasitas fiskal (KpF) sendiri relatif sama dengan cara menurut UU No. 25 Tahun 1999 dengan sedikit perubahan penggunaan data PAD, dimana menurut UU No. 33 Tahun 2004, PAD diukur dengan menggunakan PAD realisasi dua tahun sebelum dialokasikannya DAU tahun yang bersangkutan. Secara lengkap rumus kapasitas fiskal tersebut adalah:

$$KpF = PAD + DBH Pajak + DBH SDA \quad (2.23)$$

Dimana: PAD = Pendapatan Asli Daerah
 DBH Pajak = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak
 DBH SDA = Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Sumber Daya Alam

Catatan: PAD untuk Provinsi diperhitungkan dengan bobot 50% dengan mengingat bahwa daerah Provinsi melakukan redistribusi alokasi sebagian pendapatannya kepada daerah kabupaten/kota di wilayahnya dalam rangka pemerataan.

Setelah dihitung nilai kebutuhan dan kapasitas fiskal, dengan menggunakan cara di atas, maka langkah berikutnya adalah menghitung besarnya alokasi berdasarkan kesenjangan fiskal. Alokasi DAU yang berdasarkan kesenjangan fiskal untuk setiap daerah ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- (a) Tentukan nilai kesenjangan fiskal atau *fiscal gap* (FG) yang merupakan selisih antara nilai kebutuhan fiskal (KbF) dengan kapasitas fiskal (KpF).

$$FG = KbF - KpF \quad (2.24)$$

- (b) Tentukan nilai kesenjangan fiskal yang sudah dinormalisasi (FG*). Normalisasi yang dimaksud adalah dengan aturan sebagai berikut:

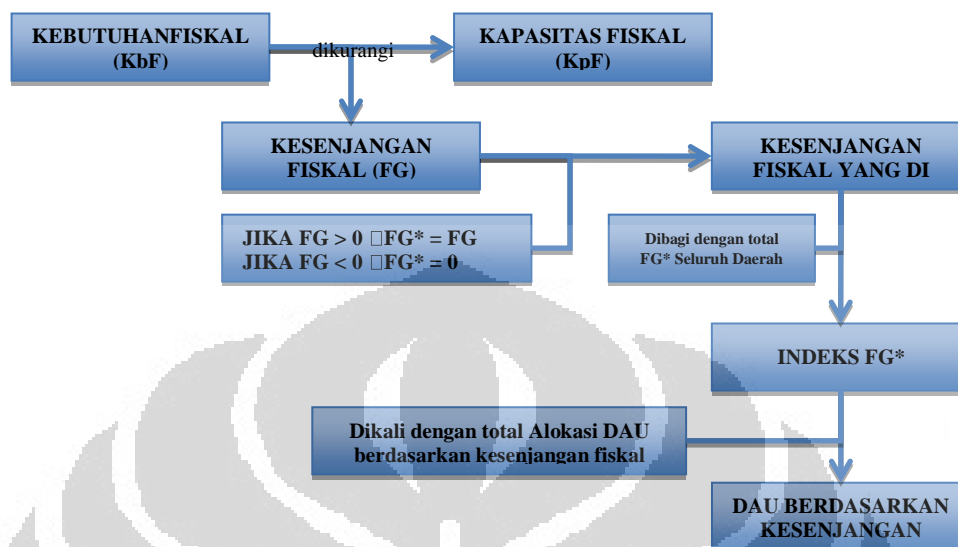
- Jika nilai $FG > 0$ atau $KbF > KpF$ maka $FG^* = FG$
- Jika nilai $FG < 0$ atau $KbF < KpF$ maka $FG^* = 0$

- (c) Tentukan Indeks FG* yang merupakan rasio antara FG* dengan total FG*. Untuk daerah yang memiliki kesenjangan fiskal negatif, tentunya nilai Indeks FG* nya akan menjadi nol.

$$\text{Indeks FG* Daerah Z} = \frac{\text{FG* Daerah Z}}{\text{Total FG* Seluruh Daerah}} \quad (2.25)$$

- (d) Jumlah DAU yang berdasarkan kesenjangan fiskal ini ditentukan dengan mengalikan Indeks FG* dengan jumlah total alokasi DAU (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

Sebagai ilustrasi, cara perhitungan alokasi DAU berdasarkan kesenjangan fiskal ini dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.4** berikut ini:



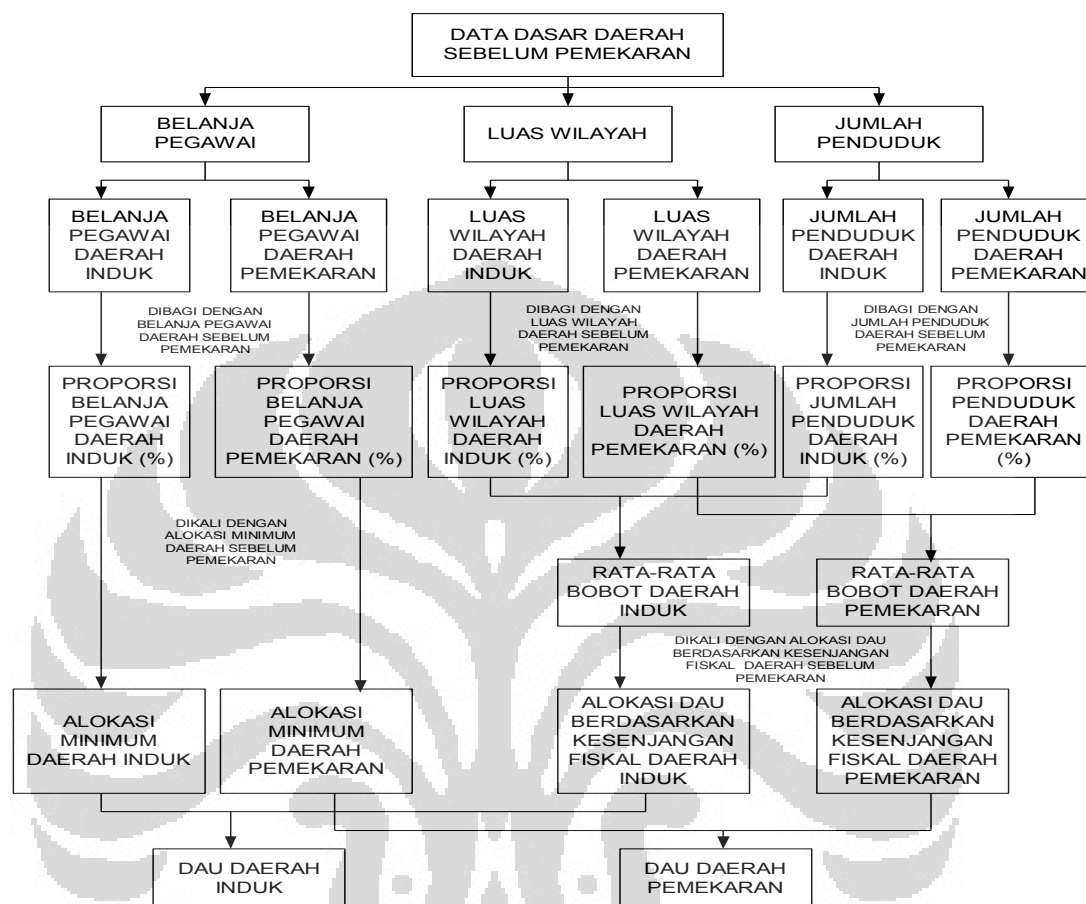
Gambar 2.4
Penentuan Alokasi DAU Berdasarkan Kesenjangan Fiskal Setiap Daerah

Sumber: Kementerian Keuangan

Proses penentuan DAU selanjutnya mirip dengan penentuan dalam UU No. 25 Tahun 1999 hanya terdapat satu perubahan besar menurut UU No. 33 Tahun 2004, yaitu dengan adanya pencabutan prinsip *hold harmless* dalam alokasi DAU yang berlaku efektif mulai Tahun Anggaran 2008. *Hold harmless* adalah sikap daerah yang tidak mau menerima DAU lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³⁷ Dalam periode menuju 2008 tersebut mekanisme *hold harmless* masih tetap berjalan. Mekanisme secara garis besar berbeda antara provinsi dan kabupaten/kota. Pada tahun 2004 dan terus diadopsi dalam mekanisme *hold harmless* hingga tahun 2007, jika provinsi secara formula memiliki DAU usulan lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka provinsi tersebut akan memperoleh tambahan alokasi berupa Dana Penyeimbang Murni (DP Murni). Sedangkan di tingkat kabupaten/kota, mekanisme *hold harmless* dilakukan dengan melakukan pengurangan dari

³⁷ Soejono, Prasetyo Indro (2005), *Evaluasi reformulasi dana alokasi umum kabupaten/kota di Indonesia*, MPKP-FEUI, hal. 35.

kabupaten/kota yang naik untuk ditambahkan ke daerah yang turun penerimaan DAU nya dengan proporsi tertentu.



Gambar 2.5
Pembagian DAU bagi Daerah Pemekaran

Sumber: Kementerian Keuangan

Berkaitan dengan DAU daerah pemekaran, tidak terjadi perubahan dalam proses alokasi DAU yang didasarkan pada daerah induknya sampai pada saat data dasar telah tersedia. Efek dari pemekaran ini pun memberi dampak terhadap jumlah DAU yang diterima oleh daerah pemekaran. Pembagian DAU pada daerah yang mengalami pemekaran dialokasikan pada daerah induk sebelum pemekaran. Sehingga, jumlah daerah yang dimekarkan serta daerah induknya dianggap merupakan satu daerah seperti daerah sebelum pemekaran. Hal ini tidak terlepas dari data dasar yang belum dimiliki oleh daerah pemekaran. Lebih jauh lagi, daerah sebelum pemekaran berikut data dasar yang dimilikinya dimasukkan ke

dalam formula serta setelah dialokasikan jumlah DAU usulan, langkah berikutnya jumlah tersebut dibagikan kepada daerah induk maupun daerah hasil pemekaran. Ilustrasi pembagian DAU bagi daerah pemekaran dapat ditunjukkan pada **Gambar 2.6**.

2.4.4. Mekanisme Distribusi dan Aspek Teknis Terkait

Keberhasilan sistem alokasi DAU untuk mencapai tujuan sangat ditentukan oleh formula alokasinya. Namun demikian, keberhasilan sistem alokasi DAU juga ditentukan oleh aspek mekanisme distribusi DAU itu sendiri. Beberapa aspek mekanisme distribusi DAU yang perlu dicermati untuk mendukung formula alokasi yang disusun, diantaranya:

- a. Jumlah Total DAU
- b. Penyesuaian DAU terhadap Inflasi
- c. Stabilitas dan kepastian
- d. Perbedaan Desa-Kota

a. Aspek Jumlah Total DAU

Ketika tidak diketahui secara pasti, apakah porsi DAU dalam APBN (yaitu minimum 26% dari total penerimaan domestik) dapat dianggap cukup untuk membiayai fungsi-fungsi yang diberikan kepada daerah. Yang pasti, jumlah total DAU yang ada sekarang sesungguhnya merupakan produk “negosiasi” antara pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) dengan DPR. Artinya, angka total tersebut merupakan “kompromi” politik ketimbang hasil perhitungan obyektif terhadap kebutuhan yang mungkin muncul. Dari jumlah total itu, sebanyak 10% dialokasikan untuk pemerintah propinsi, dan 90% sisanya dialokasikan kepada pemerintah kabupaten dan kota. Hal lain yang relevan adalah berkaitan dengan kemungkinan terjadinya pemekaran dan penciptaan wilayah. Penciptaan wilayah akan menyebabkan jumlah total untuk DAU bisa menjadi terlalu besar, sementara pemekaran wilayah akan menambah secara drastis jumlah total dana DAU - karena beban fungsi dasar yang harus disediakan. Dalam kasus terakhir, angka total 26% terhadap total penerimaan domestik menjadi tidak terlalu memadai.

b. Aspek Penyesuaian terhadap Inflasi

Hal ini kerap muncul ke permukaan dalam berbagai diskusi karena perbedaan dalam angka inflasi antar daerah. Namun pertimbangannya adalah, pengaruh inflasi dalam total alokasi DAU sebenarnya telah “tertangkap” dalam APBN yang merupakan sumber dari alokasi DAU ini. Sehingga tidak perlu diberikan tambahan untuk mengakomodasi faktor inflasi di daerah.

Faktor penyebab inflasi kerap kali berasal dari fenomena moneter, dan efisiensi internal daerah yang sifatnya berada dalam kontrol pemerintah, maka penyesuaian jumlah alokasi kepada suatu daerah sebagai respon terhadap inflasi akan memiliki efek ekonomi yang tidak sehat dimana pemerintah memberikan insentif untuk ketidak-beresan dalam pengelolaan ekonomi suatu daerah.

c. Aspek Stabilitas dan Kepastian

Adalah penting untuk menjaga stabilitas dan kepastian dalam distribusi DAU. Pemerintahan daerah umumnya masih *rigid* untuk mengadopsi sesuatu yang fluktuatif sifatnya. Ada tiga isu penting dalam aspek ini. *Pertama*, pemakaian formula dan perubahan basis data memungkinkan terjadinya fluktuasi dalam alokasi yang diterima oleh daerah. Perlu dipertimbangkan dengan hati-hati prinsip dan teknik apa yang harus dipakai untuk menghindari fluktuasi tahunan yang besar dalam dana yang diterima oleh daerah yang merupakan alokasi dari pemerintah pusat. *Kedua*, dengan rencana perubahan dalam periodisasi tahun anggaran, perlu dipertimbangkan pula jadwal perhitungan alokasi DAU harus dimulai dan kaitannya dengan jadwal perencanaan anggaran di daerah. *Ketiga*, sebagai akibat dari kompleksitas yang muncul dari pemakaian formula dan perubahan basis data, terdapat potensi kerumitan dalam melakukan perhitungan tiap tahun. Perlu dipertimbangkan keuntungan dan kerugian dari usulan untuk menetapkan alokasi untuk periode dua tahun berturut-turut misalnya dibandingkan menghitung kebutuhan alokasi setiap tahunnya. Pertimbangan ini sangat beragam untuk kemudian dipilih suatu alternatif yang konsisten terhadap semua usulan

pertimbangan ini karena jawaban keputusan sifatnya administratif dan sangat bergantung pada konsep akhir tentang pengaturan baru terhadap otoritas fiskal.

d. Aspek Perbedaan Desa-Kota

Masalah perbedaan kota dan desa kerap diangkat dalam diskusi di berbagai forum akademis dan politis. Pertimbangan perlu tidaknya dilakukan perbedaan dalam formula alokasi untuk desa dan kota, atau cukup alokasi desa dan kota disatukan saja dalam satu rumus yang memasukkan faktor tertentu yang menerangkan perbedaan beban sebagai konsekuensi perbedaan karakter daerah.

Dalam tahap ini, sebaiknya tidak perlu untuk melakukan diferensiasi antara desa dan kota. Terlebih penting lagi, perbedaan karakter wilayah tersebut secara langsung telah “ditangkap” lewat berbagai variabel yang mewakili potensi ekonomi dan kebutuhan. Dengan perkataan lain, pertimbangannya dapat memilih pendapat, adalah lebih baik untuk tetap berpegang pada dan tidak bergeser dari prinsip-prinsip dasar alokasi DAU yang telah disebutkan diatas.

2.5. Pemerataan Dana Alokasi Umum

Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN kepada pemerintahan daerah dilakukan dalam kerangka membiayai pelaksanaan desentralisasi. Seperti telah disinggung sebelumnya, alokasi DAU ditujukan untuk mengatasi ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalances*) antara pemerintahan daerah. Implikasinya, pemerataan fiskal antar daerah dalam alokasi DAU menjadi penting, termasuk dengan apa yang diajukan oleh tujuh provinsi berciri kepulauan tersebut terhadap provinsi lainnya.

Untuk mengetahui kinerja pemerataan DAU dan proses evaluasinya dalam alokasi DAU ini, maka terlebih dahulu menentukan indikator kinerja pemerataannya. Setelah indikator ditetapkan, baru kemudian menetapkan indeks pemerataan dari indikator tersebut.

Indikator pemerataan yang umumnya dipergunakan antara lain nilai:

- 1) Dana Alokasi Umum (DAU);

- 2) Dana Alokasi Umum per Kapita (DAU/kapita);
- 3) Dana Alokasi Umum ditambah dengan Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity-FC*) Daerah (DAU+FC) atau (DAU+KpF);
- 4) Dana Alokasi Umum ditambah dengan Kapasitas Fiskal (*fiscal capacity-FC*) Daerah per Kapita ((DAU+FC)/Kapita) atau ((DAU+KpF)/Kapita);
- 5) Rasio dari Kebutuhan Fiskal (KbF) (*fiscal need-FN*) dibagi dengan Kapasitas Fiskal (KpF) (*fiscal capacity-FC*) Daerah ditambah dengan DAU (FN/(FC+DAU)) atau (KbF/(KpF+DAU)).

Pertama, pemerintahan daerah umumnya menggunakan indikator DAU sebagai indikator dasar mengingat banyak pemerintahan daerah menilai kinerja dari DAU tersebut berdasarkan besaran alokasi yang diterimanya. *Kedua*, dampak dari alokasi DAU untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah tidak terlepas dari *coverage* dari dana itu sendiri, sehingga perlu untuk menggambarkan kemampuan fiskal dibandingkan dengan jumlah penduduk. Argumen ini berdasarkan logika bahwa untuk jumlah alokasi DAU yang sama pada suatu daerah yang berbeda jumlah penduduknya, akan menghasilkan kemampuan fiskal yang berbeda. Indikatornya adalah nilai Dana Alokasi Umum dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing daerah (DAU/kapita).

Ketiga, DAU sebagai salah satu komponen penting dari struktur APBD pemerintahan daerah. Selain DAU, terdapat juga komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan alokasi dana perimbangan dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH). PAD dan DBH seperti halnya DAU merupakan jenis pendapatan daerah yang peruntukannya terserah pemerintahan daerah (*block grant*). Dalam mengalokasikan DAU, variabel PAD + DBH adalah proksi dari perhitungan kapasitas fiskal (FC). Sehingga indikator untuk menilai pemerataannya adalah DAU + KpF, atau DAU+PAD+DBH.

Keempat, Apabila memperhitungkan jumlah penduduk, maka indikator berikutnya untuk menilai kinerja pemerataan DAU adalah (DAU+KpF) / kapita. *Kelima*, kemampuan keuangan daerah berupa DAU maupun kapasitas fiskal (KpF) yang ada ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fiskal (KbF) pemerintahan

daerah untuk dapat menjalankan kewenangan desentralisasinya. Dengan demikian, indikator kinerja alokasi DAU juga harus mampu menyebabkan keuangan daerah yang bersumber dari DAU + KpF memadai untuk memenuhi kebutuhan fiskal (KbF). Dan dirumuskan sebagai $KbF / (DAU + KpF)$.

Kelima indikator ini kemudian dapat diukur kinerja pemerataannya dengan menggunakan indeks pemerataan fiskal dalam bentuk Indeks Williamson dan Indeks Theil. Semakin tinggi angka Indeks Williamson menunjukkan semakin tidak tinggi tingkat ketidakmerataan, begitu juga sebaliknya. Sementara Indeks Theil, dapat membagi pemerataan itu menjadi pemerataan antar kabupaten/kota serta antar kabupaten/kota dalam provinsi tersebut. Hal ini tidak terlepas dari pengukuran ketidakpuasan kabupaten/kota jika membandingkan daerah lain dalam satu provinsi.

2.6. Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Pemberian kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut kepada Pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom sudah tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 18 ayat (4), yang menyetujui kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil-laut untuk provinsi yang dihitung dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan 1/3 (sepertiga) dari itu untuk Kabupaten/Kota. Pasal 18 ayat (5) mencantumkan bahwa lebar wilayah laut yang berada di antara dua provinsi yang berhadapan kurang dari 24 mil-laut, kewenangannya dibagi dalam jarak yang sama diantara kedua provinsi tersebut, dan Kabupaten/Kota di dalam provinsi memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi tersebut.

Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 menegaskan tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah. Seperti ditambahkan pasal 1 angka 24, dimana pada UU sebelumnya tidak ada, menyebutkan “Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara, lembaga pemerintah non kementerian dan pemerintahan daerah yang mengandung hak dan kewajiban

setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

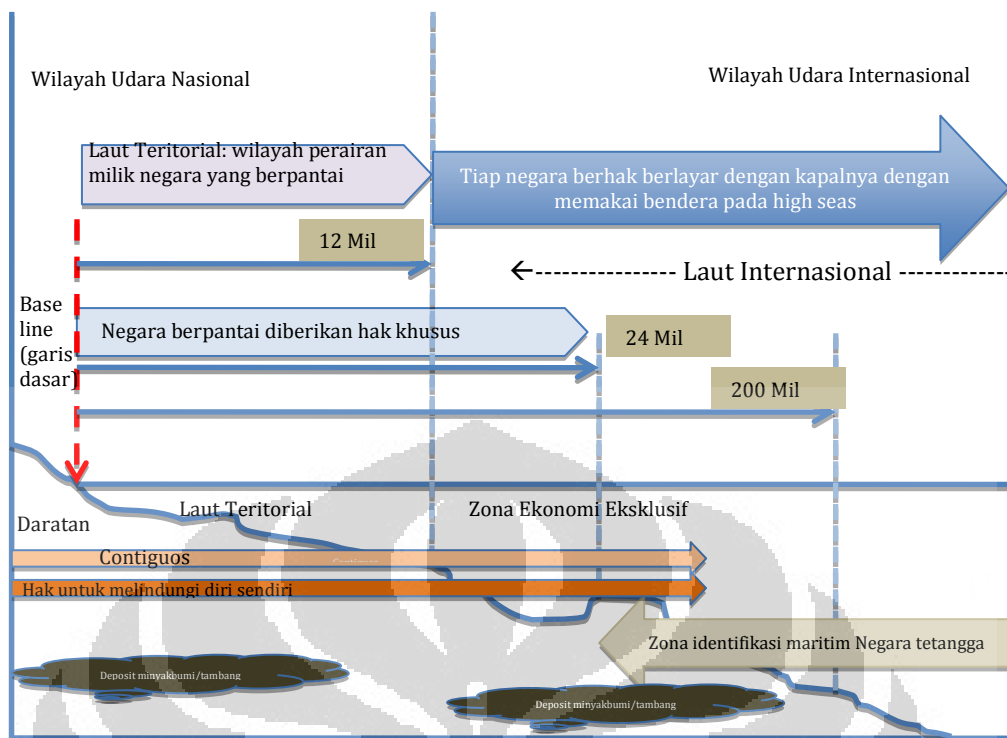
Asas otonomi, yaitu asas yang didasarkan pada hak daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Selain itu pihak-pihak yang nantinya akan terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan daerah juga disebutkan dalam undang-undang perubahan dimana sebelumnya tidak. Tentunya ini akan semakin mudah memahami undang-undang sehingga tidak salah dalam penafsiran. Dalam undang-undang perubahan dilakukan pengelompokan dan perbaikan urutan sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Sistematika penyusunan revisi UU No. 32 Tahun 2004 lebih baik karena topik-topik yang terkait di kelompokkan satu bab yang berdampak pada bertambahnya jumlah bab. Pada revisi UU No. 32 Tahun 2004 terdapat 24 bab dan pada UU No. 32 tahun 2004 sebelumnya hanya terdapat 16 bab. Demikian halnya pada rancangan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004, akan terdapat 16 bab dari sebelumnya UU No. 33 Tahun 2004 yang berjumlah 14 bab.

2.7. Provinsi Berciri Kepulauan

Kepulauan atau gugusan kepulauan merupakan kumpulan pulau-pulau yang memiliki permukaan daratan diatas rata-rata permukaan air laut, baik berpenghuni maupun tidak berpenghuni, baik manusia maupun satwa liar ataupun sekedar tetumbuhan, hewan di darat maupun di laut atau dibawah permukaan laut yang berada disekeliling daerah pantai di pulau atau kepulauan tersebut.

Garis pantai diukur sepanjang sekeliling pulau atau kepulauan tersebut dari batas landas kontinen masing-masing pulau. Garis pantai dapat berubah karena abrasi ataupun reklamasi pantai, atau tenggelamnya pulau.



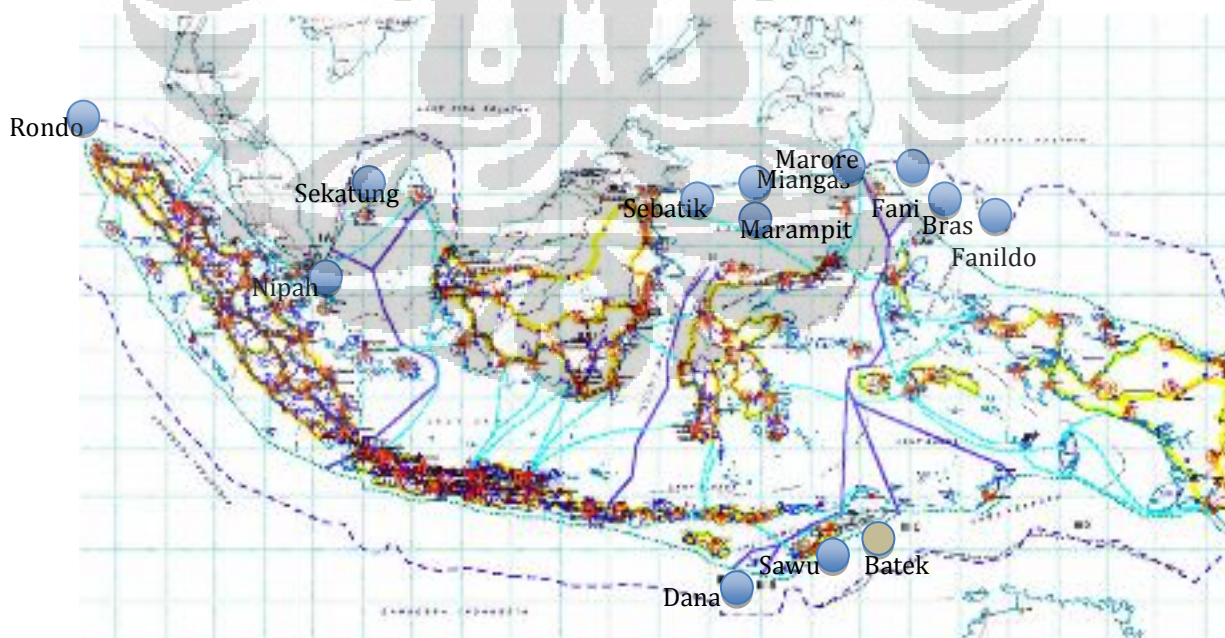
Gambar 2.6

Integritas Wilayah Teritorial

Sumber : UNCLOS, dan berbagai sumber.

Pada penelitian ini, kriteria daerah provinsi berciri kepulauan didefinisikan sebagai provinsi yang memiliki wilayah lautan lebih luas dari daratan, dan yang di dalamnya terdapat pulau-pulau atau bagian pulau yang membentuk satu gugusan pulau. Untuk sementara dalam penelitian ini diasumsikan/diidentifikasi ada 7 (tujuh) provinsi yang termasuk dalam kategori ini yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Tujuh provinsi ini tergabung dalam suatu Badan Kerjasama Daerah Kepulauan yang dibentuk untuk mengusung usulan kepentingan dari para provinsi ini. Tidak tertutup kemungkinan bila nantinya ada provinsi lain yang dimasukkan dalam kriteria tersebut karena memiliki gugusan pulau dan/atau garis pantai dengan luas wilayah laut yang signifikan. Rasio luas daratan dan laut dari ketujuh provinsi tersebut adalah 12,27 persen berbanding 87,73 persen, secara rata-rata, seperti disajikan dalam **Tabel 4.1**.

DAU bagi provinsi berciri kepulauan dinilai terlalu rendah dimana cakupan wilayah yang harus dibiayai juga besar yaitu pulau-pulau yang sebaran cukup jauh yang tentunya berdampak kepada biaya operasional pemerintahan daerah untuk mengelola wilayah laut yang luas. Saat ini terlihat jelas ketimpangan pembangunan antara daerah yang memiliki daratan yang lebih luas dibandingkan daerah yang memiliki wilayah laut yang lebih luas. Karakteristik daerah kepulauan berbeda dengan daratan seperti luas wilayah lautnya jauh lebih besar dari luas wilayah daratan, penduduknya relatif sedikit dan sebarannya tidak merata serta terkelompok menurut teritori pulau serta ketersediaan sumber daya alam yang beragam, dimana terdapat provinsi dengan keadaan pulau yang cukup mempunyai sumber daya alam tetapi pulau lainnya minim sumber daya alam yang dapat didayagunakan. Untuk penelitian ini keberadaan sumber daya alam diasumsikan seimbang dan tidak menjadi pertimbangan. Juga tidak diperhitungkan pulau atau gugusan pulau yang menjadi pulau terdepan di daerah perbatasan antar Negara sehingga diprioritaskan pengamanannya dan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, ataupun seandainya dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintahan daerah sehingga layak mendapat alokasi.



Gambar 2.7

Perbatasan Indonesia dan 12 Pulau Terdepan Prioritas

Sumber: Pusat Kajian Administrasi Internasional - Lembaga Administrasi Negara (2004)

2.8. Studi Sejenis Sebelumnya

Studi terdahulu mengenai rencana reformulasi DAU dengan memasukkan unsur kelautan dalam provinsi berciri kepulauan diantaranya adalah :

1. Lewis (2001)³⁸, menganalisa prosedur distribusi yang berbeda antara alokasi daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui faktor penyesuaian (dengan mengalokasi 80% DAU ke kabupaten/kota) dan formula yang ikut menentukan hasil alokasi. Hasil formulasi distribusi tersebut meyakinkan untuk tingkat kabupaten/kota, namun belum meyakinkan untuk tingkat provinsi, mengingat mekanisme, metode yang dipergunakan dalam menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Melihat alokasi DAU 2001 terhadap variable pembentuknya dalam kaitannya dengan efek transfer dan pemerataan (*equalization*), penelitiannya menemukan variabel populasi, luas wilayah, tingkat kemiskinan, biaya dan urbanisasi signifikan terhadap total DAU per kapita namun tetap tidak mengubah pemerataan. Pemerataan sangat bergantung pada definisi dan konsep operasionalisasinya yang ditetapkan pengambil kebijakan.
2. Brodjonegoro dan Pakpahan (2002)³⁹, mengevaluasi secara kuantitatif terhadap alokasi DAU tahun 2001 untuk melihat korelasi alokasi DAU dengan variable pembentuknya, dari sisi potensi fiskal dan sisi kebutuhan fiskal, untuk tingkatan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota. Variabel sisi potensi fiskal diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak (BHP), PAD dan BHP (dijumlahkan), Produk Domestik Regional Bruto Primer (PDRB Primer) atau PDRB sumber daya alam, PDRB Non Primer, PDRB Total, serta usia produktif. Variabel sisi kebutuhan fiskal diantaranya belanja rutin, belanja pembangunan, rutin dan pembangunan (dijumlahkan), luas wilayah, penduduk, penduduk miskin dan indeks harga dasar bangunan (IHBG). Pada tingkatan provinsi, disisi potensi fiskal, korelasi lemah hanya

³⁸ Lewis, Blane D., (2001), *Dana Alokasi Umum FY 2001: Description, Empirical Analysis, and Recommendations for Revision*, dalam Resosudarmo, Budy P., et. al., (2002), *Indonesia's Sustainable Development in a Decentralization Era*, Indonesian Regional Science Association, Chapter 9, hal. 271-298.

³⁹ Brodjonegoro, Bambang dan Pakpahan, Arlen T., (2002), *Evaluasi atas Alokasi DAU 2001 dan Permasalahannya*, dalam Sidik, Machfud et. al. (ed), (2002), *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM-FEUI dan MPKP-FEUI bekerjasama dengan Ditjen PKPD Departemen Keuangan dan Kompas, hal. 53-84.

ditunjukkan oleh PDRB sumber daya alam, variabel lainnya mempunyai tingkat korelasi cukup tinggi diatas 0,5). Disisi kebutuhan fiskal, variabel luas wilayah dan IHBG tidak berkorelasi dengan DAU, sementara variabel lainnya memiliki tingkat korelasi tinggi (diatas 0,7). Pada tingkatan kabupaten/kota, tidak satupun variabel di kedua sisi potensi maupun kebutuhan fiskal, yang memiliki korelasi cukup kuat.

Tabel 2.2
Korelasi DAU dengan Variabel-Variabel Potensial

Tingkat	PAD	BHP	PAD+BHP	PDRB Primer	PDRB Non Primer	PDRB Total	Usia Produktif
Provinsi	0,7050	0,5802	0,6739	0,3452	0,8545	0,8745	0,7866
Kab/kota	0,0226	0,0391	0,0277	0,0078	0,0596	0,0590	0,3038

Sumber: Brodjonegoro dan Pakpahan (2002), Tabel 3.1, hal 81.

Tabel 2.3
Korelasi DAU dengan Variabel-Variabel Kebutuhan

Tingkat	Rutin	Bangun	R+B	Luas	Pddk	Pddk Mskn	IHBG
Provinsi	0,7089	0,7880	0,7381	0,0981	0,7850	0,7382	-0,1654
Kab/kota	0,0995	0,0454	0,0861	-0,0986	0,2687	0,3377	-0,1243

Sumber: Brodjonegoro dan Pakpahan (2002), Tabel 3.2, hal 81.

Karena keterbatasan yang ada pada tahun 2001 tersebut, data luas wilayah bersumber dari Kepmendagri No. 13 Tahun 2001 tentang Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang diterbitkan oleh Ditjen Otda pada Maret 2001.⁴⁰

- Kadajtmiko dan Mahi (2002)⁴¹, mengetengahkan perbaikan formulasi DAU dari variable pembentuknya, dan memberikan pembobotan untuk sisi kebutuhan fiskal dengan berdasarkan nilai uji indeks koefisien variasi yang

⁴⁰ Brodjonegoro, Bambang dan Risyana, C., (2002), *Data Dasar DAU 2001 dan 2002*, (hal. 137) dalam Sidik, Machfud et. al. (ed), (2002), *ibid.*, hal. 131-149.

⁴¹ Kadajtmiko dan Mahi, Raksaka (2002), *Dana Alokasi Umum (DAU) 2002*, (hal. 95), dalam Sidik, Machfud et. al. (ed), (2002), *ibid.*, hal. 85-108.

terkecil, dimana kelompok besarnya digolongkan dalam variable kependudukan, yang terdiri dari indeks jumlah penduduk (IP) dan indeks kemiskinan relatif (IKR), dan, variabel kewilayahan, yang terdiri dari indeks luas wilayah (IW) dan indeks harga bangunan (IHB). Nilai pembobotan IP:IKR:IW:IHB berturut-turut adalah 0,4:0,1:0,1:0,4. Sehingga bobot luas wilayahnya adalah 0,1 untuk perhitungan alokasi DAU tahun 2002 sebagai perbaikan formulasi alokasi DAU tahun 2001.

4. Kadjatmiko dan Ismail (2002)⁴², mencatat dalam suatu forum yang difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintahan Daerah, dimana terdapat usulan agar luas wilayah diberikan bobot yang lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk, agar daerah luar Jawa yang memiliki luas wilayah besar mendapatkan DAU yang lebih besar sehingga dapat mengejar ketertinggalan pembangunan. Dan faktor luas wilayah dipengaruhi oleh indeks harga bangunan, yang menunjukkan kondisi geografis riil suatu daerah yang sebenarnya bila dibandingkan luas wilayah daerah itu sendiri. Sementara yang berkaitan dengan pembobotan luas wilayah, semestinya mempertimbangkan kondisi luas perairan dan luas daratan. Khusus wilayah perairan perlu memperhatikan jumlah dan sebaran pulau, sedangkan wilayah daratan perlu dikaji karakteristik lahan (kering, basah, rawa dan sungai-sungai). Pertimbangan lain adalah landasan hukum yang kuat untuk luas wilayah laut daerah karena belum ada data yang dipublikasi oleh instansi berwenang sebagai data perhitungan DAU.
5. Makalah yang dibuat oleh Sutisna (2006)⁴³. Ia mendukung revisi:
 - a) PP No. 55 Tahun 2005, khususnya penjelasan Pasal 40 ayat (3), untuk memperhitungkan luas wilayah perairan (laut) untuk penyediaan DAU bagi daerah karena berkaitan erat dengan pengelolaan wilayah untuk melaksanakan fungsi kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi, pertumbuhan ekonomi dan menjaga lingkungan serta pengembangan infrastruktur darat dan laut, dengan mengingatkan bahwa kewenangan

⁴² Kadjatmiko dan Ismail, Tjip (2002), *Perjalanan Penetapan DAU 2002*, (hal. 118-120), dalam Sidik, Machfud et. al. (ed), (2002), *ibid.*, hal. 109-130.

⁴³ Sobar Sutisna, (2006), Kemungkinan Luas Laut sebagai Bagian dari Luas Wilayah dalam Perhitungan DAU. Workshop Nasional Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Desentralisasi Fiskal, Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia, di Jakarta, 5-6 April 2006.

mengelola wilayah laut tidak sertamerta memberikan hak eksklusif kepada daerah, tetapi hanya bersifat administratif;

- b) UU No. 33 Tahun 2004, untuk juga menunjuk lembaga/instansi yang berwenang merilis data geospasial berkenaan dengan perhitungan variabel luas wilayah dalam DAU. Merujuk Pasal 33 UU No. 33 Tahun 2004, agar menunjuk lembaga statistik / pemerintah yang berwenang menerbitkan data penghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

Menurutnya langkah persiapan untuk mendukung integrasi data luas wilayah laut dalam perhitungan DAU, telah tersedia peta kerja batas wilayah laut pengelolaan daerah yang memudahkan menghitung luasannya, dan disusun berdasarkan norma dan kaidah serta sistem geo-referensi nasional, namun demikian peta tersebut perlu diperbaharui dan dilegalisasi, agar sesuai dengan stratifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut ia mengetengahkan bahwa kemungkinan luas laut sebagai bagian dari luas wilayah dalam perhitungan DAU adalah suatu konsekwensi logis yang harus diperhitungkan secara fungsional dalam rangka keadilan dan bukan pemerataan. Formulasinya mungkin tidak sama dengan formula yang diterapkan untuk wilayah darat sehingga asas proporsional perlu menjadi perhatian, antara lain untuk aspek-aspek yang berkaitan dengan tingkat biaya pengembangan infrastruktur dan fungsi ekonomi. Ia merujuk pada Pasal 33 UU No. 33 Tahun 2004, bahwa data untuk menghitung kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal diperoleh dari lembaga statistik Pemerintah, dan/atau lembaga Pemerintah yang berwenang dalam menerbitkan data yang dapat dipertanggung-jawabkan, sehingga menurutnya peta kerja yang diproses secara kartometris sangat tepat untuk digunakan dan sesuai kebutuhan.

6. Soejono (2005)⁴⁴, menemukan internalisasi variabel-variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK), PDRB per kapita, indeks pembangunan manusia (IPM), potensi pendapatan asli daerah (PPAD), bagi hasil pajak (DBH Pajak), bagi hasil sumber daya alam (DBH SDA), dalam DAU 2004 estimasi berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, ternyata lebih mampu pemeratakan kemampuan fiskal antara kabupaten/kota

⁴⁴ Soejono, Prasetyo Indro (2005), *Evaluasi reformulasi dana alokasi umum kabupaten/kota di Indonesia*, MPKP-FEUI, hal. 61-73.

lebih baik daripada DAU 2004 yang memakai metode kebutuhan fiskal dengan variabel-variabel yang sama berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 yang lama, dengan menguji koefisien variasi dan indeks Williamson, dimana untuk nilai estimasi yang lebih kecil dibandingkan nilai sebelumnya, yang berarti lebih baik. Ia juga mendapatkan bahwa hanya variabel indeks jumlah penduduk yang punya korelasi kuat dengan DAU.

7. Brodjonegoro et. al. (2003)⁴⁵, mengemukakan dalam tulisannya bahwa, dilihat dari sisi aspek makro, akurasi dari penentuan kebutuhan fiskal dalam DAU hendaknya lebih ditingkatkan lagi melalui penetapan jalur yang jelas diantara tingkatan pemerintahan dan definisi dari tingkat minimum nasional, dimana jumlah minimum nasional dan luasnya jasa-jasa pelayanan (publik) dari tiap tingkatan pemerintahan ditentukan secara berhati-hati dan diberi target. Namun demikian, daripada hanya mengejar penentuan jumlah minimum nasional, sebaiknya dimulai dengan mengukur kebutuhan fiskal melalui jasa pelayanan yang penting untuk disediakan seperti pendidikan dan kesehatan yang dimasukkan dalam perhitungan formulasi DAU, dan memperbaharui berdasarkan observasi dari kinerja pemerintahan daerah. Serta pendapatan asli daerah netto harus ditingkatkan sehingga menaikkan jumlah total DAU dan menghindari *zero-sum game* diantara pemerintahan.

Berikut ini diberikan beberapa studi terdahulu yang menyinggung kewenangan daerah terkait luas laut atau desentralisasi kelautan namun tidak langsung membahas reformulasi DAU dan dampaknya, diantaranya:

1. Satria (2003)⁴⁶, menengahkan isu Pasal 3 dan 10 UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatur kewenangan daerah dalam pengelolaan laut, yang menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaan desentralisasi kelautan, dimana peraturan ini dianggap sebagai pintu masuk penerapan sistem *territorial use*

⁴⁵ Brodjonegoro, Bambang, Paddu, Hamid dan Sato, Motohiro (2003), *Intergovernmental Transfer and Revenue Sharing – Intergovernmental Transfer in Indonesia: Theories, Practices and Policy Recommendations*, dalam LPEM-FEUI, (2003), *Indonesia's Decentralization Policy: Problems and Policy Direction*, LPEM-FEUI and Asian Public Policy Program, Hitotsubashi University, Session 4-2, hal. 345-409.

⁴⁶ Satria, Arif, (2003), *Desentralisasi Kelautan: Evaluasi dan Proyeksi*, dalam buku Otonomi Daerah: Evaluasi dan Proyeksi, Piliang, Indra J., et. al. (2003), Divisi Kajian Demokrasi Lokal, Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership for Governance reform in Indonesia, hal 303-310.

right dan *community based management*. Pada kenyataannya desentralisasi kelautan belum dijalankan dengan baik, karena tidak adanya sosialisasi, salah tafsir, dan belum adanya peraturan pemerintah dan produk hukum yang mengatur implementasi desentralisasi kelautan, termasuk rendahnya *capacity building* pemerintahan daerah, ketidak-harmonisan antar wilayah/koordinasi, dan lemahnya representasi nelayan.

2. Rais (2005)⁴⁷, mengetengahkan bahwa pada saat Indonesia merdeka, kedaulatan wilayah laut masih mengikuti “*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939*” (Ordonansi Laut Territorial dan Lingkungan Maritim 1939), selebar 3 mil dari sekeliling pulau, diluarnya adalah laut lepas. Oleh karena itu Pemerintah Republik Indonesia di bawah Perdana Menteri Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 menyatakan Deklarasi yang menjadi awal dari konsep keutuhan nasional dengan Wawasan Nusantara sebagai konsep politis dan ideologis, dengan laut sebagai perekat bangsa: bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan semua laut di antara pulau-pulainya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari daratannya dan menjadi satu kesatuan wilayah nasional, dan lebar laut wilayah di mana negara mempunyai kedaulatan penuh menjadi 12 mil laut. Deklarasi ini kemudian dituang dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 4 Tahun 1960.

Semenjak Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 dengan UU No. 17 Tahun 1985, maka rezim wilayah laut Indonesia terdiri dari (1) Laut Teritorial (Laut Wilayah), (2) Perairan Kepulauan (Nusantara), (3) Perairan Pedalaman, (4) Zona Tambahan, (5) Zona Ekonomi Eksklusif, dan (6) Landas Kontinen. UNCLOS 1982 berlaku efektif 16 November 1994 dan penentuan landas kontinen berlangsung sampai dengan 16 November 2004. Sebelumnya juga diterbitkan UU No. 5 Tahun 1983 yang mengatur tentang pemanfaatan Zona Ekonomi Eksklusif.

Penetapan kewenangan daerah di wilayah laut selebar 12 mil laut tidak diartikan sebagai pengkaplingan laut, tetapi lebih kepada penetapan batas

⁴⁷ Rais, Jacob (2003), *Pedoman Penentuan Batas Wilayah Laut Kewenangan Daerah Menurut UU No. 22 Tahun 1999*, Seri Reformasi Hukum Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 – 2003, University of Rhode Island dan USAID, hal. 1-4, 32.

kewenangan dalam melaksanakan desentralisasi untuk pengelolaan, antara lain untuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, pengaturan pemanfaatan, penataan ruang dan penegakan hukum dalam wilayah laut tersebut. Dengan demikian tidak ada istilah laut Provinsi, laut Kabupaten/Kota. Pada dasarnya perairan nasional adalah Laut Negara, sebagaimana di darat ada Tanah Negara. Untuk mengelola sumberdaya darat dan laut yang begitu luas adalah sangat bijaksana jika kewenangan Pusat dilimpahkan sebagian kepada administrator pemerintahan di Daerah. Peranan Pemerintah Pusat adalah menyiapkan prinsip-prinsip strategis secara nasional untuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dari rusaknya serta menyiapkan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pesisir dan laut yang berkelanjutan, semacam *Coastal Management Act* di berbagai negara maju.

3. Iswara (2009)⁴⁸, mengajukan studi mengenai penentuan batas kewenangan laut dan luas kewenangan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan keunikan penarikan batas garis dasar laut yang dapat dipergunakan untuk menghitung luas wilayah laut sebagai salah satu komponen dalam penghitungan DAU.

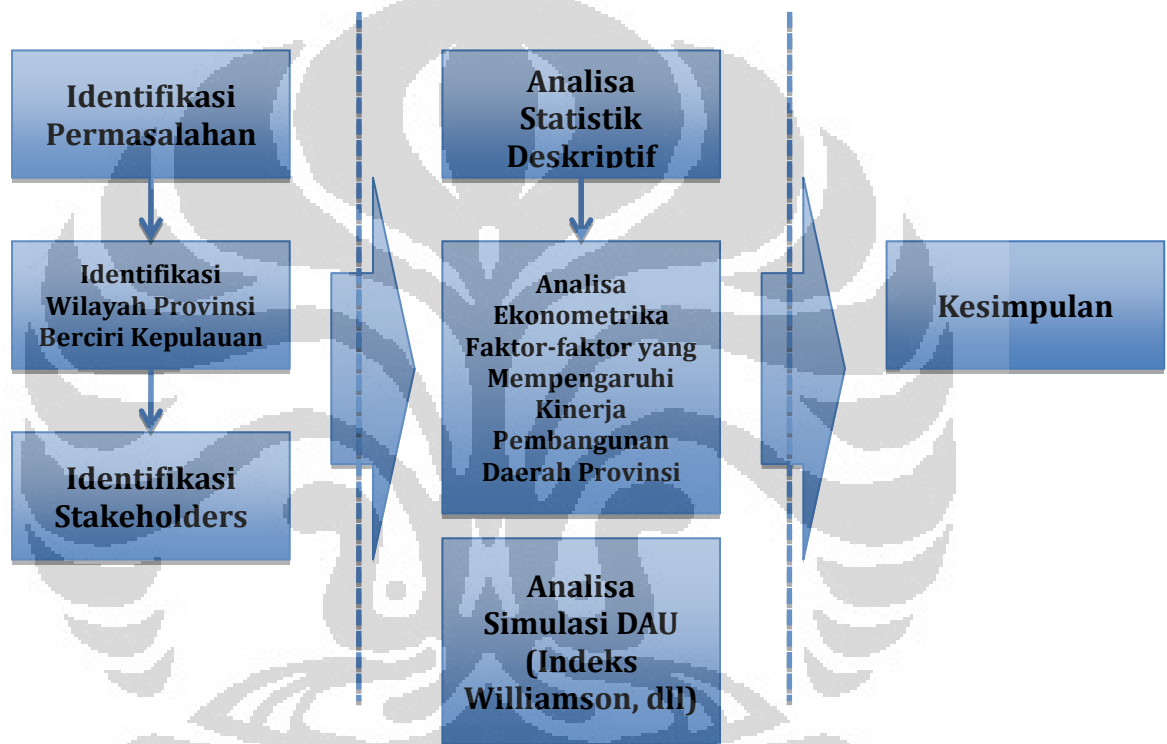
⁴⁸ Iswara, IB Yoga (2009), *Penentuan Batas Kewenangan Laut dan Luas Kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Institut Teknologi Bandung.

BAB 3

METODOLOGI

3.1 Kerangka Pikir Konseptual

Studi tentang analisa dampak perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) – studi kasus provinsi berciri kepulauan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Pikir Konseptual

3.2 Metode Analisa

Beberapa metode analisa yang digunakan dalam mengkaji secara lebih mendalam tentang analisa dampak perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) – studi kasus provinsi kepulauan ini antara lain: statistik deskriptif, model ekonometrika berupa Data Panel, dan indikator pemerataan / ketimpangan / kesenjangan. Beberapa metode yang digunakan tersebut secara rinci disajikan dalam penjelasan berikut dibawah ini:

3.2.1 Analisa Statistik Deskriptif

Analisa deskriptif digunakan untuk menjelaskan berbagai kondisi dan perkembangan dari waktu ke waktu dan dimutakhirkan dari berbagai indikator yang nantinya diperlukan, khususnya indikator karakteristik daerah dan kinerja pembangunan dari daerah (pemerintahan daerah). Deskripsi nantinya dapat ditampilkan baik dalam bentuk tabel, gambar/grafik, maupun penjelasan umum sehingga memudahkan pembaca umum dalam memahami dari data dan/atau informasi yang diberikan dalam tulisan. Analisa dapat dilakukan untuk statistik pemusatan (antara lain berupa rata-rata, nilai minimal, dan nilai maksimal), persebaran (berupa standar deviasi, dan lain-lain), dan arah perkembangan (trend positif, negatif ataupun konstan). Analisa ini juga digunakan untuk membandingkan karakteristik daerah dan kinerja pembangunan daerah antara provinsi berciri kepulauan dan provinsi lainnya di Indonesia.

3.2.2 Metode Ekonometrika: Data Panel

Dengan melihat arah penggunaan alokasi DAU yang bersifat *block-grant*, dan indikator kinerja Pemerintahan Daerah, yang akan diterapkan untuk seluruh daerah (dalam studi ini yang dimaksud dengan daerah dibatasi pada tingkatan Provinsi) dan karena jumlah Provinsi relatif tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu selama periode tahun (2005) hingga 2010, maka model ekonometrika yang tepat digunakan adalah model analisa regresi data panel (*pooled data*) yang dilakukan untuk seluruh daerah (provinsi) dan semua tahun.

Model umum yang digunakan untuk menganalisa dampak dari alokasi DAU pada kinerja pembangunan daerah adalah:

$$Y_r = f(DAU_r, DPROV, X_1, X_2, \dots) \quad (3.1)$$

dimana: Y_r : Indikator kinerja pembangunan daerah
 DAU_r : Alokasi DAU di suatu bidang di suatu daerah
 $DPROV$: *Dummy* Provinsi Berciri Kepulauan (1, non kepulauan=0)
 X_1, X_2, \dots : Variabel lain yang diduga ikut mempengaruhi Y_r
 r : Daerah Provinsi

Model analisa regresi dengan menggunakan data panel (*pooled data*) merupakan salah satu bentuk analisa regresi *Ordinary Least Square (OLS)*. Oleh karena itu, juga diperlukan berbagai asumsi dasar yang harus dipenuhi dalam model regresi klasik agar parameter menjadi *Best Liner Unbiased Estimator (BLUE)*, yakni memenuhi hal-hal sebagai berikut:

a. Rata-rata kesalahan sama dengan nol, $E(e_i/X_i = 0)$ (3.2)

b. Homoskedastis atau *variance error* pada setiap observasi sama, ditulis

$$\text{var} \left(\frac{e_i}{X_i} \right) = E(e_i - E(e_i)/X_i)^2 \quad (3.3)$$

secara simbol : $\text{var} \left(\frac{e_i}{X_i} \right) = E \left(\frac{e_i^2}{X_i} \right)$ (3.4)

karena asumsi huruf a diatas.

c. Non-otokorelasi (*non-autocorrelation*) antara *error* satu observasi dengan *error* lainnya,

$$\text{Cov}(u_i, u_j/X_i, X_j) = E(u_i - E(u_i)/X_i)(u_j - E(u_j)/X_j) \quad (3.5)$$

atau $\text{Cov}(u_i, u_j/X_i, X_j) = E(u_i/X_i)(u_j/X_j) = 0$ (3.6)

d. *Error* terdistribusi normal : $u_i \sim N(0, \sigma^2)$

e. Nilai variable bebas untuk masing-masing observasi berbeda. Jika semua nilai X sama, maka $X_i = X$ sehingga tidak memungkinkan mengestimasi *slope* persamaan regresi.

f. Tidak terdapat korelasi antara *error* dengan variabel bebas atau *covariance* antara *error* dan X sama dengan nol,

$$\text{Cov}(u_i, X_i) = 0 \quad (3.7)$$

Jika X_i dan u_i berkorelasi, maka jika nilai X_i berubah maka nilai u_i ikut berubah. Hal ini akan menyebabkan kesulitan melihat pengaruh masing-masing X_i dan u_i terhadap Y_r karena keduanya berkorelasi.

g. Setiap variabel bebas bersifat independen atau tidak ada hubungan linier antara satu dengan lainnya (*no perfect multi-collinearity*).

h. Model terspesifikasi secara tepat.

Untuk memperbaiki *standard error* dalam estimasi model regresi digunakan *heteroscedasticity* and *autocorrelation standard error* atau lebih sering disebut dengan Newey-West HAC. Newey-West HAC tidak hanya digunakan untuk *sample* yang kecil, tetapi juga dapat digunakan untuk *sample* yang besar (Gujarati, 2003, hal. 484-487). Newey-West HAC diharapkan dapat memperbaiki *standard error* terutama pada situasi terjadi *heteroscedasticity* yang serius, dan mengoreksi *standard error* pada kondisi *autocorrelation*.

Selanjutnya sebelum dianalisis model dispesifikasikan harus diuji dan jika perlu dilakukan *treatment* agar tidak terjadi penyimpangan terhadap asumsi dasar CLRM, sehingga parameter yang ada bersifat BLUE. Beberapa pengujian yang perlu dilakukan antara lain: Uji Normalitas, Uji Spesifikasi model, Uji Multi-collinearity, Uji *Heteroscedasticity*, dan Uji *Autocorrelation*.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah pengujian untuk mengetahui normalitas dari *error term*. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah *error term* memiliki distribusi normal atau tidak. Apabila *error term* memiliki distribusi normal, maka uji t dan uji F dapat dilakukan, sedangkan apabila asumsi normalitas tidak terpenuhi maka inferensi tidak dapat dilakukan dengan *t-statistic* (statistik t) dan *F value* (Gujarati, 2002, hal. 146-150).

Uji normalitas dapat dilakukan dengan Jargue-Bera (JB) Test of Normality. Prosedur pengujiannya sebagai berikut:

- 1) Tentukan H_0 : *Error* terdistribusi normal
- 2) Tentukan H_1 : *Error* tidak terdistribusi normal
- 3) Bandingkan antara *JB test* dengan U^2

2. Uji Spesifikasi Model

Uji Spesifikasi Model ialah suatu pengujian untuk melihat apakah spesifikasi model sudah tepat. Uji Spesifikasi Model bertujuan untuk menghindari *specification error* atau *miss specification* dalam model yang diestimasi. Pengujian yang biasa dilakukan adalah *Ramsey Test* atau

dikenal dengan Uji RESET (*regression specification error test*). Prosedur pengujian RESET sebagai berikut:

- 1) Tentukan $H_0 : J\theta(N/\sigma)^2$
- 2) Tentukan $H_1 : JI(N/\sigma)^2$
- 3) Bandingkan antara F_{test} dengan F_{tabel}

3. Uji Multi-collinearity / Multikolinieritas

Uji Multicollinearity atau multikolinieritas ini untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas berkaitan dengan variabel bebas lainnya. Asumsi dalam OLS sendiri adalah tidak adanya hubungan antar variabel bebas. Apabila asumsi ini dilanggar, maka akibatnya adalah sulit menemukan pendugaan yang diinginkan. Dan apabila diantara variabel-variabel bebas saling berkorelasi sempurna maka disebut multikolinieritas sempurna (*perfect multicollinearity*).

Multi-collinearity dideteksi dengan memperhatikan hasil *t-statistic* hasil regresi. Jika banyak koefisien parameter yang menjadi penduga menunjukkan hasil tidak signifikan padahal R^2 -nya tinggi, maka hal ini mengindikasikan adanya gejala *multi-collinearity*. Atau dapat juga dilakukan dengan mengecek tingkat *correlation* antar variabel bebas. Apabila nilai korelasi antar variabelnya cukup tinggi (yakni $>0,8$), maka diindikasikan ada hubungan antar variabel tersebut, sehingga akhirnya dapat diduga terjadi *multi-collinearity*.

Treatment termudah untuk pelanggaran ini adalah dengan menghilangkan salah satu variabel yang tidak signifikan tersebut. Namun hal ini seringkali tidak dipergunakan karena akan menciptakan *bias* parameter yang spesifikasi pada model. Diharapkan *bias* ini cukup kecil sehingga *bias* penghilangan variabel ini tidak terlalu besar. Cara lain adalah mencari variabel *instrumental* yang berkorelasi dengan variabel *dependent* (terikat), namun tidak berkorelasi dengan variabel bebas lainnya. Cara ini cukup rumit mengingat tidak ada informasi tentang tipe variabel tersebut.

Data panel memiliki keunggulan secara teoritis, yakni diantaranya adalah terbebas dari masalah multikolinearitas, Gujarati (2004), Baltagi (2005), Hsiao (2005).

4. Uji *Heteroscedasticity* / Heteroskedastisitas

Salah satu asumsi dalam model regresi linier klasik adalah varian gangguan, (ε_i) (*error term*) konstan untuk setiap observasi dan homoskedastisitas. Secara simbol, dituliskan :

$$E(\varepsilon_i^2 = \sigma^2) \text{ dimana } i = 1, 2, 3 \dots, n. \quad (3.8)$$

Jika varian gangguan tidak konstan untuk setiap observasi, $E(\varepsilon_i^2 = \sigma^2)$ maka dikatakan heteroskedastisitas, Gujarati (2004). Dalam heteroskedastisitas, varian gangguan dapat mempunyai nilai yang berbeda untuk tiap observasi. Jika terdapat heteroskedastisitas, maka pengaruhnya adalah:

- a. Heteroskedastisitas menghasilkan estimasi parameter yang tidak bias namun tidak lagi BLUE.

Misal apabila ada heteroskedastisitas dengan $E(\varepsilon_i^2 = \sigma^2)$ pada persamaan

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \mu_i, \quad (3.9)$$

dan

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} = \frac{n \sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \quad (3.10)$$

maka

$$\text{var}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sum x_i^2 \sigma_i^2}{(\sum x_i^2)^2} \quad (3.11)$$

Jika tidak ada heteroskedastisitas maka:

$$\text{var}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{(\sum x_i^2)} \quad (3.12)$$

Walaupun terdapat heteroskedastisitas, $\hat{\beta}_2$ tetap linier dan tidak *bias* karena parameter tidak *bias* atau *bias*, tidak berhubungan dengan u_i yang homoskedastis atau tidak. Namun $\hat{\beta}_2$ tidak dapat dikata *best* atau efisien karena nilai variannya tidak minimum.

- b. Varian estimasi $\hat{\beta}_2$, $var(\hat{\beta}_2) = \frac{\sum x_i^2 \sigma_i^2}{(\sum x_i^2)^2}$, dalam persamaan (3.11) akan menjadi *bias* terhadap varian sebenarnya $var(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{(\sum x_i^2)}$, dalam persamaan (3.12). Namun *bias* ini tidak dapat ditentukan apakah *underestimate* atau *overestimate* karena bergantung pada hubungan antara σ_i^2 dengan x_i^2 . Akibat dari hal ini adalah *standard error* dan nilai interval keyakinan (*confidence interval level*) akan *bias*, sehingga pada akhirnya tidak dapat memanfaatkan *t-statistic* dan *F-value* karena akan menimbulkan *misleading*.

Cara mendeteksi heteroskedastisitas diantaranya dengan menggunakan Uji *Goldfeld-Quant*, Uji *Park*, Uji *Glejser* dan Uji *White-Heteroskedasticity*.

Pada analisis data panel, apabila terdapat masalah heteroskedastisitas, penanggulangannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode *weighting least square* (WLS), yaitu seluruh variabel penelitian dilakukan pembobotan (*weighted*) dengan cara membaginya dengan nilai standar error (σ) dari variabel independen, Gujarati (2004).

5. Uji *Autocorrelation* / Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan yang terjadi antara anggota-anggota serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Uji *Autocorrelation* didefinisikan sebagai adanya korelasi gangguan suatu observasi dengan gangguan observasi lainnya. Secara simbol dituliskan:

$$E(u_i, u_j) \neq 0 \text{ dimana } i \neq j. \quad (3.13)$$

Autocorrelation biasanya muncul pada data *time series*, karena pada tipe data ini data diurutkan berdasarkan waktu dan biasanya terjadi *spillover effects/inertia* dari satu periode ke periode lainnya. Masalah ini timbul karena *residual* (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Adanya *autocorrelation* akan membuat estimasi tetap linier dan tidak bias namun tidak lagi efisien/BLUE (variannya tidak minimum). Hasil lain adalah residual varians, $\hat{\sigma}^2 = \frac{\sum u^2}{n-2}$ akan *underestimate* dibanding σ^2 yang sebenarnya. Jika $\hat{\sigma}^2$ tidak *underestimate*, maka $var(\hat{\beta})$ mungkin akan *underestimate*. Selain itu, interval keyakinan

akan semakin lebar, menyebabkan analisa untuk menerima hipotesa H_0 (koefisien tidak signifikan). Selain itu R^2 juga akan *overestimate*. Lebih lanjut *t-statistic* dan *F-ratio* akan tidak *valid* yang jika digunakan akan menyebabkan kesimpulan yang salah.

Cara mendeteksi adanya *autocorrelation* dilakukan dengan *Durbin Watson test* (*DW test*). DW statistik dihitung dengan, Gujarati (2004) :

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{u}_t - \hat{u}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \hat{u}_t^2} = 2(1 - \hat{\rho}) \quad (3.14)$$

$$= 2(1 - \rho) \quad (3.15)$$

$$\text{dimana, } \rho = \frac{\sum \hat{u}_t \hat{u}_{t-1}}{\sum \hat{u}_t^2} \quad (3.16)$$

Nilai ρ berkisar antara -1 hingga 1, ($-1 \leq \rho \leq 1$), sehingga kisaran nilai DW statistik adalah $0 \leq d \leq 4$,

- jika $\rho = 0, d = 2$ menandakan tak ada *autocorrelation* di dalam model;
- jika $\rho = 1, d = 0$ terdapat korelasi positif sempurna;
- jika $\rho = -1, d = 4$ terdapat korelasi negatif sempurna.

Kemudian *d value* dibandingkan dengan nilai kritis bawah dan atas d_L (*DW lower*) dan d_U (*DW upper*) dari tabel *durbin-watson* (*DW table*) pada tingkat keyakinan tertentu (Gujarati, 2004), dengan hipotesa:

H_0 : tidak ada autokorelasi positif;

H_{0*} : tidak ada autokorelasi negatif.

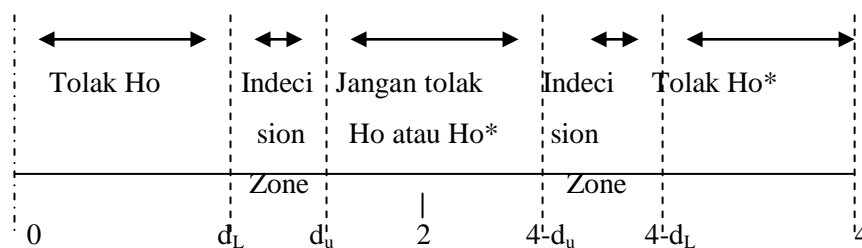
Tabel 3.1

Uji statistik Durbin-Watson d

Nilai statistik d	Hasil
$0 < d < d_L$	Menolak hipotesis nol, ada autokorelasi positif
$d_L \leq d \leq d_U$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi positif / negative
$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$	Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan
$4 - d_L \leq d \leq 4$	Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi negatif

Sumber : Widarjono, 2007, tabel 8.1 hal 160.

Sementara gambaran zonasi penerimaan dan penolakan H_0 atau H_0^* disajikan dibawah ini.



Prosedur Pengujian Hipotesis - t test

β_2 (*slope* persamaan populasi) perlu di tes untuk mengetahui hubungan antara X dan Y. Bila $\beta_2 = 0$, maka variabel X dan Y tidak memiliki hubungan apa-apa, namun bila $\beta_2 \neq 0$, maka variabel X *bias* memiliki hubungan yang positif atau negatif (tergantung dari nilai β_2 yang diperoleh) dengan variabel Y.

Tahapan pengujian sebagai berikut:

1. Desain hipotesis

$$\text{Tipe 1} \rightarrow H_0: \beta_2 = k, \quad H_1: \beta_2 \neq k$$

$$\text{Tipe 2} \rightarrow H_0: \beta_2 \leq k, \quad H_1: \beta_2 > k$$

$$\text{Tipe 3} \rightarrow H_0: \beta_2 \geq k, \quad H_1: \beta_2 < k$$

$k = \text{bias}$ bernilai 0 atau bilangan konstanta lainnya.

2. Kriteria

$$\text{Tipe 1} \rightarrow \text{tolak } H_0 \text{ jika } |t_{hit}| > t_{\alpha/2, v}$$

$$\text{Tipe 2} \rightarrow \text{tolak } H_0 \text{ jika } t_{hit} > t_{\alpha/2, v}$$

$$\text{Tipe 3} \rightarrow \text{tolak } H_0 \text{ jika } t_{hit} < t_{\alpha/2, v}$$

Dimana $v = n - 2$

3. Statistika hitung

$$t = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{Se(\hat{\beta}_2)} \quad (3.17)$$

4. Kesimpulan : terima atau tolak H_0

Prosedur Pengujian *Goodness of Fit*: Uji F dan Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi dari total variasi Y yang dijelaskan dalam model regresi, atau apakah garis regresi linear sesuai dengan

data observasi. Koefisien determinasi adalah ukuran yang menjelaskan besaran variasi regresi akibat perubahan variasi regressor. Dengan kata lain R^2 menunjukkan berapa bagian dari total variasi dalam *dependent variable*-nya (Y) yang *bias* dijelaskan oleh hubungan antara *dependent variable* (Y) dengan *independent variable*-nya (X). Jumlah kuadrat variasi total (*sum of square - total - SST*) terdiri dari jumlah kuadrat variasi yang dijelaskan (*sum of square -explained - SSE*) dan jumlah kuadrat variasi yang tidak dijelaskan (*sum of square -residual - SSR*). Dirumuskan sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{SSE}{SST} = 1 - \frac{SSR}{SST} = \frac{[n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)]^2}{[n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2][n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2]} = \frac{(\sum x_i y_i)^2}{(\sum x_i^2)(\sum y_i^2)} \quad (3.18)$$

Uji F dilakukan dengan melihat pengaruh variabel-variabel independen (*independent variables*) terhadap variabel dependen (*dependent variable*) secara keseluruhan. Uji F disebut juga Uji *Goodness of Fit*, atau uji untuk melihat kehandalan model regresi yang dibangun. Untuk melakukan Uji F, digunakan hipotesis sebagai berikut:

$$\mu_0 \cap \mu_1 \cap \mu_2 \cap \mu_3 \cap \mu_4$$

$$H_0: \sum_{i=1}^n x_1 \cap x_2 \cap x_3 \cap x_4$$

Tolak H_0 jika $F_{\text{Hitung}} > F_{\text{tabel}}$. Artinya secara bersama-sama *variable independent* dapat menjelaskan perubahan *variable dependent*.

3.2.3 Indikator Pemerataan/Ketimpangan/Kesenjangan

Sesuai dengan tujuan pengalokasian DAU sebagai salah satu alat pemerataan kemampuan fiskal antar daerah, maka kinerja formulasi harus memperhitungkan indikator pemerataan. Secara teori, kinerja pemerataan dapat diukur dengan menggunakan beberapa indeks, antara lain koefisien variasi, indeks Theil, indeks Williamson. Di bawah ini disajikan rumusan singkat masing-masing indeks tersebut.

a. Koefisien Variasi (KV)

$$KV = \left(\frac{\delta_y}{\mu_y} \right) = \left(\frac{\text{Standar Deviasi}}{\text{Rata-rata}} \right) \quad (3.19)$$

b. Indeks Theil (T_i)

$$T_i = \sum_i \sum_j \left(\frac{Y_{ij}}{Y} \right) \ln \left(\frac{\bar{Y}_{ij}}{\bar{Y}} \right) \text{ atau } T_j = \sum_j \left(\frac{Y_j}{Y} \right) \ln \left(\frac{\bar{Y}_j}{\bar{Y}} \right); \text{ (provinsi } j) \quad (3.20)$$

dimana, Y_{ij} : nilai variabel Y di kabupaten/kota i , provinsi j ,

Y : total nilai variabel Y nasional ($\sum \sum Y_{ij}$) atau ($\sum Y_j$)

\bar{Y}_{ij} : rata-rata nilai variabel Y di kabupaten/kota i , provinsi j

\bar{Y} : rata-rata nilai variabel Y nasional

n_{ij} : jumlah penduduk di kabupaten/kota i , provinsi j (atau n_j)

n : jumlah total penduduk nasional

Indeks Theil dapat didekomposisi menjadi dua komponen yaitu intra-kelompok (*within*) dan antar-kelompok (*between*), yaitu:

Total ketidakmerataan = ketidakmerataan kabupaten kota dalam satu provinsi (*within*) + ketidakmerataan antar provinsi (*between*)

$$T = \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) T_i + \sum_i \left(\frac{Y_i}{Y} \right) \ln \left(\frac{\bar{Y}_i}{\bar{Y}} \right) = T_{\text{within}} + T_{\text{between}} \quad (3.21)$$

dimana, Y_i : total nilai variabel Y di daerah i , dan

\bar{Y}_i : rata-rata nilai variabel Y di daerah i .

c. Indeks Williamson (V_w)

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}} \quad (3.22)$$

dimana, f_i : jumlah penduduk daerah ke i

n : jumlah penduduk nasional

y_i : variabel y per kapita daerah ke i

\bar{y} : variabel y per kapita nasional

Dari ketiga indikator pemerataan tersebut, dengan melihat cakupan dari pelaksanaan studi ini yang berupa tingkatan provinsi, maka indikator yang berupa Theil Index tidak akan digunakan dalam studi ini. Sehingga, studi ini akan menggunakan indikator Koefisien Variasi dan Indeks Williamson sebagai indikator untuk pemerataan akibat/dampak dari perubahan formulasi dalam penghitungan DAU untuk tingkatan provinsi.

3.3. Beberapa Pemikiran Terkait Simulasi Dana Alokasi Umum

Hal mendasar yang mendapatkan perhatian dalam kaitannya dengan Dana Perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum adalah, bahwa alokasi DAU harus ditujukan untuk mencapai pemerataan pembangunan antar daerah. Oleh karenanya, dalam alokasi DAU yang paling penting adalah membuat indeks pemerataan alokasi DAU serta mempertimbangkan indeks ini dari tahun ke tahun, sedemikian sehingga semakin menunjukkan pemerataan antar daerah. Selain faktor variabel-variabel penyusun DAU, faktor bobot setiap variabel juga menentukan tingkat pemerataan dari formula DAU yang dibuat.

Seperti yang digambarkan dalam penjelasan Pasal 28 dari UU No. 33 Tahun 2004, variabel kebutuhan fiskal adalah jumlah penduduk, wilayah, indeks kemahalan konstruksi (IKK), produk domestik regional bruto per kapita (PDRB per Kapita), dan indeks pembangunan manusia (IPM).⁴⁹ Sementara variabel yang ada mungkin telah menggambarkan dengan baik sisi kebutuhan fiskal dari DAU, terdapat kemungkinan untuk mempertimbangkan juga variabel yang lain yang juga dapat merefleksikan kebutuhan fiskal dan mungkin dapat berperan lebih baik dalam simulasi.

Variabel jumlah penduduk yang masih diukur dengan menggunakan data aktual tahun sebelumnya, seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan data proyeksi penduduk tahun dimana DAU akan dialokasikan. Untuk luas wilayah, masih diukur dengan hanya mencakup luas daratan saja, dan dalam hal ini bisa dipertimbangkan menjadi luas darat dan wilayah pantai sejauh sesuai dengan

⁴⁹ Draft Rancangan Revisi Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, (versi Januari 2011), dalam Pasal 33 dan berikut penjelasannya mencantumkan mengenai variabel kebutuhan fiskal daerah, berupa indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks pembangunan manusia dan indeks kemahalan konstruksi, yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN.

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk variabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), seharusnya juga diukur dengan menggunakan IKK tahun terakhir ketika DAU dihitung. Variabel PDRB per kapita, yang merupakan variabel baru dalam perhitungan DAU, sebaiknya diukur dengan menggunakan data tahun terakhir, dan merupakan *inverse*. Sedangkan variabel IPM, yang juga merupakan variabel baru dalam formula DAU juga sebaiknya diukur dengan menggunakan data IPM tahun terakhir, dan merupakan *inverse*. Penggunaan IPM memiliki kendala yaitu bahwa data IPM tidak di-*up date* setiap tahun, namun masih setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Terdapat beberapa perbaikan agar ketepatan pendekatan variabel yang dipilih dalam UU No. 33 Tahun 2004, diantaranya yang berhubungan dengan:

- a. Indeks kemahalan konstruksi (IKK). Indeks ini dikembangkan untuk lebih dapat menggambarkan kesulitan geografis. Namun, terdapat sedikit kelemahan terhadap beban dari bahan konstruksi manufaktur dan yang non-manufaktur. Karena bahan manufaktur akan lebih sensitif terhadap kesulitan geografis dan juga lebih dominan dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dapat diusulkan kepada BPS untuk memberikan bobot yang berbeda kepada dua jenis bahan tersebut. Bahan manufaktur seharusnya mendapat bobot yang lebih tinggi karena adanya sensitivitas harga dan permintaan yang tinggi. Dengan melakukan perbaikan ini, IKK akan dapat berperan lebih baik di masa depan sebagai indikator untuk kesulitan geografis.
- b. PDRB per kapita. Dalam UU itu sendiri, tidak jelas apakah rumus tersebut harus menggunakan total PDRB per kapita atau PDRB non-migas per kapita. Dengan tujuan untuk menyeimbangkan perkembangan daerah di seluruh Indonesia, diusulkan untuk menggunakan PDRB non-migas per kapita. Hal ini patut dipertimbangkan oleh karena, apabila tidak, daerah dengan PDRB per kapita tinggi seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Papua akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam perhitungan rumus. Menggunakan PDRB itu sendiri sebagai indikator kegiatan dan potensi ekonomi masih menoreh kritikan tajam karena variabel yang dimaksud hanya terkait dengan masalah output ekonomi secara eksklusif

tanpa kaitan yang jelas dengan masalah kesejahteraan. Masyarakat umum biasanya tidak terlalu peduli terhadap PDRB per kapita dan lebih memikirkan kehidupan sederhana keseharian mereka. Untuk membuat kaitan antara potensi ekonomi daerah dengan kesejahteraan masyarakat daerah, seharusnya terdapat variabel alternatif terhadap PDRB per kapita.

- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks ini dikenal sebagai indikator yang menggambarkan kesejahteraan penduduk secara umum dan dihitung berdasarkan variabel pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Seperti yang diindikasikan oleh rancangan UU baru bahwa IPM akan digunakan untuk menggambarkan kualitas dari pelayanan jasa daerah untuk pendidikan dan kesehatan. Kemudian menghubungkan penilaian kualitas infrastruktur daerah ini yang mempengaruhi kualitas dalam pelayanan jasa daerah. Namun, indeks tersebut hanya secara implisit berhubungan dengan infrastruktur melalui ketersediaan bangunan sekolah yang mempengaruhi rasio murid sekolah (*school enrollment ratio*) atau terhadap ketersediaan unit pelayanan kesehatan yang mempengaruhi ekspektasi hidup pada saat kelahiran. Tidak ada indikator eksplisit mengenai infrastruktur dasar itu sendiri, sementara DAU seharusnya menolong pemerintahan daerah dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar di setiap masing-masing daerah seperti penyediaan dan distribusi air bersih, energi listrik dan sanitasi.

Beberapa isu yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal (*expenditure variable issues*) ke depan juga berkaitan dengan kesepakatan tentang periode data yang dipakai. Apakah data yang digunakan adalah data terakhir, data proyeksi, atau data yang di-*update* lebih dari 1 tahun. Selain isu tentang periodisasi dari data yang digunakan, terdapat juga isu tentang variabel dan pengukurannya. Perlunya memasukkan luas wilayah pantai/laut dalam pengukuran luas wilayah juga perlu dipertimbangkan karena lebih menggambarkan kebutuhan fiskal daerah yang nantinya dikeluarkan daerah untuk melakukan pelayanan publik, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di daerah pantai/pesisir/lautan. Bahkan beberapa daerah memiliki konsentrasi penduduk yang tinggal di daerah pantai cukup tinggi. Hal ini yang juga memotivasi provinsi berciri kepulauan untuk berkoordinasi mewakili kepentingan daerahnya dalam Badan Kerjasama Daerah Kepulauan.

Pengamatan dan pemantauan secara teratur akan konsistensi data IKK juga diperlukan guna ketepatan alokasi yang dilakukan. Hal tersebut dikarenakan IKK memiliki nilai bobot yang cukup tinggi dalam penghitungan kebutuhan fiskal daerah, dimana untuk periode 2003 sampai dengan 2005 berbobot 40%, dan untuk tahun 2006 sampai dengan 2011 sebesar 30%. Sehingga, apabila terdapat ketidak-konsistenan data tersebut, maka hasilnya akan sangat mempengaruhi keakuratan dalam penentuan kebutuhan fiskal untuk setiap daerah. Terkait dengan penggunaan apakah PDRB per kapita ataukah PDRB juga dapat menjadi masalah tersendiri. PDRB dan PDRB per kapita memang secara umum dan sering digunakan untuk menggambarkan tentang tingkat kesejahteraan masyarakat suatu daerah.

Di UU No. 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa variabel yang digunakan adalah PDRB per kapita. Yang menjadi masalah adalah apakah PDRB per kapita tidak menghilangkan penggunaan variabel penduduk jika PDRB per kapita digunakan pada tingkat levelnya, atau memberikan efek ganda dari penggunaan variabel penduduk jika PDRB per kapita digunakan sebagai *inverse*. Selain itu, PDRB per kapita diduga juga merupakan bagian dari IPM, dimana PDRB per kapita merupakan cerminan dari daya beli masyarakat. Dalam IPM, daya beli masyarakat diukur dengan pengeluaran konsumsi yang diperoleh dari Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas). Dan seperti diketahui, pengeluaran konsumsi merupakan bagian dari perhitungan PDRB menurut pengeluaran.

Dalam proses perhitungan, kapasitas fiskal merupakan penjumlahan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Sumber Daya Alam (BHSDA), dan Bagi Hasil Pajak (BHP). Idealnya, seluruh komponen perhitungan kapasitas fiskal diberlakukan secara penuh, atau dengan kata lain diberikan bobot 100%. Namun, untuk kasus Pemerintah Provinsi, bagian dari PAD-nya khususnya Pajak Daerah Provinsi, harus dibagikan kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan. Implikasinya, penggunaan bobot PAD untuk pembagian DAU Provinsi tidak lagi secara penuh digunakan untuk menggambarkan kapasitas fiskal. Yang menjadi masalah berapakah besar bobot PAD yang digunakan dalam penentuan kapasitas fiskal Provinsi. Pertanyaan ini dipicu dengan pertimbangan bahwa tidak semua jenis PAD harus dibagikan, dan hanya pajak daerah yang

dibagihasilkan. Bahkan setiap jenis pajak daerah Provinsi memiliki persentase pembagian hasil yang berbeda-beda.

Kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dihitung berdasarkan variabel-variabel dan bobot seperti diberikan pada **Tabel 3.2** di bawah ini. Seperti terlihat dalam **Tabel 3.2** dari tahun 2001-2005, variabel jumlah penduduk dan indeks kemahalan konstruksi (IKK) memberikan bobot yang tinggi terhadap perhitungan kebutuhan fiskal. Sementara dari sisi kapasitas fiskal faktor penentunya adalah BHP dan BHSDA di samping PAD. Penentuan bobot-bobot variabel tersebut seyogyanya harus melalui kajian akademik dengan berbagai simulasi (*best result*, yaitu ditentukan berdasarkan indikator keberhasilan alokasi DAU), dan bukan *pre-determined* (yaitu ditentukan sebelumnya berdasarkan suatu pertimbangan tertentu). Dengan *pre-determined*, sampai dengan 2005 berlaku bobot 40% untuk penduduk dan IKK, dan 10% untuk luas wilayah dan kemiskinan relatif. Pada 2011 barulah dibedakan bobot antara kabupaten dan kota dengan provinsi untuk luas wilayah, termasuk untuk luas perairan.

Dengan tidak adanya lagi variabel indeks kemiskinan relatif (IKR), maka akan timbul permasalahan dalam penggabungan indikator kebutuhan fiskal dalam formula DAU. Dengan kombinasi variabel baru dan mempertimbangkan sisi politik maka bobot bisa dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu indikator kependudukan dan indikator kewilayahan. Indikator kependudukan secara pasti dapat disimpulkan mencakup indeks penduduk dan IPM. Secara pasti pula indikator kewilayahan diwakili oleh indeks luas wilayah dan IKK.

Tabel 3.2
Komponen, Variabel dan Bobot Penyusun DAU Tahun 2001-2011

No.	Komponen atau Variabel Berdasarkan Depkeu	Sumber Data	Bobot						
			2001	2002	2003	2004-2005	2006-2010	2011 Kab/kota	2011 Prov
Komponen Kebutuhan									
I. Fiskal									
a	Penduduk (IP)	BPS	0.250	0.400	0.400	0.400	0.300	0.300	0.300
b	Luas Wilayah	KMDN	0.250	0.100	0.100	0.100	0.150	0.135	0.150
b1	Darat								1.000
b2	Penambahan Luas Perairan (12 Mil prov, 4 mil kab/kota)	Bako-surtanal						0.350	0.300
c	Indeks Harga Bangunan	Bappenas	0.250	0.400					
d	Jumlah Penduduk Miskin	BPS	0.250						
e	Kemiskinan Relatif			0.100	0.100	0.100			
f	Indeks Kemahalan Konstruksi	BPS			0.400	0.400	0.300	0.300	0.300
g	PDRB Per kapita	BPS					0.150	0.165	0.150
h	Indeks Pembangunan Manusia	BPS					0.100	0.100	0.100
j	Total Belanja Rata-rata (d disesuaikan dan ditetapkan)	Daerah dan Kemkeu							
	Belanja PNSD							0.686	0.831
II. Komponen Kapasitas Fiskal									
a	PDRB SDA	BPS	0.330						
b	PDRB Industri	BPS	0.330						
c	Pekerja Produktif	BPS	0.330						
d	PAD Proyeksi	Depkeu		1.000	0.500	0.500			
e	PAD Aktual	Depkeu					1.000	0.930	0.500
f	BHP	Depkeu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.800
g	BHSDA	Depkeu		0.750	0.750	1.000	1.000	0.630	0.950
III. DAU KABUPATEN/KOTA			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
IV. ALOKASI MINIMUM			0.815	0.600	0.500	0.450	0.500		
a	Lump Sum			0.100	0.050	0.050	0.000		
b	Alokasi Dasar			0.500	0.450	0.400	0.500		0.480
V. FORMULA			0.185	0.400	0.500	0.550	0.500		

Sumber: lihat pada kolom tabel

3.4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data untuk pelaksanaan tentang dampak perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) studi kasus provinsi berciri kepulauan ini dilakukan dengan menggunakan metode *Desk Study*. *Desk Study* dilaksanakan untuk me-*review* berbagai regulasi dan kebijakan, tinjauan literatur, pengumpulan data sekunder, khususnya di provinsi berciri kepulauan. Selain regulasi dan kebijakan, *Desk Study* juga dilakukan dengan pengumpulan dan analisa terhadap data-data sekunder yang terkait dengan kinerja pembangunan daerah, khususnya provinsi berciri kepulauan.

3.5. Jenis dan Sumber Data

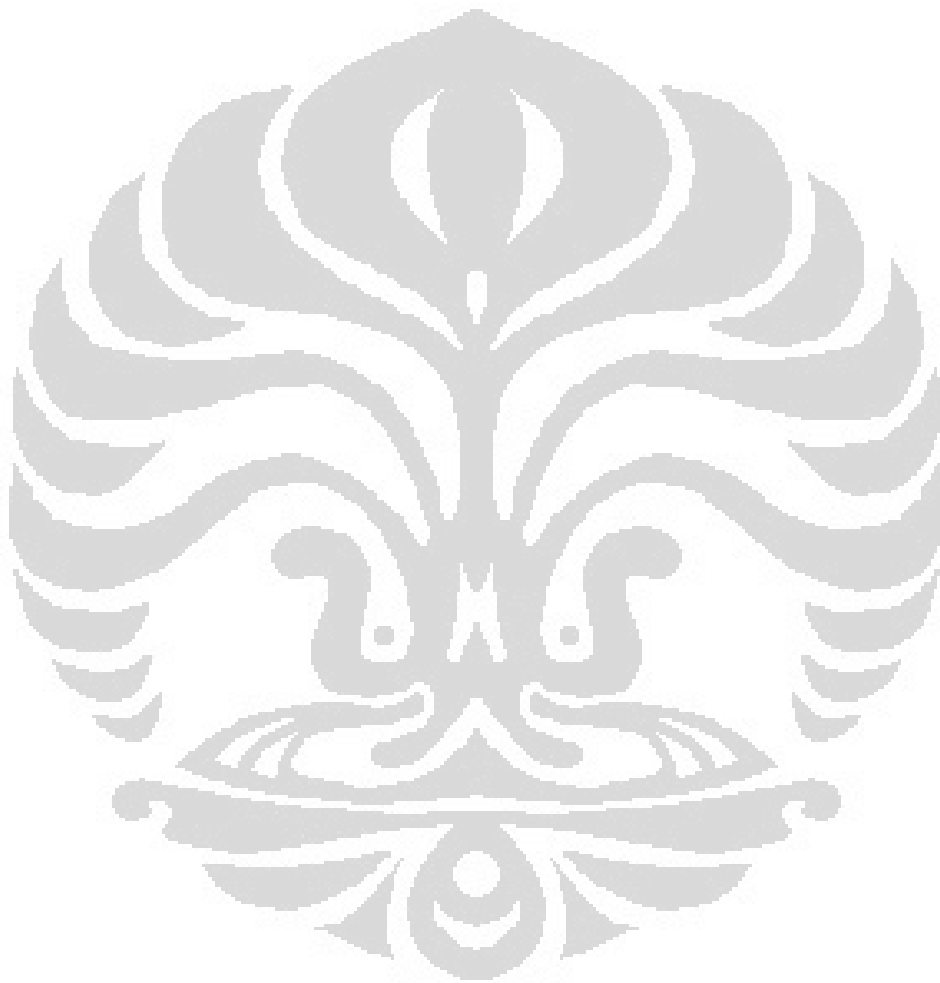
Dalam pelaksanaan kegiatan studi tentang dampak perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) studi kasus provinsi berciri kepulauan ini, dibutuhkan data-data penunjang baik data dasar maupun produk hukum yang harus digunakan sebagai dasar dan acuan. Beberapa data dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini antara lain:

Tabel 3.3
Jenis dan Sumber Data yang Dibutuhkan

No.	Jenis Data	Tahun	Sumber
1	APBN	2000-2011	Departemen Keuangan RI
2	APBD Provinsi	2000-2010	Departemen Keuangan RI
3	PDRB Provinsi	2000-2010	Badan Pusat Statistik
4	Dana Perimbangan Provinsi	2000-2011	Departemen Keuangan RI
5	Penduduk Provinsi	2000-2010	Badan Pusat Statistik
6	Luas Wilayah Provinsi (daratan dan lautan)	2000-2010	Badan Pusat Statistik, internet
7	Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi	2000-2010	Departemen Keuangan RI
8	Kemiskinan Provinsi	2000-2010	Badan Pusat Statistik
9	Kepemilikan Rumah Sendiri	2000-2010	Badan Pusat Statistik
10	Sumber Penerangan Listrik	2000-2010	Badan Pusat Statistik
10	Sanitasi Layak	2000-2010	Badan Pusat Statistik
11	Air Minum Layak	2000-2010	Badan Pusat Statistik
12	Draft revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	2011	Departemen Keuangan RI

Sumber: berbagai sumber

Mengingat tidak seluruhnya data tersedia, maka dalam pembentukan dan penyusunan data panel dilakukan pula *smoothing* untuk tahun terakhir, dan model dianalisa dalam periode data panel 2003-2010.



BAB 4

GAMBARAN UMUM

PEREKONOMIAN DAERAH PROVINSI

4.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas wilayah lautnya lebih luas dibandingkan daratan. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km² (40%) dan luas perairannya 3.257.483 km². Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, dimana setengah populasi Indonesia bermukim. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Pulau Jawa dengan luas 132.107 km², Pulau Sumatera dengan luas 473.606 km², Pulau Kalimantan dengan luas 539.460 km², Pulau Sulawesi dengan luas 189.216 km², dan Pulau Papua dengan luas 421.981 km². Sedangkan pulau-pulau lain yang tersebar di wilayah Indonesia berjumlah 17.504 pulau besar dan kecil. Saat ini wilayah administrasi Indonesia terbagi menjadi 33 Provinsi dan 497 kabupaten/ kota dimana terdapat 7 (tujuh) provinsi yang mempunyai wilayah laut yang luas yaitu, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Provinsi Bangka Belitung (Babel), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara (Malut), dan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) serta satu Kabupaten Kepulauan Seribu. Dalam penelitian ini Kabupaten Kepulauan Seribu tidak termasuk dalam fokus penelitian.

Pada tahun 2010, provinsi-provinsi kepulauan tersebut masih mempunyai kepadatan penduduk yang masih jarang dimana provinsi dengan jumlah penduduk terpadat adalah Kepulauan Riau (206 jiwa/km²) dan Provinsi dengan jumlah penduduk terjarang adalah Maluku Utara (32 jiwa/km²). Provinsi Kepulauan Riau mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi dikarenakan luas wilayah daratannya yang sedikit jika dibandingkan dengan luas lautnya yang sangat luas. Apabila diurutkan, provinsi kepulauan yang berpenduduk terjarang berturut-turut dimulai dari Provinsi Maluku Utara (32 jiwa/km²), Maluku (33 jiwa/km²), Bangka Belitung (74 jiwa/km²), Nusa Tenggara Timur (96 jiwa/km²), Sulawesi Utara (164

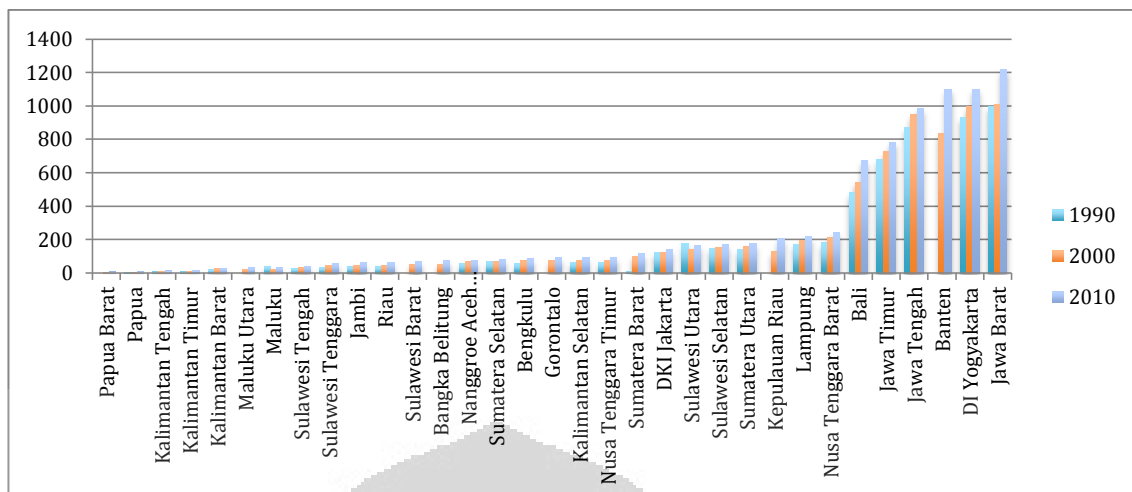
jiwa/km²), Kepulauan Riau (206 jiwa/km²), dan Nusa Tenggara Barat (242 jiwa/km²).

Kecenderungan jumlah penduduk di masing-masing provinsi kepulauan cenderung meningkat dari tahun ke tahun kecuali Sulawesi Utara dan Maluku, dikarenakan adanya pemekaran provinsi Gorontalo dan Maluku Utara. Pada tahun 2010, rata-rata kepadatan penduduk 7 provinsi kepulauan (92 jiwa/km²) lebih kecil dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk 26 provinsi lainnya (123 jiwa/km²). Sementara perubahan rata-rata kepadatan penduduk provinsi kepulauan meningkat dari 59 jiwa/km² di tahun 1990 menjadi 74 jiwa/km² di tahun 2000 dan 92 jiwa/km² di tahun 2010, atau sekitar 24%-25% dari angka kepadatan penduduk sebelumnya, lebih cepat dibandingkan rata-rata kepadatan penduduk provinsi lainnya, yang meningkat dari 92 jiwa/km² di tahun 1990 menjadi 107 jiwa/km² di tahun 2000 dan 123 jiwa/km² di tahun 2010, atau sekitar 15%-16% dari angka kepadatan penduduk sebelumnya. Hal ini menunjukkan pula pertumbuhan penduduk di provinsi berciri kepulauan yang berada disekitar 23% (2000/2010) lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk di provinsi lainnya yang berada di sekitar 15,2% (2000/2010) yang mendekati pertumbuhan penduduk secara nasional yang berada pada 15,8% untuk pertumbuhan antara tahun 2000 sampai dengan 2010. **Tabel 4.1** dibawah ini menunjukkan komposisi luas wilayah daratan dan perkembangan jumlah penduduk di masing-masing provinsi di Indonesia pada tahun 1990, 2000 dan 2010. Sementara jika diurutkan secara nasional, jumlah kepadatan penduduk provinsi berciri kepulauan ini tergambar dalam **Gambar 4.1** berikut.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Daratan, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Tahun 1990, 2000 dan 2010

Nama Provinsi	Luas Wilayah* (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)			Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)		
		1990**)	2000	2010***)	1990	2000	2010
Nanggroe Aceh Darussalam	57,956.00	3,416,156	3,929,234	4,486,570	59	68	77
Sumatera Utara	72,981.23	10,256,027	11,642,488	12,985,075	141	160	178
Sumatera Barat	42,012.89	400,207	4,248,515	4,845,998	10	101	115
Riau	87,023.66	3,303,976	3,907,763	5,543,031	38	45	64
Kepulauan Riau	8,201.72	0	1,040,207	1,685,698	0	127	206
Jambi	50,058.16	2,020,568	2,407,166	3,088,618	40	48	62
Sumatera Selatan	91,592.43	6,313,074	6,210,800	7,446,401	69	68	81
Bangka Belitung	16,424.06	0	899,968	1,223,048	0	55	74
Bengkulu	19,919.33	1,179,122	1,455,500	1,713,393	59	73	86
Lampung	34,623.80	6,017,573	6,730,751	7,596,115	174	194	219
DKI Jakarta	66,401.00	8,259,266	8,361,079	9,588,198	124	126	144
Jawa Barat	35,377.76	35,384,352	35,724,093	43,021,826	1,000	1,010	1,216
Banten	9,662.92	0	8,098,277	10,644,030	0	838	1,102
Jawa Tengah	32,800.69	28,520,643	31,223,258	32,380,687	870	952	987
DI Yogyakarta	3,133.15	2,913,054	3,121,045	3,452,390	930	996	1,102
Jawa Timur	47,799.75	32,503,991	34,765,993	37,476,011	680	727	784
Nusa Tenggara Barat	18,572.32	3,369,649	4,008,601	4,496,855	181	216	242
Nusa Tenggara Timur	48,718.10	3,268,644	3,823,154	4,679,316	67	78	96
Kalimantan Barat	147,307.00	3,229,153	4,016,353	4,393,239	22	27	30
Kalimantan Tengah	153,564.50	1,396,486	1,855,473	2,202,599	9	12	14
Kalimantan Selatan	38,744.23	2,597,572	2,984,026	3,626,119	67	77	94
Kalimantan Timur	204,534.34	1,876,663	2,451,895	3,550,586	9	12	17
Sulawesi Utara	13,851.64	2,478,119	2,000,872	2,265,937	179	144	164
Gorontalo	11,257.07	0	833,496	1,038,585	0	74	92
Sulawesi Tengah	61,841.29	1,711,327	2,175,993	2,633,420	28	35	43
Sulawesi Selatan	46,717.48	6,981,646	7,159,170	8,032,551	149	153	172
Sulawesi Barat	16,787.18	0	891,618	1,158,336	0	53	69
Sulawesi Tenggara	38,067.70	1,349,619	1,820,379	2,230,569	35	48	59
Bali	5,780.06	2,777,811	3,150,057	3,891,428	481	545	673
Maluku	46,914.03	1,857,790	1,166,300	1,531,402	40	25	33
Maluku Utara	31,982.50	0	815,101	1,035,478	0	25	32
Papua	319,036.05	1,648,708	1,684,144	2,851,999	5	5	9
Papua Barat	97,024.27	0	529,689	760,855	0	5	8
Indonesia	1,976,668.31	175,031,196	205,132,458	237,556,363	89	104	120
Provinsi Kepulauan	184,664.37	10,974,202	13,754,203	16,917,734	59	74	92
Provinsi Lainnya	1,792,003.94	164,056,994	191,378,255	220,638,629	92	107	123

Sumber: djkd.depdagri.go.id ; *) Permendagri No. 6 Tahun 2008; **) tidak termasuk Timor Timur (747.750 jiwa); ***) Hasil Olah Cepat Sensus Penduduk 2010 Provinsi , BPS.



Gambar 4.1

Kepadatan Penduduk per Provinsi, 1990, 2000, dan 2010 (Jiwa/Km²)

Sumber: djkd.depdagri.go.id ; Permendagri No. 6 Tahun 2008; tidak termasuk Timor Timur (747.750 jiwa); Hasil Olah Cepat Sensus Penduduk 2010 Provinsi , BPS, diolah.

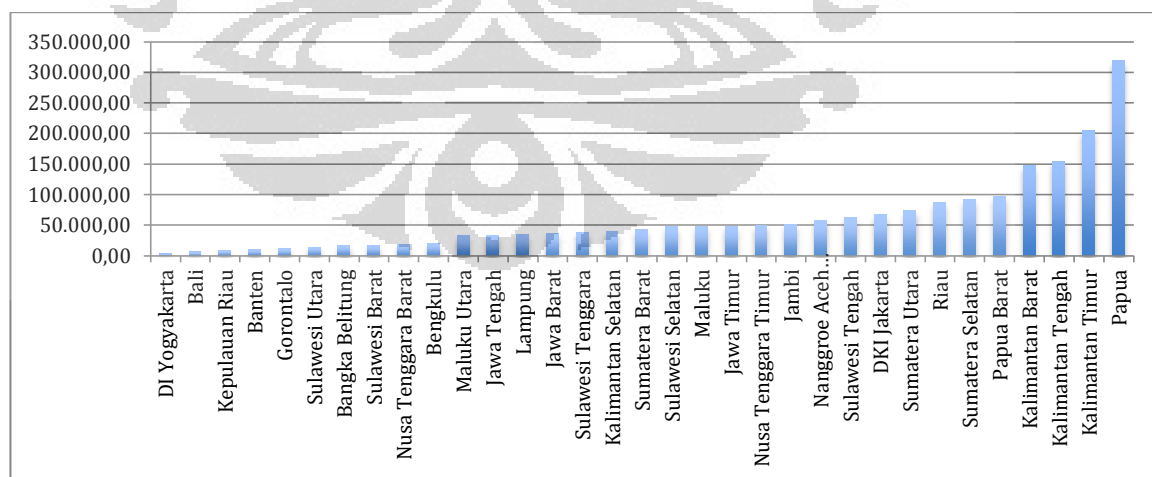
Melihat komposisi luas wilayah daratan masing-masing provinsi yang diurutkan dari luas wilayah terkecil hingga luas wilayah terbesar menunjukkan bahwa ketujuh provinsi berciri kepulauan memiliki luas wilayah beragam, dan tidak berada dalam suatu wilayah daratan terkecil semata. Apabila diurutkan dari luas daratan terkecil terlihat bahwa dari tujuh provinsi berciri kepulauan berturut-turut adalah Provinsi Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, seperti terlihat dalam **Gambar 4.2**. Namun apabila diurutkan dari luas lautan terkecil diperoleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bangka Belitung, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, dan Maluku, sebagaimana detilnya disajikan dalam **Tabel 4.2**. Jika melihat **Gambar 4.3**, masih ada potensi dari provinsi lain yang kelihatannya memiliki luas lautan yang cukup luas. Dalam **Gambar 4.4** ditampilkan perbandingan luas lautan dan daratan di Indonesia yang diperkirakan sekitar 62% berbanding 38%, sementara untuk ketujuh provinsi kepulauan tersebut perbandingannya masing-masing sekitar 87,73% berbanding 12,27%.

Tabel 4.2
Luas Wilayah Tujuh Provinsi Kepulauan

No	Provinsi	Daratan		Laut		Total	
		(Km ²)	%	(Km ²)	%	(Km ²)	%
1	Bangka Belitung	16,424.06	20.10%	65,301.08	79.90%	81,725.14	100.00%
2	Kepulauan Riau	8,201.72	3.25%	244,399.28	96.75%	252,601.00	100.00%
3	Nusa Tenggara Barat	18,572.32	38.91%	29,159.00	61.09%	47,731.32	100.00%
4	Nusa Tenggara Timur	48,718.10	19.59%	200,000.00	80.41%	248,718.10	100.00%
5	Sulawesi Utara	15,272.44	6.78%	209,982.00	93.22%	225,254.44	100.00%
6	Maluku	54,185.00	9.32%	527,191.00	90.68%	581,376.00	100.00%
7	Maluku Utara	31,982.50	23.02%	106,977.32	76.98%	138,959.82	100.00%
	Jumlah 7 Provinsi	193,356.14	12.27%	1,383,009.68	87.73%	1,576,365.82	100.00%

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber

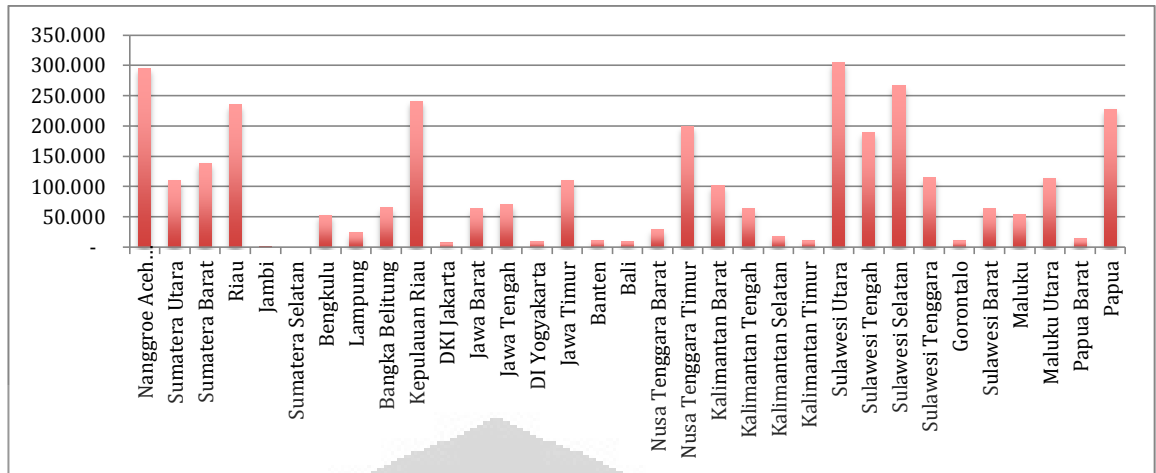
Namun demikian hal ini masih harus dianalisa lebih lanjut karena status penentuan luas wilayah lautan dapat beragam dari satu provinsi dengan provinsi lainnya. Belum adanya data standar dan ketentuan umum yang berlaku seragam bagi setiap provinsi yang dapat menjadi acuan penentuan pengukuran luas laut, juga menjadi kendala pengukuran. Pengukuran beragam terjadi mulai dari batas 2 mil laut hingga 12 mil laut yang berada dalam zona ekonomi eksklusif sesuai peraturan internasional. Belum lagi titik zona pengukuran yang memakai acuan landas kontinen maupun titik *global positioning system* (GPS) belum tersedia sepenuhnya di tiap-tiap daerah.



Gambar 4.2

Luas Wilayah Daratan (Km²)

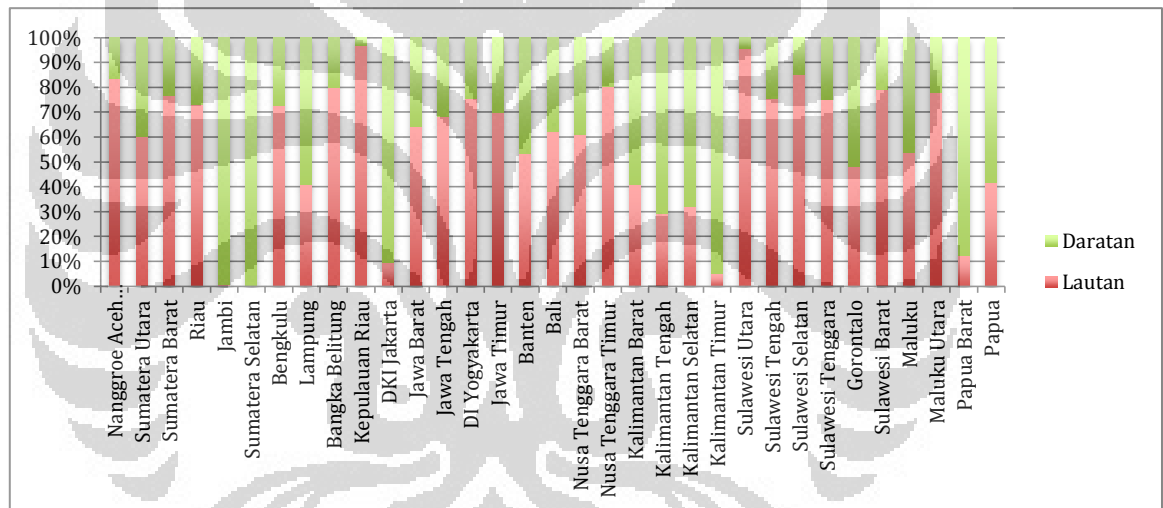
Sumber: djkd.depdagri.go.id ; Permendagri No. 6 Tahun 2008; diolah.



Gambar 4.3

Luas Lautan Provinsi-Provinsi di Indonesia (Km²)

Sumber : Penulis, diolah dari berbagai sumber.



Gambar 4.4

Perbandingan Luas Daratan dan Lautan Provinsi-Provinsi di Indonesia (%)

Sumber: diolah dari berbagai sumber (Sumatera Selatan data lautan tidak tersedia).

Gambar 4.5 meninjau dari sebaran jumlah pulau di masing-masing provinsi tersebut, ketujuh provinsi berciri kepulauan memiliki jumlah sebaran pulau yang terhitung banyak, selain Provinsi Sulawesi Tengah dan Papua Barat. Dengan posisi ini, kebutuhan akses laut menjadi sarana transportasi utama masyarakat selain pesawat udara. Oleh karenanya pemerintahan daerah juga memerlukan dukungan sarana transportasi laut untuk melakukan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.

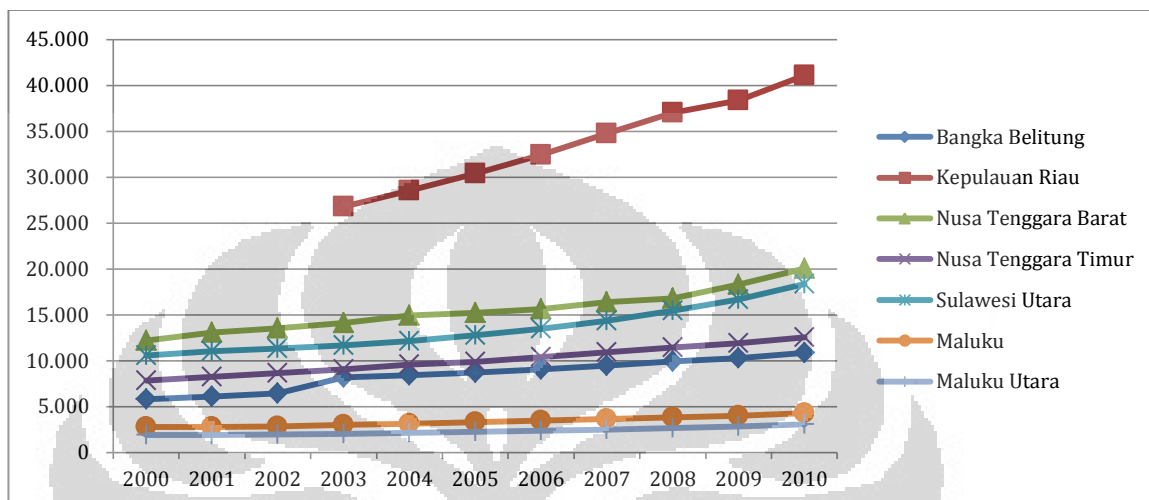
Tabel 4.3
PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku, 2009-2010

Provinsi	2009 (Rp)	2010 (Rp)	% Perubahan
Nanggroe Aceh Darussalam	15,979,812	17,275,023	8.11%
Sumatera Utara	18,201,945	21,232,084	16.65%
Sumatera Barat	15,838,417	17,998,615	13.64%
Riau	53,612,009	61,823,838	15.32%
Jambi	14,286,974	17,424,198	21.96%
Sumatera Selatan	18,442,715	21,187,703	14.88%
Bengkulu	9,292,001	10,527,045	13.29%
Lampung	11,564,172	14,122,648	22.12%
Kepulauan Bangka Belitung	18,790,773	21,017,675	11.85%
Kepulauan Riau	37,902,956	42,483,597	12.09%
DKI Jakarta	79,023,879	89,918,764	13.79%
Jawa Barat	16,034,682	17,913,244	11.72%
Jawa Tengah	12,288,311	13,724,121	11.68%
DI. Yogyakarta	11,993,735	13,205,881	10.11%
Jawa Timur	18,327,659	20,772,109	13.34%
Banten	14,278,416	16,020,754	12.20%
Bali	15,493,603	17,137,821	10.61%
Nusa Tenggara Barat	9,431,239	10,977,162	16.39%
Nusa Tenggara Timur	5,167,201	5,921,876	14.61%
Kalimantan Barat	12,344,902	13,765,527	11.51%
Kalimantan Tengah	16,850,178	19,325,899	14.69%
Kalimantan Selatan	14,191,530	16,144,484	13.76%
Kalimantan Timur	80,259,005	90,433,190	12.68%
Sulawesi Utara	14,578,344	16,255,877	11.51%
Sulawesi Tengah	12,301,634	13,995,657	13.77%
Sulawesi Selatan	12,443,692	14,669,097	17.88%
Sulawesi Tenggara	13,495,896	14,915,244	10.52%
Gorontalo	6,806,428	7,757,203	13.97%
Sulawesi Barat	8,118,006	9,484,834	16.84%
Maluku	4,616,451	5,279,350	14.36%
Maluku Utara	4,529,857	5,202,857	14.86%
Papua Barat	22,624,728	29,607,961	30.87%
Papua	27,254,064	31,364,404	15.08%
Jumlah 33 Provinsi	19,587,214	22,246,738	13.58%
Rata-rata Provinsi Kepulauan	11,718,984	13,281,934	13.34%
Rata-rata Provinsi Lainnya	20,190,521	22,934,126	13.59%

Sumber: BPS, diolah.

Dari ketujuh provinsi berciri kepulauan, Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren pertumbuhan PDRB harga konstan untuk periode 2000 hingga 2009 yang signifikan sejak awal dibentuknya provinsi tersebut. Sementara itu disusul berturut-turut Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Nusa

Tenggara Timur dan Bangka Belitung dengan perkembangan tren yang masih positif, dan diurutan terbawah berada Provinsi Maluku dan Maluku Utara dengan tren perkembangan yang lebih lambat, seperti terlihat pada **Gambar 4.6**, dibawah ini:

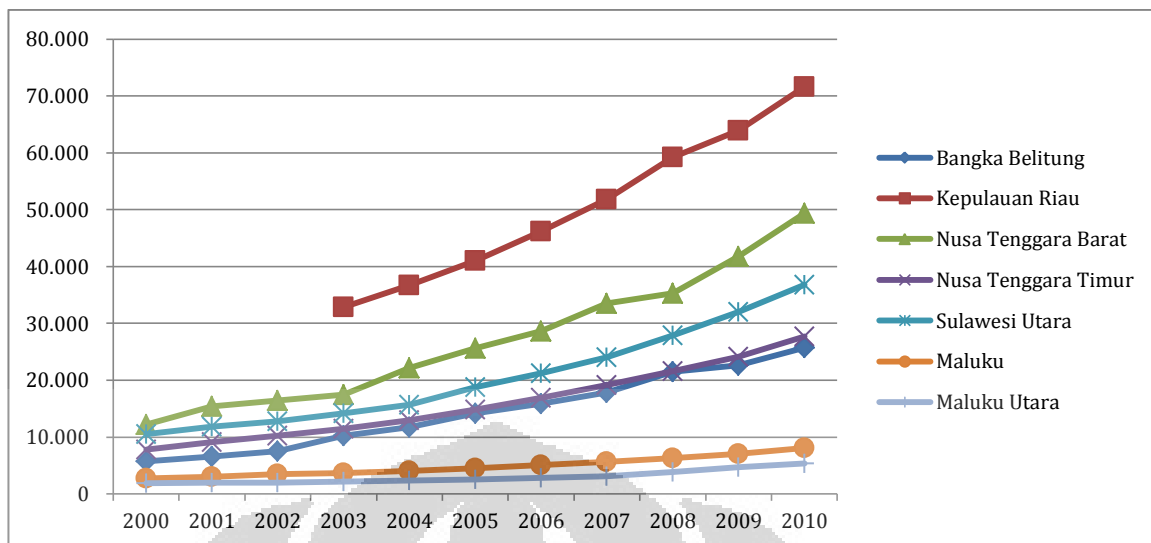


Gambar 4.6

PDRB Provinsi Kepulauan 2000-2010 (Harga Konstan 2000, Miliar Rp)

Sumber: BPS, PDRB Provinsi (Migas), diolah.

Pada **Gambar 4.7** berikut ini disajikan perkembangan PDRB provinsi berciri kepulauan dengan menggunakan harga berlaku untuk periode 2000 hingga 2009. Seperti telah dikemukakan sebelumnya dalam **Tabel 4.3**, dengan rata-rata persentase perubahan PDRB provinsi kepulauan yang berada dibawah rata-rata persentase perubahan PDRB nasional untuk tahun 2009 ke 2010, dan secara nominal rata-rata nilai PDRB per kapita provinsi kepulauan berada dibawah rata-rata nilai PDRB nasional maupun PDRB provinsi lainnya. Jika diperhatikan Provinsi Maluku dan Maluku Utara masih mengalami pertumbuhan walaupun secara nominal keduanya memiliki nilai PDRB provinsi yang lebih kecil dibandingkan lima provinsi lainnya dalam lingkup tujuh provinsi tersebut.



Gambar 4.7

PDRB Provinsi Kepulauan 2000-2010 (Harga Berlaku, Miliar Rp)

Sumber: BPS, PDRB Provinsi (Migas), diolah.

4.3. Kontribusi terhadap Perekonomian Nasional

Jika dilihat distribusi persentase PDRB atas harga berlaku maka terlihat bahwa provinsi kepulauan mempunyai *share* kontribusi yang kecil terhadap nasional. Dari 7 (tujuh) provinsi kepulauan tersebut, hanya satu kontribusi provinsi kepulauan yang berada di peringkat 15, selebihnya 6 (enam) provinsi kepulauan berada di urutan lebih dari peringkat 20 (duapuluh) bahkan untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara urutan kontribusi mereka berada di peringkat terakhir. **Tabel 4.4** dibawah ini menyajikan distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku per masing-masing provinsi di Indonesia.

Tabel 4.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi Tahun 2004-2010 (Persen)

Provinsi	2004	2005	2006	2007	2008	2009*)	2010**)	Rank
Nanggroe Aceh Darussalam	2.28	2.13	2.22	2.01	1.72	1.54	1.47	14
Sumatera Utara	5.34	5.23	5.14	5.14	5.00	5.08	5.22	7
Sumatera Barat	1.69	1.67	1.7	1.69	1.66	1.65	1.65	13
Riau	5.17	5.21	5.36	5.94	6.47	6.39	6.48	5
Jambi	0.84	0.84	0.84	0.91	0.96	0.95	1.02	19
Sumatera Selatan	2.91	3.05	3.08	3.11	3.13	2.95	2.99	9
Bengkulu	0.37	0.38	0.37	0.36	0.35	0.34	0.34	29
Lampung	1.63	1.53	1.58	1.72	1.72	1.89	2.03	11
Kepulauan Bangka Belitung	0.53	0.53	0.51	0.51	0.5	0.49	0.49	27
Kepulauan Riau	1.66	1.54	1.48	1.47	1.37	1.37	1.36	15
DKI Jakarta	16.99	16.25	16.09	16.02	15.84	16.28	16.31	1
Jawa Barat	13.83	14.58	15.17	14.88	14.81	14.83	14.58	3
Jawa Tengah	8.75	8.78	9.04	8.84	8.59	8.55	8.41	4
DI. Yogyakarta	1	0.95	0.94	0.93	0.89	0.89	0.86	21
Jawa Timur	15.43	15.11	15.09	15.13	14.54	14.76	14.73	2
Banten	3.33	3.17	3.14	3.04	3.27	3.27	3.23	8
Bali	1.31	1.27	1.2	1.2	1.21	1.3	1.26	16
Nusa Tenggara Barat	1.00	0.96	0.92	0.95	0.82	0.91	0.93	20
Nusa Tenggara Timur	0.59	0.55	0.54	0.54	0.51	0.52	0.52	26
Kalimantan Barat	1.35	1.27	1.21	1.2	1.15	1.17	1.14	17
Kalimantan Tengah	0.83	0.79	0.79	0.79	0.77	0.8	0.81	22
Kalimantan Selatan	1.27	1.19	1.11	1.12	1.07	1.11	1.11	18
Kalimantan Timur	6.05	6.75	6.4	6.3	7.36	6.12	6.08	6
Sulawesi Utara	0.71	0.7	0.68	0.68	0.67	0.71	0.7	23
Sulawesi Tengah	0.66	0.64	0.62	0.64	0.67	0.7	0.7	24
Sulawesi Selatan	2.02	1.94	1.95	1.96	1.99	2.15	2.23	10
Sulawesi Tenggara	0.46	0.49	0.49	0.51	0.61	0.65	0.63	25
Gorontalo	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.15	0.15	31
Sulawesi Barat	0.17	0.17	0.16	0.18	0.19	0.2	0.21	30
Maluku	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	32
Maluku Utara	0.11	0.1	0.09	0.09	0.09	0.1	0.1	33
Papua Barat	0.3	0.3	0.29	0.29	0.33	0.37	0.43	28
Papua	1.12	1.63	1.5	1.57	1.44	1.67	1.69	12

Sumber: BPS, 2010; *) angka sementara ; **) angka sangat sementara.

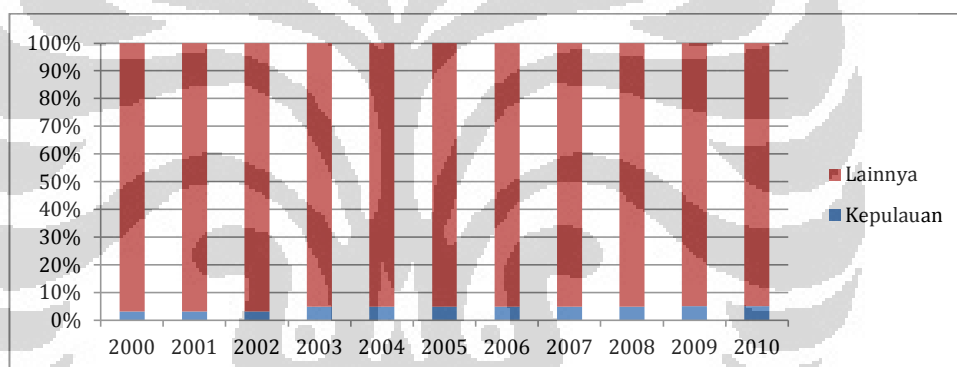
Tabel 4.5
Pertumbuhan Ekonomi (Laju Pertumbuhan PDRB-Harga Konstan 2000)
Menurut Provinsi Tahun 2001-2010

Provinsi	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009 *)	2010 **)	Rata-rata 2006-2010
Nanggroe Aceh Darussalam	-10.73	20.07	5.52	-9.63	-10.12	1.56	-2.36	-5.24	-5.51	2.64	-1.78
Sumatera Utara	3.98	4.56	4.81	5.74	5.48	6.2	6.9	6.39	5.07	6.35	6.18
Sumatera Barat	3.66	4.69	5.26	5.47	5.73	6.14	6.34	6.88	4.28	5.93	5.92
Riau	-0.14	2.66	2.45	2.93	5.41	5.15	3.41	5.65	2.97	4.17	4.27
Jambi	6.65	5.86	5	5.38	5.57	5.89	6.82	7.16	6.37	7.33	6.72
Sumatera Selatan	2.47	3.08	3.68	4.63	4.84	5.2	5.84	5.07	4.11	5.43	5.13
Bengkulu	4.15	4.73	5.37	5.38	5.82	5.95	6.46	5.78	6.43	5.14	5.95
Lampung	3.59	5.62	5.76	5.07	4.02	4.98	5.94	5.35	5.16	5.75	5.44
Kepulauan Bangka Belitung	5.71	6.75	11.93	3.28	3.47	3.98	4.54	4.6	3.7	5.85	4.53
Kepulauan Riau	-1.34	2.57	4.82	6.47	6.57	6.78	7.01	6.63	3.52	7.21	6.23
DKI Jakarta	4.74	4.89	5.31	5.65	6.01	5.95	6.44	6.23	5.02	6.51	6.03
Jawa Barat	3.16	3.76	4.67	4.77	5.6	6.02	6.48	6.21	4.19	6.09	5.8
Banten	3.95	4.11	5.07	5.63	5.88	5.57	6.04	22.53	4.69	5.94	8.95
Jawa Tengah	3.59	3.55	4.98	5.13	5.35	5.33	5.59	5.61	5.14	5.84	5.5
DI Yogyakarta	4.26	4.5	4.58	5.12	4.73	3.7	4.31	5.03	4.43	4.87	4.47
Jawa Timur	3.76	3.8	4.78	5.83	5.84	5.8	6.11	6.16	5.01	6.68	5.95
Bali	3.54	3.04	3.57	4.62	5.56	5.28	5.92	10.27	5.33	5.83	6.52
Nusa Tenggara Barat	7.32	3.51	3.9	6.07	1.71	2.77	4.91	2.82	12.11	6.29	5.78
Nusa Tenggara Timur	4.78	4.93	4.59	5.34	3.46	5.08	5.15	4.84	4.29	5.13	4.9
Kalimantan Barat	2.69	4.55	3.12	4.79	4.69	5.23	6.02	4.49	4.79	5.35	5.18
Kalimantan Tengah	2.95	5.3	4.91	5.56	5.9	5.84	6.06	6.17	5.51	6.47	6.01
Kalimantan Selatan	4.15	3.8	4.37	5.03	5.06	4.98	6.01	6.45	5.29	5.58	5.66
Kalimantan Timur	4.73	1.74	1.86	1.75	3.17	2.85	1.84	4.9	2.09	4.95	3.32
Sulawesi Utara	2.13	3.32	3.2	4.26	4.9	5.72	6.47	10.86	7.85	7.12	7.6
Gorontalo	5.55	6.45	6.88	6.93	7.19	7.3	7.51	7.76	7.54	7.62	7.55
Sulawesi Tengah	5.1	5.62	6.21	7.15	7.57	7.82	7.99	9.96	7.51	7.79	8.21
Sulawesi Selatan	5.23	4.08	5.42	5.26	6.05	6.72	6.34	7.78	6.23	8.18	7.05
Sulawesi Barat	3.83	4.24	3.15	6	6.3	6.9	7.43	12.07	6.03	11.91	8.87
Sulawesi Tenggara	5.01	6.66	7.57	7.51	7.31	7.68	7.96	12.59	7.57	8.19	8.8
Maluku	-0.03	2.87	4.31	4.43	5.07	5.55	5.62	4.23	5.44	6.47	5.46
Maluku Utara	1.67	2.44	3.82	4.71	5.1	5.48	6.01	5.99	6.05	7.96	6.3
Papua Barat	3.34	5.07	7.68	7.39	6.8	4.55	6.95	7.84	7.02	26.82	10.64
Papua	8.89	5.15	-0.28	-22.53	36.4	-17.14	4.34	-1.4	22.74	-2.65	1.18
Indonesia	3.29	4.34	4.55	4.25	5.37	5.19	5.67	6.43	4.74	6.08	5.62
Provinsi Kepulauan	2.32	3.58	5.04	5.44	4.58	na	na	na	na	na	na

Sumber: BPS; *) Angka Sementara; **) Angka Sangat Sementara; na= not available

Tabel 4.5 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi. Ketujuh provinsi kepulauan menunjukkan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi di atas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional untuk kurun waktu 2006-2010. Sementara Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Bangka-Belitung menunjukkan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi provinsi di bawah rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional untuk kurun waktu yang sama.

Gambar 4.8 berikut, menunjukkan komposisi kontribusi provinsi kepulauan terhadap perekonomian nasional kurang signifikan, rata-rata di bawah lima persen setiap tahunnya (kecuali tahun 2004, 5,11%) untuk periode 2000 hingga 2010.



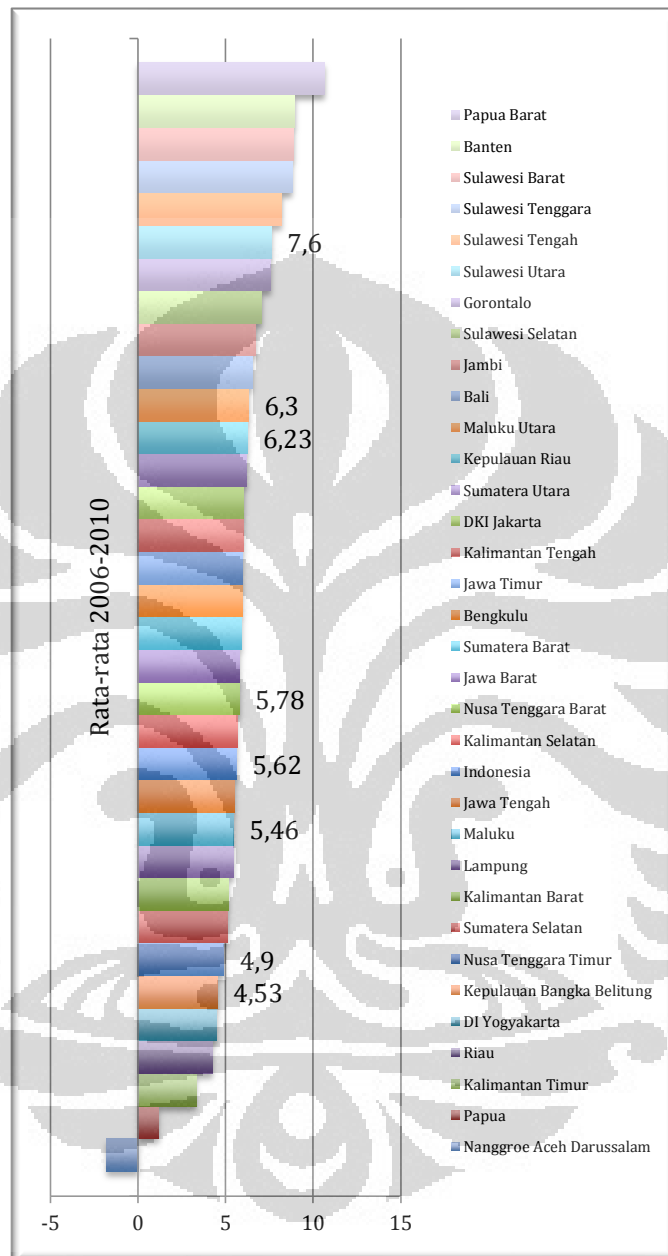
Gambar 4.8
Kontribusi PDRB Kepulauan terhadap Perekonomian Nasional
Tahun 2000-2010 (%)

Sumber: BPS, PDRB Provinsi (Migas), diolah.

Dari **Tabel 4.5**, provinsi kepulauan menunjukkan tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi yang bervariasi dalam kurun waktu 2001 hingga 2010 jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan nasional untuk kurun waktu yang sama.

Gambar 4.9 menunjukkan urutan rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi lima tahun terakhir (2006-2010) (**Tabel 4.5**) dari Provinsi Sulawesi Utara (7,6), Maluku Utara (6,3), Kepulauan Riau (6,23), dan Nusa Tenggara Barat (5,78) berada di atas, sementara Provinsi Maluku (5,46), Nusa Tenggara Timur (4,9),

dan Bangka Belitung (4,53) berada di bawah, dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional (5,62) untuk periode yang sama.



Gambar 4.9

**Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 2006-2010 Per Provinsi
(Laju Pertumbuhan PDRB-Harga Konstan 2000)**

Sumber: BPS, 2011, diolah.

4.4. Dana Perimbangan dan Dana Alokasi Umum

Dana Perimbangan ditujukan untuk membantu daerah dalam mendanai keberlangsungan pemerintahan daerah untuk menjalankan kewenangannya serta untuk mengurangi ketimpangan (kesenjangan fiskal) sumber pendanaan pemerintah antara alokasi dari pusat dan pendapatan asli daerah (PAD) serta mengurangi kesenjangan pendanaan antar pemerintah daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). DAU mempunyai bagian yang cukup besar dalam dana perimbangan. Karena besarnya yang cukup besar dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) maka peran DAU cukup penting dalam pembangunan suatu daerah namun ketergantungan terhadap DAU juga tidak baik karena tujuan dari DAU adalah untuk pemerataan kesejahteraan.

Jumlah DAU dari tahun ke tahun terus mengalami pertumbuhan dari sisi jumlah alokasi. Selain DAU, pada tahun 2001 Pemerintah Pusat juga mengeluarkan Dana Kontijensi kepada Pemerintah Daerah. Perkembangan alokasi DAU kepada masing-masing daerah juga menemui babak baru karena adanya tekanan politik dan sikap Pemerintah Daerah yang tidak mau menerima DAU yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sikap ini kemudian dikenal dengan *hold harmless*.^{50,51} Dari sisi Dana Perimbangan, Pemerintah Pusat kemudian mengintrodusir jenis Dana Perimbangan yang baru yaitu Dana Penyeimbang (DP) yang dialokasikan untuk mempertahankan beberapa daerah yang secara formula akan menerima DAU yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dalam perkembangannya, Dana Penyeimbang ini berubah menjadi DP Murni dikarenakan adanya jenis DP yang lain yaitu DP Adhoc yang muncul karena adanya kebijakan Pemerintah Pusat mengenai Gaji PNS Daerah (DP Adhoc I) dan peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat (DP Adhoc II). Perkembangan jumlah total alokasi DAU dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta DP Murni-nya dapat ditunjukkan pada **Tabel 4.6** berikut ini:

⁵⁰ Simanjuntak, Robert A. dan Hidayanto, Djoko (2002), *Dana Alokasi Umum di Masa Depan*, dalam Sidik, Machfud (2002), *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM-FEUI dan MPKP-FEUI bekerjasama dengan Ditjen PKPD Depkeu dan Kompas, hal. 156.

⁵¹ Soejono, Prasetyo Indro (2005), *opcit.*, hal. 35.

Tabel 4.6
Perkembangan Jumlah Total Alokasi DAU dan Dana Penyeimbang
Tahun 2001 – 2010

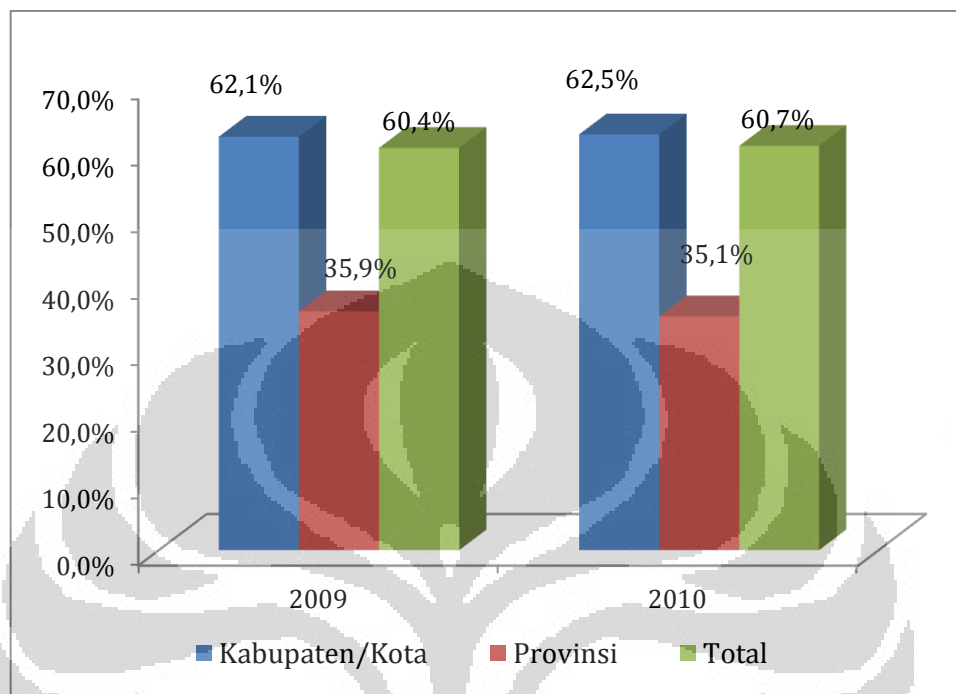
TAHUN	DAU (Miliar Rp)	DP (Milyar Rp)	DAU + DP (Milyar Rp)	JUMLAH DAERAH
2001	60,516.70	3,092.30	63,609.00	30 Provinsi
	Keppres 181 Tahun 2000	KMK No 382 & 451 Tahun 2001		336 Kab/Kota
2002	69,114.10	2,054.77	71,168.87	30 Provinsi
	Keppres 131 Tahun 2001	KMK No 685 Tahun 2001	12%*	348 Kab/Kota
2003	76,978.00	2,262.40	79,240.40	30 Provinsi
	Keppres 1 Tahun 2003	KMK No 23 Tahun 2003	11%*	370 Kab/Kota
2004	82,130.94	1,008.43	83,139.37	32 Provinsi
	Keppres 109 Tahun 2003	KMK No 578 Tahun 2003	5%*	410 Kab/Kota
2005	88,765.60	805.5	89,571.10	31 Provinsi
	Perpres 3 Tahun 2004	PMK No 626 Tahun 2004	8%*	470 Kab/Kota
2006	145.7	263.18	408.88	33 Provinsi
		PMK No 123 Tahun 2005		
2007	164.8	n.a	n.a	33 Provinsi
	Perpres No.104 th. 2006			428 Kab/Kota
2008	179.5	242.84	422.34	33 Provinsi
	Perpres 110 Tahun 2007	PMK No 172 Tahun 2007	3%	431 Kab/Kota
2009	186.4	186.41	372.81	33 Provinsi
	Perpres 74 Tahun 2008		-13%	477 Kab/Kota
2010	203.6	187.35	390.95	33 Provinsi
	Perpres 53 Tahun 2009	PMK No 225 Tahun 2009	5%	491 Kab/Kota

*) *Pertumbuhan jumlah alokasi DAU (termasuk DP)*

Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2011

DAU juga merupakan komponen yang sangat dominan dalam struktur pendapatan daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten/Kota. Secara rata-rata, berturut-turut pada tahun 2009 dan 2010, DAU menyumbang lebih dari 62,1% dan 62,5% dari total pendapatan Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan di tingkat Pemerintah Provinsi, DAU keseluruhan Provinsi menyumbang sekitar 35,9% dan 35,1% dari total pendapatan dalam APBD Provinsi. Dengan menggunakan data konsolidasi APBD (APBD Provinsi ditambah dengan APBD Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi), secara rata-rata, pada tahun 2009 dan 2010

DAU telah menyumbang lebih dari 60,4% dan 60,7% dari total pendapatan dalam APBD Pemerintah Daerah di Indonesia.



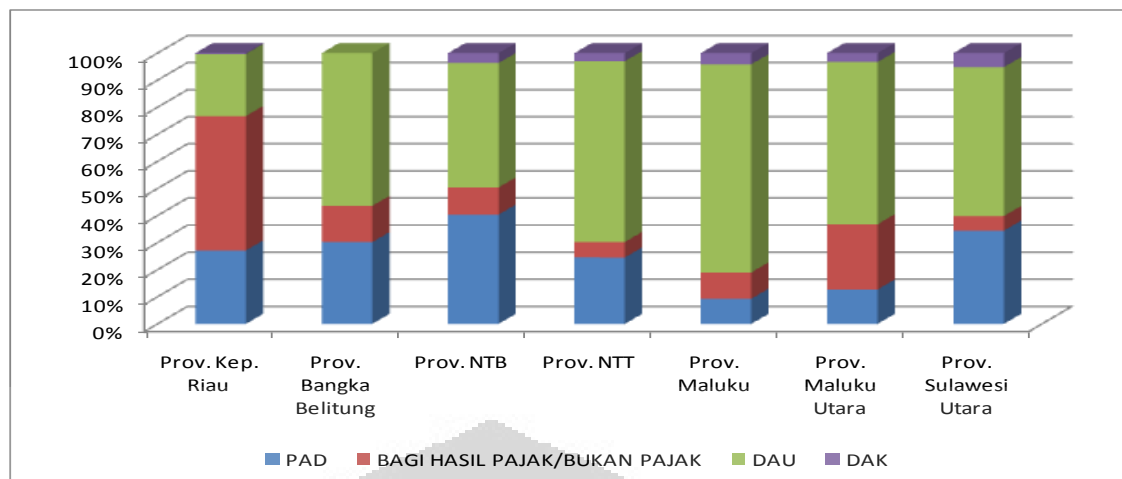
Gambar 4.10.

Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah

Sumber: Departemen Keuangan, RI, 2011

Ketergantungan Pemerintah Daerah yang tinggi terhadap DAU sebagai sumber pendapatan dalam APBD, serta signifikannya belanja daerah dari mata anggaran DAU bagi Pemerintah Pusat memberikan implikasi tentang pentingnya proses pengalokasian DAU secara lebih efektif dan efisien.

Rata-rata DAU dari ketujuh provinsi kepulauan menyumbang hampir 60% (enampuluh persen) dari total pendapatan dalam APBD pemerintah daerah. Dengan demikian DAU mempunyai peran penting dalam sumber pendapatan pemerintah kabupaten/kota. **Gambar 4.11** menunjukkan persentase komposisi sumber pendapatan daerah atau penerimaan APBD dari ketujuh provinsi kepulauan tersebut yang berasal dari PAD, bagi hasil pajak/bukan pajak atau DBH, DAU, dan DAK untuk tahun 2010.



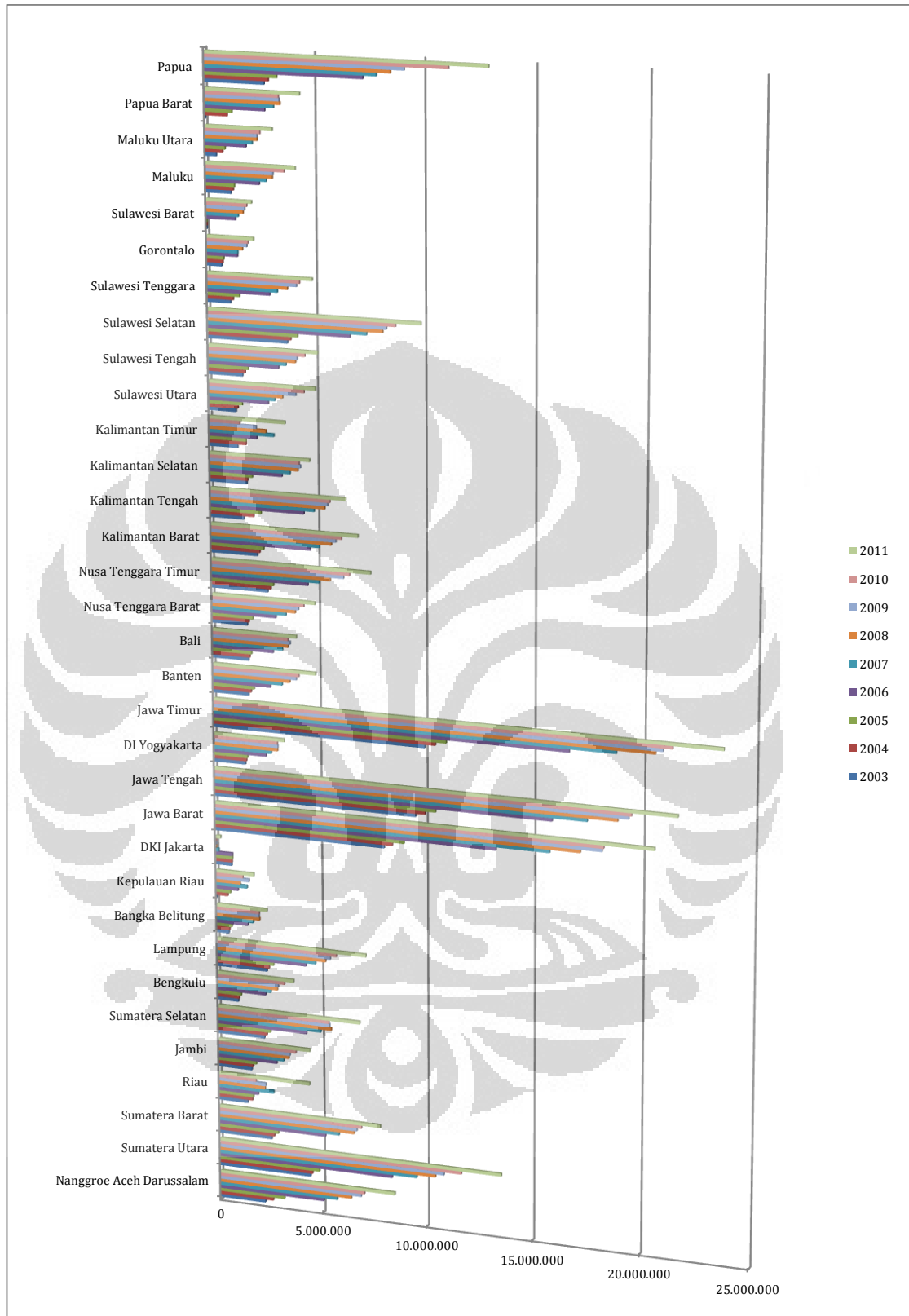
Gambar 4.11

Pendapatan Daerah 7 Provinsi Kepulauan (persentase)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2010

Pertumbuhan dana DAU setiap tahun makin kecil meskipun secara nominal nilainya meningkat. Peningkatan DAU terbesar terjadi pada tahun 2006 yang meningkat dari 88,8 triliun rupiah menjadi 145 triliun rupiah atau meningkat sebesar 39% (tigapuluh sembilan persen). Namun pertumbuhannya setelah itu cenderung menurun, berkisar 8% (delapan persen) setiap tahunnya.

Berikut digambarkan perubahan DAU se-provinsi yang diterima oleh tiap provinsi untuk periode 2003 hingga 2011 (**Gambar 4.12**). Sementara dalam **Tabel 4.7** memperlihatkan DAU se-provinsi dalam bentuk persentasenya dan demikian pula distribusi DAU per provinsi untuk periode yang sama disajikan dalam **Tabel 4.8**. DAU se-provinsi untuk provinsi kepulauan telah berkembang dari 10,29% pada 2003 menjadi sekitar 12,72% pada 2011. Sementara distribusi DAU provinsi untuk provinsi kepulauan telah berkembang dari 9,5% pada 2003 menjadi 12,09% pada 2011.



Gambar 4.12

DAU Se-Provinsi (Provinsi dan Kabupaten/Kota), 2003-2011 (Juta Rupiah)

Sumber: Bappenas, 2011, diolah.

Tabel 4.7
DAU Se-Provinsi Tahun 2003 – 2011 (%)

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	2.89	3.14	3.52	3.45	3.44	3.54	3.67	3.63	3.75
Sumatera Utara	5.87	5.51	5.47	5.72	5.77	5.80	5.80	6.04	6.00
Sumatera Barat	3.37	3.25	3.22	3.52	3.51	3.63	3.56	3.57	3.45
Riau	1.83	1.96	1.85	1.29	1.60	1.23	1.20	0.92	1.94
Jambi	2.12	2.02	2.05	1.92	1.90	1.88	1.85	1.94	1.95
Sumatera Selatan	2.97	2.87	2.85	2.92	3.00	3.04	2.88	2.77	3.02
Bengkulu	1.30	1.24	1.26	1.58	1.55	1.60	1.56	1.67	1.62
Lampung	3.18	3.04	3.06	2.93	2.86	2.90	2.91	2.97	3.16
Bangka Belitung	0.74	0.72	0.80	1.01	1.05	1.14	1.08	1.05	1.06
Kepulauan Riau	0.00	0.65	0.74	0.71	0.88	0.63	0.84	0.65	0.79
DKI Jakarta	0.98	0.91	0.87	0.53	0.07	0.00	0.00	0.00	0.09
Jawa Barat	10.75	10.34	10.18	9.10	9.55	9.55	9.73	9.46	9.10
Jawa Tengah	12.73	12.23	11.86	10.88	10.59	10.50	10.38	10.12	9.56
DI Yogyakarta	1.96	1.86	1.78	1.68	1.64	1.67	1.62	1.55	1.48
Jawa Timur	13.31	12.83	12.42	11.41	11.38	11.44	11.19	11.06	10.45
Banten	2.22	2.19	2.19	1.86	1.98	2.02	2.11	2.11	2.15
Bali	2.25	2.14	2.07	1.96	2.00	1.98	1.96	1.84	1.75
Nusa Tenggara Barat	2.19	2.11	2.17	2.06	2.11	2.18	2.18	2.24	2.15
Nusa Tenggara Timur	3.52	3.41	3.30	3.11	3.07	3.11	3.33	3.37	3.31
Kalimantan Barat	2.90	2.79	2.79	3.20	3.08	3.15	3.14	3.18	3.05
Kalimantan Tengah	2.06	2.47	2.68	3.00	2.94	2.98	2.94	2.91	2.81
Kalimantan Selatan	2.28	2.14	2.24	2.31	2.27	2.29	2.27	2.16	2.07
Kalimantan Timur	1.74	2.08	1.92	1.52	1.82	1.46	1.17	0.74	1.57
Sulawesi Utara	1.66	1.64	1.74	1.89	1.86	1.91	2.17	2.30	2.20
Sulawesi Tengah	2.11	2.08	2.09	2.24	2.19	2.26	2.21	2.33	2.25
Sulawesi Selatan	4.94	4.72	4.72	4.52	4.46	4.51	4.43	4.51	4.36
Sulawesi Tenggara	1.41	1.45	1.67	1.99	1.97	2.06	2.22	2.22	2.16
Gorontalo	0.89	0.88	0.87	0.97	0.86	0.92	0.99	0.99	0.96
Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.91	0.89	0.94	0.95	0.96	0.92
Maluku	1.54	1.53	1.48	1.69	1.69	1.71	1.66	1.88	1.83
Maluku Utara	0.65	0.96	1.01	1.28	1.30	1.33	1.28	1.31	1.37
Papua Barat	0.00	1.23	1.39	1.89	1.92	1.93	1.83	1.76	1.93
Papua	3.66	3.59	3.76	4.98	4.77	4.74	4.90	5.78	5.73
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Kepulauan	10.29	11.03	11.24	11.75	11.98	12.00	12.54	12.81	12.72
Lainnya	89.71	88.97	88.76	88.25	88.02	88.00	87.46	87.19	87.28

Sumber: BPS, diolah.

Tabel 4.8
Distribusi DAU Provinsi Tahun 2003-2011 (%)

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	3.11	3.39	3.57	3.48	3.49	3.58	3.77	3.68	3.81
Sumatera Utara	6.09	5.71	5.69	5.95	5.97	5.99	5.99	6.25	6.20
Sumatera Barat	3.41	3.29	3.27	3.55	3.53	3.64	3.57	3.58	3.45
Riau	1.93	2.10	1.95	1.36	1.59	1.25	1.23	0.99	1.97
Jambi	2.05	1.95	1.97	1.85	1.83	1.80	1.77	1.87	1.88
Sumatera Selatan	2.96	2.88	2.87	2.92	2.99	3.04	2.89	2.78	3.04
Bengkulu	1.14	1.07	1.11	1.47	1.45	1.48	1.45	1.55	1.50
Lampung	3.17	3.01	3.02	2.90	2.84	2.87	2.86	2.93	3.13
Bangka Belitung	0.58	0.57	0.65	0.91	0.96	1.02	0.96	0.93	0.94
Kepulauan Riau	0.00	0.72	0.79	0.65	0.76	0.52	0.69	0.55	0.69
DKI Jakarta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Jawa Barat	11.34	10.86	10.69	9.68	9.98	10.05	10.23	9.89	9.53
Jawa Tengah	13.44	12.85	12.49	11.41	11.06	11.01	10.86	10.57	9.99
DI Yogyakarta	1.88	1.73	1.67	1.56	1.53	1.54	1.49	1.42	1.34
Jawa Timur	14.22	13.64	13.24	12.05	11.91	12.08	11.76	11.59	10.94
Banten	2.22	2.18	2.18	1.88	1.98	2.03	2.13	2.12	2.16
Bali	2.24	2.12	2.05	1.91	1.93	1.92	1.90	1.77	1.67
Nusa Tenggara Barat	2.11	2.03	2.10	1.98	2.04	2.11	2.09	2.16	2.07
Nusa Tenggara Timur	3.50	3.38	3.29	3.09	3.04	3.07	3.31	3.35	3.31
Kalimantan Barat	2.82	2.71	2.71	3.10	3.01	3.04	3.04	3.10	2.98
Kalimantan Tengah	1.92	2.38	2.61	2.92	2.89	2.90	2.86	2.82	2.73
Kalimantan Selatan	2.24	2.11	2.20	2.27	2.24	2.26	2.24	2.14	2.05
Kalimantan Timur	1.82	2.22	2.05	1.63	1.86	1.55	1.29	0.82	1.71
Sulawesi Utara	1.54	1.53	1.63	1.80	1.77	1.79	2.08	2.24	2.14
Sulawesi Tengah	1.99	1.96	1.98	2.12	2.09	2.13	2.08	2.21	2.14
Sulawesi Selatan	5.06	4.82	4.83	4.64	4.55	4.60	4.53	4.60	4.45
Sulawesi Tenggara	1.23	1.29	1.53	1.88	1.88	1.94	2.11	2.12	2.05
Gorontalo	0.73	0.69	0.70	0.77	0.76	0.79	0.87	0.86	0.84
Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	0.82	0.80	0.82	0.82	0.84	0.81
Maluku	1.34	1.33	1.30	1.55	1.55	1.55	1.50	1.74	1.68
Maluku Utara	0.42	0.78	0.84	1.16	1.20	1.19	1.14	1.17	1.25
Papua Barat	0.00	1.23	1.38	1.83	1.82	1.78	1.68	1.61	1.80
Papua	3.49	3.49	3.65	4.91	4.71	4.64	4.81	5.76	5.73
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Kepulauan	9.50	10.34	10.59	11.14	11.32	11.26	11.78	12.15	12.09
Lainnya	90.50	89.66	89.41	88.86	88.68	88.74	88.22	87.85	87.91

Sumber: BPS, 2011, diolah

4.5. Indeks Kapasitas Fiskal

Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)⁵² provinsi kepulauan yang memiliki kategori sangat tinggi adalah Kepulauan Riau (2,16840), disusul Bangka Belitung (1,88990) dengan kategori tinggi, kategori sedang mencakup Maluku Utara (0,97270) dan Sulawesi Utara (0,73780), sedangkan kategori rendah berturut-turut Maluku (0,42220), Nusa Tenggara Barat (0,17370) dan Nusa Tenggara Timur (0,14740). IKF seluruh provinsi disajikan dalam **Tabel 4.9** di halaman berikut ini.

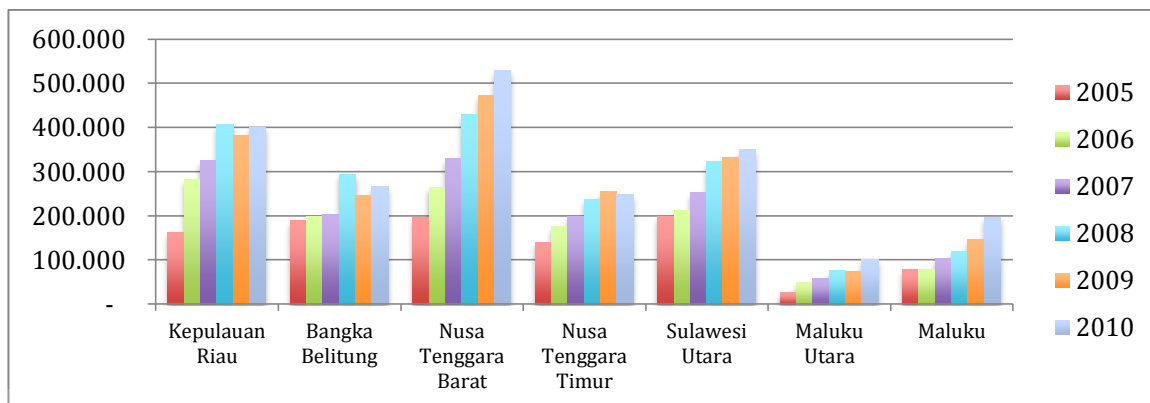
Gambar 4.13 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi kepulauan mengalami tren yang meningkat setiap tahunnya. Masing-masing PAD provinsi kepulauan ini masih berada dibawah rata-rata PAD nasional untuk tiap-tiap tahunnya, yang berkisar antara Rp 845.022 juta tahun 2005 hingga Rp 1.472.877 juta tahun 2010. Pada tahun 2010, diantara ketujuh provinsi tersebut, PAD tertinggi diperoleh oleh provinsi Nusa Tenggara Barat, dan terendah oleh provinsi Maluku Utara. Dari ketujuh provinsi tersebut, provinsi Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan Nusa Tenggara Timur memperlihatkan fluktuasi PAD untuk dua tahun terakhir, sementara provinsi lainnya memiliki tren PAD yang terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Sementara, **Gambar 4.14**, memperlihatkan bagian DBH provinsi kepulauan, jika dibandingkan dengan rata-rata bagian DBH provinsi secara nasional, (berkisar dari Rp 363.081 juta tahun 2005 hingga Rp 804.183 juta tahun 2010), juga masih berada dibawah rata-rata.

⁵² Pasal 28 ayat 3 UU No. 33 Tahun 2004 menyebutkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) diperoleh dengan cara membagi angka KFD daerah dengan angka KFD nasional. KFD dipergunakan untuk menentukan Celah Fiskal (CF), dengan mengurangkan KFD pada Kebutuhan Fiskal (KF). Celah Fiskal ditambah Alokasi Dasar akan diperoleh Alokasi DAU. Jika Total DAU negatif, maka disesuaikan menjadi nol.

Tabel 4.9
Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) Menurut Provinsi, 2010

Provinsi	Indeks Kapasitas Fiskal	Kategori
Nanggroe Aceh Darussalam	1.38630	Tinggi
Sumatera Utara	0.39040	Rendah
Sumatera Barat	0.86850	Sedang
Riau	1.06410	Tinggi
Jambi	0.93790	Sedang
Sumatera Selatan	0.35980	Rendah
Bengkulu	0.40600	Rendah
Lampung	0.20240	Rendah
Bangka Belitung	1.88990	Tinggi
Kepulauan Riau	2.16840	Sangat Tinggi
DKI Jakarta	6.87250	Sangat Tinggi
Jawa Barat	0.32290	Rendah
Jawa Tengah	0.19580	Rendah
DI Yogyakarta	0.36320	Rendah
Jawa Timur	0.22040	Rendah
Banten	0.62990	Sedang
Bali	2.63830	Sangat Tinggi
Nusa Tenggara Barat	0.17370	Rendah
Nusa Tenggara Timur	0.14740	Rendah
Kalimantan Barat	0.65030	Sedang
Kalimantan Tengah	1.46700	Tinggi
Kalimantan Selatan	2.09660	Sangat Tinggi
Kalimantan Timur	4.55140	Sangat Tinggi
Sulawesi Utara	0.73780	Sedang
Sulawesi Tengah	0.34070	Rendah
Sulawesi Selatan	0.39790	Rendah
Sulawesi Tenggara	0.34900	Rendah
Gorontalo	0.51520	Sedang
Sulawesi Barat	0.59280	Sedang
Maluku	0.42220	Rendah
Maluku Utara	0.97270	Sedang
Papua Barat	2.78520	Sangat Tinggi
Papua	1.75600	Tinggi

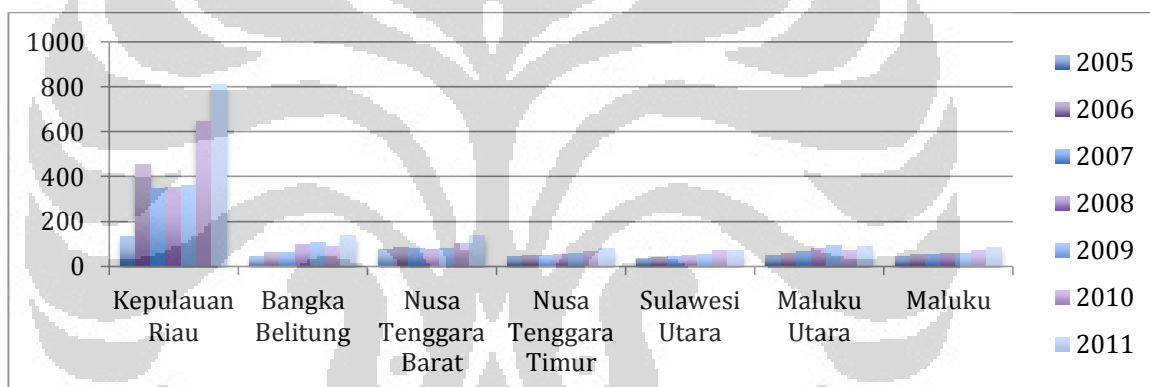
Sumber: Kementerian Keuangan



Gambar 4.13

**Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepulauan 2005-2010
(Juta Rupiah)**

Sumber: BPS, Daerah Dalam Angka berbagai tahun, diolah.



Gambar 4.14

DBH Provinsi Kepulauan 2005-2011, (Miliar Rupiah)

Sumber : Bappenas, diolah

Pada 23 Maret 2011, Menteri Keuangan mengedarkan Surat No. S-156/MK.07/2011 kepada kementerian terkait, dalam rangka menemukan keseimbangan pendanaan di daerah, sebagai rekomendasi kerangka acuan untuk perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012, yang diantaranya memuat langkah-langkah formulasi keseimbangan pendanaan melalui Indeks Kemampuan Fiskal Daerah (IKFD), kemudian mengkaitkannya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). **Tabel 4.10** memuat langkah-langkah formulasi tersebut.

Tabel 4.10
Langkah-langkah Formulasi IKFD dan Pengkaitan dengan IPM

No	Tahapan	Rumusan				
1	Menentukan IKFD					
a	Menghitung besaran transfer daerah (TD) (jumlah dana perimbangan: DAU, DAK, DBH Pajak, DBH SDA, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus)	$TD = DAU + DAK + DBH_{Pajak} + DBH_{SDA} + DP_y + DOK$				
b	Menghitung kemampuan keuangan daerah (KKD) (jumlah PAD dan Lain-lain Pendapatan yang sah dikurangi Belanja PNSD)	$KKD = PAD + P_{lainnya} - B_{PNSD}$				
c	Menentukan Kemampuan Fiskal Daerah (KFD) yang merupakan hasil penjumlahan dana transfer daerah dan kemampuan keuangan daerah	$KFD = TD + KKD$				
d	Menghitung KFD per kapita yang didapat dari KFD dibagi jumlah penduduk	$KFD \text{ per kapita} = KFD / (\text{jumlah penduduk})$				
e	Menghitung KFD Riil (KFDR) dengan memperhitungkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) sebagai proxy perbedaan tingkat harga antar daerah	$KFDR_{Daerah} = KFD \times IKK$				
f	Menentukan Indeks KFD (IKFD) sebagai hasil dari pembagian KFD Riil terhadap rata-rata KFD Riil nasional.	$IKFD = KFDR_{Daerah} / KFDR_{Nasional}$				
g	Memperoleh Peta Keseimbangan Pendanaan antar daerah yang menjadi dasar dalam rekomendasi penentuan alokasi kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Peta Keseimbangan $IKFD = \frac{KFD}{(\text{Jumlah Penduduk}) \times (IKK)}$				
2	Mengkaitkan IKFD dengan IPM					
a	Menghitung besarnya perbandingan indeks KFD daerah terhadap rata-rata indeks KFD Nasional sehingga menghasilkan daerah yang berada di atas dan di bawah rata-rata nasional.	$IKFD_{Daerah} : IKFD_{Nasional}$				
b	Menghitung besarnya perbandingan IPM daerah terhadap rata-rata IPM Nasional sehingga menghasilkan daerah yang berada di atas dan di bawah rata-rata nasional.	$IPM_{Daerah} : IPM_{Nasional}$				
c	Hasil kedua perbandingan indeks KFD dan IPM tersebut di atas berupa 4 kelompok daerah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok daerah yang mempunyai KFD dan IPM di atas rata-rata nasional • Kelompok daerah yang mempunyai KFD di bawah rata-rata nasional namun IPM di atas rata-rata nasional. • Kelompok daerah yang mempunyai KFD dan IPM di bawah dari rata-rata nasional. • Kelompok daerah yang mempunyai KFD di atas rata-rata nasional namun IPM di bawah rata-rata nasional. 	<p>Matrix IKFD dan IPM</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Kuadran II KFD < rata-rata nasional, dan IPM > rata-rata nasional </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Kuadran I KFD > rata-rata nasional, dan IPM > rata-rata nasional </td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Kuadran III KFD < rata-rata nasional, dan IPM < rata-rata nasional </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Kuadran IV KFD > rata-rata nasional, dan IPM < rata-rata nasional </td> </tr> </table> <p>Daerah dalam Kuadran III seyogyanya diprioritaskan dalam pengalokasian dana dari Kementerian Lembaga, setelahnya adalah daerah dalam Kuadran II.</p>	Kuadran II KFD < rata-rata nasional, dan IPM > rata-rata nasional	Kuadran I KFD > rata-rata nasional, dan IPM > rata-rata nasional	Kuadran III KFD < rata-rata nasional, dan IPM < rata-rata nasional	Kuadran IV KFD > rata-rata nasional, dan IPM < rata-rata nasional
Kuadran II KFD < rata-rata nasional, dan IPM > rata-rata nasional	Kuadran I KFD > rata-rata nasional, dan IPM > rata-rata nasional					
Kuadran III KFD < rata-rata nasional, dan IPM < rata-rata nasional	Kuadran IV KFD > rata-rata nasional, dan IPM < rata-rata nasional					

Sumber: Kementerian Keuangan, 2011

Tabel 4.11
Kelompok Daerah Rekomendasi Menkeu Tahun 2011
(Keseimbangan Pendanaan di Daerah berdasarkan IKFD dan IPM)

Kudran II – <i>Prioritas 2</i>			Kudran I		
Prop	IKFD	Re-IPM	Prop	IKFD	Re-IPM
Bali	0.8048	1.0017	DKI Jakarta	3.6058	1.0835
Babel	0.9585	1.0161	Kalteng	1.1341	1.0415
Bengkulu	0.8694	1.0161	Kaltim	2.4127	1.0520
DIY	0.4832	1.0537	Kepri	1.2275	1.0440
Jambi	0.6571	1.0148			
JaBar	0.3184	1.0034			
JaTeng	0.2670	1.0099			
Riau	0.9318	1.0589			
Sulut	0.6069	1.0599			
Sumbar	0.5020	1.0287			
Sumsel	0.6816	1.0170			
Sumut	0.4058	1.0336			
.			.		
Kudran III – <i>Prioritas 1</i>			Kudran IV		
Prop	IKFD	Re-IPM	Prop	IKFD	Re-IPM
Banten	0.4218	0.9813	NAD	2.2395	0.9988
Gorontalo	0.7666	0.9775	Papua Barat	5.0419	0.9605
Jatim	0.3226	0.9953	Papua	1.8318	0.9039
Kalbar	0.4945	0.9634			
Kalsel	0.8861	0.9707			
Lampung	0.3362	0.9935			
Malut	0.8287	0.9613			
Maluku	0.7584	0.9939			
NTB	0.3823	0.9057			
NTT	0.2638	0.9328			
Sulbar	0.8755	0.9689			
Sulse	0.4500	0.9936			
Sulteng	0.5484	0.9902			
Sultra	0.6845	0.9737			
.			.		

Sumber: Kementerian Keuangan, 2011

Hasil formulasi keseimbangan pendanaan di daerah tahun 2011 untuk perencanaan lokasi dan anggaran dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2012 yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan formulasi perhitungan **Tabel 4.10** disajikan dalam **Tabel 4.11** diatas, yang menunjukkan Provinsi Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, berada dalam Kuadran III sebagai prioritas pertama, dan Provinsi Bangka Belitung dan Sulawesi Utara berada dalam Kuadran II sebagai prioritas kedua. Sementara Provinsi Kepulauan Riau berada dalam Kuadran I yang tidak membutuhkan prioritas berdasarkan perhitungan Kementerian Keuangan tersebut.

4.6. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan menurut provinsi disajikan dalam **Tabel 4.12**, yang memperlihatkan komposisi jumlah penduduk miskin di kota dan desa beserta persentase dan peringkat (*ranking*) tingkat kemiskinan provinsi secara nasional untuk tahun 2010 dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari **Tabel 4.12** menunjukkan bahwa Provinsi Maluku, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat ke-3, ke-5 dan ke-6 secara nasional, keempat provinsi kepulauan lainnya menduduki peringkat diatas 20 dalam kategori jumlah penduduk miskin. Sementara persentase penduduk miskin kota dan desa dari provinsi kepulauan masih berada dibawah persentase penduduk miskin kota dan desa secara nasional.

4.7. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) daerah kepulauan dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok daerah yaitu kelompok provinsi yang memiliki IPM tinggi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung. Dan kelompok provinsi dengan IPM rendah yaitu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Kelompok daerah pertama yang memiliki IPM cukup tinggi tercermin dari PDRB per capita yang cukup tinggi sekitar 26 juta, berbeda jauh dengan PDRB per kapita dari kelompok daerah rendah yang hanya 6,8 juta. **Tabel 4.13** menyajikan IPM provinsi untuk periode 1999-2009.

Tabel 4.12
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2010

Propinsi	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)			Ranking
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa	Nasional
Nangroe Aceh Darussalam	173.4	688.5	861.9	14.7	23.5	21.0	7
Sumatera Utara	689.0	801.9	1,490.9	11.3	11.3	11.3	18
Sumatera Barat	106.2	323.8	430.0	6.8	10.9	9.5	20
Riau	208.9	291.3	500.3	7.2	10.2	8.7	24
Jambi	110.8	130.8	241.6	11.8	6.7	8.3	25
Sumatera Selatan	471.2	654.5	1,125.7	16.7	14.7	15.5	14
Bengkulu	117.2	207.7	324.9	18.8	18.1	18.3	9
Lampung	301.7	1,178.2	1,479.9	14.3	20.7	18.9	8
Bangka Belitung	21.9	45.9	67.8	4.4	8.5	6.5	30
Kepulauan Riau	67.1	62.6	129.7	7.9	8.2	8.1	26
DKI Jakarta	312.2	-	312.2	3.5	-	3.5	33
Jawa Barat	2,350.5	2,423.2	4,773.7	9.4	13.9	11.3	19
Jawa Tengah	2,258.9	3,110.2	5,369.2	14.3	18.7	16.6	13
DI Yogyakarta	308.4	268.9	577.3	14.0	22.0	16.8	12
Jawa Timur	1,873.5	3,655.8	5,529.3	10.6	19.7	15.3	15
Banten	318.3	439.9	758.2	5.0	10.4	7.2	28
Bali	83.6	91.3	174.9	4.0	6.0	4.9	32
Nusa Tenggara Barat	552.6	456.7	1,009.4	28.2	16.8	21.6	6
Nusa Tenggara Timur	107.4	906.7	1,014.1	13.6	25.1	23.0	5
Kalimantan Barat	83.4	345.3	428.8	6.3	10.1	9.0	23
Kalimantan Tengah	33.2	131.0	164.2	4.0	8.2	6.8	29
Kalimantan Selatan	65.8	116.2	182.0	4.5	5.7	5.2	31
Kalimantan Timur	79.2	163.8	243.0	4.0	13.7	7.7	27
Sulawesi Utara	76.4	130.3	206.7	7.8	10.1	9.1	22
Sulawesi Tengah	54.2	420.8	475.0	9.8	20.3	18.1	10
Sulawesi Selatan	119.2	794.2	913.4	4.7	14.9	11.6	17
Sulawesi Tenggara	22.2	378.5	400.7	4.1	20.9	17.1	11
Gorontalo	17.8	192.0	209.9	6.3	30.9	23.2	4
Sulawesi Barat	33.7	107.6	141.3	9.7	15.5	13.6	16
Maluku	36.3	342.3	378.6	10.2	33.9	27.7	3
Maluku Utara	7.6	83.4	91.1	2.7	12.3	9.4	21
Papua Barat	9.6	246.7	256.3	5.7	43.5	34.9	2
Papua	26.2	735.4	761.6	5.6	46.0	36.8	1
Indonesia	11,097.8	19,925.6	31,023.4	9.9	16.6	13.3	
Provinsi Kepulauan	869.3	2,027.9	2,897.4	7.8	10.2	9.3	

Sumber, BPS, 2010

Tabel 4.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, 1999-2009

Provinsi	1996		1999		2002		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	IPM	Rk	IPM	Rk	IPM	Rk	IPM	Rk	IPM	Rk	IPM	Rk	IPM	Rk	IPM	Rk	IPM	Rk
Nanggroe Aceh Darussalam	69.4	9	65.3	12	66.0	15	68.7	18	69.05	18	69.41	18	70.35	17	70.76	17	71.31	17
Sumatera Utara	70.5	7	66.6	8	68.8	7	71.4	7	72.03	8	72.46	8	72.78	8	73.29	8	73.80	8
Sumatera Barat	69.2	11	65.8	9	67.5	8	70.5	9	71.19	9	71.65	9	72.23	9	72.96	9	73.44	9
Riau	70.6	6	67.3	4	69.1	5	72.2	5	73.63	3	73.81	3	74.63	3	75.09	3	75.60	3
Jambi	69.3	10	65.4	11	67.1	10	70.1	10	70.95	11	71.29	10	71.46	12	71.99	13	72.45	13
Sumatera Selatan	68.0	15	63.9	16	66.0	16	69.6	13	70.23	13	71.09	13	71.40	13	72.05	12	72.61	10
Bengkulu	68.4	12	64.8	13	66.2	14	69.9	11	71.09	10	71.28	11	71.57	11	72.14	11	72.55	12
Lampung	67.6	16	63.0	18	65.8	18	68.4	19	68.85	19	69.38	19	69.78	20	70.30	20	70.93	21
Bangka Belitung	-	-	-	-	65.4	20	69.6	12	70.68	12	71.18	12	71.62	10	72.19	10	72.55	11
Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	70.8	8	72.23	7	72.79	7	73.68	6	74.18	6	74.54	6
DKI Jakarta	76.1	1	72.5	1	75.6	1	75.8	1	76.07	1	76.33	1	76.59	1	77.03	1	77.36	1
Jawa Barat	68.2	14	64.6	15	65.8	17	69.1	14	69.93	14	70.32	14	70.71	15	71.12	15	71.64	15
Jawa Tengah	67.0	17	64.6	14	66.3	13	68.9	17	69.78	16	70.25	15	70.92	14	71.60	14	72.10	14
Yogyakarta	71.8	2	68.7	2	70.8	3	72.9	3	73.50	4	73.70	4	74.15	4	74.88	4	75.23	4
Jawa Timur	65.5	22	61.8	22	64.1	25	66.8	23	68.42	22	69.18	20	69.78	19	70.38	18	71.06	18
Banten	-	-	-	-	66.6	11	67.9	20	68.80	20	69.11	21	69.29	23	69.70	23	70.06	23
Bali	70.1	8	65.7	10	67.5	9	69.1	15	69.78	15	70.07	16	70.53	16	70.98	16	71.52	16
Nusa Tenggara Barat	56.7	26	54.2	26	57.8	30	60.6	33	62.42	32	63.04	32	63.71	32	64.12	32	64.66	32
Nusa Tenggara Timur	60.9	24	60.4	24	60.3	28	62.7	31	63.59	31	64.83	31	65.36	31	66.15	31	66.60	31
Kalimantan Barat	63.6	23	60.6	23	62.9	27	65.4	27	66.20	28	67.08	28	67.53	29	68.17	29	68.79	28
Kalimantan Tengah	71.3	5	66.7	7	69.1	6	71.7	6	73.22	5	73.40	5	73.49	7	73.88	7	74.36	7
Kalimantan Selatan	66.3	19	62.2	21	64.3	23	66.7	24	67.44	26	67.75	26	68.01	26	68.72	26	69.30	26
Kalimantan Timur	71.4	4	67.8	3	70.0	4	72.2	4	72.94	6	73.26	6	73.77	5	74.52	5	75.11	5
Sulawesi Utara	71.8	3	67.1	6	71.3	2	73.4	2	74.21	2	74.37	2	74.68	2	75.16	2	75.68	2
Sulawesi Tengah	66.4	8	62.8	20	64.4	22	67.3	22	68.47	21	68.85	22	69.34	22	70.09	22	70.70	22
Sulawesi Selatan	66.0	21	63.6	17	65.3	21	67.8	21	68.06	23	68.81	23	69.62	21	70.22	21	70.94	20
Sulawesi Tenggara	66.2	20	62.9	19	64.1	26	66.7	25	67.52	24	67.80	25	68.32	25	69.00	25	69.52	25
Gorontalo	-	-	-	-	64.1	24	65.4	28	67.46	25	68.01	24	68.83	24	69.29	24	69.79	24
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	64.4	29	65.72	29	67.06	29	67.72	28	68.55	27	69.18	27
Maluku	68.2	13	67.2	5	66.5	12	69.0	16	69.24	17	69.69	17	69.96	18	70.38	19	70.96	19
Maluku Utara	-	-	-	-	65.8	19	66.4	26	66.95	27	67.51	27	67.82	27	68.18	28	68.63	29
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	63.7	30	64.83	30	66.08	30	67.28	30	67.95	30	68.58	30
Papua	60.2	25	58.8	25	60.1	29	60.9	32	62.08	33	62.75	33	63.41	33	64.00	33	64.53	33

Sumber: BPS

Dalam kaitannya dengan IPM, daerah yang penduduk miskinnya cukup besar maka akan mempunyai IPM yang rendah, dimana salah satu indikator perhitungan IPM adalah kesehatan, pendidikan dan standar hidup. Jika ketiga hal tersebut dapat diatasi maka angka kemiskinan dapat dipastikan menurun. Dengan menggabungkan persentase penduduk miskin terbanyak dan IPM dari provinsi berciri kepulauan (jika dikelompokkan dalam dua kelompok (rendah-tinggi)) dikombinasikan dengan PDRB per kapita (termasuk jumlah penduduk-nya), provinsi dengan penduduk miskin yang tinggi dan ber-IPM rendah, umumnya juga ber-PDRB per kapita rendah, dan sebaliknya. Berturut-turut dengan perbandingan dalam tahun 2010 (% miskin; IPM; dan PDRB per kapita) adalah Provinsi Maluku (27,7%-tinggi; 70,96-rendah; 5,27 juta Rp-rendah), Nusa Tenggara Timur (23%-tinggi; 66,60-rendah; 5,92 juta Rp-rendah), Nusa Tenggara Barat (21,6%-tinggi; 64,66-rendah; 10,97 juta Rp-rendah), Maluku Utara (9,4%-tinggi; 68,96-rendah; 5,2 juta Rp-rendah), Sulawesi Utara (9,1%-rendah; 75,69-tinggi; 16,25 juta Rp-tinggi), Kepulauan Riau (8,1%-rendah; 74,54-tinggi; 42,48 juta Rp-tinggi) dan Bangka Belitung (6,5%-rendah; 72,55-tinggi; 21,02 juta Rp-tinggi).

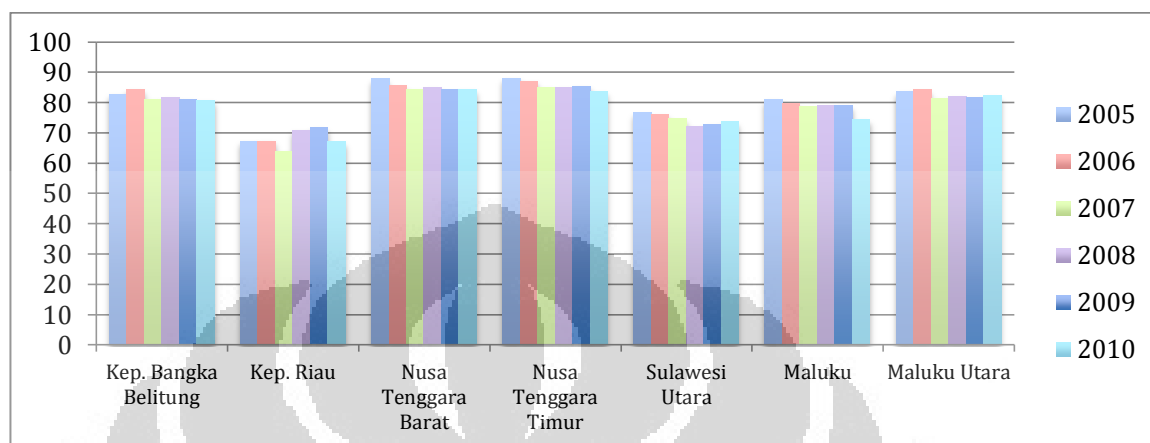
Tabel 4.14 memperlihatkan persentase kepemilikan rumah sendiri oleh penduduk di ketujuh provinsi kepulauan tersebut.

Tabel 4.14
Rumah Milik Sendiri, 2002-2010, (%)

Provinsi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rank
Aceh	52.53	86.87	82.98	78.33	79.04	77.89	77.95	77.46	76.59	16
Sumatera Utara	71.03	73.64	70.42	70.62	69.07	66.28	66.14	67.34	66.58	29
Sumatera Barat	73.32	74.03	74.98	72.91	69.84	64.91	68.28	66.55	68.53	27
Riau	74.08	73.66	72.49	74.37	71.59	66.89	67.04	67.25	66.56	30
Jambi	77.82	78.34	76.99	77.42	77.54	75.06	75.37	76.47	76.98	15
Sumatera Selatan	78.76	80.71	79.18	79.62	77.57	76.3	76.6	75.51	75.89	17
Bengkulu	81.52	81.06	78.6	79.76	77.1	75.78	75.39	77.36	78.05	14
Lampung	90.47	90.11	89.88	88.8	88.07	86.05	87.01	85.97	86.70	3
Kep. Bangka Belitung	84.97	86.27	82.29	82.72	84.23	80.88	81.54	80.91	80.75	13
Kep. Riau	-	-	-	67.21	67.33	63.83	70.95	71.86	67.09	28
DKI Jakarta	59.23	56.57	55.25	53.3	51.69	47.76	50.26	48.02	45.19	33
Jawa Barat	83.47	84.03	83.22	82.83	81.2	79.1	77.28	78.09	75.67	18
Jawa Tengah	89.43	90.19	89.06	89.12	89.18	88.35	88.31	88.45	87.88	1
DI Yogyakarta	77.25	75.13	72.61	73.31	72.41	74.09	75.36	78.63	74.50	20
Jawa Timur	87.69	89.54	88.08	88.2	88.27	86.66	87.63	88.09	87.05	2
Banten	81.29	81.26	82.57	80.82	82.16	76.56	75.41	74.2	72.33	25
Bali	79.24	83.65	79.46	79.03	77.01	73.86	77.11	76.84	71.28	26
Nusa Tenggara Barat	88.94	88.61	87.33	87.87	85.56	84.45	85.06	84.34	84.46	4
Nusa Tenggara Timur	87.92	88.87	88.39	88	87.14	85.11	85.13	85.36	83.74	7
Kalimantan Barat	85.91	88.87	87.17	86.51	87.6	84.65	85.08	85.82	84.00	5
Kalimantan Tengah	79.78	80.87	78.55	78.9	78.47	74.55	77.53	76.93	72.68	24
Kalimantan Selatan	77.81	79.85	77.93	78.52	77.8	75.18	75.78	74.79	73.78	22
Kalimantan Timur	66.3	67.91	68.81	69.64	69.1	65.65	64.92	66.05	63.88	31
Sulawesi Utara	73.89	78.18	74.51	76.58	75.95	74.65	72.11	72.75	73.75	23
Sulawesi Tengah	82.84	84.28	84.96	82.63	82.22	80.53	80.78	81.5	81.34	12
Sulawesi Selatan	85.2	86.21	85.98	84.5	83.52	80.49	82.26	81.11	82.40	8
Sulawesi Tenggara	82.65	85.89	85.25	83.44	82.02	82.83	82.3	83.94	82.32	9
Gorontalo	73.68	77.05	74.22	73.49	70.86	72.48	77.6	75.1	74.44	21
Sulawesi Barat	-	-	-	-	88.67	86.2	86.72	86.77	83.99	6
Maluku	62.74	81.69	79.64	81.04	79.79	78.59	79.02	78.96	74.57	19
Maluku Utara	64.8	82.67	84.41	83.7	84.32	81.41	82.13	81.74	82.27	10
Papua Barat	-	-	-	-	69.98	65.19	66.06	67.71	63.67	32
Papua	50.07	77.23	77.34	73.74	76.8	75.37	76.95	77.35	81.71	11
Total	82.47	83.66	82.38	81.95	81.24	79.06	79.25	79.36	78.00	

Sumber: BPS

Apabila digambarkan, perkembangan kepemilikan rumah sendiri provinsi kepulauan relatif menunjukkan penurunan tren kepemilikan rumah sendiri, seperti terlihat dalam **Gambar 4.15**.



Gambar 4.15

Kepemilikan Rumas Sendiri Provinsi Kepulauan, 2005-2010, %

Sumber: BPS, diolah

4.8. Infrastruktur Dasar

Listrik, air bersih dan sanitasi merupakan tiga elemen penting penunjang kehidupan manusia di masa kini. Listrik sebagai sumber penerangan sangat diperlukan dalam pembangunan suatu daerah yakni sebagai sumber energi untuk melakukan aktifitas ekonomi. Kemajuan suatu daerah dapat terlihat dari ketersediaan infrastruktur listrik, baik pasokan maupun jaringan. Pada **Tabel 4.15** terlihat Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung memiliki akses yang bagus terhadap sumber penerangan sedangkan provinsi kepulauan lainnya sangat sulit untuk mendapatkan akses listrik terlebih Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami kendala besar dalam ketersediaan sumber penerangan listrik. Pemeringkatan (*rank*) pada **Tabel 4.15** disajikan hanya untuk tahun 2010.

Tabel 4.15
Sumber Penerangan Listrik Menurut Provinsi Tahun 2002-2010 (%)

Provinsi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rank
Aceh	99.38	84.94	88.76	na	84.35	85.42	89.83	91.5	93.33	12
Sumatera Utara	86.18	87.77	88.01	na	90.99	90.96	92.59	93.11	92.91	13
Sumatera Barat	77.98	80.22	80.29	na	83.86	86.92	88.65	89.83	90.77	17
Riau	74.48	75.16	78.75	na	79.91	84.84	87.2	88.65	88.05	20
Jambi	63.64	67.69	72.15	na	79.23	82.65	84.39	85.85	87.93	21
Sumatera Selatan	64.06	65.54	69.5	na	77.21	80.52	83.44	88.04	88.69	19
Bengkulu	65.02	65.57	71.25	na	73.71	77.35	80.57	87.04	85.9	22
Lampung	53.75	59.75	61.44	na	72.67	81.12	86.27	88.24	91.29	16
Kep. Bangka Belitung	85.72	83.7	88.59	na	91.25	92.23	93.99	93.99	92.77	14
Kep. Riau	99.97	98.83	99.6	na	89.84	92.77	87.34	93.18	95.45	9
DKI Jakarta	-	-	-	na	99.94	99.68	99.63	99.57	99.58	2
Jawa Barat	95.95	97.13	97.75	na	98.26	97.77	98.43	98.72	99.01	4
Jawa Tengah	96.35	97.03	97.12	na	97.93	97.76	98.47	98.79	99.2	3
DI Yogyakarta	97.59	97.41	98.38	na	98.57	98.53	98.8	99.26	99.59	1
Jawa Timur	95.93	96.29	96.86	na	98	97.11	98.35	98.61	98.97	5
Banten	90.41	92.61	93.78	na	94.35	93.18	96.45	97.24	97.67	7
Bali	97.03	96.16	96.85	na	97.66	97.96	97.85	97.63	97.72	6
Nusa Tenggara Barat	78.86	77.39	81.28	na	82.04	84.71	86.17	89.65	89.39	18
Nusa Tenggara Timur	36.97	36.65	37.57	na	38.81	38.68	41.71	46.17	52.55	32
Kalimantan Barat	67.08	69.83	71.47	na	75.02	76.97	78.66	75.36	77.97	29
Kalimantan Tengah	63.65	66.37	67.31	na	69.19	74	75.16	77.49	81.54	24
Kalimantan Selatan	83.54	84.75	87.75	na	89.46	91.33	93.84	93.76	94.01	11
Kalimantan Timur	88.66	89.59	91.13	na	92.23	91.17	93.16	94.65	95.18	10
Sulawesi Utara	90.05	91.7	94.49	na	94.85	94.84	95.8	95.66	96.58	8
Sulawesi Tengah	60.85	63.19	66.63	na	69.43	74.13	77.72	78.41	80.44	25
Sulawesi Selatan	76.66	78.03	79.27	na	85.23	87.68	88.53	90.38	92.49	15
Sulawesi Tenggara	52.05	57.47	61.42	na	65.28	71.3	76.34	80.8	79.29	28
Gorontalo	61.42	59.79	59.14	na	66.64	76.71	76.9	80.2	77.33	30
Sulawesi Barat	-	-	-	na	64.68	68.94	77.59	82.27	74.25	31
Maluku	100	69.91	67.96	na	69.76	74.98	75.06	73.26	79.64	27
Maluku Utara	91.65	62.05	57.26	na	63.09	72.74	75.83	72.5	79.67	26
Papua Barat	-	-	-	na	60.93	67.26	67.48	68.99	82.17	23
Papua	100	42.22	45.42	na	39.99	46.37	41.82	42.78	42.71	33
Total	87.6	87.94	89.01	na	90.62	91.47	92.73	93.55	94.15	

Sumber: BPS; na = *not available* / data tidak tersedia.

Akses masyarakat terhadap sanitasi juga menjadi salah satu indikator kemajuan suatu daerah dimana sanitasi yang layak terkait erat dengan kesehatan. Jika masyarakat dapat memperoleh sanitasi yang memadai atau bahkan bagus maka peluang mereka untuk terkena penyakit menjadi kecil dan pengeluaran untuk biaya dokter dan pengobatan dapat digunakan untuk kegiatan produktif lainnya seperti biaya sekolah atau membeli nutrisi yang cukup. Pada **Tabel 4.16** terlihat bahwa terdapat 4 (empat) provinsi kepulauan yang memiliki sanitasi yang kurang layak yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Keempat daerah provinsi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk mengatasi sumber masalah penyediaan sanitasi di daerahnya. Kekurangan sanitasi ini sejalan dengan keadaan kekurangan air bersih, listrik dan tingginya tingkat kemiskinan yang terjadi di provinsi, Kondisi yang menjadi lingkaran berputar yang sulit dipecahkan bila pengentasan kemiskinan di daerah provinsi ini tidak dilaksanakan dengan terpadu dan terarah, terkoordinir antara pemangku kepentingan.

Air bersih atau layak pakai juga menjadi salah hal penting yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah karena kaitannya kepada kehidupan manusia. Air minum yang layak akan memberikan kesehatan bagi yang meminumnya, sehingga manusia yang sehat mampu bekerja dan menghasilkan. Tidak seperti indikator-indikator sebelumnya, air minum yang layak terdapat cukup banyak di daerah yang tergolong rendah bahkan miskin sedangkan pada daerah yang memiliki kemampuan finansial yang baik malah yang tidak mempunyai ketersediaan air bersih yang cukup. Hal ini dapat dilihat pada **Tabel 4.17** dibawah yaitu Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sulawesi Utara mengalami masalah dalam menyediakan air minum yang layak. Hal ini berkaitan dengan kondisi geografis kepulauan yang sukar mencari sumber mata air, dan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan daerah untuk mencari dan memelihara sumber mata air.

Tabel 4.16
Sanitasi Layak Menurut Provinsi Tahun 2002-2010 (%)

Provinsi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rank
Aceh	93.97	30.8	35.66	n.a	24.08	30.65	40.17	42.03	45.17	25
Sumatera Utara	39.91	37.95	40.39	n.a	41.82	49.11	52.87	51.92	57.1	11
Sumatera Barat	28.01	29.33	28.44	n.a	29.86	36.16	37.59	39.21	44.26	27
Riau	39.53	37.06	37.95	n.a	32.74	43.12	54.64	52.75	54.27	13
Jambi	28.98	26.62	30.51	n.a	29.08	35.26	38.91	40.93	51.98	16
Sumatera Selatan	25.95	24.01	26.74	n.a	24.72	37.57	38.39	41.48	44.36	26
Bengkulu	23.34	21.43	28.26	n.a	24.2	31.08	31.5	34.66	41.64	29
Lampung	22.88	21.53	26.44	n.a	24.44	31.85	37.72	38.43	43.85	28
Kep. Bangka Belitung	38.48	39.63	40.49	n.a	39.23	47.54	55.74	60.66	65.06	6
Kep. Riau	-	-	-	n.a	34.97	48.89	46.39	45.78	72.37	4
DKI Jakarta	76.1	68.82	71.46	n.a	65.21	74.49	75.61	80.37	84.57	1
Jawa Barat	34.95	37.36	38.97	n.a	35.89	45.05	49.04	52.17	55.57	12
Jawa Tengah	35.01	36.42	38.89	n.a	39.68	46.34	50.41	54.06	57.76	10
DI Yogyakarta	52.56	55.97	61.91	n.a	54.94	68.49	73.44	75.35	81.85	2
Jawa Timur	30.46	31.57	35.37	n.a	32.68	42.44	47.49	51.07	52.96	15
Banten	45.66	48.33	50.79	n.a	40.91	50.57	57.75	58.82	63.78	8
Bali	61.25	61.17	63.08	n.a	61.16	74.1	77.13	75.95	79.13	3
Nusa Tenggara Barat	25.46	23.25	26.69	n.a	16.37	33.79	42.32	39.83	47.43	21
Nusa Tenggara Timur	10.26	10.55	10.68	n.a	9.06	15.43	17.41	14.98	26.23	32
Kalimantan Barat	23.87	24.85	24.63	n.a	25.45	32.21	36.56	40.12	45.32	24
Kalimantan Tengah	17.52	19.77	22.11	n.a	16.54	21.82	24.4	25.78	35.14	31
Kalimantan Selatan	20.3	21.19	25.19	n.a	21.55	27.04	36.67	41.16	48.95	18
Kalimantan Timur	44.46	44.95	41.51	n.a	35.09	48.97	52.79	58.48	68.37	5
Sulawesi Utara	48.8	49.16	48.38	n.a	42.04	54.46	54.36	63.59	64.87	7
Sulawesi Tengah	25.25	29.15	29.76	n.a	27.14	33.71	43.76	42.02	48.25	20
Sulawesi Selatan	38.99	38.39	39.22	n.a	36.74	47.37	51.01	57.58	61.45	9
Sulawesi Tenggara	24.17	27.6	29.2	n.a	27.1	36.43	42.6	45.91	50.87	17
Gorontalo	25.42	27.35	26.79	n.a	18.37	33.64	37.32	43.84	45.66	23
Sulawesi Barat	-	-	-	n.a	14.17	28.87	38.68	45.35	41.3	30
Maluku	39.49	23.48	27.04	n.a	19.76	31.45	40.19	38.69	48.28	19
Maluku Utara	67.81	33.93	39.04	n.a	28.57	41.56	45.9	43.18	53.26	14
Papua Barat	-	-	-	n.a	22.64	26.19	26.54	32.63	46.91	22
Papua	32.93	17.98	23.47	n.a	13.06	21.86	18.34	21.65	23.97	33
Total	35.64	35.61	38.13	n.a	35.03	44.2	48.56	51.19	55.53	

Sumber: BPS; n.a = not available / data tidak tersedia

Tabel 4.17
Air Minum Layak Menurut Provinsi Tahun 2002-2010 (%)

Provinsi	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Rank
Aceh	79.59	37.48	42.63	31.28	31.34	32.85	28.02	30.6	29.02	29
Sumatera Utara	50.05	49.59	50.24	48	50.67	49.85	49.52	51.04	46.06	13
Sumatera Barat	47.28	47.09	49.11	45.11	46.45	47.56	46.23	46.62	41.92	19
Riau	51.41	53.66	49.84	49.58	46.54	50.28	45.17	40.96	40.01	22
Jambi	49.37	47.96	53.79	50.01	46.62	52.04	53.52	51.19	48.28	11
Sumatera Selatan	40.34	46.28	42.41	45.06	45.26	49.59	45.89	48.53	45.99	14
Bengkulu	35.42	30.89	31.88	33.86	36.73	26.93	26.82	33.02	28.23	31
Lampung	38.71	41.35	39.05	43.74	42.92	38.68	39.77	40.29	38.07	24
Kep. Bangka Belitung	41.17	31.64	32.05	33.66	31.39	37.73	37.36	36.84	38.17	23
Kep. Riau	-	-	-	57.03	57.03	43.1	34.72	37.74	23.82	32
DKI Jakarta	63.76	62.54	60.91	57.5	56.85	49.27	39.2	34.81	28.41	30
Jawa Barat	39.42	38.07	40.04	39.23	38.82	39.52	38.06	40.51	35.32	26
Jawa Tengah	52.06	50.48	55.2	52.84	54.58	55.25	54.45	58.3	57.44	2
DI Yogyakarta	57.29	55.05	52.42	55.4	54.93	59.22	58.2	60.38	60.41	1
Jawa Timur	54.67	55.7	54.84	53.57	52.87	56.88	56.04	55.7	52.94	6
Banten	36.03	37.6	38.55	35.8	34.49	29.59	26.27	27.47	22.32	33
Bali	66.74	66.81	65.09	64.84	60.33	58.12	57.17	59.99	48.44	10
Nusa Tenggara Barat	42.91	35.93	37.78	39.18	39.67	45.4	42.81	44.96	46.2	12
Nusa Tenggara Timur	42.16	40.2	42.74	43.6	45	43.82	46.53	45.45	49.29	8
Kalimantan Barat	53.24	54.15	55.06	53.24	55.38	56.43	54.64	54.02	54.47	4
Kalimantan Tengah	34.64	39.77	38.97	37.04	37.37	38.45	37.53	36.89	40.55	20
Kalimantan Selatan	47.22	47.16	52.59	48.58	54.16	54.87	52.88	51.97	48.97	9
Kalimantan Timur	62.63	63.42	65.03	61.28	65.61	63.17	59.1	55.71	43.27	18
Sulawesi Utara	57.32	54.29	58.79	49.11	56.08	51.03	45.21	44.49	44.41	17
Sulawesi Tengah	38.43	39.69	38.09	44.94	39.45	37.4	40.57	44.36	35.1	27
Sulawesi Selatan	45.24	46.34	47.65	45.82	50.12	47.12	47.49	50.13	45.12	16
Sulawesi Tenggara	50.69	52.92	54.37	53.78	53.83	54.55	55.88	59.12	50.74	7
Gorontalo	29.95	31.07	39.34	34.84	39.44	42.96	36.93	44.85	40.09	21
Sulawesi Barat	-	-	-	-	33.19	41.02	42.21	42.92	37.44	25
Maluku	66.64	49.94	50.85	60.86	56.26	55.1	47.54	55.5	56.95	3
Maluku Utara	81.69	41.9	43.65	44.98	45.03	43.57	44.15	43.75	54.18	5
Papua Barat	-	-	-	-	43.25	45.79	38.8	48.08	45.26	15
Papua	89.63	35.64	37.19	38.72	36.33	40.44	33.2	35.44	32.42	28
Total	48.33	47.73	48.81	47.62	47.79	48.31	46.45	47.71	44.19	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

4.9. Rekapitulasi Kinerja Provinsi Kepulauan

Secara umum dari uraian diatas dapat digambarkan ketujuh provinsi kepulauan tersebut masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda mengikuti indikator kinerja masing-masing provinsi tersebut diatas, yang dapat dirangkum dalam **Tabel 4.18**. Dan dari **Tabel 4.18** tersebut, di peringkat kembali dalam urutan 1 sampai dengan 7 untuk provinsi berciri kepulauan, dengan mengesampingkan sementara faktor DAU yang dialokasikan, dan mengelompokkan provinsi yang memiliki peringkat terkritik (dengan mengambil dua hingga tiga peringkat tertinggi), berturut-turut diperoleh Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, sebagaimana disajikan dalam **Tabel 4.19**. Karakteristik yang spesifik dan berbeda dari tiap-tiap provinsi ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja masing-masing provinsi kepulauan. Seperti faktor jumlah penduduk dan faktor penyebaran penduduk yang selayaknya juga dibarengi dengan penyebaran distribusi listrik dan pelayanan kesehatan serta pendidikan misalnya boleh jadi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun terkendala oleh prasarana infrastruktur dan akses ke pelayanan dasar tersebut. Ini boleh jadi merupakan tantangan berat pemerintahan daerah kepulauan karena faktor akses transportasi, infrastruktur pelabuhan, cuaca yang harus melalui laut sehingga biaya transportasi menjadi lebih mahal, sedangkan informasi pengukuran kebutuhan transportasi yang berbeda-beda misalnya belum sepenuhnya tersedia. Dari penjabaran sebelumnya, masing-masing provinsi telah dipilah oleh pemerintah dengan menetapkan prioritas pertama dan kedua (lihat **Tabel 4.11**) yang menjadi fokus pemberdayaan melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan untuk perencanaan anggaran 2012.

Tabel 4.18

Rekapitulasi Kinerja Pembangunan Provinsi Berciri Kepulauan

Provinsi	Kepadatan penduduk (jw/km ²)	% perubahan PDRB per kapita (nasional 13,58%); (provinsi kepulauan 13,34%)	Distribusi PDRB harga berlaku	Pertumbuhan ekonomi rata-rata 2006-2010 terhadap nasional	DAU Se-provinsi	DAU per-provinsi	Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)	kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rumah milik sendiri	Listrik	Sanitasi Layak	Air minum layak
Bangka Belitung	74	11.85% < nas	27	<			Tinggi	30	11	13	14	6	23
Kepulauan Riau	206	12.09% < nas	15	>			Sangat Tinggi	26	6	28	9	4	32
Nusa Tenggara Barat	242	16.39% > nas	20	>			Rendah	6	32	4	18	21	12
Nusa Tenggara Timur	96	14.61% > nas	26	<			Rendah	5	31	7	32	32	8
Sulawesi Utara	164	11.51% < nas	23	>			Sedang	22	2	23	8	7	17
Maluku	33	14.36% > nas	32	<			Rendah	3	19	19	27	19	3
Maluku Utara	32	14.86% >nas	33	>			Sedang	21	29	10	26	14	5

Sumber : diolah penulis

Tabel 4.19

Peringkat Provinsi Berciri Kepulauan

Provinsi	Kepadatan penduduk (jw/km ²)	% perubahan PDRB per kapita (nasional 13,58%); (provinsi kepulauan 13,34%)	Distribusi PDRB harga berlaku	Pertumbuhan ekonomi rata-rata 2006-2010 terhadap nasional	DAU Se-provinsi	DAU per-provinsi	Indeks Kapasitas Fiskal (IKF)	kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Rumah milik sendiri	Listrik	Sanitasi Layak	Air minum layak
Bangka Belitung	5	7	5	<			Tinggi	7	3	4	3	2	6
Kepulauan Riau	2	6	1	>			Sangat Tinggi	6	2	7	2	1	7
Nusa Tenggara Barat	1	1	2	>			Rendah	3	7	1	4	6	4
Nusa Tenggara Timur	4	3	4	<			Rendah	2	6	2	7	7	3
Sulawesi Utara	3	5	3	>			Sedang	5	1	6	1	3	5
Maluku	6	4	6	<			Rendah	1	4	5	6	5	1
Maluku Utara	7	2	7	>			Sedang	4	5	3	5	4	2

Sumber: diolah penulis.

Peta wilayah masing-masing provinsi kepulauan, berturut-turut untuk provinsi Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Maluku Utara, disajikan sebagai lampiran.

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Model Analisa Data Panel

Menggunakan model ekonometrika dengan regresi panel data untuk menganalisa dampak dari alokasi DAU pada kinerja pembangunan daerah untuk provinsi berciri kepulauan dengan analogi dari persamaan (5.1), dengan memasukkan variabel-variabel lain seperti Produk Domestik Regional Bruto sebagai *dependent variable*, dan Indeks Pembangunan Manusia, populasi, luas wilayah daratan, luas lautan, Pendapatan Asli Daerah Se-provinsi, Dana Alokasi Umum Se-provinsi, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dari masing-masing provinsi, disertai Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya dan *dummy variable* untuk provinsi kepulauan sebagai *independent variable*, sebagai berikut:

$$YHKMIG_r = f(IPM_r, POP_r, LD_r, LL_r, PADSP_r, DAUSP_r, DAK_r, DBH_r, YHKMIG1_r, DPROV_r) \quad (5.1)$$

dimana:

- $YHKMIG_r$: Pendapatan Domestik Regional Bruto Harga Konstan (Migas) sebagai Indikator kinerja pembangunan daerah
- IPM_r : Indeks Pembangunan Manusia dari suatu daerah
- POP_r : Jumlah penduduk di suatu daerah
- LD_r : Luas wilayah daratan di suatu daerah
- LL_r : Luas lautan di suatu daerah
- $PADSP_r$: Pendapatan Asli Daerah Se-Provinsi (total pendapatan provinsi dan kabupaten/kota) di suatu daerah
- $DAUSP_r$: Alokasi DAU Se-Provinsi di suatu daerah
- DAK_r : Alokasi DAK di suatu daerah
- DBH_r : Alokasi DBH di suatu daerah
- $YHKMIG1_r$: Pendapatan Domestik Regional Bruto Harga Konstan (Migas) tahun sebelumnya di suatu daerah
- $DPROV$: *Dummy* Provinsi Berciri Kepulauan, (DPROV Kepulauan = 1)
- r : Daerah Provinsi

Adapun model regresinya dalam bentuk log linier dapat ditulis sebagai berikut:

$$\log(YHKMIG) = \beta_0 + \beta_1 \log(IPM) + \beta_2 \log(POP) + \beta_3 \log(LD) + \beta_4 \log(LL) + \beta_5 \log(PADSP + DAUSP + DBH + DAK) + \beta_6 \log(YHKMIG1) + \beta_7 \log(DPROV) + \varepsilon \quad (5.2)$$

Dalam penelitian ini, persamaan (5.2) menunjukkan *dependent variable* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang memasukkan unsur pendapatan migas, dalam bentuk data panel diregresikan dalam fungsi logaritma terhadap *independent variable*: Indeks Pembangunan Manusia (IPM), populasi penduduk provinsi (POP), luas wilayah daratan (LD), luas lautan (LL), kesatuan dari Pendapatan Asli Daerah Se-Provinsi (PADSP), dana alokasi umum Se-provinsi (DAUSP), dana bagi hasil (DBH), dan dana alokasi khusus (DAK), kemudian Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya dan *dummy variable* provinsi (DPROV), dimana untuk *dummy* provinsi kepulauan ditandai dengan (DPROV=1).

5.1.1. Hasil Estimasi

Sebelum dilakukan pengolahan terhadap persamaan yang ada, hal yang terpenting untuk dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan terhadap asumsi tidak adanya hubungan linear antar variabel bebas (*no multikolinierity*). Pengecekan dilakukan dengan melakukan penghitungan terhadap koefisien korelasi antar variabel bebas. Hasil pengolahan untuk koefisien korelasi yang dimaksudkan tersebut dapat dilihat dalam **Tabel 5.1** berikut ini:

Tabel 5.1
Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas

	IPM	POP	LD	LL	PADSP	DAUSP	DAK	DBH	DPROV
IPM	1.000	0.058	-0.182	0.030	0.210	0.012	-0.007	0.350	-0.113
POP	0.058	1.000	-0.127	-0.117	0.930	0.886	0.572	0.206	-0.242
LD	-0.182	-0.127	1.000	0.091	-0.064	0.073	0.161	0.397	-0.264
LL	0.030	-0.117	0.091	1.000	-0.135	-0.001	0.134	-0.052	0.428
PADSP	0.210	0.930	-0.064	-0.135	1.000	0.854	0.612	0.396	-0.287
DAUSP	0.012	0.886	0.073	-0.001	0.854	1.000	0.859	0.129	-0.266
DAK	-0.007	0.572	0.161	0.134	0.612	0.859	1.000	0.061	-0.166
DBH	0.350	0.206	0.397	-0.052	0.396	0.129	0.061	1.000	-0.224
DPROV	-0.113	-0.242	-0.264	0.428	-0.287	-0.266	-0.166	-0.224	1.000

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Dari hasil pengolahan koefisien korelasi ditunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara jumlah penduduk (POP) dengan Pendapatan Asli Daerah (PADSP) dan Dana Alokasi Umum (DAUSP), antara Pendapatan Asli Daerah (PADSP) dengan Dana Alokasi Umum (DAUSP) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh karena itu, diperlukan *treatment* terhadap persamaan yang akan digunakan.

Dengan melakukan *dropping* (penghilangan) variabel jumlah penduduk (POP), dan menggabungkan Pendapatan Asli Daerah dengan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil (sebagai variabel penerimaan daerah, dikarenakan menjadi prioritas dalam studi ini), maka hasil estimasinya dengan menggunakan Metode PLS dan Metode *Random Effect* masing-masing dapat dilihat dalam **Tabel 5.2** dan **Tabel 5.3**. Pengolahan dengan menggunakan Metode Fixed Effect ternyata tidak dapat dilakukan dikarenakan terjadinya *near singular matrix* dalam proses pengolahannya.

Tabel 5.2
Hasil Estimasi dengan Metode PLS

Dependent Variable: LOG(YHKMIG?)
Method: Pooled Least Squares
Sample: 2003 2010
Included observations: 8
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 264
White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.034360	0.326432	-0.105261	0.9163
LOG(IPM?)	0.043518	0.081920	0.531224	0.5957
LOG(LD?)	-0.005889	0.003399	-1.732460	0.0844
LOG(LL?)	-0.003114	0.001315	-2.369139	0.0186
LOG(PADSP?+DAUSP?+DBH?+DAK?)	0.005971	0.003542	1.685874	0.0930
LOG(YHKMIG1?)	0.990680	0.002004	494.4334	0.0000
DPROV?	-0.001666	0.005011	-0.332389	0.7399
R-squared	0.998661	Mean dependent var		10.09552
Adjusted R-squared	0.998629	S.D. dependent var		1.306342
S.E. of regression	0.048363	Akaike info criterion		-3.194025
Sum squared resid	0.601107	Schwarz criterion		-3.099208
Log likelihood	428.6113	Hannan-Quinn criter.		-3.155925
F-statistic	31938.77	Durbin-Watson stat		2.165123
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 6 :, 2011

Tabel 5.3
Hasil Estimasi dengan Metode Random Effect

Dependent Variable: LOG(YHKMIG?)
 Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)
 Sample: 2003 2010
 Included observations: 8
 Cross-sections included: 33
 Total pool (balanced) observations: 264
 Swamy and Arora estimator of component variances
 White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.110775	0.400323	-0.276714	0.7822
LOG(IPM?)	0.060719	0.102346	0.593274	0.5535
LOG(LD?)	-0.005783	0.004818	-1.200317	0.2311
LOG(LL?)	-0.003100	0.001856	-1.670183	0.0961
LOG(PADSP?+DAUSP?+DBH?+DAK?)	0.007078	0.004021	1.760242	0.0796
LOG(YHKMIG1?)	0.989211	0.002589	382.0257	0.0000
DPROV?	-0.002346	0.006955	-0.337362	0.7361
Random Effects (Cross)				
_NAD--C	-0.032510			
_SUMUT--C	0.008327			
_SUMBAR--C	0.003128			
_RIAU--C	-0.018714			
_JAMBI--C	-0.005251			
_SUMSEL--C	-0.005350			
_BENGKULU--C	-0.005290			
_LAMPG--C	-0.000975			
_BABEL--C	0.003279			
_KEPRI--C	0.007233			
_DKI--C	0.008033			
_JABAR--C	0.006508			
_JATENG--C	0.004233			
_DIY--C	-0.015517			
_JATIM--C	0.011179			
_BANTEN--C	0.008739			
_BALI--C	-0.006706			
_NTB--C	-0.001304			
_NTT--C	-0.001636			
_KALBAR--C	0.003488			
_KALTENG--C	0.002441			
_KALSEL--C	0.004475			
_KALTIM--C	-0.006056			
_SULUT--C	0.001665			
_SULTENG--C	0.012435			
_SULSEL--C	0.003880			
_SULTRA--C	0.011375			
_GRTL--C	-0.004877			
_SULBAR--C	0.006535			
_MALUKU--C	-0.003916			
_MALUT--C	-0.005321			
_PABAR--C	0.019785			
_PAPUA--C	-0.013315			

Tabel 5.3 (Sambungan)
Hasil Estimasi dengan Metode Random Effect

Effects Specification			
		S.D.	Rho
Cross-section random		0.015445	0.1084
Idiosyncratic random		0.044303	0.8916
Weighted Statistics			
R-squared	0.997617	Mean dependent var	7.188504
Adjusted R-squared	0.997561	S.D. dependent var	0.935045
S.E. of regression	0.046176	Sum squared resid	0.547985
F-statistic	17930.75	Durbin-Watson stat	2.373534
Prob(F-statistic)	0.000000		
Unweighted Statistics			
R-squared	0.998660	Mean dependent var	10.09552
Sum squared resid	0.601637	Durbin-Watson stat	2.161869

Sumber: Hasil Pengolahan Eviews 6 :, 2011

5.1.2. Pengujian Model Panel

Pendekatan pengolahan data panel untuk mengestimasi model regresi data panel dapat menggunakan *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Masing-masing pendekatan ini dapat diuji untuk memperoleh teknik yang akan dipilih untuk regresi data panel. Dikenal tiga uji yang sering dipergunakan untuk menentukan pendekatan model tepat untuk pengolahan data panel tersebut Gujarati (2004), yakni: *F-test* (uji signifikansi *fixed effect*), *LM-test* (uji signifikansi *random effect*, dan *Hausman test* (uji signifikansi *fixed effect* atau *random effect*). Dalam menguji data panel dalam penelitian ini akan digunakan pengujian *F-test* dan *Hausman test* untuk menentukan model yang tepat dalam mengestimasi model regresi data panel.

a. Uji Signifikansi *Fixed Effect* (F-test)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui model regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari model regresi *common effect* (*pooled least square*). Hipotesis *null* (H_0) pengujian ini adalah model *common effect* lebih baik digunakan, sebaliknya hipotesis alternatifnya (H_a) adalah menolak model *common effect* dan memilih model *fixed effect* sebagai model yang lebih baik.

Dengan bantuan software Eviews 6, tidak diperoleh hasil pengujian karena menunjukkan “*near singular matrix*”, sehingga pilihan dilakukan dengan langsung melakukan uji signifikansi melalui *Hausman Test*.

b. Uji Signifikansi *Fixed* atau *Random Effect* (*Hausman Test*)

Setelah diketahui bahwa antara memilih model *common effect* yang dibandingkan *fixed effect* tidak dapat dilanjutkan karena “*near singular matrix*”, maka selanjutnya dengan menggunakan *Hausman test*, akan dilakukan pengujian untuk memilih apakah lebih tepat menggunakan model *fixed effect* (MFE) atau model *random effect* (MRE). Hipotesis null pengujian ini adalah lebih baik menggunakan MRE, sedangkan hipotesis alternatifnya adalah menolak MRE, dan yang lebih baik adalah MFE. Dengan menggunakan *software* Eviews versi 6, diperoleh hasil pengujian pada **Tabel 5.4** sebagai berikut:

Tabel 5.4
Hasil Pengujian *Fixed* atau *Random Effect*

<i>Test summary</i>	<i>Chi-square Statistic</i>	<i>Chi-square d.f.</i>	<i>Prob.</i>	<i>Coef covariance method</i>
<i>Cross-section random</i>	23.935749	3	0.0000	<i>White cross-section</i>

Sumber: Hasil pengolahan *Hausman Test* Eviews 6, 2011

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa hasil pengujian signifikansi, dengan nilai probabilitas (ρ value) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$. Hasil *Hausman Test* menunjukkan penolakan terhadap *hipotesis null*, sehingga dengan demikian model *fixed effect* lebih tepat digunakan dibandingkan model *random effect*. Namun, dikarenakan hasil dari pengolahan dengan menggunakan metode *fixed effect* tidak dapat dilakukan, maka hasil dari pengolahan dengan menggunakan metode *common effect* atau PLS yang nantinya digunakan.

5.1.3. Evaluasi Ekonometrika: Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian lebih lanjut adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas. Uji multikolinieritas telah dilakukan pada bagian sebelumnya, yaitu sebelum dilakukan pengolahan regresi.

a. Uji Autokorelasi

Jika terjadi autokorelasi berarti terjadi hubungan antara anggota-anggota serangkaian pengamatan yang tersusun dalam suatu rangkaian waktu (*time series*). Masalah yang timbul dari kesalahan pengganggu (*residual*) yang tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya atau dimana terdapat korelasi yang tinggi antara e_t dan e_{t-1} . Akibatnya nilai parameter (b) yang diperoleh tetap linier dan tidak bias, akan tetapi varian (S_b) menjadi bias, atau parameter tidak efisien. Dampaknya uji signifikansi variabel yang dilakukan melalui uji t , yang diperoleh dari $t = \frac{b}{S_b}$, tidak bisa ditentukan.

Untuk mengatasi autokorelasi dilakukan uji Durbin-Watson (DW). Nilai Durbin-Watson dari hasil regresi metode *pooled least square* adalah sebesar 2.165123, sedangkan nilai Durbin-Watson dari regresi dengan *random effect*, metode *pooled EGLS (cross-section random effects)* adalah sebesar 2.373534. Sementara itu nilai kritis statistik Durbin Watson dengan k , n dan $\alpha = 1\%$ adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5
Daerah Kritis Uji Durbin Watson

	Statistik Durbin-Watson
k = jumlah variabel penjelas tidak termasuk konstanta	6
n = jumlah observasi	264
(tingkat signifikan) $\alpha = 1\%$	1%
dL	1.707
$-dU$	1,831
$4 - dU$	2,169
$4 - dL$	2,293

Tolak H_0 bukti autokorelasi positif	Daerah keraguan			Daerah keraguan			Tolak H_0 bukti autokorelasi negatif
		Menerima H_0 atau H_0^* atau kedua-duanya					
0	1,707	1,831	2	2,169	2,293	4	
0	dL	dU	2	$4 - dU$	$4 - dL$	4	

Gambar 5.1

Daerah Uji Durbin Watson

Dari hasil pengujian tersebut, regresi dengan metode *pooled least square* berada pada daerah terima H_0 , dimana nilai DW-nya adalah sekitar 2,165123 berada di $dU < DW < 4 - dU$, juga metode EGLS *unweighted*, nilai DW-nya 2.161869 berada di daerah penerimaan H_0 , dan tidak ada autokorelasi, sedangkan metode EGLS *weighted* nilai DW-nya 2.373534 berada di $4 - dL < DW < 4$, yang menurut kaidah Durbin Watson dapat disimpulkan terdapat masalah autokorelasi negatif.

b. Uji Heteroskedastisitas

Menurut pengalaman empiris, masalah heteroskedastisitas lebih sering dijumpai pada data panel, khususnya data *cross-section* yang terdiri atas unit-unit yang memiliki variasi sangat berbeda, Baltagi (2005). Adanya heteroskedastisitas menyebabkan asumsi tetap tidak bias (*unbias*) namun tidak efisien karena *standard error* yang diperoleh bias sehingga uji t dan uji F tidak menentu, Widarjono (2009). Uji Goldfeld-Quant, uji Park, uji Glejser dan uji White dipergunakan untuk mendeteksi ada tidaknya masalah heteroskedastisitas. Dalam penelitian ini, adanya gejala heteroskedastisitas akan diidentifikasi melalui uji White, yakni dengan mengkonstantakan residual, sementara jika dengan uji Glejser meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut *residualnya*, Gujarati (2004).

Penanggulangan masalah heteroskedastisitas ini, mengikuti saran Gujarati (2004) dilakukan melalui regresi dengan metode *weighting least square* (WLS). Seluruh variabel dibobot dengan cara dibagi dengan nilai standard error (σ) dari variabel dependen. Pada Eviews 6, metode yang disediakan untuk menanggulangi masalah heteroskedastisitas dalam model penelitian ini menggunakan metode

heteroskedasticity *consistent covariance matrix* yang dibuat oleh model White (1980), seperti diungkapkan dalam Eviews 6 User Guide (2007).

Pengujian dengan uji White dengan bantuan Eviews 6, antara metode *ordinary* dan *White cross-section*, yang sudah dibobot, menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dari koefisien regresi, *adjusted R²*, *DW statistics*, yang mungkin berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas, berupa nilai absolut dari residual. Dari hasil uji ini dapat disimpulkan bahwa heteroskedastisitas sesungguhnya tidak ada pada data awal, atau jikapun ada, tidak signifikan, sehingga model penelitian tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

5.1.4. Evaluasi Statistik: Uji Signifikansi Hasil Regresi

Dari hasil pengolahan dengan menggunakan metode PLS, diperoleh nilai koefisien deterministik (*adjusted-R²*) sebesar 0.998629, hal ini berarti 99.8629 persen variasi nilai variabel pertumbuhan ekonomi dalam model yang merupakan *proxy* dari kinerja pembangunan ekonomi daerah provinsi mampu dijelaskan oleh variabel-variabel independen dalam model, sedangkan 0.1371 persen sisanya dijelaskan oleh hal-hal lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Nilai koefisien determinasi (*R²*) yang tinggi berarti menunjukkan model penelitian ini cukup baik untuk digunakan.

Sementara itu, dari nilai F statistik diperoleh bahwa nilainya adalah sebesar 31.938,77 dengan probabilitas sebesar 0,0000 menunjukkan bahwa berbagai variabel independen yang ada, yaitu IPM, luas wilayah (darat dan laut), penerimaan daerah, PDRB/pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun sebelumnya, dan *dummy* provinsi kepulauan, secara bersama-sama signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.

Sedangkan untuk uji parsialnya, dari hasil pengolahan ditunjukkan bahwa:

- a. IPM tidak signifikan berpengaruh positif terhadap PDRB provinsi;
- b. Potensi wilayah yang berupa luas wilayah (baik darat maupun laut) signifikan berpengaruh secara negatif terhadap PDRB provinsi;
- c. Penerimaan daerah (yaitu DAU secara bersama-sama dengan PAD, DBH, dan DAK) signifikan secara positif mempengaruhi PDRB provinsi;

- d. PDRB tahun sebelumnya berpengaruh signifikan secara positif terhadap PDRB provinsi pada tahun berikutnya; dan
- e. *Dummy provinsi kepulauan* tidak signifikan berpengaruh secara negatif terhadap PDRB provinsi.

5.1.5. Evaluasi Ekonomi: Interpretasi Hasil

Dari hasil regresi model dengan menggunakan metode *pooled least square* atau *common effect* (PLS atau CEM) dalam **Tabel 5.2** diatas, dapat dilakukan interpretasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian daerah provinsi, dalam hal ini perubahan dari PDRB, atau pertumbuhan ekonomi. Hasil regresi dengan menggunakan data panel tahun 2003 hingga 2010 yang mencakup 33 provinsi, secara rinci tentang interpretasi pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kinerja perekonomian ekonomi daerah provinsi adalah sebagai berikut:

a. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sejalan dengan pemikiran hipotesa bahwa IPM berpengaruh secara positif terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah provinsi (melalui pertumbuhan ekonomi), dimana peningkatan kualitas pembangunan manusia, baik dari segi daya beli, kesehatan, dan pendidikan, pada hasil regresi menunjukkan bahwa IPM ternyata memang berpengaruh secara positif terhadap perubahan PDRB provinsi, namun belum signifikan.

Dari hasil *t-test* yang ada, nilai t-statistik tercatat relatif cukup kecil sehingga tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa IPM sebagai proksi dari kualitas pembangunan manusia pada tingkatan provinsi ternyata belum berperan signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah provinsi. Hal tersebut dimungkinkan dan disebabkan oleh karena masih rendahnya kualitas pembangunan manusia yang ada, baik dalam rendahnya tingkat daya beli, rendahnya kondisi dan kualitas kesehatan dan pendidikan yang ada selama ini.

b. Pengaruh Penerimaan Daerah (PAD, DAU, DBH, dan DAK)

Hipotesa bahwa penerimaan dalam APBD (berupa PAD, dan Dana Perimbangan (DAU, DBH, dan DAK)), signifikan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi, terbukti benar dengan ditunjukkan oleh hasil pengolahan model. Hal tersebut terlihat dari nilai t statistik yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai kritis t pada tingkat kesalahan (α) 10 persen. Dari hasil regresi tersebut, ditunjukkan bahwa DAU secara bersama-sama dengan PAD, DBH, dan DAK berperan signifikan dalam peningkatan kinerja pembangunan ekonomi daerah.

Nilai koefisien yang diperoleh (metode PLS) adalah sebesar 0.005971, yang menunjukkan bahwa setiap 1 persen peningkatan penerimaan dalam APBD se-provinsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh penerimaan dalam APBD se-provinsi terhadap pertumbuhan ekonomi walaupun signifikan positif, namun masih relatif kecil pengaruhnya.

Pengaruh yang relatif kecil dari penerimaan APBD terhadap kinerja pembangunan ekonomi daerah provinsi umumnya disebabkan oleh dua hal, yaitu yang *pertama*, dikarenakan masih relatif kecilnya sumber-sumber penerimaan daerah, dan *kedua*, adalah belum efisien dan efektifnya dalam penggunaan anggaran. Untuk mengoptimalkan pengaruhnya, maka alternatif solusinya adalah dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah dan juga mengefisienkan dan mengefektifkan dari penggunaan anggaran dari APBD di masing-masing daerah.

c. Pengaruh Luas Wilayah (Daratan (LD) dan Lautan (LL))

Hipotesa yang diuji adalah bahwa Luas Wilayah sebagai cerminan dari potensi wilayah yang berupa Luas Daratan dan Luas Lautan, signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi. Dari hasil regresi ditunjukkan bahwa luas wilayah, baik daratan maupun lautan ternyata signifikan berpengaruh secara negatif terhadap kinerja pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari koefisien yang diperoleh, setiap peningkatan 1 persen luas daratan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,006 persen dan setiap 1 persen peningkatan luas lautan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,003 persen. Pengaruh yang signifikan negatif, walaupun relatif kecil, menunjukkan bahwa potensi wilayah yang ada, baik daratan maupun lautan, belum dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pengaruh yang sama-sama negatif antara luas daratan dan luas lautan menunjukkan bahwa kedua jenis luasan kewilayahan tersebut secara bersama-sama perlu dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari formulasi DAU.

d. Pengaruh Jumlah Penduduk

Dalam hipotesa disebutkan bahwa Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Jumlah Penduduk atau populasi (POP) signifikan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan daerah provinsi. Namun dikarenakan variabel jumlah penduduk tidak dimasukkan ke dalam pengolahan karena adanya multikolinieritas, maka hipotesa ini tidak dapat dilakukan pengujian.

e. Pengaruh Pola Perubahan PDRB Tahun Sebelumnya

Hipotesa bahwa pola perubahan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh signifikan secara positif ternyata dibuktikan benar dari hasil pengolahan. Hal tersebut terlihat dari nilai t statistik yang cukup tinggi untuk variabel YHKMIG1. Nilai koefisien yang diperoleh yaitu sebesar 0.990680 menunjukkan bahwa setiap peningkatan PDRB (pertumbuhan ekonomi) tahun sebelumnya sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi pada tahun berikutnya juga akan mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,99 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pola yang sangat kuat dari *trend* perkembangan kinerja pembangunan dari suatu daerah. Apabila daerah provinsi tersebut memiliki *trend* peningkatan yang cukup baik, maka pertumbuhan ekonomi daerah wilayah yang bersangkutan juga akan terus membaik, dan *vice versa*.

f. Pengaruh *Dummy* Provinsi Kepulauan

Hipotesa yang diuji adalah bahwa pertumbuhan ekonomi daerah provinsi berciri kepulauan secara rata-rata signifikan lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain. Dari hasil pengolahan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah provinsi yang berciri kepulauan memang lebih rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, namun tidak signifikan perbedaannya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak benar kinerja pembangunan ekonomi daerah kepulauan relatif tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah provinsi yang lain bila ditinjau dari segi pertumbuhan ekonominya. Sehingga, relatif kurang dapat dibenarkan apabila alasan untuk mendapatkan perlakuan khusus untuk provinsi berciri kepulauan dengan alasan pertumbuhan ekonomi.

5.2. Analisa Perubahan Formulasi DAU

5.2.1. Kondisi Eksisting

Pada berikut ini disajikan kondisi eksisting keuangan daerah provinsi.

Tabel 5.6

Nilai Koefisien Variasi Kondisi Keuangan Daerah Provinsi Tahun 2003-2011

No.	Variabel	2003	2004	2005	2006	2007
1	PAD	1.89	1.84	1.78	1.68	1.63
2	DAU	0.52	0.57	0.51	0.43	0.44
3	PAD+DAU	1.47	1.47	1.46	1.21	1.14
4	PAD+DAU+DBH	1.47	1.47	1.61	1.34	1.37
5	PAD+DAU+DBH+DAK	1.46	1.47	1.61	1.34	1.37
No.	Variabel	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
1	PAD	1.56	1.59	1.61	1.71	1.70
2	DAU	0.39	0.41	0.41	0.42	0.46
3	PAD+DAU	1.11	1.13	1.16	1.25	1.27
4	PAD+DAU+DBH	1.33	1.41	1.43	1.30	1.41
5	PAD+DAU+DBH+DAK	1.31	1.38	1.42	1.28	1.40

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Tabel 5.6 diatas menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan alokasi Dana Perimbangan (DAU, DBK, dan DAK) secara bersama-sama mampu membawa perubahan kondisi keuangan daerah provinsi dan memberikan efek pemerataan

yang lebih baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah provinsi, yang diperlihatkan oleh *trend* penurunan koefisien variasi.

Demikian halnya dengan yang ditunjukkan oleh *trend* penurunan nilai Indeks Williamson terhadap kondisi keuangan daerah provinsi, bahwa PAD dan alokasi Dana Perimbangan (DAU, DBH dan DAK) secara bersama-sama mampu melakukan pengurangan ketimpangan diantara daerah provinsi dan memberikan efek pemerataan secara bertahap, sebagai dampak perubahan formulasi perhitungan DAU untuk tingkatan provinsi.

Tabel 5.7
Nilai Indeks Williamson Kondisi Keuangan Daerah Provinsi
Tahun 2003-2011

No.	Variabel	2003	2004	2005	2006	2007
1	PAD	2.638	2.628	2.604	2.450	2.372
2	DAU	0.696	0.790	0.696	0.598	0.771
3	PAD+DAU	2.067	2.128	2.139	1.805	1.772
4	PAD+DAU+DBH	2.067	2.128	2.089	1.675	1.766
5	PAD+DAU+DBH+DAK	2.051	2.128	2.088	1.675	1.766
No.	Variabel	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
1	PAD	2.286	2.385	2.374	2.377	2.457
2	DAU	0.607	0.657	0.675	0.645	0.682
3	PAD+DAU	1.726	1.808	1.820	1.819	1.898
4	PAD+DAU+DBH	1.724	1.850	1.838	1.702	1.871
5	PAD+DAU+DBH+DAK	1.702	1.813	1.823	1.681	1.859

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Sementara *trend* persentase perubahan distribusi alokasi DAU provinsi (**Tabel 5.8**) menunjukkan hal yang positif untuk peningkatan alokasi DAU daerah provinsi berciri kepulauan, meskipun memperlihatkan penurunan persentase dalam dua tahun terakhir. Secara rata-rata distribusi alokasi DAU provinsi mulai dari tahun 2003 hingga 2011 mencapai 17,97% dari total distribusi alokasi DAU nasional.

Tabel 5.8
Distribusi Alokasi DAU Provinsi Tahun 2003-2011 (dalam Persen)

No.	Deskripsi	2003	2004	2005	2006	2007
1	Provinsi Kepulauan	17.22	17.21	17.02	17.20	17.89
2	Provinsi Non Kepulauan	82.78	82.79	82.98	82.80	82.11
3	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Rata-rata Provinsi Kepulauan	2.46	2.46	2.43	2.46	2.56
5	Rata-rata Provinsi Non Kepulauan	3.18	3.18	3.19	3.18	3.16
6	Rata-rata	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03
No.	Deskripsi	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
1	Provinsi Kepulauan	18.65	19.38	18.78	18.36	17.97
2	Provinsi Non Kepulauan	81.35	80.62	81.22	81.64	82.03
3	Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4	Rata-rata Provinsi Kepulauan	2.66	2.77	2.68	2.62	2.57
5	Rata-rata Provinsi Non Kepulauan	3.13	3.10	3.12	3.14	3.16
6	Rata-rata	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Komposisi struktur penerimaan/pendapatan provinsi pada tahun 2011 menunjukkan sumber penerimaan untuk provinsi berciri kepulauan masih mengandalkan alokasi pemerintah pusat melalui dana transfer (Dana Perimbangan) yang mencapai rata-rata 68,32% dari total penerimaan, dan belum mampu mengandalkan sumber pendapatan asli daerahnya. Sementara untuk provinsi lainnya PAD telah mampu menyumbangkan rata-rata 44,45% dari pendapatan provinsi. Dari **Tabel 5.9** juga terlihat bahwa provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Papua dan Papua merupakan daerah yang mendapatkan dana otonomi khusus sebagai sumber andalan pendapatan utama pemerintah daerah. Dari pengurutan pendapatan provinsi tersebut pada **Tabel 5.10** juga menggambarkan bahwa peringkat provinsi berciri kepulauan masih berada dibawah dibandingkan provinsi lain. Dengan distribusi PAD, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah yang diterima oleh provinsi, menunjukkan PAD provinsi berciri kepulauan berkontribusi 4,40% dari jumlah penerimaan seluruh PAD provinsi, dan menerima 12,11% dari seluruh alokasi Dana Perimbangan untuk provinsi.

Tabel 5.9
Struktur Pendapatan Provinsi Tahun 2011 (dalam Persen)

No	Provinsi	PAD	DP	DBH	DAU	DAK	LLPS	PENDAPATAN
1	Nanggroe Aceh Darussalam	11.25	24.64	13.81	10.11	0.71	64.12	100.00
2	Sumatera Utara	71.01	28.37	7.75	19.96	0.65	0.62	100.00
3	Sumatera Barat	54.70	45.03	4.49	38.49	2.05	0.26	100.00
4	Riau	35.14	62.75	51.67	8.89	2.20	2.11	100.00
5	Jambi	40.83	59.17	22.44	34.96	1.77	-	100.00
6	Sumatera Selatan	45.52	54.14	38.30	14.91	0.94	0.34	100.00
7	Bengkulu	36.78	60.61	4.42	53.00	3.19	2.60	100.00
8	Lampung	50.20	45.69	11.67	32.75	1.28	4.11	100.00
9	DKI Jakarta	61.44	34.16	33.36	0.80	-	4.40	100.00
10	Jawa Barat	74.97	24.88	10.31	14.02	0.54	0.14	100.00
11	Jawa Tengah	71.23	28.77	8.37	19.90	0.50	-	100.00
12	DI Yogyakarta	49.34	50.34	5.23	43.74	1.37	0.32	100.00
13	Jawa Timur	76.87	22.88	8.73	13.60	0.56	0.25	100.00
14	Kalimantan Barat	42.18	57.56	6.73	48.63	2.21	0.26	100.00
15	Kalimantan Tengah	38.99	59.96	10.25	46.66	3.04	1.06	100.00
16	Kalimantan Selatan	56.78	41.35	20.62	19.71	1.02	1.87	100.00
17	Kalimantan Timur	40.95	58.89	57.50	0.80	0.59	0.16	100.00
18	Sulawesi Utara	35.86	55.89	4.37	49.20	2.33	8.25	100.00
19	Sulawesi Tengah	27.87	71.84	4.90	63.67	3.27	0.29	100.00
20	Sulawesi Selatan	62.04	37.96	8.06	28.43	1.46	-	100.00
21	Sulawesi Tenggara	34.53	65.47	5.28	57.42	2.77	-	100.00
22	Bali	58.29	32.94	5.79	26.16	0.99	8.77	100.00
23	Nusa Tenggara Barat	44.37	54.88	9.75	40.42	4.70	0.75	100.00
24	Nusa Tenggara Timur	28.53	71.47	5.50	62.51	3.47	-	100.00
25	Maluku	20.12	74.04	6.21	63.79	4.05	5.84	100.00
26	Papua	5.67	29.24	7.85	21.40	-	65.09	100.00
27	Maluku Utara	11.13	88.55	6.90	74.58	7.07	0.32	100.00
28	Banten	71.09	28.77	11.48	15.74	1.54	0.14	100.00
29	Bangka Belitung	32.75	62.08	9.81	49.80	2.47	5.17	100.00
30	Gorontalo	19.28	80.72	3.88	72.43	4.41	-	100.00
31	Kepulauan Riau	28.66	71.34	47.41	22.68	1.26	-	100.00
32	Papua Barat	2.92	39.36	17.47	20.69	1.20	57.72	100.00
33	Sulawesi Barat	15.91	73.97	4.95	63.83	5.18	10.12	100.00
Total		50.07	39.84	20.38	18.44	1.02	10.09	100.00
Rata-rata Provinsi Kepulauan		28.77	68.32	12.85	51.85	3.62	2.91	100.00
Rata-rata Provinsi Non Kep.		44.45	46.90	14.82	30.41	1.67	8.64	100.00
Rata-rata Provinsi		41.13	51.45	14.40	34.96	2.08	7.43	100.00

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Tabel 5.10
Distribusi Pendapatan Daerah Menurut Provinsi Tahun 2011 (dalam Persen)

No	Daerah	PAD	DP	DBH	DAU	DAK	LLPS	PENDA-PATAN	RANK
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.34	3.68	4.04	3.26	4.18	37.84	5.96	4
2	Sumatera Utara	5.34	2.68	1.43	4.08	2.40	0.23	3.76	8
3	Sumatera Barat	1.82	1.89	0.37	3.48	3.36	0.04	1.67	17
4	Riau	2.52	5.66	9.10	1.73	7.76	0.75	3.59	9
5	Jambi	0.96	1.75	1.29	2.23	2.04	-	1.18	23
6	Sumatera Selatan	2.62	3.92	5.42	2.33	2.66	0.10	2.89	10
7	Bengkulu	0.71	1.46	0.21	2.77	3.02	0.25	0.96	28
8	Lampung	1.82	2.08	1.04	3.23	2.28	0.74	1.82	15
9	DKI Jakarta	26.88	18.79	35.85	0.96	-	9.55	21.91	1
10	Jawa Barat	10.60	4.42	3.58	5.38	3.78	0.10	7.08	3
11	Jawa Tengah	7.02	3.56	2.02	5.32	2.44	-	4.93	6
12	DI Yogyakarta	1.18	1.51	0.31	2.83	1.61	0.04	1.19	22
13	Jawa Timur	12.78	4.78	3.56	6.14	4.54	0.21	8.32	2
14	Kalimantan Barat	1.23	2.11	0.48	3.85	3.17	0.04	1.46	19
15	Kalimantan Tengah	1.12	2.16	0.72	3.63	4.28	0.15	1.43	20
16	Kalimantan Selatan	2.34	2.14	2.08	2.20	2.06	0.38	2.06	14
17	Kalimantan Timur	4.43	8.01	15.28	0.23	3.15	0.08	5.42	5
18	Sulawesi Utara	0.76	1.48	0.23	2.82	2.42	0.87	1.06	24
19	Sulawesi Tengah	0.55	1.77	0.24	3.39	3.15	0.03	0.98	27
20	Sulawesi Selatan	2.99	2.30	0.95	3.72	3.46	-	2.41	13
21	Sulawesi Tenggara	0.71	1.68	0.27	3.19	2.79	-	1.03	25
22	Bali	2.10	1.49	0.51	2.55	1.75	1.57	1.80	16
23	Nusa Tenggara Barat	1.19	1.85	0.64	2.95	6.21	0.10	1.34	21
24	Nusa Tenggara Timur	0.58	1.81	0.27	3.43	3.44	-	1.01	26
25	Maluku	0.37	1.72	0.28	3.21	3.69	0.54	0.93	29
26	Papua	0.51	3.31	1.74	5.23	-	29.09	4.51	7
27	Maluku Utara	0.14	1.35	0.21	2.46	4.23	0.02	0.61	31
28	Banten	3.49	1.77	1.38	2.10	3.73	0.03	2.46	12
29	Bangka Belitung	0.53	1.27	0.39	2.19	1.97	0.42	0.81	30
30	Gorontalo	0.21	1.08	0.10	2.10	2.32	-	0.53	33
31	Kepulauan Riau	0.84	2.62	3.41	1.80	1.81	-	1.47	18
32	Papua Barat	0.17	2.81	2.44	3.19	3.35	16.27	2.84	11
33	Sulawesi Barat	0.18	1.08	0.14	2.01	2.96	0.58	0.58	32
Total		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Provinsi Kepulauan		4.40	12.11	5.43	18.86	23.76	1.94	7.23	
Provinsi Non Kepulauan		95.60	87.89	94.57	81.14	76.24	98.06	92.77	

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Selain keuangan daerah, dampak dari formulasi DAU nantinya juga dilihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk kondisi baseline, diperlukan estimasi perkiraan dampak dari DAU pada tahun 2011. Hal tersebut dilakukan dengan mengasumsikan yang lain tetap seperti pada tahun 2010. Nilai pertumbuhan ekonomi menurut provinsi tahun 2010 dan perkiraannya untuk tahun 2011 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.11
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi Tahun 2010
dan Perkiraannya untuk Tahun 2011

No	Provinsi	2010 **)	2011 ***)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.64	2.73
2	Sumatera Utara	6.35	6.41
3	Sumatera Barat	5.93	6.02
4	Riau	4.17	4.17
5	Jambi	7.33	7.33
6	Sumatera Selatan	5.43	5.43
7	Bengkulu	5.14	5.24
8	Lampung	5.75	5.81
9	DKI Jakarta	6.51	6.54
10	Jawa Barat	6.09	6.14
11	Jawa Tengah	5.84	5.84
12	DI Yogyakarta	4.87	4.98
13	Jawa Timur	6.68	6.75
14	Kalimantan Barat	5.35	5.42
15	Kalimantan Tengah	6.47	6.54
16	Kalimantan Selatan	5.58	5.61
17	Kalimantan Timur	4.95	4.97
18	Sulawesi Utara	7.12	7.19
19	Sulawesi Tengah	7.79	7.87
20	Sulawesi Selatan	8.18	8.27
21	Sulawesi Tenggara	8.19	8.30
22	Bali	5.83	5.92
23	Nusa Tenggara Barat	6.29	6.37
24	Nusa Tenggara Timur	5.13	5.20
25	Maluku	6.47	6.56
26	Papua	-2.65	(2.65)
27	Maluku Utara	7.96	8.04
28	Banten	5.94	6.06
29	Kepulauan Bangka Belitung	5.85	5.95
30	Sulawesi Barat	11.91	11.99
31	Gorontalo	7.62	7.61
32	Kepulauan Riau	7.21	7.96
33	Papua Barat	26.82	26.66

Sumber: BPS; **) Nilai Sangat Sementara, ***) Nilai Hasil Perkiraan, Diolah, 2011

5.2.2. Simulasi Perubahan Formulasi DAU

Dalam **Tabel 5.12** berikut disajikan bobot perubahan komponen luas lautan sebagai parameter yang di-simulasi. Bobot perubahan komponen luas lautan sebagai bagian dari luas wilayah, disimulasikan antara 30% hingga 100% (berturut-turut 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, dan 100%) dari total luas laut yang menjadi komponen penghitungan perubahan formulasi DAU tahun 2011. Komponen yang lain diasumsikan tetap dalam simulasi tersebut.

Tabel 5.12
Komponen, Variabel dan Bobot Penyusun Simulasi DAU Tahun 2011

No.	Komponen atau Variabel Berdasarkan Depkeu	Sumber Data	Bobot Provinsi							
			2011 (Base, 0,3)	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
I. Komponen Kebutuhan Fiskal										
a	Penduduk (IP)	BPS	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
b	Luas Wilayah	KMDN	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150
b1	Darat		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
b2	Penambahan Luas Perairan (12 Mil provinsi, 4 mil kab/kota)	Bako-surtanal	0.300	0.400	0.500	0.600	0.700	0.800	0.900	1.000
c	Indeks Harga Bangunan	Bappenas								
d	Jumlah Penduduk Miskin	BPS								
e	Kemiskinan Relatif									
f	Indeks Kemahalan Konstruksi	BPS	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300	0.300
g	PDRB Per kapita	BPS	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150	0.150
h	Indeks Pembangunan Manusia	BPS	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100	0.100
j	Total Belanja Rata-rata (d disesuaikan dan ditetapkan)	Daerah dan Kemkeu								
	Belanja PNSD		0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831	0.831
II. Komponen Kapasitas Fiskal										
a	PDRB SDA	BPS								
b	PDRB Industri	BPS								
c	Pekerja Produktif	BPS								
d	PAD Proyeksi	Depkeu								
e	PAD Aktual	Depkeu	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500	0.500
f	BHP	Depkeu	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800
g	BHSDA	Depkeu	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950	0.950
III. DAU KABUPATEN/KOTA										
IV. ALOKASI MINIMUM										
a	Lump Sum									
b	Alokasi Dasar		0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480	0.480
V. FORMULA										

Sumber: lihat pada kolom tabel

5.2.3. Dampak Perubahan Formulasi DAU

Efek perubahan yang diukur berupa efek pemerataan sebagai dampak perubahan formulasi DAU terhadap keuangan daerah dapat dilihat dari perubahan nilai koefisien variasi dan indeks Williamson sebagai akibat perubahan bobot luas laut dalam simulasi, terhadap variabel-variabel pendapatan asli daerah (PAD), DAU, penjumlahannya, termasuk dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK), sebagai penerimaan daerah yang merepresentasikan kondisi keuangan daerah. Hasil olahan disajikan dalam **Tabel 5.13** dan **Tabel 5.14** berikut dengan asumsi komponen lainnya tetap dan menggunakan data provinsi tahun 2011.

Dari **Tabel 5.13** terlihat kecenderungan *trend* yang menurun namun jika diperhatikan perubahan bobot luas lautan sebagai komponen penghitungan formulasi DAU mencapai nilai maksimalnya pada bobot 80%, yang berarti apabila penambahan luas lautan dimasukkan dalam penghitungan akan menambah jumlah DAU provinsi berciri kepulauan hingga luasan mencapai 80% dari total luas laut, namun tidak akan menambah efek pemerataan terhadap kondisi keuangan daerah jikalau melebihi bobot tersebut, yang ditunjukkan dari nilai koefisien variasi yang konstan setelah melampaui bobot 80%.

Sementara dari hasil olah penghitungan indeks Williamson untuk simulasi perubahan bobot luas lautan terhadap kondisi keuangan daerah melalui penghitungan PAD, DAU, DBH, dan DAK yang mewakili penerimaan daerah, menunjukkan *trend* perubahan yang tidak signifikan, yang berarti penambahan bobot luas lautan sebagai komponen dalam formulasi DAU akan menaikkan jumlah DAU provinsi berciri kepulauan namun hanya sedikit membantu penambahan efek pemerataan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa alokasi yang bukan melalui DAU dapat menjadi kemungkinan yang lebih baik untuk melakukan pemerataan.

Tabel 5.13
Nilai Koefisien Variasi Kondisi Keuangan Daerah Hasil Simulasi
untuk Provinsi Tahun 2011

No.	Variabel	0,3	0,4	0,5	0,6
1	PAD	1.706	1.706	1.706	1.706
2	DAU	0.412	0.414	0.415	0.417
3	PAD+DAU	1.258	1.257	1.256	1.256
4	PAD+DAU+DBH	1.396	1.395	1.395	1.394
5	PAD+DAU+DBH+DAK	1.379	1.378	1.378	1.377
No.	Variabel	0,7	0,8	0,9	1,0
1	PAD	1.706	1.706	1.706	1.706
2	DAU	0.419	0.421	0.423	0.425
3	PAD+DAU	1.256	1.255	1.255	1.255
4	PAD+DAU+DBH	1.394	1.393	1.393	1.393
5	PAD+DAU+DBH+DAK	1.377	1.376	1.376	1.376

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Tabel 5.14
Nilai Indeks Williamson Kondisi Keuangan Daerah Hasil Simulasi
untuk Provinsi Tahun 2011

No.	Variabel	0,3	0,4	0,5	0,6
1	PAD	2.379	2.379	2.379	2.379
2	DAU	0.646	0.649	0.652	0.654
3	PAD+DAU	1.834	1.834	1.834	1.834
4	PAD+DAU+DBH	1.786	1.786	1.786	1.785
5	PAD+DAU+DBH+DAK	1.766	1.765	1.765	1.765
No.	Variabel	0,7	0,8	0,9	1,0
1	PAD	2.379	2.379	2.379	2.379
2	DAU	0.656	0.658	0.660	0.661
3	PAD+DAU	1.833	1.833	1.833	1.833
4	PAD+DAU+DBH	1.785	1.785	1.785	1.785
5	PAD+DAU+DBH+DAK	1.765	1.764	1.764	1.764

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Hasil olah simulasi perubahan bobot luas lautan untuk kontribusi DAU terhadap pendapatan provinsi menunjukkan semakin besar bobot luas lautan akan memberikan efek penambahan DAU untuk provinsi berciri kepulauan seperti terlihat dalam kenaikan *trend* persentase rata-rata pendapatan provinsi berciri

kepulauan, dan sebaliknya untuk provinsi lainnya, dan disajikan dalam **Tabel 5.15**.

Tabel 5.15
Kontribusi DAU terhadap Pendapatan Provinsi Hasil Simulasi
Tahun 2011 (dalam Persen)

Provinsi	0.3	0.4	0.5	0.6
Rata-rata Provinsi Kepulauan	51.85	52.60	53.22	53.73
Rata-rata Provinsi Non Kepulauan	30.41	30.36	30.32	30.28
Rata-rata Total	34.96	35.08	35.17	35.26
Provinsi	0.7	0.8	0.9	1.0
Rata-rata Provinsi Kepulauan	54.17	54.54	54.87	55.15
Rata-rata Provinsi Non Kepulauan	30.25	30.22	30.20	30.18
Rata-rata Total	35.32	35.38	35.43	35.48

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Dengan adanya penambahan bobot luas lautan dalam formulasi penghitungan DAU juga akan menaikkan distribusi DAU untuk provinsi berciri kepulauan, namun disisi yang lain berarti pula menurunkan jumlah alokasi DAU untuk provinsi lainnya yang memiliki luas lautan lebih sedikit.

Tabel 5.16
Distribusi DAU dalam Pendapatan Daerah Provinsi Hasil Simulasi
Tahun 2011 (dalam Persen)

Provinsi	0.3	0.4	0.5	0.6
Provinsi Kepulauan	18.86	19.16	19.41	19.62
Provinsi Non Kepulauan	81.14	80.84	80.59	80.38
Total	100.00	100.00	100.00	100.00
Provinsi	0.7	0.8	0.9	1.0
Provinsi Kepulauan	19.80	19.95	20.08	20.19
Provinsi Non Kepulauan	80.20	80.05	79.92	79.81
Total	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

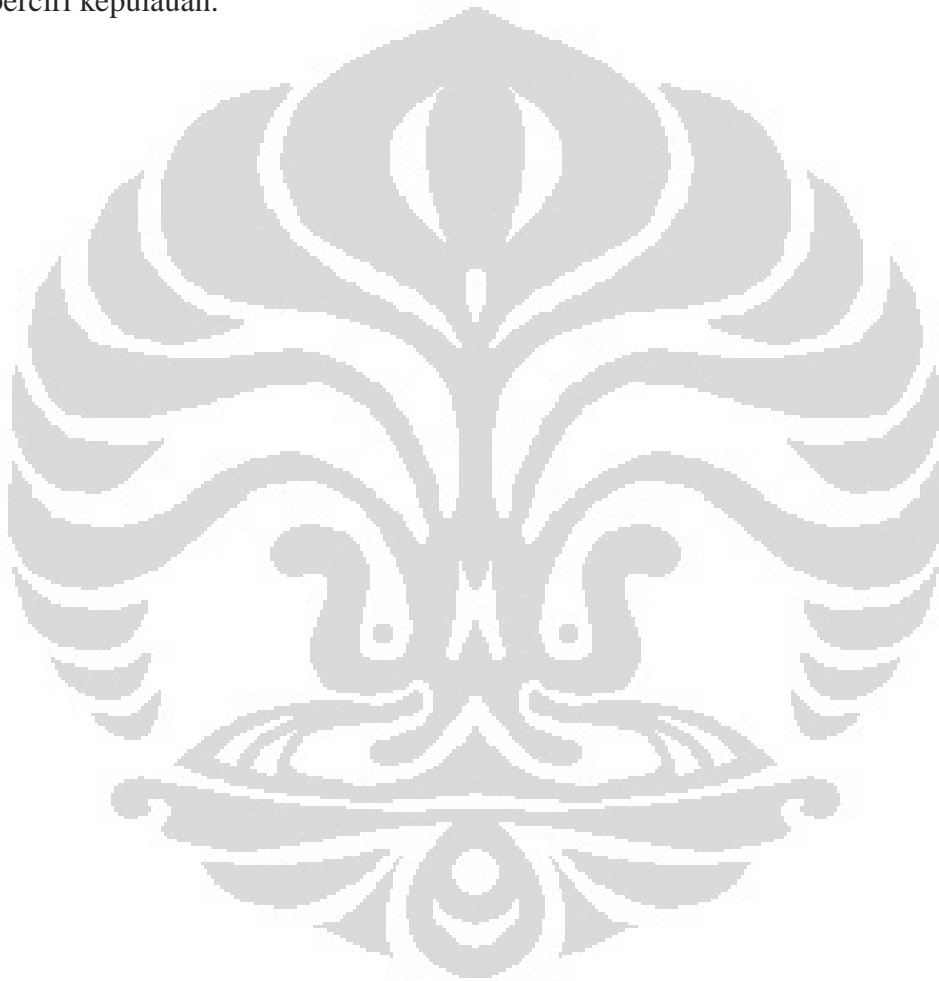
Sementara itu, dampak dari perubahan bobot luas laut/perairan dalam perhitungan luas wilayah terhadap pertumbuhan ekonomi secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 5.17
Dampak Perubahan Formulasi DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi
Tahun 2011 (dalam Persen)

No	Provinsi	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.73	2.75	2.76	2.78	2.79	2.80	2.80	2.81
2	Sumatera Utara	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41	6.41
3	Sumatera Barat	6.02	6.03	6.03	6.04	6.04	6.04	6.05	6.05
4	Riau	4.17	4.18	4.20	4.20	4.21	4.22	4.23	4.23
5	Jambi	7.33	7.32	7.31	7.31	7.30	7.30	7.29	7.29
6	Sumatera Selatan	5.43	5.41	5.40	5.39	5.38	5.37	5.36	5.36
7	Bengkulu	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.24	5.25	5.25
8	Lampung	5.81	5.81	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80	5.80
9	DKI Jakarta	6.54	6.51	6.49	6.47	6.45	6.44	6.43	6.41
10	Jawa Barat	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14	6.14
11	Jawa Tengah	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84	5.84
12	DI Yogyakarta	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98	4.98
13	Jawa Timur	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
14	Kalimantan Barat	5.42	5.41	5.40	5.40	5.39	5.38	5.38	5.38
15	Kalimantan Tengah	6.54	6.53	6.52	6.51	6.50	6.49	6.48	6.48
16	Kalimantan Selatan	5.61	5.61	5.60	5.60	5.60	5.59	5.59	5.59
17	Kalimantan Timur	4.97	4.60	4.31	4.06	3.84	3.66	3.51	3.37
18	Sulawesi Utara	7.19	7.21	7.24	7.26	7.27	7.29	7.30	7.31
19	Sulawesi Tengah	7.87	7.87	7.88	7.89	7.89	7.89	7.90	7.90
20	Sulawesi Selatan	8.27	8.29	8.30	8.31	8.32	8.33	8.33	8.34
21	Sulawesi Tenggara	8.30	8.30	8.30	8.31	8.31	8.31	8.32	8.32
22	Bali	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92	5.92
23	Nusa Tenggara Barat	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37	6.37
24	Nusa Tenggara Timur	5.20	5.21	5.22	5.22	5.23	5.23	5.24	5.24
25	Maluku	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56
26	Papua	(2.65)	(2.66)	(2.68)	(2.69)	(2.69)	(2.70)	(2.71)	(2.71)
27	Maluku Utara	8.04	8.04	8.05	8.05	8.06	8.06	8.06	8.07
28	Banten	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06	6.06
29	Kepulauan Bangka Belitung	5.95	5.96	5.96	5.97	5.97	5.97	5.97	5.98
30	Sulawesi Barat	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99
31	Gorontalo	7.61	7.64	7.67	7.69	7.71	7.73	7.74	7.75
32	Kepulauan Riau	7.96	7.97	7.98	7.98	7.98	7.98	7.99	7.99
33	Papua Barat	26.66	26.66	26.66	26.67	26.67	26.67	26.67	26.67

Sumber: Hasil Pengolahan, 2011

Secara umum, dampak perubahan formulasi DAU dalam perhitungan luas wilayah, khususnya dengan peningkatan bobot luas perairan dari 0,3 sampai dengan 1 menunjukkan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, khususnya provinsi yang berciri kepulauan. Namun, bila dilihat dari besarnya, nilai tersebut belum cukup signifikan. Hal ini menyiratkan perlunya alternatif lain selain dengan perubahan formulasi DAU dalam rangka mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah provinsi, khususnya provinsi berciri kepulauan.



BAB 6

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan gambaran umum dan hasil analisis pengolahan data tentang analisa dampak perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) di provinsi kepulauan ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kinerja provinsi kepulauan tergolong rendah, kecuali provinsi Kepulauan Riau yang menunjukkan *trend* pertumbuhan yang tinggi dan berada dalam posisi teratas diantara 7 provinsi kepulauan, provinsi lainnya masih menunjukkan *trend* positif namun lebih lambat. Meskipun demikian rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara, Maluku Utara, Kepulauan Riau dan Nusa Tenggara Barat berada diatas rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional untuk kurun waktu 2006-2010, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Bangka-Belitung berada dibawah rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi nasional untuk kurun waktu yang sama, yang secara keseluruhan kontribusi provinsi kepulauan terhadap perekonomian nasional rata-rata dibawah 5% setiap tahunnya.
- b. Provinsi berciri kepulauan masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dengan rata-rata DAU menyumbang 60% dan 51,85% dari total pendapatan dalam APBD pada tahun 2010 dan 2011, sementara kontribusi PAD-nya masih tergolong rendah namun menunjukkan *trend* meningkat. DBH provinsi kepulauan dibandingkan dengan rata-rata bagian DBH provinsi secara nasional masih berada dibawah rata-rata.
- c. Dari pengolahan data terhadap variabel IPM, penerimaan daerah, luas wilayah (luas daratan dan luas lautan), jumlah penduduk, PDRB tahun sebelumnya dan *dummy* provinsi berciri kepulauan, dihasilkan sebagai berikut:

No	Variabel	Hipotesa	Hasil	Keterangan
1	IPM	IPM berpengaruh positif	Positif, belum signifikan	IPM sebagai proksi kualitas pembangunan manusia belum berperan signifikan terhadap kinerja pembangunan daerah provinsi
2	Penerimaan Daerah: PAD, DAU, DBH, DAK	Penerimaan dalam APBD signifikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah provinsi	Positif, signifikan	Setiap 1 persen peningkatan penerimaan dalam APBD se-provinsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,006 persen
3	Luas Wilayah: Luas Daratan Luas Lautan	Luas wilayah sebagai cerminan potensi wilayah (darat dan laut) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi	Negatif, signifikan	Setiap peningkatan 1 persen luas daratan, maka pertumbuhan ekonomi akan menurun sebesar 0,006 persen dan setiap 1 persen peningkatan luas lautan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan sebesar 0,003 persen
4	Jumlah Penduduk	Jumlah sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif	NA	Multikolinieritas
5	PDRB tahun sebelumnya	Pola perubahan PDRB tahun sebelumnya berpengaruh signifikan dan positif	Positif, signifikan	Setiap peningkatan PDRB tahun sebelumnya sebesar 1 persen, maka pertumbuhan ekonomi tahun berikutnya akan mengalami peningkatan 0,99 persen
6	Dummy Provinsi Kepulauan	Pertumbuhan ekonomi daerah provinsi berciri kepulauan secara rata-rata signifikan lebih rendah dibandingkan dengan provinsi lain	Negatif, tidak signifikan	Tidak benar kinerja pembangunan ekonomi daerah kepulauan relatif tertinggal dibanding provinsi lainnya, sehingga relatif kurang dapat dibenarkan apabila alasan mendapat perlakuan khusus provinsi berciri kepulauan dengan alasan pertumbuhan ekonomi

- d. Simulasi efek perubahan DAU terhadap keuangan daerah sebagai akibat penambahan komponen luas wilayah lautan menunjukkan *trend* mencapai maksimalnya pada bobot luas lautan 80% dari total luas laut namun tidak akan menambah efek pemerataan terhadap kondisi keuangan daerah jika melebihi 80%. Simulasi efek penambahan bobot luas lautan sebagai komponen dalam formulasi DAU ini juga menunjukkan *trend* perubahan yang tidak signifikan, hanya sedikit membantu efek pemerataan, sehingga alokasi yang bukan melalui DAU dapat menjadi kemungkinan yang lebih baik untuk melakukan pemerataan.
- e. Dampak perubahan formulasi DAU dalam perhitungan luas wilayah, khususnya dengan peningkatan bobot luas perairan menunjukkan

pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi, khususnya provinsi yang berciri kepulauan. Namun, bila dilihat dari besarnya, nilai tersebut belum cukup signifikan. Hal ini menyiratkan perlunya alternatif lain selain dengan perubahan formulasi DAU dalam rangka mengoptimalkan kinerja pembangunan daerah provinsi, khususnya provinsi berciri kepulauan.

6.2. Saran/Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisisnya terkait dampak perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap provinsi ini, khususnya terhadap ketujuh provinsi kepulauan yang menjadi fokus penelitian ini, secara umum dapat disampaikan beberapa saran/rekomendasi kebijakan sebagai berikut:

1. Perlu dipertimbangkan untuk memasukkan variabel IPM dan PDRB per kapita dalam formulasi DAU sebagai *inverse* dan tidak lagi berbanding lurus, serta mempertimbangkan variabel lainnya dalam upaya formulasi DAU, khususnya untuk provinsi;
2. Luas wilayah perairan dalam formulasi DAU untuk provinsi perlu ditingkatkan bobotnya dari 0,3 atau 30 persen menjadi 0,8 atau 80 persen dalam perhitungan luas wilayah agar pemerataan keuangan daerah semakin baik;
3. Peningkatan bobot luas wilayah secara umum dari 0,15 atau 15 persen dalam perhitungan formulasi DAU untuk provinsi juga perlu dipertimbangkan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan ekonomi daerah Provinsi secara umum; dan
4. Oleh karena kinerja provinsi berciri kepulauan yang masih tergolong rendah dibandingkan dengan daerah lain, sedangkan daerah provinsi kepulauan masih membutuhkan transfer dari pusat untuk mendukung pertumbuhan ekonominya, sehingga jikalau mau menolong dan mendukung upaya perbaikan kondisi keuangan daerah tidak harus melalui DAU tetapi dapat mengalokasikan melalui DBH atau DAK atau variabel khusus lainnya yang langsung menyentuh masyarakat dan secara berkelanjutan.

6.3. Keterbatasan Studi

Studi ini dirancang untuk sedapat mungkin mengidentifikasi dan menemukan hasil analisa serta saran/rekomendasi yang dapat dipergunakan bagi para pengambil keputusan terkait dampak perubahan formulasi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap provinsi kepulauan ini, namun penulis tetap menyadari bahwa adanya keterbatasan dari pelaksanaan studi ini, antara lain:

- a. Keterbatasan akan ketersediaan data, khususnya data riil di lapangan, karena penulis membatasi hanya mempergunakan data sekunder, analisa dari berbagai literatur, *desk study* dan review regulasi dan kebijakan yang dianggap relevan untuk menghasilkan saran/rekomendasi, khususnya pendalaman literatur sekitar: Dana Perimbangan, yang berfokus pada Dana Alokasi Umum, Kebijakan Keuangan Daerah, dan Provinsi Kepulauan;
- b. Kelemahan dari model yang tidak memasukkan data terperinci dari tingkat kabupaten/kota yang memang belum dibahas dalam penelitian ini.

Terkait dengan kelemahan-kelemahan tersebut, peneliti sangat berharap, ke depan kelemahan-kelemahan tersebut dapat diatasi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik melalui berbagai penelitian lanjutan dengan topik yang sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Baltagi, Hadi H., (2005), *Analysis of Panel Data*, Third edition, John Wiley & Son Ltd., England.
- Bird, Richard M., (2000), *Intergovernmental Fiscal Relations: Universal Principles, Local Application*, Working Paper #00-2, Georgia State University, USA.
- Bird, Richard M., and Vaillancourt, Francois (1998), *Fiscal Decentralization in Developing Countries*, Cambridge University Press, Australia, Reprinted 1999 – United Kingdom.
- Bird, Richard M. dan Francois Vailancourt, (2000), *Desentralisasi Fiskal di Negara-Negara Berkembang*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bray, M., (1999), *Control of education: Issues and tensions in centralisation and decentralisation*. In R.F. Arnove and C. A. Torres (Eds.). *Comparative education: The dialectic of the global and the local*. Rowman & Littlefield.
- Brodjonegoro, Bambang P.S., (2006), *Desentralisasi sebagai Kebijakan Fundamental untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Mengurangi Kesenjangan Antar daerah di Indonesia*, Pidato pada Upacara Pengukuhan Sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 18 Maret 2006, Depok.
- Departemen Keuangan RI, (2011), *Indonesia's Budget Statistics 2002-2011*, Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Djohermansyah, (2005), *Pembagian Kewenangan Antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota*, makalah disampaikan dalam Semiloka Evaluasi Kebijakan Dana Dekonsentrasi, Hotel Borobudur, 2-3 Juni 2005, Departemen Keuangan RI, Jakarta.
- Fox, Jonathan, and Aranda, Josefina, (1996), *Decentralization and Rural Development in Mexico*, San Diego: Center for U.S.-Mexican Studies, at the University of California, San Diego.

- Fukuda-Parr, Sakiko (2003), *The Human Development Paradigm: "Operationalizing Sen's Idea on Capabilities"*, *Feminist Economics*, 9(2 – 3), 2003, 301 – 317.
- Gujarati, Damodar N., (2004), *Basic Econometrics*, Fourth Edition, McGraw-Hill New York.
- Hanson, M.E., (1998), *Strategies of Educational Decentralisation: Key Questions and Core Issues*, *Journal of Educational Administration*, 36(2), 111-28.
- Hsiao, Cheng, (2003), *Analysis of Panel Data*, Second Edition, University of Southern California, Cambridge University Press, USA.
- Hsiao, Cheng, (2005), *Why Panel Data?*, Institute of Economic Policy Research (IEPR) Working Paper, University of Southern California, (<http://www.usc.edu/iepr>), September 2005.
- Iswara, Ida Bagus Yoga, (2009), *Penentuan Batas Kewenangan Laut dan Luas Kewenangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Institut Teknologi Bandung.
- Kuncoro, M., (2004), *Otonomi Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Maddick, H., (1963), *Democracy, Decentralization & Development* (Asia Publishing House, Bombay, 1963) Introductory Chapter.
- Mahi, Raksaka, (2005), *Peran Pendapatan Asli Daerah di Era Otonomi*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. VI No. 1, 2005, p. 39-49.
- Musgrave, Richard A. (1958), *Multi-Level Finance*, edited by R. A. Musgrave. New York: McGraw-Hill.
- Nachrowi, Nachrowi D. dan Usman, Hardius (2006), *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*, Lembaga Penerbit FEUI.
- Oates, Wallace, (1972), *Fiscal Federalism*, New York: Harcourt Brace Jovanovich.
- Oates, Wallace, (1977), *The Political Economy of Fiscal Federalism*, Lexington: Lexington Books.
- Oates, Wallace, and Schwab, Robert, (1991), *The Allocative and Distributional Implications of Local Fiscal Competition*, in Kenyon D., Kincaid, J. and

- eds, *Competition Among States and Local Governments: Efficiency and Equity in American Federalism*, Washington, D.C.: Urban Institute Press.
- Pemerintah Republik Indonesia, (2004), *Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah* (www.indonesia.go.id)
- _____, 2004, *Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (www.indonesia.go.id)
- _____, 2007, *Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota* (www.indonesia.go.id).
- Piliang, Indra J., (2003), *Otonomi Daerah: Evaluasi & Proyeksi*, Divisi Kajian Demokrasi Lokal Yayasan Harkat Bangsa bekerjasama dengan Partnership-Governance Reform in Indonesia, November 2003.
- Resosudarmo, Budy P., at.al. (editor), (2002), *Indonesia's Sustainable Development in a Decentralization Era*, Indonesian Regional Science Association (IRSA), June 2002.
- Schneider, Aaron, (2002), *Decentralization and the Poor*, Institute of development Studies, Research fellow, University of Sussex, Brighton, BNI 9RE, England, 21 June 2002.
- Shah, Anwar,(2006), *A practitioner's guide to intergovernmental fiscal transfers*, Policy Research Working Paper Series 4039, The World Bank.
- Sidik, Machfud, (2002), "*Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional*", makalah Seminar Nasional: *Public Sector Scorecard*, 17-18 April 2002, DJPKPD RI, Jakarta.
- Sidik, Machfud, et. al. (editor) (2002), *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan, dan Prospek Di Era Otonomi Daerah*, LPEM-FEUI, MPKP-FEUI, Ditjen PKPD-Departemen Keuangan, Penerbit Buku Kompas, November 2002.
- Simanjuntak, Robert A., (2002), *Transfer Pusat ke Daerah: Konsep dan Praktik di Beberapa Negara* dalam Machfud Sidik at al (eds.), "*Dana Alokasi Umum (DAU): Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*", Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

- Stiglitz, Joseph E., (1988), *Economics of Public Sectors*, W. W. Norton, New York.
- Wibowo, Kodrat, dan Dendi, Astia, dan Zulhanif, (2011), *Is a Specific Grant Really "Specific"?: Case of Indonesia Provinces, 2003-2010*, Working Paper in Economics and Development Studies No. 201109, Center for Economics and Development Studies (CEDDS), Padjajaran University, Indonesia, September 2011.
- Widarjono, Agus, (2009), *Ekonometrika, Pengantar dan Aplikasinya*, Edisi Ketiga, Ekonesia, Yogyakarta.



LAMPIRAN 1-1

DATA PANEL

ID	OBS	YHKMIG?	IPM?	POP?	LD?	LL?	PADSP?	DAUSP?	DAK?	DBH?	YHKMIG1?	DPROV?
NAD	2003	44677.16	66	4239989	56771	295370	208601	2162440	161005	0	39960.84	0
NAD	2004	40374.28	68.7	4089086	56771	295370	290929.9	2555510	141770	0	44677.16	0
NAD	2005	36287.92	69.05	4031687	56771	295370	384208.9	3101872	229550	1946005	40374.28	0
NAD	2006	36853.87	69.41	4072661	56771	295370	746196.7	5020879	592800	3716674	36287.92	0
NAD	2007	35983.09	70.35	4223953	56771	295370	731303	5666371	800688	1694561	36853.87	0
NAD	2008	34097.99	70.76	4294998	56771	295370	1137478	6348755	1005049	1777896	35983.09	0
NAD	2009	32220.88	71.31	4445898	56771	295370	1296934	6833515	1040297	1241551	34097.99	0
NAD	2010	33071.14	71.7	4486570	56771	295370	1310523	6992338	812758	2175850	32220.88	0
SUMUT	2003	78805.61	68.8	11923452	71681	110000	1390282	4387250	131015	0	75189.14	0
SUMUT	2004	83328.95	71.4	12123355	71681	110000	1617507	4483871	160990	0	78805.61	0
SUMUT	2005	87897.79	72.03	12450358	71681	110000	1910600	4822925	221890	1054900	83328.95	0
SUMUT	2006	93347.4	72.46	12643027	71681	110000	2180267	8333587	645945	1242991	87897.79	0
SUMUT	2007	99792.27	72.78	12834032	71681	110000	1919472	9511977	1020199	1379127	93347.4	0
SUMUT	2008	106172.4	73.29	13042230	71681	110000	3070204	10404366	1269146	1524697	99792.27	0
SUMUT	2009	111559.2	73.8	13248521	71681	110000	3047896	10807528	1495635	1843280	106172.4	0
SUMUT	2010	118640.9	73	12985075	71681	110000	3340349	11633089	1425156	1916927	111559.2	0
SUMBAR	2003	26146.78	67.5	4476478	42297	138750	516538.2	2517320	108715	0	24840.19	0
SUMBAR	2004	27578.14	70.5	4535457	42297	138750	605430.9	2645281	123270	0	26146.78	0
SUMBAR	2005	29159.48	71.19	4566084	42297	138750	717837.4	2837637	191240	327080	27578.14	0
SUMBAR	2006	30949.95	71.65	4632214	42297	138750	877628	5128701	466475	432408	29159.48	0
SUMBAR	2007	32912.97	72.23	4697859	42297	138750	794319	5779340	746945	440031	30949.95	0
SUMBAR	2008	35176.63	72.96	4786139	42297	138750	1302986	6511816	895406	480211	32912.97	0
SUMBAR	2009	36683.24	73.44	4856859	42297	138750	1268555	6642881	953752	501354	35176.63	0
SUMBAR	2010	38860.19	74	4845998	42297	138750	1433327	6866583	689948	574771	36683.24	0
RIAU	2003	73077.96	69.1	4428311	86412	235366	1025869	1366150	0	0	98656.2	0
RIAU	2004	75216.72	72.2	4519606	86412	235366	1206424	1597556	0	0	73077.96	0
RIAU	2005	79287.59	73.63	4579169	86412	235366	1205820	1634677	8330	3987804	75216.72	0
RIAU	2006	83370.87	73.81	4762627	86412	235366	1547880	1876835	161575	10520822	79287.59	0
RIAU	2007	86213.26	74.63	5070933	86412	235366	1690855	2629987	211369	10113654	83370.87	0
RIAU	2008	91085.38	75.09	5189151	86412	235366	2832918	2210426	193426	9482081	86213.26	0
RIAU	2009	93786.24	75.6	4935527	86412	235366	2330551	2240351	293290	8171669	91085.38	0
RIAU	2010	97701.68	76	5543031	86412	235366	2322945	1776303	274571	10120899	93786.24	0
JAMBI	2003	11343.28	67.1	2582771	53010	425.5	375019.4	1582770	73900	0	10708.65	0
JAMBI	2004	11953.89	70.1	2625319	53010	425.5	406835.8	1647605	78520	0	11343.28	0
JAMBI	2005	12619.97	70.95	2635917	53010	425.5	464088	1805197	110540	548181	11953.89	0
JAMBI	2006	13363.62	71.29	2683185	53010	425.5	563891.3	2799352	200355	1079990	12619.97	0
JAMBI	2007	14275.16	71.46	2742299	53010	425.5	497285	3133539	365218	1266887	13363.62	0
JAMBI	2008	15297.77	71.99	2788216	53010	425.5	915861.9	3380903	420457	1357209	14275.16	0
JAMBI	2009	16272.91	72.45	2920964	53010	425.5	727815	3440532	445958	1262548	15297.77	0
JAMBI	2010	17465.25	73	3088618	53010	425.5	809454.1	3728830	454879	1581534	16272.91	0
SUMSEL	2003	45247.4	66	6521598	99599	284	624407.8	2219350	48560	0	43592.16	0
SUMSEL	2004	47344.4	69.6	6628417	99599	284	668563.3	2333234	54010	0	45247.4	0
SUMSEL	2005	49633.54	70.23	6782423	99599	284	809867.1	2514138	66570	1651485	47344.4	0
SUMSEL	2006	52214.85	71.09	6899861	99599	284	1088849	4250580	312805	2520944	49633.54	0
SUMSEL	2007	55262.11	71.4	7019847	99599	284	365778	4947884	459848	3496461	52214.85	0

DATA PANEL

ID	OBS	YHKMIG?	IPM?	POP?	LD?	LL?	PADSP?	DAUSP?	DAK?	DBH?	YHKMIG1?	DPROV?
SUMSEL	2008	58065.46	72.05	7139461	99599	284	1593689	5452010	547926	3712999	55262.11	0
SUMSEL	2009	60452.94	72.61	7263545	99599	284	1729276	5363018	625143	3871475	58065.46	0
SUMSEL	2010	63736	72.95	7446401	99599	284	2152306	5332934	558105	5385078	60452.94	0
BENGGKULU	2003	5595.03	68.05	1525169	19789	53000	99648.72	973800	41700	0	5310.017	0
BENGGKULU	2004	5896.253	69.9	1549148	19789	53000	141141.3	1006947	43060	0	5595.03	0
BENGGKULU	2005	6239.361	71.09	1581531	19789	53000	150350.8	1110329	85220	146382	5896.253	0
BENGGKULU	2006	6610.629	71.28	1600703	19789	53000	217356.2	2300959	292780	199529	6239.361	0
BENGGKULU	2007	7037.404	71.57	1616568	19789	53000	618731	2550302	407383	210913	6610.629	0
BENGGKULU	2008	7444.485	72.14	1688655	19789	53000	401314.5	2867998	498058	239026	7037.404	0
BENGGKULU	2009	7923.13	72.55	1708612	19789	53000	565253	2916491	540660	254884	7444.485	0
BENGGKULU	2010	8330.345	73	1713393	19789	53000	642322	3208355	381555	270946	7923.13	0
LAMPG	2003	26898.05	65.8	6962564	35288	24000	409032.8	2376060	60900	0	25451.59	0
LAMPG	2004	28262.29	68.4	7063753	35288	24000	508457.1	2479281	74300	0	26898.05	0
LAMPG	2005	29397.25	68.85	7116700	35288	24000	661127.1	2694062	99010	437541	28262.29	0
LAMPG	2006	30861.36	69.38	7211715	35288	24000	799521.3	4261522	308390	791619	29397.25	0
LAMPG	2007	32694.89	69.78	7289933	35288	24000	735388	4718764	455375	735161	30861.36	0
LAMPG	2008	34443.15	70.3	7314870	35288	24000	1123201	5200883	545813	725007	32694.89	0
LAMPG	2009	36221.14	70.93	7451249	35288	24000	1088343	5421583	670106	594830	34443.15	0
LAMPG	2010	38305.28	71	7596115	35288	24000	1116649	5717661	675921	854572	36221.14	0
BABEL	2003	8147.53	65.4	987927.4	16424	65301	135805.7	551450	17500	0	6409.268	1
BABEL	2004	8414.981	69.6	1023793	16424	65301	206753	585862	36700	0	8147.53	1
BABEL	2005	8707.309	70.68	1043489	16424	65301	273136.7	705145	41780	236258	8414.981	1
BABEL	2006	9053.553	71.18	1074767	16424	65301	348564.7	1468389	178440	288641	8707.309	1
BABEL	2007	9464.539	71.62	1106680	16424	65301	336082	1736836	266757	318103	9053.553	1
BABEL	2008	9899.926	72.19	1117208	16424	65301	507907.1	2041955	338038	478418	9464.539	1
BABEL	2009	10266.45	72.55	1156677	16424	65301	435211	2017871	342681	547445	9899.926	1
BABEL	2010	10866.81	73	1223048	16424	65301	469469.2	2029800	184491	434605	10266.45	1
KEPRI	2003	26775.79	69.1	1167958	10595	241215.3	281625.9	0	3715	0	25147.9	1
KEPRI	2004	28509.06	70.8	1192045	10595	241215.3	281625.9	527475	8000	0	26775.79	1
KEPRI	2005	30381.5	72.23	1274837	10595	241215.3	281625.9	654142	22560	597879	28509.06	1
KEPRI	2006	32441	72.79	1337851	10595	241215.3	586125.7	1032358	81760	2156649	30381.5	1
KEPRI	2007	34713.81	73.68	1392917	10595	241215.3	506964	1456492	149424	1552878	32441	1
KEPRI	2008	37014.74	74.18	1437564	10595	241215.3	1034808	1124237	144307	1574019	34713.81	1
KEPRI	2009	38318.83	74.54	1515271	10595	241215.3	1050395	1559077	224071	1527181	37014.74	1
KEPRI	2010	41083.26	75	1685698	10595	241215.3	1030742	1260268	111046	2856883	38318.83	1
JABAR	2003	219525.2	65.8	38137941	26737	63954.76	3400470	8033110	97530	0	211391.6	0
JABAR	2004	230003.5	69.1	38610858	26737	63954.76	4361980	8415510	118260	0	219525.2	0
JABAR	2005	242883.9	69.93	38967329	26737	63954.76	5379995	8971131	117910	2601222	230003.5	0
JABAR	2006	257499.4	70.32	39647029	26737	63954.76	5701735	13261845	685680	3058414	242883.9	0
JABAR	2007	274180.3	70.71	40329570	26737	63954.76	5405424	15733865	818090	3568753	257499.4	0
JABAR	2008	291205.8	71.12	43024899	26737	63954.76	7941628	17145181	1000183	3777739	274180.3	0
JABAR	2009	303405.3	71.64	43908174	26737	63954.76	7927066	18142281	1295927	4621777	291205.8	0
JABAR	2010	321875.8	72.08	43021826	26737	63954.76	8912359	18217654	1740271	5289284	303405.3	0
JATENG	2003	129166.5	66.3	32175387	32544	70129.23	2616585	9520330	174900	0	123038.5	0
JATENG	2004	135789.9	68.9	32542780	32544	70129.23	3136429	9961491	194280	0	129166.5	0
JATENG	2005	143051.2	69.78	31978628	32544	70129.23	3966084	10454612	295990	1245882	135789.9	0
JATENG	2006	150682.7	70.25	32180384	32544	70129.23	4419420	15850376	897170	1474007	143051.2	0
JATENG	2007	159110.3	70.92	32379398	32544	70129.23	4561887	17457004	1293669	1591062	150682.7	0
JATENG	2008	168034.5	71.6	33003951	32544	70129.23	6055336	18842579	1639783	1792936	159110.3	0

DATA PANEL

ID	OBS	YHKMIG?	IPM?	POP?	LD?	LL?	PADSP?	DAUSP?	DAK?	DBH?	YHKMIG1?	DPROV?
JATENG	2009	176673.5	72.1	33275125	32544	70129.23	5936313	19346337	2006430	2488695	168034.5	0
JATENG	2010	186995.5	72.9	32380687	32544	70129.23	6405525	19473816	1969338	2573920	176673.5	0
DIY	2003	15360.41	70.8	3211424	3186	9561.538	459313	1462350	38600	0	14689.24	0
DIY	2004	16146.42	72.9	3223513	3186	9561.538	557762.2	1516979	40010	0	15360.41	0
DIY	2005	16910.88	73.5	3343574	3186	9561.538	655217.3	1565931	51410	182148	16146.42	0
DIY	2006	17535.75	73.7	3388705	3186	9561.538	732621.3	2452464	126495	191729	16910.88	0
DIY	2007	18291.51	74.15	3434551	3186	9561.538	724696	2704390	175934	236476	17535.75	0
DIY	2008	19212.48	74.88	3469467	3186	9561.538	1063152	3006412	232322	248738	18291.51	0
DIY	2009	20064.26	75.23	3504320	3186	9561.538	989154	3015955	289434	341936	19212.48	0
DIY	2010	21042.27	75.99782	3452390	3186	9561.538	1121984	2992336	274584	362288	20064.26	0
JATIM	2003	228884.5	64.1	36269926	47963	110000	3667878	9952580	184315	0	218452.4	0
JATIM	2004	242228.9	66.8	36481820	47963	110000	4412586	10446937	217120	0	228884.5	0
JATIM	2005	256442.6	68.42	36295875	47963	110000	5252886	10948640	257630	2062057	242228.9	0
JATIM	2006	271249.3	69.18	36593383	47963	110000	3703284	16616758	914090	2554265	256442.6	0
JATIM	2007	287814.2	69.78	36896078	47963	110000	5320294	18760738	1362150	2978736	271249.3	0
JATIM	2008	305538.7	70.38	37238070	47963	110000	8106422	20531290	1690259	3377252	287814.2	0
JATIM	2009	320861.2	71.06	37428345	47963	110000	6841116	20855304	2138175	4445767	305538.7	0
JATIM	2010	342280.8	71.55	37476011	47963	110000	8686450	21290498	1892371	4336133	320861.2	0
BANTEN	2003	51957.46	66.6	8999325	9019	11134.22	993579.7	1663010	29800	0	49246.2	0
BANTEN	2004	54880.41	67.9	9128778	9019	11134.22	1275994	1781362	25900	0	51957.46	0
BANTEN	2005	58106.95	68.8	9028303	9019	11134.22	1596168	1927846	50230	799559	54880.41	0
BANTEN	2006	61341.66	69.11	9224060	9019	11134.22	1748608	2704949	99680	886662	58106.95	0
BANTEN	2007	65046.78	69.29	9423181	9019	11134.22	1881245	3261483	239914	1110873	61341.66	0
BANTEN	2008	79699.68	69.7	10964369	9019	11134.22	2532710	3624493	283278	1175382	65046.78	0
BANTEN	2009	83440.21	70.06	11174991	9019	11134.22	2374519	3937436	346241	1534109	79699.68	0
BANTEN	2010	88393.77	70.56	10644030	9019	11134.22	2531521	4054416	378604	1693225	83440.21	0
BALI	2003	19080.9	67.5	3362831	5637	9500	833497.1	1683850	47800	0	18423.86	0
BALI	2004	19963.24	69.1	3397270	5637	9500	1144018	1742776	51360	0	19080.9	0
BALI	2005	21072.44	69.78	3383481	5637	9500	1356810	1824508	90210	294456	19963.24	0
BALI	2006	22184.68	70.07	3431710	5637	9500	1368348	2854126	235590	320610	21072.44	0
BALI	2007	23497.05	70.53	3479897	5637	9500	1414178	3292774	348377	381405	22184.68	0
BALI	2008	25910.33	70.98	3656326	5637	9500	2301732	3555232	433914	401264	23497.05	0
BALI	2009	27290.95	71.52	3718300	5637	9500	1962691	3653882	484340	583627	25910.33	0
BALI	2010	28880.69	72.21438	3891428	5637	9500	2466105	3549610	336352	490429	27290.95	0
NTB	2003	14073.34	57.8	4024858	20153	29159	251467.2	1637440	58915	0	13510.95	1
NTB	2004	14928.17	60.6	4083740	20153	29159	293979.6	1717496	62770	0	14073.34	1
NTB	2005	15183.79	62.42	4184209	20153	29159	330131.7	1912050	103280	383256	14928.17	1
NTB	2006	15603.77	63.04	4257389	20153	29159	442800.2	2998811	291010	414781	15183.79	1
NTB	2007	16369.22	63.71	4292218	20153	29159	444160	3478868	406192	397972	15603.77	1
NTB	2008	16831.6	64.12	4354447	20153	29159	629421.7	3919127	514263	360544	16369.22	1
NTB	2009	18869.08	64.66	4500309	20153	29159	715521	4067645	526669	405683	16831.6	1
NTB	2010	20056.8	65.8874	4496855	20153	29159	906890.1	4320282	462300	487015	18869.08	1
NTT	2003	9053.93	60.3	4093902	47349	199529	236835.9	2632410	125415	0	8622.491	1
NTT	2004	9537.095	62.7	4155865	47349	199529	296254.5	2778293	127250	0	9053.93	1
NTT	2005	9867.309	63.59	4260780	47349	199529	287904.8	2905629	212920	294869	9537.095	1
NTT	2006	10368.5	64.83	4355597	47349	199529	415455.1	4529409	492045	322331	9867.309	1
NTT	2007	10902.4	65.36	4448392	47349	199529	373913	5059361	748340	323579	10368.5	1
NTT	2008	11429.77	66.15	4539026	47349	199529	553805	5576587	1008974	346851	10902.4	1
NTT	2009	11920.6	66.6	4627553	47349	199529	560432	6205727	1213012	400216	11429.77	1

DATA PANEL

ID	OBS	YHKMIG?	IPM?	POP?	LD?	LL?	PADSP?	DAUSP?	DAK?	DBH?	YHKMIG1?	DPROV?
NTT	2010	12531.63	67.71622	4679316	47349	199529	666386.1	6485894	859588	417755	11920.6	1
KALBAR	2003	21455.28	62.9	3969072	147307	101538.5	288929	2165460	80415	0	20741.9	0
KALBAR	2004	22483.02	65.4	4033234	147307	101538.5	375964.2	2275765	90850	0	21455.28	0
KALBAR	2005	23538.35	66.2	4052341	147307	101538.5	410199.6	2460616	145910	352233	22483.02	0
KALBAR	2006	24768.37	67.08	4118257	147307	101538.5	566951.2	4654627	352960	439249	23538.35	0
KALBAR	2007	26260.65	67.53	4178497	147307	101538.5	574591	5079791	565268	486196	24768.37	0
KALBAR	2008	27438.79	68.17	4312179	147307	101538.5	854521.6	5647334	716082	544541	26260.65	0
KALBAR	2009	28754.36	68.79	4348818	147307	101538.5	771520	5853361	779595	702480	27438.79	0
KALBAR	2010	30292.39	68.79	4393239	147307	101538.5	960333.5	6119635	637206	653094	28754.36	0
KALTENG	2003	12555.44	69.1	1837632	153565	63461.54	199204.2	1542670	126510	0	11904.5	0
KALTENG	2004	13253.08	71.7	1870584	153565	63461.54	253802	2015156	87120	0	12555.44	0
KALTENG	2005	14034.63	73.22	1914872	153565	63461.54	280441	2360036	174810	458099	13253.08	0
KALTENG	2006	14853.73	73.4	1937785	153565	63461.54	393625.5	4373819	378720	585011	14034.63	0
KALTENG	2007	15754.51	73.49	2028317	153565	63461.54	163012	4851377	493392	728821	14853.73	0
KALTENG	2008	16726.46	73.88	2077768	153565	63461.54	627447.4	5351554	634633	740804	15754.51	0
KALTENG	2009	17647.32	74.36	2137052	153565	63461.54	772062	5489564	691262	919471	16726.46	0
KALTENG	2010	18788.98	78.02	2202599	153565	63461.54	1055534	5593756	453638	1035680	17647.32	0
KALSEL	2003	21109.04	64.3	3187652	37531	18109.02	385487.7	1704110	89400	0	18482.25	0
KALSEL	2004	22171.33	66.7	3226933	37531	18109.02	529555.7	1744544	92280	0	21109.04	0
KALSEL	2005	23292.54	67.44	3282138	37531	18109.02	732013.1	1971732	159490	806498	22171.33	0
KALSEL	2006	24452.26	67.75	3345927	37531	18109.02	869999.6	3360317	326600	1014317	23292.54	0
KALSEL	2007	25922.29	68.01	3396673	37531	18109.02	1007102	3744116	416095	1071795	24452.26	0
KALSEL	2008	27593.09	68.72	3453133	37531	18109.02	1457065	4113710	563021	1249631	25922.29	0
KALSEL	2009	29051.63	69.3	3515520	37531	18109.02	1252465	4234156	684685	1807402	27593.09	0
KALSEL	2010	30674.12	70.17472	3626119	37531	18109.02	1543644	4167301	538618	2396358	29051.63	0
KALTIM	2003	89483.54	70	2720034	204534	10538.66	954344.4	1298830	13715	0	87850.4	0
KALTIM	2004	91050.43	72.2	2765660	204534	10538.66	1063482	1690263	0	0	89483.54	0
KALTIM	2005	93938	72.94	2848799	204534	10538.66	1225653	1696670	56140	6006564	91050.43	0
KALTIM	2006	96612.84	73.26	2936372	204534	10538.66	1901475	2207525	213100	14145206	93938	0
KALTIM	2007	98386.38	73.77	3024767	204534	10538.66	1340691	2994740	271789	12831048	96612.84	0
KALTIM	2008	103206.9	74.52	3100572	204534	10538.66	3048058	2629072	282301	13127495	98386.38	0
KALTIM	2009	105368.8	75.11	3204751	204534	10538.66	2392839	2178514	340632	10937411	103206.9	0
KALTIM	2010	110579.9	75.56	3550586	204534	10538.66	3554316	1414946	235408	14188752	105368.8	0
SULUT	2003	11652.79	71.2	2135521	15473	304782	190381.8	1240900	55415	0	11322.27	1
SULUT	2004	12149.5	73.4	2158596	15473	304782	214314.5	1338887	59550	0	11652.79	1
SULUT	2005	12744.55	74.21	2128827	15473	304782	246980.2	1537682	110200	189632	12149.5	1
SULUT	2006	13473.11	74.37	2160539	15473	304782	324855.3	2759310	314210	228174	12744.55	1
SULUT	2007	14344.3	74.68	2186808	15473	304782	296342	3071624	501621	239818	13473.11	1
SULUT	2008	15902.07	75.16	2275794	15473	304782	495384.4	3427850	673556	279897	14344.3	1
SULUT	2009	17149.62	75.68	2297351	15473	304782	507318	4051272	887186	340794	15902.07	1
SULUT	2010	18371.2	76.09	2265937	15473	304782	580875.4	4434225	628605	376704	17149.62	1
SULTENG	2003	10196.75	64.4	2220740	68033	189480	164326.2	1575010	78215	0	9600.364	0
SULTENG	2004	10925.46	67.3	2252641	68033	189480	186882.6	1693682	81960	0	10196.75	0
SULTENG	2005	11752.24	68.47	2294755	68033	189480	189612.7	1839514	119710	229241	10925.46	0
SULTENG	2006	12671.55	68.85	2349465	68033	189480	282970.4	3262728	286430	282082	11752.24	0
SULTENG	2007	13683.88	69.34	2396293	68033	189480	267495	3608224	467964	303994	12671.55	0
SULTENG	2008	15047.43	70.09	2488307	68033	189480	438905.9	4049961	578982	335637	13683.88	0
SULTENG	2009	16177.34	70.7	2506412	68033	189480	417877	4125361	606415	346190	15047.43	0
SULTENG	2010	17437.13	71.81473	2633420	68033	189480	517445	4489694	461238	373145	16177.34	0

DATA PANEL

ID	OBS	YHKMIG?	IPM?	POP?	LD?	LL?	PADSP?	DAUSP?	DAK?	DBH?	YHKMIG1?	DPROV?
SULSEL	2003	32627.38	65.3	7310017	46717	266877	774723.4	3693290	138715	0	33659.13	0
SULSEL	2004	34345.08	67.8	7399460	46717	266877	927990.9	3846009	196980	0	32627.38	0
SULSEL	2005	36421.79	68.06	7509854	46717	266877	1034275	4159547	275000	757243	34345.08	0
SULSEL	2006	38867.68	68.81	7630021	46717	266877	1294038	6586306	649785	895813	36421.79	0
SULSEL	2007	41332.43	69.62	7700303	46717	266877	1338943	7351855	982884	945371	38867.68	0
SULSEL	2008	44549.82	70.22	7804858	46717	266877	1927954	8096082	1220358	1042664	41332.43	0
SULSEL	2009	47326.08	70.94	7912182	46717	266877	2111574	8263349	1318598	1041384	44549.82	0
SULSEL	2010	51197.03	71.62	8032551	46717	266877	2377271	8675872	1030727	1092892	47326.08	0
SULTRA	2003	6957.66	64.1	1887353	38068	114879	152133.2	1053260	47115	0	6468.062	0
SULTRA	2004	7480.18	66.7	1922683	38068	114879	150275.9	1177901	59290	0	6957.66	0
SULTRA	2005	8026.856	67.52	1962959	38068	114879	145350	1470305	101690	201740	7480.18	0
SULTRA	2006	8643.33	67.8	2001881	38068	114879	213379.3	2892753	321560	253647	8026.856	0
SULTRA	2007	9331.72	68.32	2031580	38068	114879	101625	3243450	501529	274842	8643.33	0
SULTRA	2008	10506.37	69	2434829	38068	114879	469621.6	3705709	645094	310892	9331.72	0
SULTRA	2009	11301.22	69.52	2485430	38068	114879	747160	4132308	711817	337036	10506.37	0
SULTRA	2010	12226.38	70.47198	2230569	38068	114879	663478.2	4273782	501019	370589	11301.22	0
GRTL	2003	1769.19	64.1	885118	11257	10500	77389.51	664160	27600	0	1653.845	0
GRTL	2004	1891.763	65.4	897301	11257	10500	70823.12	716851	35730	0	1769.19	0
GRTL	2005	2027.723	67.46	922248.7	11257	10500	90044.31	766198	56500	90622	1891.763	0
GRTL	2006	2175.815	68.01	941433.4	11257	10500	117583.4	1406387	135160	105968	2027.723	0
GRTL	2007	2339.218	68.83	960398.5	11257	10500	42690	1420678	220918	107829	2175.815	0
GRTL	2008	2520.673	69.29	972142.2	11257	10500	194986.7	1642790	288104	116969	2339.218	0
GRTL	2009	2710.737	69.79	982085.9	11257	10500	213687	1844425	354484	135626	2520.673	0
GRTL	2010	2917.413	70.28	1038585	11257	10500	242964.7	1899267	238457	134833	2710.737	0
SULBAR	2003	2756.96	64	942662.5	16787	63630.77	46306.46	0	29215	0	2600.817	0
SULBAR	2004	2922.478	64.4	969650.1	16787	63630.77	46306.46	0	33910	0	2756.96	0
SULBAR	2005	3120.765	65.72	969519.2	16787	63630.77	46306.46	0	56400	106742	2922.478	0
SULBAR	2006	3321.147	67.06	992603.7	16787	63630.77	69289	1325625	147010	143469	3120.765	0
SULBAR	2007	3567.816	67.72	1016711	16787	63630.77	78852	1467798	205098	144577	3321.147	0
SULBAR	2008	3998.502	68.55	1101076	16787	63630.77	119621.2	1688207	285145	161255	3567.816	0
SULBAR	2009	4239.461	69.18	1136085	16787	63630.77	129569	1768088	318908	161344	3998.502	0
SULBAR	2010	4744.309	70.08424	1158336	16787	63630.77	163464.8	1854908	205486	166936	4239.461	0
MALUKU	2003	2970.47	66.5	1224086	54185	527191	74549.06	1149940	64600	0	2847.739	1
MALUKU	2004	3101.996	69	1243941	54185	527191	151038.7	1248443	43980	0	2970.47	1
MALUKU	2005	3259.244	69.24	1251551	54185	527191	118711.2	1301151	86470	255402	3101.996	1
MALUKU	2006	3440.114	69.69	1270912	54185	527191	141379.1	2462449	250850	327243	3259.244	1
MALUKU	2007	3633.475	69.96	1301988	54185	527191	170466	2782040	408908	316601	3440.114	1
MALUKU	2008	3787.271	70.38	1320825	54185	527191	258590.7	3066445	500065	336396	3633.475	1
MALUKU	2009	3993.139	70.96	1339709	54185	527191	286013	3092072	532650	372187	3787.271	1
MALUKU	2010	4251.356	71.73689	1531402	54185	527191	368001.3	3614588	451745	409374	3993.139	1
MALUT	2003	2032.57	65.8	858059.8	31983	113818.6	30128.05	482290	29400	0	1957.716	1
MALUT	2004	2128.208	66.4	872657.6	31983	113818.6	38349.89	783947	47930	0	2032.57	1
MALUT	2005	2236.804	66.95	1000039	31983	113818.6	60979.57	891512	88110	277538	2128.208	1
MALUT	2006	2359.483	67.51	1000148	31983	113818.6	119608.1	1864170	283650	338546	2236.804	1
MALUT	2007	2501.175	67.82	1000013	31983	113818.6	82786	2149097	357979	376807	2359.483	1
MALUT	2008	2651.108	68.18	1001619	31983	113818.6	249036.3	2378912	450758	454280	2501.175	1
MALUT	2009	2811.446	68.63	1000548	31983	113818.6	300364	2377243	561200	503479	2651.108	1
MALUT	2010	3035.125	69.11346	1035478	31983	113818.6	417068.3	2513533	320701	416925	2811.446	1
PABAR	2003	4627.37	60.1	616714.8	97024	13853	30022.77	0	19100	0	3961.756	0

DATA PANEL

ID	OBS	YHKMIG?	IPM?	POP?	LD?	LL?	PADSP?	DAUSP?	DAK?	DBH?	YHKMIG1?	DPROV?
PABAR	2004	4969.21	63.7	642472.1	97024	13853	30022.77	1002013	46130	0	4627.37	0
PABAR	2005	5307.329	64.83	643030.5	97024	13853	53187.29	1221677	109060	706471	4969.21	0
PABAR	2006	5548.901	66.08	688383.2	97024	13853	75514.97	2746290	259945	1091152	5307.329	0
PABAR	2007	5934.316	67.28	716021.7	97024	13853	48118	3159167	396716	1084350	5548.901	0
PABAR	2008	6399.528	67.95	818120	97024	13853	248241.4	3458609	511623	1147473	5934.316	0
PABAR	2009	6848.556	68.58	880203.4	97024	13853	184196	3411970	495331	1068065	6399.528	0
PABAR	2010	8685.648	70.11517	760855	97024	13853	240595.4	3388461	419729	2046487	6848.556	0
PAPUA	2003	21019.42	60.1	1749702	317062	228000	211413.9	2734080	65300	0	21278.88	0
PAPUA	2004	16282.97	60.9	1873812	317062	228000	287701.9	2926171	99750	0	21019.42	0
PAPUA	2005	22209.19	62.08	1875363	317062	228000	273975.4	3313505	218240	852577	16282.97	0
PAPUA	2006	18402.2	62.75	1973456	317062	228000	411397.6	7251915	656735	1273574	22209.19	0
PAPUA	2007	19200.3	63.41	2015594	317062	228000	343879	7863525	1028067	1470092	18402.2	0
PAPUA	2008	18931.84	64	2333165	317062	228000	796297.6	8506659	1211817	2400947	19200.3	0
PAPUA	2009	23237.11	64.53	2446064	317062	228000	668505	9125004	1605005	2564820	18931.84	0
PAPUA	2010	22620.3	65.29988	2851999	317062	228000	1017093	11119707	1528966	2114638	23237.11	0



LAMPIRAN 2-1
KOEFISIEN VARIASI PAD 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	103,532	198,432	262,120	476,910	587,487	716,291	735,206	795,487	797,285
Sumatera Utara	908,262	1,136,072	1,361,818	1,502,608	1,693,846	2,181,312	2,016,073	2,226,498	3,181,900
Riau	658,548	706,475	769,562	964,668	1,257,064	1,477,579	1,352,413	1,330,053	1,502,361
Kepulauan Riau	-	69,616	162,272	281,831	325,000	406,283	381,947	400,884	500,056
Sumatera Barat	281,449	375,075	448,279	494,930	571,608	790,088	739,747	845,916	1,086,756
Jambi	225,323	285,933	344,881	385,043	451,051	626,110	526,442	503,810	571,302
Bengkulu	69,012	104,921	122,166	165,101	209,766	289,078	287,782	442,804	421,521
Sumatera Selatan	428,080	493,133	590,861	741,957	847,954	1,139,864	1,054,333	1,496,643	1,563,704
Bangka Belitung	71,780	114,541	188,304	198,173	203,542	294,185	246,800	267,242	316,750
Lampung	306,859	410,682	549,673	631,982	674,694	891,782	860,358	853,470	1,085,424
Banten	614,669	818,246	1,070,238	1,118,023	1,298,456	1,661,169	1,687,721	1,607,549	2,079,097
DKI Jakarta	5,261,851	6,430,335	7,597,868	7,817,458	8,731,096	10,455,566	10,601,058	11,824,970	16,022,581
Jawa Barat	2,170,594	2,846,801	3,604,768	3,748,404	4,221,669	5,275,052	5,577,589	5,622,865	6,316,400
Jawa Tengah	1,491,411	1,865,391	2,490,644	2,630,621	2,932,805	3,698,843	4,000,736	3,729,062	4,182,627
DI Yogyakarta	263,266	347,404	401,912	436,482	488,891	632,872	645,146	621,738	700,339
Jawa Timur	2,196,866	2,860,562	3,464,580	3,703,284	4,164,251	5,212,319	5,708,030	6,376,891	7,615,043
Bali	382,260	559,682	742,886	729,338	834,475	1,057,792	1,163,948	1,004,103	1,249,492
Nusa Tenggara Barat	130,281	170,223	196,167	265,025	328,753	430,222	471,989	529,531	709,889
Nusa Tenggara Timur	94,332	123,690	140,629	175,952	198,296	237,286	255,675	247,965	343,231
Kalimantan Barat	198,410	264,677	295,462	377,846	471,327	586,815	579,576	630,540	733,335
Kalimantan Tengah	88,488	112,681	154,093	215,751	273,180	380,666	382,020	540,324	664,905
Kalimantan Timur	604,419	705,631	897,516	1,196,996	1,381,717	2,070,293	2,208,309	2,280,359	2,641,234
Kalimantan Selatan	277,679	364,206	530,111	585,032	690,491	1,052,561	1,021,456	1,090,111	1,392,301
Sulawesi Utara	119,691	147,140	198,270	211,236	252,324	322,581	331,084	350,031	451,755
Gorontalo	35,874	37,822	46,113	54,115	70,078	94,512	102,626	103,283	122,767
Sulawesi Barat	-	-	20,550	35,390	47,056	61,856	64,445	82,200	110,076
Sulawesi Tengah	100,572	122,908	141,349	160,509	194,191	278,854	275,191	278,234	325,623
Sulawesi Selatan	445,679	563,613	675,857	775,510	992,252	1,238,690	1,242,766	1,430,079	1,782,147
Sulawesi Tenggara	76,480	91,543	101,069	120,633	174,859	296,603	223,128	361,282	421,500
Maluku Utara	15,969	18,009	26,933	49,517	57,108	75,338	73,292	101,727	80,678
Maluku	38,304	57,308	77,358	79,080	104,446	120,041	146,189	196,266	222,002
Papua Barat	-	-	12,788	12,144	32,796	357,742	369,727	357,802	98,962
Papua	95,124	162,102	198,627	214,586	345,420	76,490	73,618	75,220	304,175
Standar deviasi	1,014,468	1,255,414	1,506,421	1,553,150	1,732,465	2,101,322	2,181,419	2,372,548	3,081,638
Rata-rata	538,032	683,783	845,022	925,943	1,063,877	1,348,083	1,375,952	1,472,877	1,805,976
Koefisien Variasi	1.89	1.84	1.78	1.68	1.63	1.56	1.59	1.61	1.71

LAMPIRAN 2-2
KOEFISIEN VARIASI DAU 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	76,120	76,124	271,147	460,881	487,934	557,327	509,686	621,432	716,646
Sumatera Utara	301,750	302,047	313,745	539,718	657,357	727,911	761,055	813,233	948,868
Riau	74,210	61,628	92,157	92,157	277,659	198,375	171,851	58,869	380,051
Kepulauan Riau		2,713	25,963	178,330	333,333	288,885	403,132	310,162	395,746
Sumatera Barat	227,630	234,249	247,487	477,029	546,332	631,676	648,943	661,617	764,681
Jambi	209,250	223,347	243,618	374,361	415,018	468,804	473,506	489,069	583,882
Bengkulu	208,840	222,618	230,653	378,050	405,858	482,473	487,339	523,041	607,388
Sumatera Selatan	231,930	224,874	242,707	421,381	510,197	545,776	507,356	512,084	646,813
Bangka Belitung	162,490	168,285	187,358	275,689	319,357	391,045	407,995	410,811	481,590
Lampung	252,780	275,506	300,878	460,898	509,656	570,534	628,506	643,748	769,973
Banten	171,860	187,863	198,018	245,293	330,597	342,744	361,179	381,979	460,384
DKI Jakarta	734,890	743,531	768,080	768,080	119,943				209,909
Jawa Barat	429,570	467,764	495,604	565,753	933,436	904,232	977,238	1,086,124	1,181,553
Jawa Tengah	509,870	553,064	549,956	890,420	1,050,732	1,053,492	1,130,743	1,168,788	1,276,180
DI Yogyakarta	201,960	248,049	238,692	402,484	437,379	511,338	523,920	527,471	620,812
Jawa Timur	414,320	463,328	454,635	820,773	1,091,155	1,022,861	1,118,478	1,212,935	1,347,502
Bali	184,870	192,806	199,924	353,305	436,533	448,187	471,063	489,943	560,674
Nusa Tenggara Barat	223,950	231,537	249,887	404,145	447,658	511,286	554,432	573,407	646,671
Nusa Tenggara Timur	283,040	305,474	299,984	479,436	553,589	616,602	652,757	674,636	752,057
Kalimantan Barat	272,910	294,411	312,572	586,027	610,890	728,081	744,834	755,123	845,484
Kalimantan Tengah	253,600	274,597	287,641	552,000	571,290	670,213	694,822	707,880	795,816
Kalimantan Timur	76,410	66,139	72,547	72,547	235,743	126,229	17,867		51,447
Kalimantan Selatan	201,090	200,276	230,674	378,666	427,994	466,549	483,365	458,075	504,876
Sulawesi Utara	206,650	220,626	247,873	404,324	447,037	532,916	558,635	558,781	619,711
Gorontalo	177,130	209,175	209,429	391,390	291,394	368,638	388,325	400,751	461,118
Sulawesi Barat				255,206	279,253	366,675	391,061	405,750	441,579
Sulawesi Tengah	240,700	258,145	271,756	477,668	502,129	606,487	629,397	659,331	743,162
Sulawesi Selatan	299,050	313,614	332,725	509,538	599,508	656,710	663,422	706,276	816,758
Sulawesi Tenggara	226,430	235,259	254,152	426,354	461,841	566,435	589,844	595,762	700,837
Maluku Utara	200,960	212,240	226,815	338,604	370,724	451,481	458,512	479,727	540,390
Maluku	248,370	272,418	272,775	425,137	476,048	556,236	578,164	607,572	703,994
Papua Barat		101,457	128,243	350,540	464,871	578,084	595,756	605,916	700,445
Papua	395,160	369,930	418,864	810,237	876,295	1,002,432	1,058,228	1,148,741	1,276,286
Jumlah	7,697,790	8,213,094	8,876,559	14,566,421	16,478,740	17,950,714	18,641,411	19,249,034	22,553,283
Standar deviasi	133,579	146,003	141,602	187,960	219,334	216,730	241,567	254,874	286,911
Rata-rata	256,593	256,659	277,392	441,407	499,356	560,960	582,544	620,937	683,433
Koefisien Variasi	0.52	0.57	0.51	0.43	0.44	0.39	0.41	0.41	0.42

LAMPIRAN 2-3
KOEFISIEN VARIASI PAD+DAU 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	179,652	274,556	533,267	937,791	1,075,421	1,273,618	1,244,892	1,416,919	1,513,931
Sumatera Utara	1,210,012	1,438,119	1,675,563	2,042,326	2,351,203	2,909,223	2,777,128	3,039,731	4,130,768
Riau	732,758	768,103	861,719	1,056,825	1,534,723	1,675,954	1,524,264	1,388,922	1,882,412
Kepulauan Riau	-	72,329	188,235	460,161	658,333	695,168	785,079	711,046	895,802
Sumatera Barat	509,079	609,324	695,766	971,959	1,117,940	1,421,764	1,388,690	1,507,533	1,851,437
Jambi	434,573	509,280	588,499	759,404	866,069	1,094,914	999,948	992,879	1,155,184
Bengkulu	277,852	327,539	352,819	543,151	615,624	771,551	775,121	965,845	1,028,909
Sumatera Selatan	660,010	718,007	833,568	1,163,338	1,358,151	1,685,640	1,561,689	2,008,727	2,210,517
Bangka Belitung	234,270	282,826	375,662	473,862	522,899	685,230	654,795	678,053	798,340
Lampung	559,639	686,188	850,551	1,092,880	1,184,350	1,462,316	1,488,864	1,497,218	1,855,397
Banten	786,529	1,006,109	1,268,256	1,363,316	1,629,053	2,003,913	2,048,900	1,989,528	2,539,481
DKI Jakarta	5,996,741	7,173,866	8,365,948	8,585,538	8,851,039	10,455,566	10,601,058	11,824,970	16,232,490
Jawa Barat	2,600,164	3,314,565	4,100,372	4,314,157	5,155,105	6,179,284	6,554,827	6,708,989	7,497,953
Jawa Tengah	2,001,281	2,418,455	3,040,600	3,521,041	3,983,537	4,752,335	5,131,479	4,897,850	5,458,807
DI Yogyakarta	465,226	595,453	640,604	838,966	926,270	1,144,210	1,169,066	1,149,209	1,321,151
Jawa Timur	2,611,186	3,323,890	3,919,215	4,524,057	5,255,406	6,235,180	6,826,508	7,589,826	8,962,545
Bali	567,130	752,488	942,810	1,082,643	1,271,008	1,505,979	1,635,011	1,494,046	1,810,166
Nusa Tenggara Barat	354,231	401,760	446,054	669,170	776,411	941,508	1,026,421	1,102,938	1,356,560
Nusa Tenggara Timur	377,372	429,164	440,613	655,388	751,885	853,888	908,432	922,601	1,095,288
Kalimantan Barat	471,320	559,088	608,034	963,873	1,082,217	1,314,896	1,324,410	1,385,663	1,578,819
Kalimantan Tengah	342,088	387,278	441,734	767,751	844,470	1,050,879	1,076,842	1,248,204	1,460,721
Kalimantan Timur	680,829	771,770	970,063	1,269,543	1,617,460	2,196,522	2,226,176	2,280,359	2,692,681
Kalimantan Selatan	478,769	564,482	760,785	963,698	1,118,485	1,519,110	1,504,821	1,548,186	1,897,177
Sulawesi Utara	326,341	367,766	446,143	615,560	699,361	855,497	889,719	908,812	1,071,466
Gorontalo	213,004	246,997	255,542	445,505	361,472	463,150	490,951	504,034	583,885
Sulawesi Barat	-	-	20,550	290,596	326,309	428,531	455,506	487,950	551,655
Sulawesi Tengah	341,272	381,053	413,105	638,177	696,320	885,341	904,588	937,565	1,068,785
Sulawesi Selatan	744,729	877,227	1,008,582	1,285,048	1,591,760	1,895,400	1,906,188	2,136,355	2,598,905
Sulawesi Tenggara	302,910	326,802	355,221	546,987	636,700	863,038	812,972	957,044	1,122,337
Maluku Utara	216,929	230,249	253,748	388,121	427,832	526,819	531,804	581,454	621,068
Maluku	286,674	329,726	350,133	504,217	580,494	676,277	724,353	803,838	925,996
Papua Barat	-	101,457	141,031	362,684	497,667	935,826	965,483	963,718	799,407
Papua	490,284	532,032	617,491	1,024,823	1,221,715	1,078,922	1,131,846	1,223,961	1,580,461
Stdev	1,132,151	1,375,157	1,623,950	1,655,813	1,781,785	2,104,109	2,196,691	2,393,133	3,108,143
Average	771,299	932,665	1,114,009	1,367,350	1,563,233	1,892,044	1,940,843	2,056,181	2,489,409
Koefisien Variasi	1.47	1.47	1.46	1.21	1.14	1.11	1.13	1.16	1.25

LAMPIRAN 2-4

KOEFSIEN VARIASI PAD+DAU+DBH 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	179,652	274,556	1,785,545	3,323,020	1,400,622	1,615,748	1,481,342	2,393,660	2,614,574
Sumatera Utara	1,210,012	1,438,119	1,883,686	2,286,274	2,631,509	3,219,295	3,150,417	3,446,536	4,435,530
Riau	732,758	768,103	1,677,213	3,178,487	3,584,199	3,604,582	3,202,069	3,466,780	4,260,422
Kepulauan Riau	-	72,329	319,307	912,629	1,005,016	1,047,220	1,144,298	1,357,520	1,705,601
Sumatera Barat	509,079	609,324	753,095	1,043,390	1,194,399	1,508,265	1,469,532	1,614,407	1,956,575
Jambi	434,573	509,280	693,145	969,027	1,113,050	1,361,026	1,241,738	1,306,071	1,552,568
Bengkulu	277,852	327,539	375,716	575,919	649,504	811,669	815,243	1,012,778	1,082,945
Sumatera Selatan	660,010	718,007	1,169,056	1,673,477	2,066,468	2,442,678	2,373,002	3,105,469	3,368,153
Bangka Belitung	234,270	282,826	420,741	533,566	585,246	780,274	761,539	766,494	935,118
Lampung	559,639	686,188	949,239	1,289,610	1,359,729	1,632,501	1,609,677	1,691,530	2,059,917
Banten	786,529	1,006,109	1,460,710	1,581,742	1,906,082	2,301,552	2,420,419	2,419,961	2,776,957
DKI Jakarta	5,996,741	7,173,866	13,209,526	14,171,278	15,876,065	18,045,798	19,970,717	22,808,461	22,697,391
Jawa Barat	2,600,164	3,314,565	4,719,552	5,064,273	6,025,159	7,086,942	7,630,653	7,953,803	8,490,307
Jawa Tengah	2,001,281	2,418,455	3,293,513	3,813,979	4,312,171	5,131,634	5,681,321	5,469,810	5,948,571
DI Yogyakarta	465,226	595,453	679,155	879,047	976,975	1,198,702	1,243,185	1,233,371	1,381,846
Jawa Timur	2,611,186	3,323,890	4,363,783	5,068,140	5,899,278	6,982,488	7,836,592	8,563,164	9,883,898
Bali	567,130	752,488	1,004,014	1,149,701	1,351,935	1,593,106	1,764,808	1,494,046	1,810,166
Nusa Tenggara Barat	354,231	401,760	521,225	752,200	856,374	1,015,576	1,107,739	1,206,156	1,495,217
Nusa Tenggara Timur	377,372	429,164	485,004	705,692	802,207	906,373	964,909	989,959	1,174,412
Kalimantan Barat	471,320	559,088	682,266	1,040,257	1,167,885	1,412,277	1,448,768	1,505,862	1,711,477
Kalimantan Tengah	342,088	387,278	519,647	861,831	956,852	1,169,522	1,231,514	1,416,823	1,663,734
Kalimantan Timur	680,829	771,770	2,337,692	4,527,368	4,572,751	5,287,826	4,714,490	5,621,767	6,989,052
Kalimantan Selatan	478,769	564,482	915,657	1,159,975	1,326,888	1,764,749	1,863,992	2,032,666	2,426,058
Sulawesi Utara	326,341	367,766	479,398	656,519	742,398	902,832	943,998	977,208	1,141,100
Gorontalo	213,004	246,997	269,247	460,807	377,630	480,286	510,758	525,256	607,167
Sulawesi Barat	-	-	34,828	311,980	347,943	454,290	480,127	515,931	584,247
Sulawesi Tengah	341,272	381,053	451,073	684,591	747,128	943,207	960,327	1,003,668	1,147,654
Sulawesi Selatan	744,729	877,227	1,152,560	1,455,061	1,776,468	2,099,902	2,106,442	2,366,924	2,805,649
Sulawesi Tenggara	302,910	326,802	387,949	589,473	683,463	915,326	866,039	1,022,333	1,195,865
Maluku Utara	216,929	230,249	300,138	445,186	491,957	606,922	623,450	653,240	710,032
Maluku	286,674	329,726	393,645	558,467	632,524	732,671	782,564	872,147	1,008,520
Papua Barat	-	101,457	273,738	559,381	690,800	1,142,692	1,157,545	1,932,913	1,744,092
Papua	490,284	532,032	782,899	1,261,799	1,504,175	1,550,510	1,623,974	1,645,328	2,094,693
Standar deviasi	1,132,151	1,375,157	2,384,905	2,586,472	2,895,607	3,293,520	3,632,215	4,090,683	4,158,126
Rata-rata	771,299	932,665	1,477,090	1,925,580	2,109,541	2,477,225	2,581,309	2,860,365	3,195,743
Koefisien Variasi	1.47	1.47	1.61	1.34	1.37	1.33	1.41	1.43	1.30

LAMPIRAN 2-5

KOEFSIEN VARIASI PAD+DAU+DBH+DAK 2003-2011

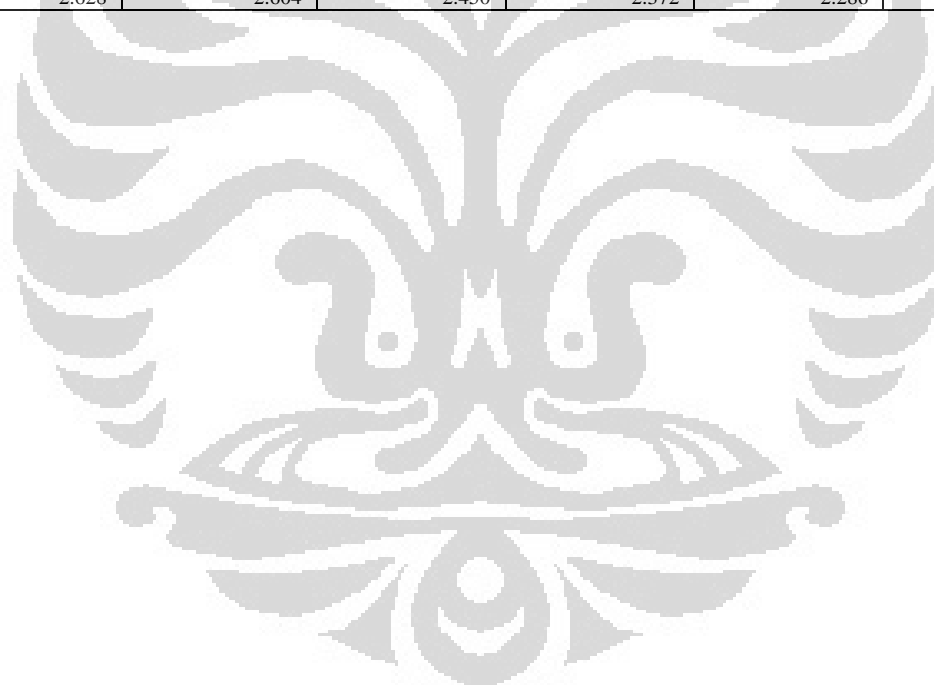
Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	182,152	274,556	1,785,545	3,323,020	1,400,622	1,651,151	1,529,531	2,424,017	2,665,185
Sumatera Utara	1,214,812	1,438,119	1,883,686	2,286,274	2,631,509	3,219,295	3,196,720	3,475,674	4,474,016
Riau	732,758	768,103	1,677,213	3,178,487	3,584,199	3,604,582	3,202,069	3,489,149	4,317,245
Kepulauan Riau	-	72,329	329,307	912,629	1,005,016	1,053,021	1,165,229	1,362,079	1,727,504
Sumatera Barat	513,779	609,324	753,095	1,043,390	1,194,399	1,532,832	1,516,711	1,633,628	1,997,308
Jambi	441,973	509,280	693,145	969,027	1,113,050	1,385,480	1,276,859	1,326,101	1,577,304
Bengkulu	284,052	327,539	375,716	575,919	649,504	837,065	868,520	1,033,762	1,119,555
Sumatera Selatan	668,310	718,007	1,169,056	1,673,477	2,066,468	2,442,678	2,373,002	3,129,212	3,400,440
Bangka Belitung	240,170	282,826	420,741	533,566	585,246	802,303	807,102	774,566	958,959
Lampung	564,239	686,188	949,239	1,289,610	1,359,729	1,655,229	1,649,693	1,719,104	2,102,127
Banten	789,329	1,006,109	1,460,710	1,581,742	1,906,082	2,319,649	2,452,540	2,433,622	2,822,137
DKI Jakarta	5,996,741	7,173,866	13,209,526	14,171,278	15,876,065	18,045,798	19,970,717	22,808,461	22,697,391
Jawa Barat	2,600,164	3,314,565	4,719,552	5,064,273	6,025,159	7,086,942	7,630,653	7,992,373	8,536,072
Jawa Tengah	2,001,281	2,418,455	3,293,513	3,813,979	4,312,171	5,131,634	5,684,758	5,507,549	6,000,361
DI Yogyakarta	470,726	595,453	679,155	879,047	976,975	1,218,170	1,276,595	1,244,755	1,401,336
Jawa Timur	2,611,186	3,323,890	4,363,783	5,068,140	5,899,278	6,982,488	7,854,593	8,620,146	9,938,929
Bali	572,230	752,488	1,004,014	1,149,701	1,351,935	1,614,740	1,800,916	1,505,181	1,831,388
Nusa Tenggara Barat	362,731	401,760	521,225	752,200	856,374	1,052,791	1,155,763	1,230,920	1,541,181
Nusa Tenggara Timur	383,372	429,164	485,004	705,692	802,207	948,949	1,024,642	1,020,066	1,221,811
Kalimantan Barat	479,920	559,088	682,266	1,040,257	1,167,885	1,443,371	1,502,082	1,535,481	1,749,847
Kalimantan Tengah	348,988	387,278	519,647	861,831	956,852	1,209,701	1,290,810	1,449,119	1,715,649
Kalimantan Timur	680,829	771,770	2,337,692	4,527,368	4,572,751	5,287,826	4,718,301	5,655,410	7,027,240
Kalimantan Selatan	484,469	564,482	915,657	1,159,975	1,326,888	1,800,788	1,907,344	2,052,503	2,463,304
Sulawesi Utara	333,041	367,766	479,398	656,519	742,398	930,911	996,877	994,647	1,170,388
Gorontalo	217,804	246,997	269,247	460,807	377,630	505,660	562,104	535,991	635,224
Sulawesi Barat	-	-	34,828	311,980	347,943	500,028	546,180	533,463	620,108
Sulawesi Tengah	348,472	381,053	451,073	684,591	747,128	978,408	1,020,384	1,032,265	1,185,833
Sulawesi Selatan	748,129	877,227	1,152,560	1,455,061	1,776,468	2,135,039	2,151,291	2,396,162	2,847,535
Sulawesi Tenggara	309,810	326,802	387,949	589,473	683,463	945,192	922,357	1,046,365	1,229,670
Maluku Utara	221,729	230,249	300,138	445,186	491,957	643,404	707,108	679,626	761,266
Maluku	295,274	329,726	393,645	558,467	632,524	769,283	850,831	904,645	1,053,178
Papua Barat	-	101,457	283,738	559,381	690,800	1,191,826	1,226,125	1,954,670	1,784,631
Papua	497,584	532,032	782,899	1,261,799	1,504,175	1,584,713	1,705,247	1,720,383	2,190,847
Standar deviasi	1,130,830	1,375,157	2,384,597	2,586,472	2,895,607	3,284,062	3,617,760	4,089,944	4,154,231
Rata-rata	775,638	932,665	1,477,696	1,925,580	2,109,541	2,500,332	2,622,535	2,885,488	3,235,302
Koefisien Variasi	1.46	1.47	1.61	1.34	1.37	1.31	1.38	1.42	1.28

LAMPIRAN 3-1
INDEKS WILLIAMSON PAD 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	3,718,331,749	4,421,530,111	6,254,488,465	3,693,876,108	4,247,355,799	7,336,363,819	7,699,574,101	8,666,131,947	19,242,755,994
Sumatera Utara	7,591,864,692	11,383,825,166	15,182,188,264	18,912,290,018	22,567,111,319	38,748,076,714	22,899,547,975	31,044,468,959	103,422,461,229
Riau	298,765,735	10,681,841	119,051,963	32,127,082	838,530,537	372,376,637	11,536,053	475,974,691	2,148,361,799
Kepulauan Riau	1,570,535,772	2,063,957,022	2,713,265,359	2,496,765,694	3,369,339,371	5,456,504,367	6,315,427,468	8,154,491,802	12,050,468,258
Sumatera Barat	1,368,975,108	1,984,050,274	3,281,528,894	3,870,949,850	5,044,064,089	6,376,991,741	8,292,484,178	8,018,589,373	10,550,346,890
Jambi	1,173,197,303	1,907,463,538	3,010,447,176	3,531,277,686	4,563,143,772	6,219,246,469	8,891,975,703	12,209,708,646	19,836,262,939
Bengkulu	1,558,491,614	2,382,749,521	3,773,076,804	4,168,182,560	5,225,125,802	8,104,128,550	8,534,389,563	7,652,897,891	13,836,653,858
Sumatera Selatan	366,238,099	1,105,915,126	2,000,400,376	1,050,645,289	1,450,111,260	1,324,571,131	3,169,334,916	17,705,313	1,840,199,051
Bangka Belitung	997,632,500	1,522,792,527	2,054,751,354	2,560,644,230	3,629,376,260	5,310,080,394	6,220,885,185	7,483,564,646	11,416,454,589
Lampung	1,728,414,776	2,418,341,148	2,834,408,637	2,803,275,682	4,892,230,451	6,517,480,922	8,355,650,922	12,268,098,833	16,622,741,347
Banten	245,518,777	757,621,792	2,090,827,260	1,530,846,839	2,297,472,604	4,599,177,461	4,581,934,511	812,632,656	3,337,396,836
DKI Jakarta	895,598,041,667	1,326,313,304,290	1,844,773,073,057	1,914,878,038,558	2,361,025,569,633	3,244,672,384,121	3,313,872,098,170	4,325,403,815,569	8,171,337,821,123
Jawa Barat	472,171,623,923	829,208,785,770	1,355,042,085,906	1,420,733,716,076	1,781,824,256,440	2,839,255,837,584	3,269,771,492,838	3,119,002,806,049	3,685,729,801,011
Jawa Tengah	135,849,579,287	208,562,055,124	395,397,516,358	420,651,171,397	501,104,454,074	780,463,431,602	967,034,008,094	693,854,943,712	769,699,577,403
DI Yogyakarta	1,126,231,619	1,674,256,956	2,997,417,188	3,651,883,625	5,031,063,795	7,594,519,954	7,894,846,416	10,528,198,546	17,785,427,357
Jawa Timur	463,613,207,641	793,486,040,057	1,137,175,161,915	1,269,717,059,376	1,571,384,974,456	2,379,492,583,498	2,962,976,763,247	3,793,937,251,553	5,321,728,860,415
Bali	379,044,845	240,171,248	161,151,365	596,688,219	811,401,561	1,318,505,681	704,968,643	3,599,729,008	5,070,123,787
Nusa Tenggara Barat	3,108,452,278	4,943,968,343	8,043,091,061	8,365,364,985	10,277,262,091	15,698,428,983	15,512,399,085	16,845,515,193	22,751,038,950
Nusa Tenggara Timur	3,743,868,787	5,984,340,004	9,652,348,730	11,020,641,078	14,767,016,645	23,966,336,691	24,498,395,883	29,554,608,989	42,171,214,894
Kalimantan Barat	2,126,597,642	3,251,890,184	5,587,913,529	5,565,124,083	6,500,466,579	10,694,042,767	11,634,374,171	13,121,684,825	21,283,495,877
Kalimantan Tengah	1,725,068,959	2,800,530,133	4,173,695,394	4,396,466,174	5,618,628,276	8,321,364,114	8,905,601,002	8,063,347,388	12,120,096,576
Kalimantan Timur	55,684,913	6,059,667	35,842,132	970,426,479	1,353,885,845	6,920,514,715	9,365,882,365	9,745,376,781	10,431,148,813
Kalimantan Selatan	1,003,691,065	1,512,786,576	1,486,098,162	1,749,226,260	2,098,189,793	1,290,512,297	1,863,573,995	2,236,360,987	2,611,554,749
Sulawesi Utara	1,736,075,816	2,853,499,093	4,065,644,665	4,964,372,605	6,381,442,631	10,241,786,388	10,579,998,194	12,026,001,931	17,522,547,904
Gorontalo	1,036,779,478	1,718,643,724	2,687,550,326	3,218,827,899	4,202,653,723	6,537,284,729	6,716,820,866	8,200,852,551	12,400,986,377
Sulawesi Barat	1,267,583,871	2,081,069,492	3,009,000,805	3,541,130,488	4,657,583,183	7,795,112,257	8,243,041,227	9,430,189,248	14,022,691,204
Sulawesi Tengah	1,974,141,412	3,252,815,515	5,187,900,526	6,192,007,287	8,030,450,490	12,173,490,018	12,810,715,485	15,820,844,660	24,299,135,373
Sulawesi Selatan	289,617,997	490,488,071	981,216,049	776,718,485	175,028,474	399,677,174	592,035,712	61,934,024	19,198,226

LAMPIRAN 3-1 (LANJUTAN)
INDEKS WILLIAMSON PAD 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sulawesi Tenggara	1,867,664,994	3,095,550,646	4,960,389,977	5,839,982,882	7,114,263,651	11,519,661,560	13,933,566,058	11,602,243,898	18,007,653,287
Maluku Utara	1,086,342,681	1,775,547,754	3,055,848,722	3,455,746,422	4,490,970,010	6,943,124,064	7,162,007,738	8,194,903,432	13,002,891,798
Maluku	1,419,983,747	2,241,000,453	3,367,479,771	4,100,044,196	5,310,170,725	8,523,957,217	8,546,499,042	10,506,060,014	16,190,483,437
Papua Barat	829,287,015	1,378,877,869	2,033,464,038	2,585,701,927	3,372,770,144	3,433,653,109	3,759,311,015	3,982,388,228	9,324,101,746
Papua	1,594,393,481	2,340,838,053	3,577,631,551	4,492,102,777	4,609,773,536	16,144,010,617	17,500,387,835	23,452,216,094	26,891,062,551
Jumlah	2,014,220,929,246	3,229,171,447,089	4,840,765,955,781	5,146,113,322,317	6,368,266,137,022	9,493,765,217,343	10,768,851,527,655	12,225,975,537,437	18,448,705,015,649
Akar	1,419,233	1,796,990	2,200,174	2,268,505	2,523,542	3,081,195	3,281,593	3,496,566	4,295,196
Rata-rata	538,032	683,783	845,022	925,943	1,063,877	1,348,083	1,375,952	1,472,877	1,805,976
Indeks Williamson	2.638	2.628	2.604	2.450	2.372	2.286	2.385	2.374	2.377

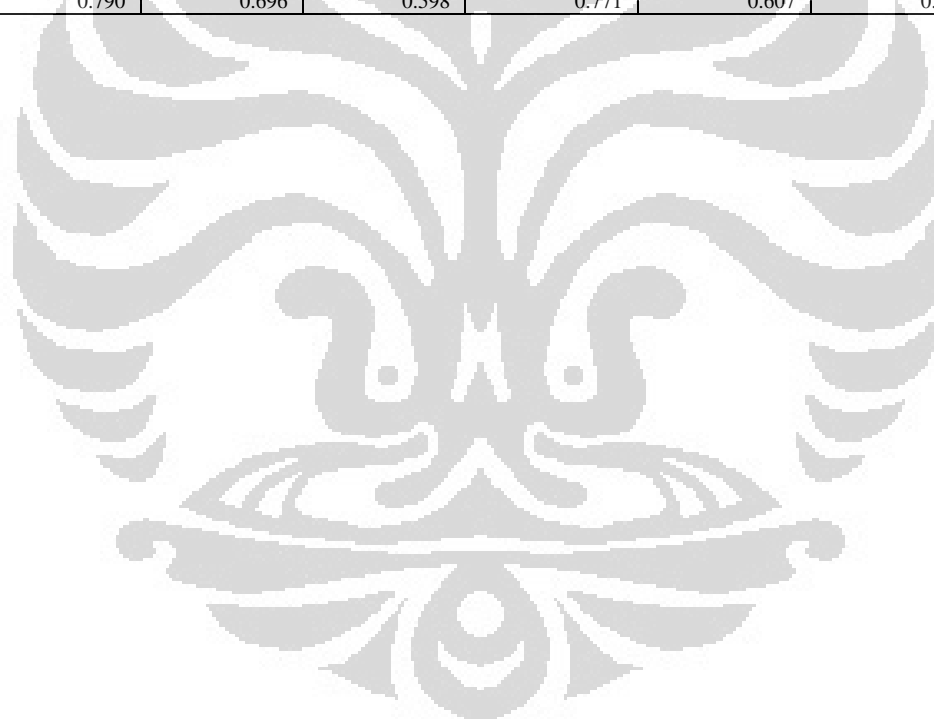


LAMPIRAN 3-2
INDEKS WILLIAMSON DAU 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	641,494,416	611,764,744	718,011	6,947,817	2,441,515	242,560	99,552,025	4,635	20,862,756
Sumatera Utara	112,942,095	114,639,892	75,121,659	549,672,799	1,419,575,591	1,555,609,815	1,780,868,890	2,021,250,731	3,848,960,314
Riau	684,243,114	789,120,170	717,379,569	2,613,153,419	1,104,284,477	2,919,344,371	3,511,586,627	7,371,531,280	2,145,057,130
Kepulauan Riau	357,207,546	352,866,541	367,960,390	416,503,740	170,111,999	455,379,803	205,744,823	685,336,847	584,804,647
Sumatera Barat	17,443,241	10,455,539	18,644,862	26,441,062	45,933,644	102,421,896	90,325,912	33,758,831	134,638,790
Jambi	26,890,643	13,372,815	13,728,493	54,254,864	86,423,802	101,330,856	146,493,302	226,085,967	128,956,847
Bengkulu	16,155,594	8,240,183	15,774,632	28,902,941	62,613,885	44,514,760	65,327,935	69,122,032	41,745,778
Sumatera Selatan	18,426,781	30,739,289	37,255,813	12,446,919	3,655,613	7,043,636	173,213,535	371,413,095	42,042,607
Bangka Belitung	40,638,310	36,702,646	38,620,659	132,769,559	158,867,656	138,027,683	148,655,979	227,318,451	209,718,234
Lampung	470,226	11,517,170	17,922,287	12,324,422	3,426,832	2,869,328	66,398,796	16,639,087	239,776,856
Banten	300,136,480	198,324,247	259,705,910	1,595,821,200	1,189,062,201	2,234,219,636	2,309,939,026	2,558,474,233	2,225,869,172
DKI Jakarta	9,181,675,606	9,520,522,814	9,740,456,290	4,302,680,576	5,781,610,261	12,309,421,427	13,214,496,835	15,561,978,744	9,065,360,037
Jawa Barat	5,300,753,738	7,898,418,936	8,471,690,033	2,757,545,436	33,669,604,358	21,695,361,449	28,853,682,704	39,190,255,419	44,952,837,670
Jawa Tengah	9,587,799,399	13,123,799,825	10,846,992,608	29,184,745,909	43,615,338,777	34,261,389,475	42,182,378,190	40,911,459,528	47,877,284,310
DI Yogyakarta	44,525,769	1,096,956	22,864,273	23,093,295	58,452,361	36,557,609	50,803,207	126,956,985	57,052,748
Jawa Timur	4,191,431,881	7,152,548,712	5,206,036,083	23,690,069,396	57,253,678,620	33,998,137,082	45,347,998,959	55,287,605,929	69,545,124,289
Bali	80,357,358	63,581,341	92,710,247	119,818,934	60,851,984	198,986,453	194,931,462	281,088,035	246,727,489
Nusa Tenggara Barat	19,922,065	11,830,619	14,453,249	26,589,787	50,827,600	45,978,822	15,002,505	42,763,199	25,592,044
Nusa Tenggara Timur	13,301,294	45,456,832	9,928,748	28,335,490	57,970,704	60,136,882	96,232,184	56,800,857	92,818,220
Kalimantan Barat	4,908,776	26,385,390	22,898,136	387,452,299	230,309,010	515,382,409	483,158,075	332,993,144	485,778,671
Kalimantan Tengah	76,467	2,762,808	918,284	106,612,844	46,503,057	106,129,247	113,641,977	70,087,764	117,566,415
Kalimantan Timur	410,209,411	460,802,966	545,793,731	1,797,130,942	931,320,583	2,507,566,880	4,310,520,694	5,762,724,535	5,971,801,796
Kalimantan Selatan	45,614,975	47,089,454	32,707,551	59,246,322	76,640,648	131,712,373	145,869,613	404,867,276	486,555,608
Sulawesi Utara	24,743,254	12,865,043	8,469,766	13,364,445	26,521,613	7,659,083	5,539,730	36,850,333	38,796,649
Gorontalo	25,961,796	9,286,897	19,449,711	10,594,144	184,031,779	153,870,973	156,267,388	211,959,618	216,329,962
Sulawesi Barat	288,303,222	293,199,414	340,611,846	154,804,917	218,234,193	177,854,432	175,714,207	225,786,648	285,191,495
Sulawesi Tengah	2,605,632	22,827	332,862	13,896,394	81,656	22,070,665	23,209,218	16,341,415	39,557,904
Sulawesi Selatan	61,209,755	110,178,106	104,980,004	159,318,192	342,218,552	306,206,247	218,318,773	246,255,643	601,002,358
Sulawesi Tenggara	7,976,382	4,041,823	4,840,776	2,040,390	12,668,134	312,346	558,690	5,950,774	2,845,728

LAMPIRAN 3-2 (LANJUTAN)
INDEKS WILLIAMSON DAU 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Maluku Utara	12,336,336	7,903,502	11,680,066	47,546,606	73,312,246	51,372,717	64,929,341	86,916,561	89,380,731
Maluku	384,482	1,418,017	121,835	1,513,285	3,133,879	126,125	108,421	1,151,419	2,728,096
Papua Barat	188,615,621	71,036,959	65,311,407	25,567,367	3,772,723	1,026,613	648,110	722,618	926,089
Papua	156,058,474	110,356,127	171,371,063	1,207,610,428	1,268,878,659	1,945,906,729	2,334,746,360	3,344,481,099	4,190,610,727
Jumlah	31,864,820,138	41,152,348,605	37,297,450,853	69,568,816,140	148,212,358,612	116,094,170,383	146,586,863,494	175,786,932,729	194,014,302,169
Akar	178,507	202,860	193,125	263,759	384,984	340,726	382,867	419,270	440,471
Rata-rata	256,593	256,659	277,392	441,407	499,356	560,960	582,544	620,937	683,433
Indeks Williamson	0.696	0.790	0.696	0.598	0.771	0.607	0.657	0.675	0.645



LAMPIRAN 3-3
INDEKS WILLAMSON PAD+DAU 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	6,894,343,660	8,129,351,604	6,208,213,337	3,380,421,825	4,453,463,536	7,029,236,157	9,083,484,775	7,718,014,551	17,996,406,170
Sumatera Utara	10,660,254,658	14,217,399,995	17,925,846,772	25,910,395,617	35,306,708,180	57,745,239,614	39,085,083,729	52,877,507,663	147,174,752,172
Riau	30,554,449	561,819,694	1,330,761,421	2,065,787,641	18,261,813	1,036,891,727	3,612,971,647	10,388,905,081	8,586,836,587
Kepulauan Riau	3,227,574,361	4,050,077,610	4,988,597,153	4,952,791,191	5,053,604,672	8,812,425,608	8,538,156,364	12,839,402,318	17,944,574,115
Sumatera Barat	1,429,780,331	2,176,593,940	3,646,819,826	3,257,540,853	4,127,309,321	4,529,688,469	6,246,111,722	6,140,513,196	8,301,302,863
Jambi	1,360,322,587	2,160,168,607	3,323,590,049	4,460,950,139	5,905,536,102	7,581,484,188	10,907,967,126	14,699,785,184	23,163,983,248
Bengkulu	1,725,049,828	2,603,870,468	4,183,866,134	4,891,269,148	6,431,707,214	9,072,534,705	9,794,203,084	8,574,537,132	15,398,428,434
Sumatera Selatan	375,194,767	1,401,975,509	2,435,459,858	1,291,804,230	1,308,150,323	1,301,580,140	4,404,700,856	70,586,340	2,438,539,298
Bangka									
Belitung	1,323,498,820	1,984,530,961	2,597,299,945	3,859,562,333	5,306,915,042	6,962,811,035	8,069,783,203	9,778,133,745	14,720,838,356
Lampung	1,448,934,685	1,969,802,168	2,255,344,509	2,443,854,211	4,636,698,978	5,780,485,623	6,420,984,477	9,990,593,401	12,869,650,230
Banten	9,696,613	226,028,726	980,742,382	675,179	180,880,358	587,179,850	550,412,581	199,057,779	112,171,170
DKI Jakarta	1,095,904,742,616	1,564,472,165,558	2,127,539,282,923	2,100,719,789,780	2,133,136,217,552	2,868,659,120,849	2,920,453,765,692	3,851,694,047,319	7,636,064,612,500
Jawa Barat	592,548,848,029	1,005,520,279,874	1,586,718,425,898	1,548,674,930,970	2,305,364,528,421	3,384,115,472,931	3,943,051,721,782	3,920,598,279,459	4,544,768,662,249
Jawa Tengah	226,112,807,664	329,764,316,134	541,942,234,728	671,435,534,213	840,394,211,947	1,155,463,849,091	1,428,923,851,239	1,100,693,133,060	1,201,509,801,175
DI Yogyakarta	1,397,493,921	1,682,555,761	3,421,284,266	4,255,783,341	6,174,094,517	8,303,141,325	8,804,878,754	11,954,761,287	19,857,133,924
Jawa Timur	570,338,360,946	957,528,388,590	1,304,070,156,006	1,640,277,048,196	2,228,530,544,388	3,005,826,515,167	3,768,625,926,831	4,830,691,626,008	6,607,991,363,601
Bali	651,160,393	506,250,606	452,769,855	1,251,276,435	1,316,665,043	2,332,038,680	1,467,058,917	5,176,354,946	7,553,758,880
Nusa Tenggara Barat	3,252,119,911	5,283,555,973	8,523,571,402	9,335,211,414	11,773,591,077	16,836,024,254	15,873,446,015	17,200,836,880	24,302,731,367
Nusa Tenggara Timur	2,951,018,592	4,836,108,371	8,821,522,111	9,931,344,670	12,974,523,246	20,934,254,704	20,806,177,069	25,311,612,558	38,307,136,794
Kalimantan Barat	1,659,104,369	2,583,732,538	4,736,711,032	3,015,761,698	4,283,641,735	6,146,689,392	6,970,740,908	8,314,549,556	15,338,390,210
Kalimantan Tengah	1,572,542,671	2,554,006,086	3,951,366,944	3,133,816,791	4,642,813,589	6,291,142,932	6,729,434,634	6,052,939,267	9,850,265,824
Kalimantan Timur	103,415,553	328,637,769	269,509,023	126,358,108	39,408,793	1,230,050,013	1,100,608,235	751,134,225	617,798,951
Kalimantan Selatan	1,267,108,424	2,007,950,228	1,869,697,040	2,452,321,080	2,976,844,468	2,055,164,855	2,819,300,464	3,939,074,771	5,352,587,334

LAMPIRAN 3-3 (LANJUTAN)

INDEKS WILLAMSON PAD+DAU 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sulawesi Utara	1,964,014,128	3,161,897,652	4,335,428,918	5,492,891,731	7,230,754,991	10,463,589,978	10,707,074,857	12,557,036,378	19,210,363,834
Gorontalo	1,281,539,590	1,936,424,304	3,103,193,289	3,598,749,683	6,145,573,607	8,493,752,110	8,708,753,513	10,532,732,514	15,893,109,320
Sulawesi Barat	2,604,984,410	3,871,692,582	5,292,674,478	5,176,724,937	6,892,194,234	10,092,071,059	10,572,954,388	11,991,899,202	18,307,458,811
Sulawesi Tengah	1,907,619,397	3,146,256,456	5,147,146,025	5,619,229,766	7,979,317,412	10,791,365,173	11,353,265,443	13,871,246,081	22,377,853,810
Sulawesi Selatan	23,971,187	104,387,364	381,103,709	232,487,433	27,765,705	376,286	40,083,638	217,348,006	405,368,752
Sulawesi Tenggara	1,923,401,219	3,239,595,418	5,160,185,591	6,060,342,709	7,727,346,461	11,032,489,317	13,336,912,529	11,343,642,284	17,557,752,327
Maluku Utara	1,224,953,121	1,976,364,378	3,379,020,794	4,313,993,994	5,711,876,435	7,988,783,064	8,379,513,863	9,479,757,427	15,248,387,526
Maluku	1,335,446,521	2,075,776,966	3,334,325,270	4,259,095,246	5,571,307,948	8,354,405,302	8,363,010,916	10,110,423,405	15,772,882,166
Papua Barat	1,704,249,948	2,037,549,462	2,779,401,632	3,125,505,001	3,602,148,969	3,201,111,184	3,532,223,273	3,822,512,937	9,139,178,990
Papua	641,838,732	1,380,556,719	2,110,906,853	1,041,511,768	1,041,610,428	6,601,255,633	6,753,005,053	8,314,938,182	9,850,566,364
Jumlah	2,540,855,946,100	3,939,480,068,073	5,677,216,459,171	6,090,044,761,333	7,676,266,216,506	10,665,652,220,415	12,314,087,567,576	14,007,896,922,143	20,523,984,647,353
Akar	1,594,006	1,984,812	2,382,691	2,467,802	2,770,608	3,265,831	3,509,143	3,742,713	4,530,340
Rata-rata	771,299	932,665	1,114,009	1,367,350	1,563,233	1,892,044	1,940,843	2,056,181	2,489,409
Indeks Williamson	2.067	2.128	2.139	1.805	1.772	1.726	1.808	1.820	1.819

LAMPIRAN 3-4
INDEKS WILLIAMSON PAD+DAU+DBH 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	6,894,343,660	8,129,351,604	1,751,399,551	35,775,908,275	9,405,594,212	13,640,197,174	22,691,004,831	4,113,699,515	6,387,855,782
Sumatera Utara	10,660,254,658	14,217,399,995	9,397,725,154	7,399,037,931	15,492,658,400	30,733,385,660	18,100,592,124	18,781,362,029	83,969,298,616
Riau	30,554,449	561,819,694	837,326,150	33,630,287,284	48,859,071,342	28,222,078,096	8,022,617,885	8,580,653,340	26,417,840,521
Kepulauan Riau	3,227,574,361	4,050,077,610	7,802,306,317	6,174,919,619	7,529,238,390	12,579,767,046	13,199,136,557	16,026,599,895	15,690,100,702
Sumatera Barat	1,429,780,331	2,176,593,940	10,927,698,933	16,216,599,703	17,432,179,650	19,229,475,425	25,323,606,826	31,668,210,858	31,318,649,274
Jambi	1,360,322,587	2,160,168,607	7,396,341,972	11,043,716,555	12,065,242,605	14,865,506,904	22,110,190,847	31,409,712,047	35,133,581,552
Bengkulu	1,725,049,828	2,603,870,468	8,759,139,373	13,116,157,709	15,268,476,466	20,046,069,035	22,479,801,706	24,620,670,377	32,224,712,747
Sumatera Selatan	375,194,767	1,401,975,509	2,938,298,207	1,972,611,471	57,704,932	36,464,247	1,329,509,379	1,883,136,449	931,931,228
Bangka Belitung	1,323,498,820	1,984,530,961	5,316,384,400	9,368,021,141	11,392,906,256	13,767,109,497	16,157,721,320	22,572,343,859	26,306,719,230
Lampung	1,448,934,685	1,969,802,168	9,053,455,656	13,120,741,516	18,159,460,905	22,336,081,032	29,673,422,420	43,684,900,841	41,304,274,042
Banten	9,696,613	226,028,726	11,059,746	4,905,416,351	1,728,319,998	1,447,996,315	1,220,215,960	8,690,440,737	7,846,647,693
DKI Jakarta	1,095,904,742,616	1,564,472,165,558	5,568,595,340,225	6,046,149,293,125	7,611,558,104,932	9,481,383,356,159	11,775,046,536,030	16,061,023,896,219	15,376,023,497,807
Jawa Barat	592,548,848,029	1,005,520,279,874	1,870,528,860,656	1,756,930,421,101	2,739,671,940,785	3,912,352,758,440	4,722,264,863,360	4,698,336,879,494	5,078,661,604,715
Jawa Tengah	226,112,807,664	329,764,316,134	481,734,607,719	516,208,395,636	696,027,434,155	995,110,781,310	1,348,905,379,541	928,144,495,161	1,032,639,635,628
DI Yogyakarta	1,397,493,921	1,682,555,761	9,719,844,271	16,694,982,819	19,519,631,241	24,268,878,874	26,468,641,553	38,470,250,831	47,870,072,370
Jawa Timur	570,338,360,946	957,528,388,590	1,380,932,901,392	1,625,607,960,164	2,347,862,575,919	3,234,426,123,177	4,360,416,583,868	5,130,537,521,564	7,054,280,466,067
Bali	651,160,393	506,250,606	3,457,315,164	9,292,764,361	8,849,676,356	12,230,290,943	10,456,662,484	30,580,647,747	31,432,107,260
Nusa Tenggara Barat	3,252,119,911	5,283,555,973	17,455,027,443	26,367,370,037	29,865,781,379	39,809,717,039	41,221,032,847	51,799,192,742	54,761,753,522
Nusa Tenggara Timur	2,951,018,592	4,836,108,371	19,147,033,012	29,156,417,779	33,686,063,170	47,929,534,265	51,001,643,234	68,910,799,980	80,529,215,950
Kalimantan Barat	1,659,104,369	2,583,732,538	11,688,569,748	14,519,881,996	16,416,431,499	20,927,820,837	23,529,577,172	33,929,533,559	40,752,780,420
Kalimantan Tengah	1,572,542,671	2,554,006,086	8,014,557,979	9,863,479,856	11,940,820,703	15,204,973,731	16,424,242,105	19,320,898,184	21,847,562,348
Kalimantan Timur	103,415,553	328,637,769	9,633,422,878	89,413,048,286	81,314,719,191	104,811,711,688	61,515,559,706	113,970,517,812	215,143,058,109
Kalimantan Selatan	1,267,108,424	2,007,950,228	4,723,533,342	8,822,109,594	9,218,632,986	7,501,084,816	7,630,377,676	10,457,313,515	9,040,770,800
Sulawesi Utara	1,964,014,128	3,161,897,652	9,674,908,127	15,652,117,282	18,109,763,052	24,139,557,918	25,979,139,399	33,826,264,185	40,335,788,734
Gorontalo	1,281,539,590	1,936,424,304	6,143,033,069	9,086,078,664	12,763,718,053	16,589,351,960	17,760,542,733	23,839,088,435	29,329,297,919

LAMPIRAN 3-4 (LANJUTAN)
INDEKS WILLIAMSON PAD+DAU+DBH 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sulawesi Barat	2,604,984,410	3,871,692,582	9,207,859,131	11,625,560,130	13,979,291,261	19,281,960,783	21,157,937,791	26,800,560,956	33,251,353,848
Sulawesi Tengah	1,907,619,397	3,146,256,456	11,029,580,693	16,276,137,756	19,707,523,596	25,057,338,447	27,780,722,005	38,215,141,065	46,511,205,340
Sulawesi Selatan	23,971,187	104,387,364	3,611,218,236	7,598,493,306	3,784,945,144	4,755,119,427	7,526,176,401	8,232,975,954	5,145,040,379
Sulawesi Tenggara	1,923,401,219	3,239,595,418	10,631,462,507	16,075,606,164	18,306,065,931	25,418,158,625	30,846,162,638	31,721,594,698	37,574,479,927
Maluku Utara	1,224,953,121	1,976,364,378	6,324,820,768	9,859,740,102	11,593,480,975	14,993,272,379	16,178,391,883	21,233,807,100	26,990,614,959
Maluku	1,335,446,521	2,075,776,966	6,707,739,878	10,684,906,619	12,584,960,556	17,202,202,862	18,284,555,359	25,483,005,101	30,870,917,555
Papua Barat	1,704,249,948	2,037,549,462	4,251,388,892	5,779,691,326	6,385,678,540	6,235,135,708	7,526,513,271	2,754,979,267	6,743,058,317
Papua	641,838,732	1,380,556,719	4,126,267,202	3,911,323,706	3,272,756,710	8,574,485,628	9,456,501,099	17,723,996,705	14,454,292,152
Jumlah	2,540,855,946,100	3,939,480,068,073	9,521,530,427,791	10,408,299,197,368	13,883,810,849,293	18,235,107,745,448	22,807,685,562,010	27,627,345,090,224	29,621,720,185,513
Akar	1,594,006	1,984,812	3,085,698	3,226,190	3,726,099	4,270,259	4,775,739	5,256,172	5,442,584
Rata-rata	771,299	932,665	1,477,090	1,925,580	2,109,541	2,477,225	2,581,309	2,860,365	3,195,743
Indeks Williamson	2.067	2.128	2.089	1.675	1.766	1.724	1.850	1.838	1.702

LAMPIRAN 3-5
INDEKS WILLIAMSON PAD+DAU+DBH+DAK 2003-2011

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Nanggroe Aceh Darussalam	6,937,278,514	8,129,351,604	1,744,523,926	35,775,908,275	9,405,594,212	13,253,575,098	22,404,647,263	4,021,945,141	6,147,221,191
Sumatera Utara	10,682,650,850	14,217,399,995	9,369,730,084	7,399,037,931	15,492,658,400	28,849,256,282	18,424,966,691	19,039,541,992	83,823,958,052
Riau	37,822,251	561,819,694	832,262,244	33,630,287,284	48,859,071,342	27,077,057,571	6,992,398,010	8,502,898,302	27,281,507,063
Kepulauan Riau	3,263,993,752	4,050,077,610	7,676,208,332	6,174,919,619	7,529,238,390	12,886,077,924	13,574,598,383	16,468,192,879	16,064,122,066
Sumatera Barat	1,425,850,545	2,176,593,940	10,946,001,885	16,216,599,703	17,432,179,650	19,171,540,300	25,053,153,703	31,968,931,492	31,259,355,597
Jambi	1,335,706,161	2,160,168,607	7,407,782,479	11,043,716,555	12,065,242,605	14,829,629,792	22,312,189,435	31,615,884,119	35,770,335,492
Bengkulu	1,712,065,290	2,603,870,468	8,768,781,927	13,116,157,709	15,268,476,466	19,990,989,432	22,174,066,377	24,731,100,513	32,314,745,691
Sumatera Selatan	348,964,585	1,401,975,509	2,949,871,860	1,972,611,471	57,704,932	101,552,236	1,907,833,614	1,861,993,845	854,969,939
Bangka									
Belitung	1,315,817,817	1,984,530,961	5,322,486,507	9,368,021,141	11,392,906,256	13,784,594,049	16,080,801,016	22,941,463,070	26,673,819,223
Lampung	1,445,368,878	1,969,802,168	9,074,257,356	13,120,741,516	18,159,460,905	22,356,088,363	29,747,389,530	43,501,868,426	41,111,722,718
Banten	7,835,493	226,028,726	11,893,312	4,905,416,351	1,728,319,998	1,531,751,287	1,362,235,917	9,148,676,601	7,637,439,548
DKI Jakarta	1,094,085,341,619	1,564,472,165,558	5,568,020,042,982	6,046,149,293,125	7,611,558,104,932	9,453,260,472,858	11,719,280,924,929	16,020,594,564,303	15,313,705,719,181
Jawa Barat	589,740,272,745	1,005,520,279,874	1,869,829,670,991	1,756,930,421,101	2,739,671,940,785	3,873,229,651,840	4,645,468,163,257	4,723,177,780,692	5,090,573,628,996
Jawa Tengah	224,520,164,081	329,764,316,134	481,413,193,977	516,208,395,636	696,027,434,155	977,861,597,703	1,316,219,426,006	937,141,004,327	1,041,835,874,542
DI Yogyakarta	1,386,915,611	1,682,555,761	9,734,615,039	16,694,982,819	19,519,631,241	24,407,197,365	26,778,761,580	39,122,702,382	48,935,226,485
Jawa Timur	567,651,234,631	957,528,388,590	1,380,353,109,162	1,625,607,960,164	2,347,862,575,919	3,201,334,253,720	4,321,960,828,281	5,188,022,028,937	7,086,955,267,354
Bali	646,317,795	506,250,606	3,466,179,221	9,292,764,361	8,849,676,356	12,271,056,794	10,588,168,677	31,209,997,222	32,269,589,327
Nusa Tenggara Barat	3,187,558,155	5,283,555,973	17,477,168,975	26,367,370,037	29,865,781,379	39,044,889,314	40,841,594,763	51,821,666,936	54,350,039,232
Nusa Tenggara Timur	2,926,190,877	4,836,108,371	19,170,433,828	29,156,417,779	33,686,063,170	46,748,782,454	49,840,455,883	68,544,027,839	79,905,774,426
Kalimantan Barat	1,612,310,454	2,583,732,538	11,706,401,840	14,519,881,996	16,416,431,499	20,615,055,682	23,029,989,097	33,704,653,740	40,818,121,514
Kalimantan Tengah	1,553,835,518	2,554,006,086	8,024,707,608	9,863,479,856	11,940,820,703	14,810,547,612	15,987,441,388	19,129,358,179	21,496,584,288
Kalimantan Timur	113,574,145	328,637,769	9,619,859,392	89,413,048,286	81,314,719,191	103,095,459,128	59,376,562,284	114,674,904,736	214,987,521,606
Kalimantan Selatan	1,255,348,747	2,007,950,228	4,733,736,845	8,822,109,594	9,218,632,986	7,231,239,363	7,585,219,641	10,591,304,167	9,095,199,755

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Sulawesi Utara	1,943,230,275	3,161,897,652	9,686,665,994	15,652,117,282	18,109,763,052	23,987,308,073	25,610,667,743	34,102,869,038	40,740,084,398
Gorontalo	1,279,425,863	1,936,424,304	6,149,199,409	9,086,078,664	12,763,718,053	16,551,695,068	17,587,358,690	24,133,763,473	29,590,528,471
Sulawesi Barat	2,634,378,604	3,871,692,582	9,215,599,325	11,625,560,130	13,979,291,261	18,852,937,169	20,660,903,523	26,974,391,857	33,345,602,282
Sulawesi Tengah	1,882,324,223	3,146,256,456	11,042,614,732	16,276,137,756	19,707,523,596	24,663,773,810	27,139,020,083	38,072,261,377	46,573,924,144
Sulawesi Selatan	25,696,206	104,387,364	3,624,718,772	7,598,493,306	3,784,945,144	4,456,724,345	7,411,780,010	8,096,226,339	5,083,851,788
Sulawesi Tenggara	1,902,428,853	3,239,595,418	10,643,297,717	16,075,606,164	18,306,065,931	25,198,619,744	30,305,752,002	31,759,257,552	37,791,023,772
Maluku Utara	1,222,918,425	1,976,364,378	6,331,336,265	9,859,740,102	11,593,480,975	14,779,585,898	15,484,737,239	21,209,508,984	26,737,677,986
Maluku	1,312,068,419	2,075,776,966	6,715,246,367	10,684,906,619	12,584,960,556	16,936,886,381	17,738,939,473	25,294,300,245	30,727,160,583
Papua Barat	1,723,480,410	2,037,549,462	4,185,271,228	5,779,691,326	6,385,678,540	5,994,296,465	7,240,088,299	2,775,011,750	6,733,960,938
Papua	628,385,901	1,380,556,719	4,133,475,188	3,911,323,706	3,272,756,710	8,370,368,338	8,681,889,401	16,297,186,998	13,006,563,065
Jumlah	2,531,746,755,697	3,939,480,068,073	9,519,380,344,770	10,408,299,197,368	13,883,810,849,293	18,107,534,511,455	22,594,852,952,189	27,680,251,267,454	29,614,198,120,712
Akar	1,591,146	1,984,812	3,085,349	3,226,190	3,726,099	4,255,295	4,753,404	5,261,202	5,441,893
Rata-rata	775,638	932,665	1,477,696	1,925,580	2,109,541	2,500,332	2,622,535	2,885,488	3,235,302
Indeks Williamson	2.051	2.128	2.088	1.675	1.766	1.702	1.813	1.823	1.681

LAMPIRAN 4-1

DISTRIBUSI ALOKASI DAU KEPULAUAN dan NON KEPULAUAN (%)

Provinsi	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Rata-rata
Nanggroe Aceh Darussalam	0.99	0.93	3.05	3.16	2.96	3.10	2.73	3.23	3.18	2.59
Sumatera Utara	3.92	3.68	3.53	3.71	3.99	4.06	4.08	4.22	4.21	3.93
Riau	0.96	0.75	1.04	0.63	1.68	1.11	0.92	0.31	1.69	1.01
Kepulauan Riau	0.00	0.03	0.29	1.22	2.02	1.61	2.16	1.61	1.75	1.19
Sumatera Barat	2.96	2.85	2.79	3.27	3.32	3.52	3.48	3.44	3.39	3.22
Jambi	2.72	2.72	2.74	2.57	2.52	2.61	2.54	2.54	2.59	2.62
Bengkulu	2.71	2.71	2.60	2.60	2.46	2.69	2.61	2.72	2.69	2.64
Sumatera Selatan	3.01	2.74	2.73	2.89	3.10	3.04	2.72	2.66	2.87	2.86
Bangka Belitung	2.11	2.05	2.11	1.89	1.94	2.18	2.19	2.13	2.14	2.08
Lampung	3.28	3.35	3.39	3.16	3.09	3.18	3.37	3.34	3.41	3.29
Banten	2.23	2.29	2.23	1.68	2.01	1.91	1.94	1.98	2.04	2.03
DKI Jakarta	9.55	9.05	8.65	5.27	0.73	0.00	0.00	0.00	0.93	3.80
Jawa Barat	5.58	5.70	5.58	3.88	5.66	5.04	5.24	5.64	5.24	5.29
Jawa Tengah	6.62	6.73	6.20	6.11	6.38	5.87	6.07	6.07	5.66	6.19
DI Yogyakarta	2.62	3.02	2.69	2.76	2.65	2.85	2.81	2.74	2.75	2.77
Jawa Timur	5.38	5.64	5.12	5.63	6.62	5.70	6.00	6.30	5.97	5.82
Bali	2.40	2.35	2.25	2.43	2.65	2.50	2.53	2.55	2.49	2.46
Nusa Tenggara Barat	2.91	2.82	2.82	2.77	2.72	2.85	2.97	2.98	2.87	2.86
Nusa Tenggara Timur	3.68	3.72	3.38	3.29	3.36	3.43	3.50	3.50	3.33	3.47
Kalimantan Barat	3.55	3.58	3.52	4.02	3.71	4.06	4.00	3.92	3.75	3.79
Kalimantan Tengah	3.29	3.34	3.24	3.79	3.47	3.73	3.73	3.68	3.53	3.53
Kalimantan Timur	0.99	0.81	0.82	0.50	1.43	0.70	0.10	0.00	0.23	0.62
Kalimantan Selatan	2.61	2.44	2.60	2.60	2.60	2.60	2.59	2.38	2.24	2.52
Sulawesi Utara	2.68	2.69	2.79	2.78	2.71	2.97	3.00	2.90	2.75	2.81
Gorontalo	2.30	2.55	2.36	2.69	1.77	2.05	2.08	2.08	2.04	2.21
Sulawesi Barat	0.00	0.00	0.00	1.75	1.69	2.04	2.10	2.11	1.96	1.29
Sulawesi Tengah	3.13	3.14	3.06	3.28	3.05	3.38	3.38	3.43	3.30	3.24
Sulawesi Selatan	3.88	3.82	3.75	3.50	3.64	3.66	3.56	3.67	3.62	3.68
Sulawesi Tenggara	2.94	2.86	2.86	2.93	2.80	3.16	3.16	3.10	3.11	2.99
Maluku Utara	2.61	2.58	2.56	2.32	2.25	2.52	2.46	2.49	2.40	2.47
Maluku	3.23	3.32	3.07	2.92	2.89	3.10	3.10	3.16	3.12	3.10
Papua Barat	0.00	1.24	1.44	2.41	2.82	3.22	3.20	3.15	3.11	2.29
Papua	5.13	4.50	4.72	5.56	5.32	5.58	5.68	5.97	5.66	5.35
Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
Kepulauan	17.22	17.21	17.02	17.20	17.89	18.65	19.38	18.78	18.36	17.97
Non Kepulauan	82.78	82.79	82.98	82.80	82.11	81.35	80.62	81.22	81.64	82.03
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Rata-rata Kepulauan	2.46	2.46	2.43	2.46	2.56	2.66	2.77	2.68	2.62	2.57
Rata-rata Non Kepulauan	3.18	3.18	3.19	3.18	3.16	3.13	3.10	3.12	3.14	3.16
Rata-rata	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03	3.03

LAMPIRAN 5-1
SIMULASI LUAS WILAYAH (KM²)

Provinsi	Luas Wilayah Laut:		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
	Darat (Km ²)	Laut (Km ²)	LW Aktual (Km ²)	LW (Km ²)						
Nanggroe Aceh Darussalam	57,956	295,370	146,567	176,104	205,641	235,178	264,715	294,252	323,789	353,326
Sumatera Utara	72,981	110,000	105,981	116,981	127,981	138,981	149,981	160,981	171,981	182,981
Sumatera Barat	42,013	138,750	83,638	97,513	111,388	125,263	139,138	153,013	166,888	180,763
Riau	87,024	235,366	157,633	181,170	204,707	228,243	251,780	275,316	298,853	322,390
Jambi	50,058	426	50,186	50,228	50,271	50,313	50,356	50,399	50,441	50,484
Sumatera Selatan	91,592	284	91,678	91,706	91,734	91,763	91,791	91,820	91,848	91,876
Bengkulu	19,919	53,000	35,819	41,119	46,419	51,719	57,019	62,319	67,619	72,919
Lampung	34,624	24,000	41,824	44,224	46,624	49,024	51,424	53,824	56,224	58,624
Bangka Belitung	16,424	65,301	36,014	42,544	49,075	55,605	62,135	68,665	75,195	81,725
Kepulauan Riau	8,202	241,215	80,566	104,688	128,809	152,931	177,052	201,174	225,295	249,417
DKI Jakarta	66,401	6,979	68,495	69,193	69,891	70,589	71,287	71,985	72,682	73,380
Jawa Barat	35,378	63,955	54,564	60,960	67,355	73,751	80,146	86,542	92,937	99,333
Jawa Tengah	32,801	70,129	53,839	60,852	67,865	74,878	81,891	88,904	95,917	102,930
DI Yogyakarta	3,133	9,562	6,002	6,958	7,914	8,870	9,826	10,782	11,739	12,695
Jawa Timur	47,800	110,000	80,800	91,800	102,800	113,800	124,800	135,800	146,800	157,800
Banten	9,663	11,134	13,003	14,117	15,230	16,343	17,457	18,570	19,684	20,797
Bali	5,780	9,500	8,630	9,580	10,530	11,480	12,430	13,380	14,330	15,280
Nusa Tenggara Barat	18,572	29,159	27,320	30,236	33,152	36,068	38,984	41,900	44,815	47,731
Nusa Tenggara Timur	48,718	200,000	108,718	128,718	148,718	168,718	188,718	208,718	228,718	248,718
Kalimantan Barat	147,307	101,538	177,769	187,922	198,076	208,230	218,384	228,538	238,692	248,845
Kalimantan Tengah	153,565	63,462	172,603	178,949	185,295	191,641	197,988	204,334	210,680	217,026
Kalimantan Selatan	38,744	18,109	44,177	45,988	47,799	49,610	51,421	53,231	55,042	56,853
Kalimantan Timur	204,534	10,539	207,696	208,750	209,804	210,858	211,911	212,965	214,019	215,073
Sulawesi Utara	13,852	304,782	105,286	135,764	166,243	196,721	227,199	257,677	288,155	318,634
Sulawesi Tengah	61,841	189,480	118,685	137,633	156,581	175,529	194,477	213,425	232,373	251,321
Sulawesi Selatan	46,717	266,877	126,781	153,468	180,156	206,844	233,531	260,219	286,907	313,594
Sulawesi Tenggara	38,068	114,879	72,531	84,019	95,507	106,995	118,483	129,971	141,459	152,947
Gorontalo	11,257	10,500	14,407	15,457	16,507	17,557	18,607	19,657	20,707	21,757
Sulawesi Barat	16,787	63,631	35,876	42,239	48,603	54,966	61,329	67,692	74,055	80,418
Maluku	46,914	54,185	63,170	68,588	74,007	79,425	84,844	90,262	95,681	101,099
Maluku Utara	31,983	113,819	66,128	77,510	88,892	100,274	111,656	123,037	134,419	145,801
Papua Barat	97,024	13,853	101,180	102,565	103,951	105,336	106,721	108,107	109,492	110,877
Papua	319,036	228,000	387,436	410,236	433,036	455,836	478,636	501,436	524,236	547,036
Rata-rata	59,899	97,812	89,243	99,024	108,805	118,586	128,367	138,148	147,929	157,711

LAMPIRAN 5-2
SIMULASI INDEKS LUAS WILAYAH

Provinsi	0.15	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
	Indeks Luas Wilayah	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Nanggroe Aceh Darussalam	1.642	1.778	1.890	1.983	2.062	2.130	2.189	2.240
Sumatera Utara	1.188	1.181	1.176	1.172	1.168	1.165	1.163	1.160
Sumatera Barat	0.937	0.985	1.024	1.056	1.084	1.108	1.128	1.146
Riau	1.766	1.830	1.881	1.925	1.961	1.993	2.020	2.044
Jambi	0.562	0.507	0.462	0.424	0.392	0.365	0.341	0.320
Sumatera Selatan	1.027	0.926	0.843	0.774	0.715	0.665	0.621	0.583
Bengkulu	0.401	0.415	0.427	0.436	0.444	0.451	0.457	0.462
Lampung	0.469	0.447	0.429	0.413	0.401	0.390	0.380	0.372
Bangka Belitung	0.404	0.430	0.451	0.469	0.484	0.497	0.508	0.518
Kepulauan Riau	0.903	1.057	1.184	1.290	1.379	1.456	1.523	1.581
DKI Jakarta	0.768	0.699	0.642	0.595	0.555	0.521	0.491	0.465
Jawa Barat	0.611	0.616	0.619	0.622	0.624	0.626	0.628	0.630
Jawa Tengah	0.603	0.615	0.624	0.631	0.638	0.644	0.648	0.653
DI Yogyakarta	0.067	0.070	0.073	0.075	0.077	0.078	0.079	0.080
Jawa Timur	0.905	0.927	0.945	0.960	0.972	0.983	0.992	1.001
Banten	0.146	0.143	0.140	0.138	0.136	0.134	0.133	0.132
Bali	0.097	0.097	0.097	0.097	0.097	0.097	0.097	0.097
Nusa Tenggara Barat	0.306	0.305	0.305	0.304	0.304	0.303	0.303	0.303
Nusa Tenggara Timur	1.218	1.300	1.367	1.423	1.470	1.511	1.546	1.577
Kalimantan Barat	1.992	1.898	1.820	1.756	1.701	1.654	1.614	1.578
Kalimantan Tengah	1.934	1.807	1.703	1.616	1.542	1.479	1.424	1.376
Kalimantan Selatan	0.495	0.464	0.439	0.418	0.401	0.385	0.372	0.360
Kalimantan Timur	2.327	2.108	1.928	1.778	1.651	1.542	1.447	1.364
Sulawesi Utara	1.180	1.371	1.528	1.659	1.770	1.865	1.948	2.020
Sulawesi Tengah	1.330	1.390	1.439	1.480	1.515	1.545	1.571	1.594
Sulawesi Selatan	1.421	1.550	1.656	1.744	1.819	1.884	1.939	1.988
Sulawesi Tenggara	0.813	0.848	0.878	0.902	0.923	0.941	0.956	0.970
Gorontalo	0.161	0.156	0.152	0.148	0.145	0.142	0.140	0.138
Sulawesi Barat	0.402	0.427	0.447	0.464	0.478	0.490	0.501	0.510
Maluku	0.708	0.693	0.680	0.670	0.661	0.653	0.647	0.641
Maluku Utara	0.741	0.783	0.817	0.846	0.870	0.891	0.909	0.924
Papua Barat	1.134	1.036	0.955	0.888	0.831	0.783	0.740	0.703
Papua	4.341	4.143	3.980	3.844	3.729	3.630	3.544	3.469
Rata-rata	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

LAMPIRAN 5-3
SIMULASI INDEKS LUAS WILAYAH LAUT

Provinsi	Indeks Luas Wilayah Laut	Komposisi Luas Wilayah Lautan							
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Nanggroe Aceh Darussalam	3.02	0.050	0.054	0.057	0.060	0.062	0.065	0.066	0.068
Sumatera Utara	1.12	0.036	0.036	0.036	0.036	0.035	0.035	0.035	0.035
Sumatera Barat	1.42	0.028	0.030	0.031	0.032	0.033	0.034	0.034	0.035
Riau	2.41	0.054	0.055	0.057	0.058	0.059	0.060	0.061	0.062
Jambi	0.00	0.017	0.015	0.014	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010
Sumatera Selatan	0.00	0.031	0.028	0.026	0.023	0.022	0.020	0.019	0.018
Bengkulu	0.54	0.012	0.013	0.013	0.013	0.013	0.014	0.014	0.014
Lampung	0.25	0.014	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.012	0.011
Bangka Belitung	0.67	0.012	0.013	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015	0.016
Kepulauan Riau	2.47	0.027	0.032	0.036	0.039	0.042	0.044	0.046	0.048
DKI Jakarta	0.07	0.023	0.021	0.019	0.018	0.017	0.016	0.015	0.014
Jawa Barat	0.65	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019	0.019
Jawa Tengah	0.72	0.018	0.019	0.019	0.019	0.019	0.020	0.020	0.020
DI Yogyakarta	0.10	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Jawa Timur	1.12	0.027	0.028	0.029	0.029	0.029	0.030	0.030	0.030
Banten	0.11	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Bali	0.10	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
Nusa Tenggara Barat	0.30	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009
Nusa Tenggara Timur	2.04	0.037	0.039	0.041	0.043	0.045	0.046	0.047	0.048
Kalimantan Barat	1.04	0.060	0.058	0.055	0.053	0.052	0.050	0.049	0.048
Kalimantan Tengah	0.65	0.059	0.055	0.052	0.049	0.047	0.045	0.043	0.042
Kalimantan Selatan	0.19	0.015	0.014	0.013	0.013	0.012	0.012	0.011	0.011
Kalimantan Timur	0.11	0.071	0.064	0.058	0.054	0.050	0.047	0.044	0.041
Sulawesi Utara	3.12	0.036	0.042	0.046	0.050	0.054	0.057	0.059	0.061
Sulawesi Tengah	1.94	0.040	0.042	0.044	0.045	0.046	0.047	0.048	0.048
Sulawesi Selatan	2.73	0.043	0.047	0.050	0.053	0.055	0.057	0.059	0.060
Sulawesi Tenggara	1.17	0.025	0.026	0.027	0.027	0.028	0.029	0.029	0.029
Gorontalo	0.11	0.005	0.005	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004
Sulawesi Barat	0.65	0.012	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.015	0.015
Maluku	0.55	0.021	0.021	0.021	0.020	0.020	0.020	0.020	0.019
Maluku Utara	1.16	0.022	0.024	0.025	0.026	0.026	0.027	0.028	0.028
Papua Barat	0.14	0.034	0.031	0.029	0.027	0.025	0.024	0.022	0.021
Papua	2.33	0.132	0.126	0.121	0.116	0.113	0.110	0.107	0.105
Rata-rata	1.00	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030	0.030

LAMPIRAN 5-4
SIMULASI NILAI KEBUTUHAN FISKAL

KbF=4,584,808	Provinsi	Nilai	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
		KbF	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
	Nanggroe Aceh Darussalam	228,177	247,080	262,584	275,531	286,505	295,925	304,099	311,259
	Sumatera Utara	164,993	164,129	163,420	162,828	162,327	161,896	161,523	161,195
	Sumatera Barat	130,208	136,814	142,232	146,756	150,591	153,883	156,739	159,241
	Riau	245,405	254,188	261,391	267,406	272,505	276,881	280,679	284,006
	Jambi	78,130	70,472	64,191	58,946	54,501	50,685	47,374	44,473
	Sumatera Selatan	142,725	128,667	117,136	107,508	99,347	92,342	86,263	80,938
	Bengkulu	55,764	57,692	59,273	60,594	61,713	62,674	63,507	64,238
	Lampung	65,112	62,047	59,534	57,436	55,657	54,130	52,805	51,644
	Bangka Belitung	56,067	59,691	62,664	65,146	67,249	69,055	70,622	71,995
	Kepulauan Riau	125,426	146,881	164,477	179,172	191,626	202,317	211,595	219,721
	DKI Jakarta	106,633	97,080	89,244	82,701	77,154	72,394	68,262	64,644
	Jawa Barat	84,946	85,528	86,006	86,405	86,743	87,033	87,285	87,506
	Jawa Tengah	83,818	85,378	86,658	87,726	88,632	89,409	90,084	90,675
	DI Yogyakarta	9,343	9,762	10,105	10,392	10,635	10,844	11,025	11,183
	Jawa Timur	125,790	128,798	131,266	133,326	135,073	136,572	137,873	139,012
	Banten	20,243	19,806	19,447	19,148	18,894	18,676	18,487	18,321
	Bali	13,435	13,441	13,446	13,450	13,453	13,456	13,459	13,461
	Nusa Tenggara Barat	42,532	42,422	42,332	42,256	42,193	42,138	42,090	42,048
	Nusa Tenggara Timur	169,253	180,596	189,899	197,668	204,252	209,904	214,809	219,106
	Kalimantan Barat	276,752	263,661	252,925	243,959	236,360	229,837	224,176	219,218
	Kalimantan Tengah	268,710	251,072	236,605	224,524	214,285	205,495	197,868	191,187
	Kalimantan Selatan	68,775	64,522	61,035	58,122	55,653	53,534	51,695	50,084
	Kalimantan Timur	323,343	292,883	267,900	247,038	229,355	214,176	201,004	189,466
	Sulawesi Utara	163,911	190,482	212,276	230,475	245,901	259,142	270,632	280,697
	Sulawesi Tengah	184,770	193,104	199,940	205,647	210,485	214,638	218,242	221,399
	Sulawesi Selatan	197,373	215,321	230,042	242,335	252,754	261,698	269,459	276,258
	Sulawesi Tenggara	112,918	117,882	121,954	125,354	128,236	130,710	132,856	134,737
	Gorontalo	22,429	21,687	21,078	20,570	20,139	19,769	19,448	19,167
	Sulawesi Barat	55,853	59,263	62,061	64,397	66,377	68,077	69,551	70,843
	Maluku	98,343	96,231	94,499	93,053	91,827	90,775	89,862	89,062
	Maluku Utara	102,949	108,749	113,506	117,479	120,846	123,737	126,245	128,442
	Papua Barat	157,518	143,903	132,735	123,410	115,506	108,721	102,834	97,676
	Papua	603,164	575,575	552,946	534,051	518,035	504,286	492,356	481,906

LAMPIRAN 6-1
KOEFISIEN VARIASI PAD, DP, DBH, DAU, DAK 2011

Provinsi	PAD	DP	DBH	DAU	DAK
Nanggroe Aceh Darussalam	797,285	1,746,648	979,391	716,646	50,611
Sumatera Utara	3,181,900	1,271,127	347,432	894,557	29,138
Sumatera Barat	1,086,756	894,605	89,191	764,681	40,733
Riau	1,502,361	2,683,190	2,209,170	380,051	93,969
Jambi	571,302	827,820	314,015	489,069	24,736
Sumatera Selatan	1,563,704	1,859,991	1,315,621	512,083	32,287
Bengkulu	421,521	694,596	50,598	607,388	36,610
Lampung	1,085,424	987,945	252,248	708,123	27,574
DKI Jakarta	16,022,581	8,909,900	8,700,000	209,900	-
Jawa Barat	6,316,400	2,096,138	868,820	1,181,553	45,765
Jawa Tengah	4,182,627	1,689,618	491,264	1,168,788	29,566
DI Yogyakarta	700,339	714,542	74,240	620,812	19,490
Jawa Timur	7,615,043	2,267,158	864,625	1,347,502	55,031
Kalimantan Barat	733,335	1,000,797	116,943	845,484	38,370
Kalimantan Tengah	664,905	1,022,611	174,880	795,816	51,915
Kalimantan Selatan	1,392,301	1,013,865	505,500	483,365	25,000
Kalimantan Timur	2,641,234	3,798,311	3,708,676	51,447	38,188
Sulawesi Utara	451,755	703,999	55,000	619,711	29,288
Sulawesi Tengah	325,623	839,180	57,243	743,758	38,179
Sulawesi Selatan	1,782,147	1,090,322	231,612	816,758	41,953
Sulawesi Tenggara	421,500	799,080	64,439	700,837	33,805
Bali	1,249,492	706,009	124,115	560,674	21,221
Nusa Tenggara Barat	709,889	877,931	156,006	646,671	75,254
Nusa Tenggara Timur	343,231	859,955	66,205	752,057	41,692
Maluku	222,002	817,137	68,485	703,994	44,658
Papua	304,175	1,570,107	421,367	1,148,741	-
Maluku Utara	80,678	641,624	50,000	540,390	51,234
Banten	2,079,097	841,416	335,853	460,384	45,180
Bangka Belitung	316,750	600,307	94,876	481,590	23,841
Gorontalo	122,767	513,873	24,698	461,118	28,057
Kepulauan Riau	500,056	1,244,960	827,312	395,746	21,903
Papua Barat	98,962	1,332,510	591,527	700,445	40,539
Sulawesi Barat	110,076	511,711	34,271	441,579	35,861
Total	59,597,218	47,428,983	24,265,622	21,951,716	1,211,645
Standar deviasi	3,081,638	1,514,420	1,610,174	274,078	17,932
Rata-rata	1,805,976	1,437,242	735,322	665,204	36,717
Koefisien variasi	1.706	1.054	2.190	0.412	0.488

LAMPIRAN 6-2
SIMULASI dan KOEFISIEN VARIASI DAU

Provinsi	DAU 2011	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Nanggroe Aceh Darussalam	716,646	735,549	751,054	764,000	774,974	784,394	792,568	799,728
Sumatera Utara	894,557	893,693	892,984	892,393	891,891	891,461	891,087	890,760
Sumatera Barat	764,681	771,287	776,705	781,229	785,064	788,355	791,212	793,714
Riau	380,051	388,834	396,037	402,052	407,151	411,527	415,325	418,652
Jambi	489,069	481,412	475,131	469,886	465,441	461,625	458,313	455,413
Sumatera Selatan	512,083	498,025	486,495	476,866	468,705	461,700	455,621	450,296
Bengkulu	607,388	609,316	610,897	612,218	613,337	614,298	615,131	615,862
Lampung	708,123	705,059	702,546	700,447	698,668	697,141	695,816	694,655
Bangka Belitung	481,590	485,214	488,186	490,668	492,772	494,578	496,145	497,517
Kepulauan Riau	395,746	417,200	434,797	449,491	461,945	472,637	481,914	490,041
DKI Jakarta	209,900	200,346	192,511	185,967	180,421	175,660	171,529	167,910
Jawa Barat	1,181,553	1,182,136	1,182,613	1,183,012	1,183,350	1,183,641	1,183,892	1,184,113
Jawa Tengah	1,168,788	1,170,348	1,171,628	1,172,696	1,173,602	1,174,379	1,175,054	1,175,645
DI Yogyakarta	620,812	621,231	621,574	621,861	622,104	622,313	622,494	622,652
Jawa Timur	1,347,502	1,350,510	1,352,978	1,355,038	1,356,784	1,358,284	1,359,584	1,360,724
Banten	460,384	459,946	459,588	459,288	459,034	458,816	458,627	458,461
Bali	560,674	560,679	560,684	560,688	560,691	560,694	560,697	560,699
Nusa Tenggara Barat	646,671	646,561	646,471	646,395	646,332	646,277	646,229	646,187
Nusa Tenggara Timur	752,057	763,400	772,703	780,472	787,056	792,709	797,613	801,910
Kalimantan Barat	845,484	832,394	821,657	812,691	805,092	798,569	792,908	787,950
Kalimantan Tengah	795,816	778,178	763,711	751,631	741,391	732,602	724,974	718,293
Kalimantan Selatan	483,365	479,112	475,624	472,712	470,243	468,124	466,285	464,674
Kalimantan Timur	51,447	20,987	(3,996)	(24,859)	(42,541)	(57,720)	(70,892)	(82,430)
Sulawesi Utara	619,711	646,283	668,077	686,276	701,701	714,942	726,433	736,497
Sulawesi Tengah	743,758	752,092	758,927	764,635	769,473	773,626	777,230	780,387
Sulawesi Selatan	816,758	834,706	849,427	861,720	872,139	881,083	888,844	895,643
Sulawesi Tenggara	700,837	705,801	709,873	713,273	716,155	718,629	720,775	722,656
Gorontalo	461,118	460,376	459,767	459,259	458,828	458,458	458,137	457,856
Sulawesi Barat	441,579	444,990	447,787	450,123	452,103	453,803	455,278	456,569
Maluku	703,994	701,882	700,150	698,704	697,478	696,426	695,513	694,713
Maluku Utara	540,390	546,190	550,947	554,920	558,287	561,178	563,686	565,883
Papua Barat	700,445	686,830	675,662	666,337	658,433	651,648	645,760	640,603
Papua	1,148,741	1,121,152	1,098,523	1,079,628	1,063,611	1,049,863	1,037,933	1,027,483
Standar deviasi	274,078	275,068	276,300	277,615	278,930	280,204	281,417	282,560
Rata-rata	665,204	665,204	665,204	665,204	665,204	665,204	665,204	665,204
Koefisien variasi	0.412	0.414	0.415	0.417	0.419	0.421	0.423	0.425

LAMPIRAN 6-3
SIMULASI dan KOEFISIEN VARIASI PAD+DAU

Provinsi	DAU+PAD	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Nanggroe Aceh Darussalam	1,513,931	1,532,834	1,548,339	1,561,285	1,572,259	1,581,679	1,589,853	1,597,013
Sumatera Utara	4,076,456	4,075,592	4,074,884	4,074,292	4,073,791	4,073,360	4,072,987	4,072,659
Sumatera Barat	1,851,437	1,858,043	1,863,461	1,867,985	1,871,820	1,875,111	1,877,968	1,880,470
Riau	1,882,412	1,891,195	1,898,398	1,904,413	1,909,512	1,913,888	1,917,686	1,921,013
Jambi	1,060,371	1,052,713	1,046,432	1,041,188	1,036,742	1,032,926	1,029,615	1,026,714
Sumatera Selatan	2,075,787	2,061,729	2,050,199	2,040,570	2,032,409	2,025,404	2,019,325	2,014,000
Bengkulu	1,028,909	1,030,837	1,032,418	1,033,739	1,034,858	1,035,819	1,036,653	1,037,383
Lampung	1,793,547	1,790,483	1,787,970	1,785,871	1,784,092	1,782,565	1,781,240	1,780,079
DKI Jakarta	16,232,481	16,222,927	16,215,091	16,208,548	16,203,002	16,198,241	16,194,110	16,190,491
Jawa Barat	7,497,953	7,498,535	7,499,013	7,499,412	7,499,750	7,500,040	7,500,292	7,500,513
Jawa Tengah	5,351,415	5,352,975	5,354,255	5,355,323	5,356,229	5,357,006	5,357,681	5,358,272
DI Yogyakarta	1,321,152	1,321,570	1,321,913	1,322,200	1,322,443	1,322,652	1,322,833	1,322,991
Jawa Timur	8,962,545	8,965,553	8,968,020	8,970,081	8,971,827	8,973,326	8,974,627	8,975,767
Kalimantan Barat	1,578,819	1,565,729	1,554,992	1,546,027	1,538,427	1,531,904	1,526,244	1,521,285
Kalimantan Tengah	1,460,721	1,443,083	1,428,616	1,416,536	1,406,296	1,397,507	1,389,880	1,383,198
Kalimantan Selatan	1,875,666	1,871,413	1,867,925	1,865,012	1,862,544	1,860,425	1,858,586	1,856,975
Kalimantan Timur	2,692,681	2,662,221	2,637,238	2,616,376	2,598,693	2,583,514	2,570,343	2,558,805
Sulawesi Utara	1,071,466	1,098,037	1,119,832	1,138,030	1,153,456	1,166,697	1,178,187	1,188,252
Sulawesi Tengah	1,069,381	1,077,715	1,084,550	1,090,258	1,095,096	1,099,249	1,102,853	1,106,010
Sulawesi Selatan	2,598,905	2,616,853	2,631,574	2,643,867	2,654,286	2,663,230	2,670,992	2,677,790
Sulawesi Tenggara	1,122,337	1,127,301	1,131,373	1,134,773	1,137,655	1,140,129	1,142,276	1,144,156
Bali	1,810,165	1,810,171	1,810,176	1,810,180	1,810,183	1,810,186	1,810,188	1,810,191
Nusa Tenggara Barat	1,356,560	1,356,450	1,356,360	1,356,285	1,356,221	1,356,166	1,356,118	1,356,077
Nusa Tenggara Timur	1,095,289	1,106,631	1,115,934	1,123,703	1,130,288	1,135,940	1,140,845	1,145,141
Maluku	925,996	923,884	922,152	920,706	919,480	918,428	917,515	916,715
Papua	1,452,916	1,425,327	1,402,698	1,383,803	1,367,786	1,354,038	1,342,108	1,331,658
Maluku Utara	621,068	626,869	631,626	635,599	638,966	641,856	644,364	646,561
Banten	2,539,480	2,539,043	2,538,684	2,538,385	2,538,131	2,537,913	2,537,724	2,537,558
Bangka Belitung	798,339	801,963	804,936	807,418	809,521	811,327	812,894	814,267
Gorontalo	583,885	583,143	582,534	582,025	581,594	581,225	580,904	580,622
Kepulauan Riau	895,802	917,256	934,853	949,547	962,002	972,693	981,970	990,097
Papua Barat	799,407	785,792	774,624	765,299	757,395	750,610	744,722	739,565
Sulawesi Barat	551,655	555,065	557,863	560,199	562,179	563,879	565,353	566,645
Standar deviasi	3,107,626	3,106,010	3,104,721	3,103,670	3,102,797	3,102,062	3,101,434	3,100,891
Rata-rata	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180
Koefisien variasi	1.258	1.257	1.256	1.256	1.256	1.255	1.255	1.255

LAMPIRAN 6-4

SIMULASI dan KOEFISIEN VARIASI PAD+DAU+DBH

Provinsi	PAD+DAU +DBH	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Nanggroe Aceh Darussalam	2,493,322	2,512,225	2,527,729	2,540,676	2,551,650	2,561,070	2,569,244	2,576,404
Sumatera Utara	4,423,888	4,423,025	4,422,316	4,421,724	4,421,223	4,420,792	4,420,419	4,420,091
Sumatera Barat	1,940,628	1,947,233	1,952,651	1,957,176	1,961,010	1,964,302	1,967,159	1,969,661
Riau	4,091,582	4,100,365	4,107,568	4,113,583	4,118,682	4,123,058	4,126,856	4,130,183
Jambi	1,374,386	1,366,728	1,360,447	1,355,203	1,350,757	1,346,941	1,343,630	1,340,729
Sumatera Selatan	3,391,408	3,377,350	3,365,820	3,356,191	3,348,030	3,341,025	3,334,946	3,329,621
Bengkulu	1,079,508	1,081,436	1,083,017	1,084,337	1,085,457	1,086,417	1,087,251	1,087,981
Lampung	2,045,795	2,042,731	2,040,217	2,038,119	2,036,340	2,034,813	2,033,488	2,032,327
DKI Jakarta	24,932,481	24,922,927	24,915,091	24,908,548	24,903,002	24,898,241	24,894,110	24,890,491
Jawa Barat	8,366,773	8,367,355	8,367,833	8,368,232	8,368,570	8,368,860	8,369,112	8,369,333
Jawa Tengah	5,842,679	5,844,239	5,845,519	5,846,588	5,847,493	5,848,271	5,848,945	5,849,536
DI Yogyakarta	1,395,392	1,395,811	1,396,154	1,396,441	1,396,684	1,396,892	1,397,073	1,397,232
Jawa Timur	9,827,170	9,830,178	9,832,646	9,834,706	9,836,453	9,837,952	9,839,253	9,840,392
Kalimantan Barat	1,695,762	1,682,672	1,671,935	1,662,970	1,655,371	1,648,848	1,643,187	1,638,229
Kalimantan Tengah	1,635,601	1,617,963	1,603,496	1,591,416	1,581,176	1,572,387	1,564,760	1,558,078
Kalimantan Selatan	2,381,166	2,376,913	2,373,425	2,370,512	2,368,044	2,365,925	2,364,086	2,362,475
Kalimantan Timur	6,401,357	6,370,897	6,345,914	6,325,051	6,307,369	6,292,190	6,279,018	6,267,480
Sulawesi Utara	1,126,466	1,153,037	1,174,832	1,193,030	1,208,456	1,221,697	1,233,187	1,243,252
Sulawesi Tengah	1,126,624	1,134,958	1,141,793	1,147,501	1,152,339	1,156,492	1,160,096	1,163,253
Sulawesi Selatan	2,830,517	2,848,465	2,863,186	2,875,479	2,885,898	2,894,842	2,902,603	2,909,402
Sulawesi Tenggara	1,186,776	1,191,740	1,195,812	1,199,212	1,202,094	1,204,568	1,206,715	1,208,595
Bali	1,934,280	1,934,286	1,934,290	1,934,294	1,934,298	1,934,301	1,934,303	1,934,305
Nusa Tenggara Barat	1,512,566	1,512,456	1,512,366	1,512,290	1,512,227	1,512,172	1,512,124	1,512,083
Nusa Tenggara Timur	1,161,494	1,172,837	1,182,140	1,189,908	1,196,493	1,202,145	1,207,050	1,211,346
Maluku	994,481	992,369	990,637	989,191	987,965	986,913	986,000	985,200
Papua	1,874,282	1,846,693	1,824,065	1,805,169	1,789,153	1,775,405	1,763,475	1,753,024
Maluku Utara	671,068	676,869	681,626	685,599	688,966	691,856	694,364	696,561
Banten	2,875,333	2,874,896	2,874,537	2,874,237	2,873,983	2,873,765	2,873,576	2,873,411
Bangka Belitung	893,215	896,839	899,811	902,293	904,397	906,203	907,770	909,143
Gorontalo	608,583	607,841	607,232	606,723	606,292	605,923	605,602	605,320
Kepulauan Riau	1,723,114	1,744,568	1,762,165	1,776,859	1,789,313	1,800,005	1,809,282	1,817,409
Papua Barat	1,390,934	1,377,318	1,366,151	1,356,825	1,348,921	1,342,136	1,336,249	1,331,092
Sulawesi Barat	585,926	589,337	592,134	594,470	596,450	598,150	599,625	600,917
Standar deviasi	4,476,327	4,473,971	4,472,064	4,470,489	4,469,166	4,468,040	4,467,069	4,466,224
Rata-rata	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502
Koefisien variasi	1.396	1.395	1.395	1.394	1.394	1.393	1.393	1.393

LAMPIRAN 6-5

SIMULASI DAN KOEFISIEN VARIASI PAD+DAU+DBH+DAK

Provinsi	PAD+DAU +DBH+DAK	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Nanggroe Aceh Darussalam	2,543,933	2,562,836	2,578,341	2,591,287	2,602,261	2,611,681	2,619,855	2,627,015
Sumatera Utara	4,453,026	4,452,162	4,451,454	4,450,862	4,450,360	4,449,930	4,449,556	4,449,229
Sumatera Barat	1,981,361	1,987,967	1,993,385	1,997,909	2,001,744	2,005,035	2,007,892	2,010,394
Riau	4,185,551	4,194,333	4,201,536	4,207,552	4,212,650	4,217,027	4,220,824	4,224,151
Jambi	1,399,122	1,391,464	1,385,183	1,379,938	1,375,493	1,371,677	1,368,365	1,365,465
Sumatera Selatan	3,423,695	3,409,637	3,398,107	3,388,478	3,380,317	3,373,312	3,367,233	3,361,908
Bengkulu	1,116,117	1,118,045	1,119,626	1,120,947	1,122,066	1,123,027	1,123,861	1,124,591
Lampung	2,073,369	2,070,304	2,067,791	2,065,692	2,063,914	2,062,387	2,061,062	2,059,901
DKI Jakarta	24,932,481	24,922,927	24,915,091	24,908,548	24,903,002	24,898,241	24,894,110	24,890,491
Jawa Barat	8,412,537	8,413,120	8,413,598	8,413,997	8,414,335	8,414,625	8,414,877	8,415,097
Jawa Tengah	5,872,245	5,873,805	5,875,085	5,876,154	5,877,059	5,877,837	5,878,511	5,879,102
DI Yogyakarta	1,414,882	1,415,300	1,415,644	1,415,930	1,416,173	1,416,382	1,416,563	1,416,721
Jawa Timur	9,882,201	9,885,209	9,887,677	9,889,737	9,891,484	9,892,983	9,894,284	9,895,423
Kalimantan Barat	1,734,132	1,721,042	1,710,305	1,701,339	1,693,740	1,687,217	1,681,556	1,676,598
Kalimantan Tengah	1,687,516	1,669,878	1,655,411	1,643,331	1,633,091	1,624,302	1,616,675	1,609,993
Kalimantan Selatan	2,406,166	2,401,913	2,398,425	2,395,512	2,393,044	2,390,925	2,389,086	2,387,475
Kalimantan Timur	6,439,545	6,409,085	6,384,102	6,363,240	6,345,557	6,330,378	6,317,206	6,305,668
Sulawesi Utara	1,155,754	1,182,326	1,204,120	1,222,319	1,237,744	1,250,985	1,262,476	1,272,541
Sulawesi Tengah	1,164,803	1,173,137	1,179,972	1,185,680	1,190,518	1,194,671	1,198,275	1,201,432
Sulawesi Selatan	2,872,470	2,890,418	2,905,139	2,917,432	2,927,851	2,936,795	2,944,556	2,951,354
Sulawesi Tenggara	1,220,581	1,225,545	1,229,617	1,233,017	1,235,899	1,238,373	1,240,519	1,242,400
Bali	1,955,501	1,955,507	1,955,511	1,955,515	1,955,519	1,955,522	1,955,524	1,955,526
Nusa Tenggara Barat	1,587,820	1,587,710	1,587,620	1,587,544	1,587,481	1,587,426	1,587,378	1,587,336
Nusa Tenggara Timur	1,203,186	1,214,529	1,223,832	1,231,601	1,238,185	1,243,837	1,248,742	1,253,039
Maluku	1,039,139	1,037,027	1,035,295	1,033,849	1,032,623	1,031,571	1,030,658	1,029,858
Papua	1,874,282	1,846,693	1,824,065	1,805,169	1,789,153	1,775,405	1,763,475	1,753,024
Maluku Utara	722,302	728,102	732,860	736,832	740,200	743,090	745,598	747,795
Banten	2,920,513	2,920,075	2,919,717	2,919,417	2,919,163	2,918,945	2,918,756	2,918,590
Bangka Belitung	917,056	920,680	923,653	926,135	928,238	930,044	931,611	932,984
Gorontalo	636,640	635,898	635,289	634,781	634,350	633,980	633,659	633,378
Kepulauan Riau	1,745,017	1,766,471	1,784,068	1,798,762	1,811,217	1,821,908	1,831,185	1,839,312
Papua Barat	1,431,472	1,417,857	1,406,690	1,397,364	1,389,460	1,382,675	1,376,788	1,371,630
Sulawesi Barat	621,787	625,197	627,995	630,331	632,311	634,011	635,485	636,777
Standar deviasi	4,472,528	4,470,182	4,468,283	4,466,714	4,465,397	4,464,276	4,463,310	4,462,469
Rata-rata	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218
Koefisien variasi	1.379	1.378	1.378	1.377	1.377	1.376	1.376	1.376

LAMPIRAN 6-6
SIMULASI INDEKS WILLIAMSON PAD

Provinsi	PAD
Nanggroe Aceh Darussalam	19,242,755,994
Sumatera Utara	103,422,461,229
Sumatera Barat	10,550,346,890
Riau	2,148,361,799
Jambi	19,836,262,939
Sumatera Selatan	1,840,199,051
Bengkulu	13,836,653,858
Lampung	16,622,741,347
DKI Jakarta	8,171,337,821,123
Jawa Barat	3,685,729,801,011
Jawa Tengah	769,699,577,403
DI Yogyakarta	17,785,427,357
Jawa Timur	5,321,728,860,415
Kalimantan Barat	21,283,495,877
Kalimantan Tengah	12,120,096,576
Kalimantan Selatan	2,611,554,749
Kalimantan Timur	10,431,148,813
Sulawesi Utara	17,522,547,904
Sulawesi Tengah	24,299,135,373
Sulawesi Selatan	19,198,226
Sulawesi Tenggara	18,007,653,287
Bali	5,070,123,787
Nusa Tenggara Barat	22,751,038,950
Nusa Tenggara Timur	42,171,214,894
Maluku	16,190,483,437
Papua	26,891,062,551
Maluku Utara	13,002,891,798
Banten	3,337,396,836
Bangka Belitung	11,416,454,589
Gorontalo	13,813,605,611
Kepulauan Riau	7,464,709,063
Papua Barat	20,589,470,926
Sulawesi Barat	9,203,084,355
Jumlah	18,451,977,638,019
akar	4,295,577
Rata-rata	1,805,976
Indeks Williamson	2.379

LAMPIRAN 6-7
SIMULASI INDEKS WILLIAMSON DAU

Provinsi	DAU	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Nanggroe Aceh Darussalam	50,049,220	93,589,131	139,390,102	184,602,037	227,888,466	268,678,550	306,794,436	342,259,004
Sumatera Utara	2,873,667,347	2,852,059,068	2,834,396,674	2,819,689,957	2,807,254,400	2,796,601,686	2,787,374,106	2,779,303,638
Sumatera Barat	201,832,676	229,527,452	253,571,582	274,566,743	293,016,165	309,331,542	323,847,552	336,836,472
Riau	1,895,020,160	1,780,087,016	1,688,501,763	1,613,877,783	1,551,946,575	1,499,751,488	1,455,182,225	1,416,693,669
Jambi	403,684,113	439,548,449	470,103,809	496,405,240	519,259,045	539,286,886	556,973,334	572,700,429
Sumatera Selatan	735,062,215	876,229,371	1,001,265,734	1,112,062,699	1,210,526,497	1,298,378,433	1,377,106,440	1,447,972,909
Bengkulu	24,130,245	22,547,755	21,289,845	20,267,104	19,419,934	18,707,153	18,099,430	17,575,333
Lampung	58,976,777	50,856,230	44,644,492	39,767,346	35,854,279	32,656,930	30,003,390	27,771,364
DKI Jakarta	8,381,146,402	8,736,557,717	9,033,577,726	9,285,404,297	9,501,564,928	9,689,100,243	9,853,320,900	9,998,305,608
Jawa Barat	48,303,265,889	48,412,299,588	48,501,821,576	48,576,639,091	48,640,100,054	48,694,607,748	48,741,932,034	48,783,405,134
Jawa Tengah	34,556,898,481	34,771,356,141	34,947,751,079	35,095,389,285	35,220,772,061	35,328,578,492	35,422,262,010	35,504,427,011
DI Yogyakarta	28,670,339	28,132,156	27,694,542	27,331,745	27,026,110	26,765,124	26,539,678	26,342,979
Jawa Timur	73,415,616,865	74,064,446,792	74,598,752,617	75,046,388,958	75,426,856,917	75,754,216,500	76,038,860,211	76,288,635,470
Kalimantan Barat	601,216,484	517,077,125	452,797,720	402,389,627	361,991,978	329,018,913	301,682,001	278,709,939
Kalimantan Tengah	158,800,598	118,807,045	90,327,530	69,531,381	54,031,844	42,284,008	33,255,269	26,236,304
Kalimantan Selatan	504,606,394	528,484,296	548,481,152	565,463,762	580,061,074	592,739,726	603,852,818	613,672,254
Kalimantan Timur	5,632,266,266	6,205,181,903	6,695,802,045	7,119,788,251	7,489,352,558	7,814,043,148	8,101,379,673	8,357,337,796
Sulawesi Utara	19,774,152	3,420,630	78,874	4,242,603	12,727,598	23,637,887	35,820,537	48,564,969
Sulawesi Tengah	68,422,926	83,710,957	97,400,032	109,624,776	120,552,280	130,346,428	139,155,339	147,108,232
Sulawesi Selatan	776,585,274	971,412,818	1,147,472,112	1,305,715,596	1,447,844,854	1,575,703,496	1,691,037,568	1,795,412,362
Sulawesi Tenggara	11,928,663	15,483,984	18,745,753	21,708,128	24,389,146	26,814,998	29,013,241	31,009,961
Bali	178,893,242	178,873,419	178,857,160	178,843,584	178,832,078	178,822,201	178,813,630	178,806,123
Nusa Tenggara Barat	6,503,938	6,581,403	6,645,283	6,698,862	6,744,444	6,783,694	6,817,847	6,847,833
Nusa Tenggara Timur	148,681,764	190,051,059	227,768,117	261,877,188	292,651,031	320,430,417	345,556,798	368,345,679
Maluku	9,709,851	8,681,502	7,880,998	7,242,208	6,721,902	6,290,743	5,928,180	5,619,431
Papua	2,787,681,089	2,478,645,676	2,238,721,285	2,047,730,726	1,892,512,655	1,764,152,993	1,656,420,269	1,564,839,215

LAMPIRAN 6-7 (LANJUTAN)
SIMULASI INDEKS WILLIAMSON DAU

Provinsi	DAU	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Maluku Utara	68,051,297	61,873,383	57,025,621	53,129,059	49,934,269	47,270,884	45,018,856	43,091,326
Banten	1,876,911,694	1,884,936,688	1,891,531,626	1,897,047,465	1,901,729,015	1,905,752,241	1,909,246,878	1,912,310,672
Bangka Belitung	173,547,888	166,765,144	161,302,811	156,811,247	153,053,829	149,864,818	147,124,732	144,745,296
Gorontalo	203,074,157	204,554,021	205,771,826	206,791,507	207,657,769	208,402,809	209,050,406	209,618,500
Kepulauan Riau	317,805,907	269,213,247	232,364,999	203,672,191	180,832,000	162,309,189	147,046,714	134,296,449
Papua Barat	8,775,600	3,304,631	772,883	9,076	323,930	1,298,414	2,671,229	4,276,256
Sulawesi Barat	160,019,294	155,175,317	151,257,825	148,024,947	145,312,084	143,003,385	141,014,972	139,284,639
Jumlah	184,641,277,207	186,409,471,114	187,973,767,191	189,358,734,473	190,588,741,770	191,685,631,166	192,668,202,704	193,552,362,259
akar	429,699	431,752	433,559	435,154	436,565	437,819	438,940	439,946
Rata-rata	665,204	665,204	665,204	665,204	665,204	665,204	665,204	665,204
Indeks Williamson	0.646	0.649	0.652	0.654	0.656	0.658	0.660	0.661

LAMPIRAN 6-8
SIMULASI INDEKS WILLIAMSON PAD+DAU

Provinsi	PAD+DAU	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Nanggroe Aceh Darussalam	17,330,067,399	16,652,383,267	16,106,631,045	15,657,874,269	15,282,469,606	14,963,856,827	14,690,097,592	14,452,371,818
Sumatera Utara	140,775,209,176	140,623,725,143	140,499,537,714	140,395,878,667	140,308,046,537	140,232,673,688	140,167,284,619	140,110,018,894
Sumatera Barat	7,833,683,553	7,667,579,859	7,532,669,079	7,420,931,033	7,326,874,926	7,246,615,979	7,177,328,736	7,116,909,301
Riau	8,078,819,443	7,839,597,468	7,646,069,614	7,486,319,807	7,352,235,394	7,238,104,266	7,139,789,438	7,054,221,879
Jambi	25,899,482,086	26,181,401,487	26,413,772,998	26,608,598,350	26,774,294,125	26,916,936,978	27,041,023,724	27,149,953,297
Sumatera Selatan	4,901,340,191	5,256,063,402	5,556,259,991	5,813,322,199	6,035,761,368	6,230,033,297	6,401,108,226	6,552,866,969
Bengkulu	15,016,434,312	14,976,314,824	14,943,448,589	14,916,031,732	14,892,812,737	14,872,896,065	14,855,623,991	14,840,502,578
Lampung	14,701,459,842	14,834,717,532	14,944,465,249	15,036,418,522	15,114,579,546	15,181,834,290	15,240,316,197	15,291,636,419
DKI Jakarta	7,656,325,507,184	7,645,698,614,048	7,636,987,868,256	7,629,717,878,490	7,623,558,498,691	7,618,273,294,028	7,613,688,494,506	7,609,673,524,268
Jawa Barat	4,577,911,699,345	4,578,972,628,758	4,579,842,902,518	4,580,569,676,529	4,581,185,740,057	4,581,714,599,719	4,582,173,547,265	4,582,575,586,155
Jawa Tengah	1,130,436,979,025	1,131,661,997,774	1,132,667,262,249	1,133,507,037,058	1,134,219,079,318	1,134,830,472,049	1,135,361,147,186	1,135,826,099,663
DI Yogyakarta	19,242,263,273	19,228,257,253	19,216,773,220	19,207,186,258	19,199,062,159	19,192,089,834	19,186,040,562	19,180,742,420
Jawa Timur	6,645,261,283,143	6,651,422,080,409	6,656,477,341,842	6,660,700,142,691	6,664,280,464,631	6,667,354,566,863	6,670,022,721,633	6,672,360,358,862
Kalimantan Barat	14,730,416,154	15,165,753,078	15,527,551,889	15,832,934,806	16,094,107,930	16,320,002,085	16,517,299,571	16,691,098,409
Kalimantan Tengah	9,504,241,458	9,838,942,902	10,117,790,943	10,353,624,627	10,555,646,204	10,730,617,676	10,883,616,325	11,018,526,981
Kalimantan Selatan	5,412,076,842	5,489,648,095	5,553,684,627	5,607,441,989	5,653,209,821	5,692,645,129	5,726,976,555	5,757,134,338
Kalimantan Timur	733,573,909	545,690,475	412,297,699	315,210,127	243,108,911	188,675,474	147,023,656	114,800,928
Sulawesi Utara	18,719,596,080	18,015,613,916	17,448,274,159	16,981,478,776	16,590,775,766	16,259,024,569	15,973,859,582	15,726,139,173
Sulawesi Tengah	21,788,707,441	21,530,406,056	21,319,695,107	21,144,537,563	20,996,638,621	20,870,096,744	20,760,598,822	20,664,919,581
Sulawesi Selatan	551,578,181	717,485,412	869,824,056	1,008,259,923	1,133,600,116	1,247,047,088	1,349,875,302	1,443,295,455
Sulawesi Tenggara	17,092,635,951	16,967,049,733	16,864,388,673	16,778,901,584	16,706,612,260	16,644,683,853	16,591,038,099	16,544,117,672
Bali	7,153,759,407	7,153,634,047	7,153,531,227	7,153,445,369	7,153,372,595	7,153,310,127	7,153,255,920	7,153,208,437

LAMPIRAN 6-8 (LANJUTAN)
SIMULASI INDEKS WILLIAMSON PAD+DAU

Provinsi	PAD+DAU	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Nusa Tenggara Barat	23,526,883,738	23,531,529,276	23,535,339,922	23,538,522,189	23,541,219,667	23,543,535,296	23,545,544,796	23,547,305,109
Nusa Tenggara Timur	37,311,866,855	36,699,222,493	36,200,512,806	35,786,685,779	35,437,786,073	35,139,655,110	34,881,969,803	34,657,026,767
Maluku	15,407,206,074	15,449,344,405	15,483,949,525	15,512,875,736	15,537,414,917	15,558,494,727	15,576,798,505	15,592,840,736
Papua	12,362,426,879	13,041,399,567	13,611,846,589	14,097,546,019	14,515,894,781	14,879,882,737	15,199,389,163	15,482,052,805
Maluku Utara	14,952,286,924	14,858,680,349	14,782,122,964	14,718,346,225	14,664,396,608	14,618,165,469	14,578,107,125	14,543,062,749
Banten	208,712,002	206,047,352	203,874,566	202,069,034	200,544,941	199,241,267	198,113,437	197,128,133
Bangka Belitung	14,405,176,775	14,342,833,251	14,291,799,564	14,249,254,240	14,213,242,207	14,182,365,955	14,155,600,013	14,132,174,873
Gorontalo	17,366,417,857	17,380,080,848	17,391,291,343	17,400,655,288	17,408,594,202	17,415,410,381	17,421,326,263	17,426,509,169
Kepulauan Riau	10,862,988,072	10,569,128,523	10,331,110,593	10,134,433,689	9,969,209,085	9,828,464,029	9,707,142,082	9,601,487,890
Papua Barat	19,748,105,476	20,071,083,710	20,337,948,381	20,562,140,510	20,753,129,479	20,917,777,906	21,061,180,284	21,187,197,623
Sulawesi Barat	11,790,176,832	11,748,315,345	11,714,035,823	11,685,449,531	11,661,246,949	11,640,491,556	11,622,495,856	11,606,743,768
Jumlah	20,537,343,060,878	20,534,337,250,060	20,531,985,872,819	20,530,101,108,606	20,528,559,670,230	20,527,277,561,062	20,526,195,734,834	20,525,271,563,116
akar	4,531,815	4,531,483	4,531,223	4,531,015	4,530,845	4,530,704	4,530,584	4,530,482
Rata-rata	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180	2,471,180
Indeks Williamson	1.834	1.834	1.834	1.834	1.833	1.833	1.833	1.833

LAMPIRAN 6-9
SIMULASI INDEKS WILLIAMSON PAD+DAU+DBH

Provinsi	PAD+DAU+DBH	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Nanggroe Aceh Darussalam	9,619,418,527	9,116,245,971	8,713,629,408	8,384,396,182	8,110,300,458	7,878,650,892	7,680,354,780	7,508,731,734
Sumatera Utara	80,962,440,525	80,847,570,077	80,753,413,375	80,674,831,092	80,608,254,191	80,551,126,750	80,501,570,301	80,458,173,329
Sumatera Barat	32,683,143,256	32,342,935,452	32,065,223,217	31,834,240,695	31,639,112,195	31,472,093,084	31,327,518,916	31,201,151,095
Riau	18,256,819,072	18,620,935,553	18,922,270,277	19,175,748,956	19,391,919,695	19,578,446,275	19,741,029,923	19,883,999,171
Jambi	43,677,781,853	44,043,662,405	44,344,899,460	44,597,230,080	44,811,667,694	44,996,150,358	45,156,543,983	45,297,276,954
Sumatera Selatan	1,071,915,758	915,122,009	795,768,675	702,491,240	627,980,249	567,351,275	517,233,615	475,236,346
Bengkulu	32,659,227,198	32,600,048,089	32,551,549,014	32,511,078,160	32,476,794,513	32,447,379,985	32,421,866,058	32,399,525,107
Lampung	43,133,706,267	43,361,747,039	43,549,236,528	43,706,107,044	43,839,292,347	43,953,779,724	44,053,248,181	44,140,471,009
DKI Jakarta	19,083,591,686,685	19,066,812,092,341	19,053,054,856,373	19,041,570,861,371	19,031,839,663,335	19,023,488,423,303	19,016,243,043,543	19,009,897,509,629
Jawa Barat	4,824,295,260,961	4,825,384,364,259	4,826,277,746,444	4,827,023,816,842	4,827,656,236,112	4,828,199,135,482	4,828,670,266,113	4,829,082,976,907
Jawa Tengah	946,977,784,441	948,099,028,977	949,019,177,090	949,787,876,601	950,439,674,977	950,999,354,583	951,485,155,183	951,910,799,330
DI Yogyakarta	47,723,099,173	47,701,040,476	47,682,951,580	47,667,849,313	47,655,050,406	47,644,065,244	47,634,533,794	47,626,185,403
Jawa Timur	6,912,635,733,345	6,918,919,220,880	6,924,075,113,763	6,928,381,945,580	6,932,033,492,715	6,935,168,734,386	6,937,889,943,465	6,940,274,054,182
Kalimantan Barat	42,219,500,242	42,954,315,653	43,561,748,892	44,072,245,608	44,507,274,520	44,882,405,832	45,209,205,226	45,496,442,643
Kalimantan Tengah	22,970,890,643	23,489,625,106	23,919,418,364	24,281,296,866	24,590,154,851	24,856,834,293	25,089,413,374	25,294,033,358
Kalimantan Selatan	10,395,403,314	10,502,804,489	10,591,307,740	10,665,495,713	10,728,580,664	10,782,880,922	10,830,111,545	10,871,568,517
Kalimantan Timur	152,613,538,777	149,717,361,169	147,362,605,860	145,410,598,725	143,766,255,628	142,362,215,662	141,149,430,432	140,091,340,883
Sulawesi Utara	41,338,958,133	40,289,531,122	39,438,854,995	38,735,463,303	38,144,219,723	37,640,325,254	37,205,781,367	36,827,210,917
Sulawesi Tengah	47,966,248,863	47,582,629,248	47,269,131,376	47,008,142,965	46,787,493,222	46,598,502,331	46,434,813,705	46,291,665,539
Sulawesi Selatan	4,779,599,933	4,334,172,726	3,985,090,427	3,704,821,331	3,475,264,476	3,284,069,153	3,122,541,229	2,984,395,800
Sulawesi Tenggara	38,324,019,443	38,135,854,435	37,981,865,798	37,853,518,290	37,744,900,198	37,651,787,311	37,571,080,940	37,500,456,477
Bali	26,499,506,514	26,499,265,240	26,499,067,346	26,498,902,098	26,498,762,033	26,498,641,801	26,498,537,470	26,498,446,080
Nusa Tenggara Barat	54,338,140,911	54,345,200,816	54,350,991,744	54,355,827,619	54,359,926,706	54,363,445,470	54,366,499,003	54,369,173,847
Nusa Tenggara Timur	82,426,855,940	81,515,040,252	80,770,948,072	80,152,217,622	79,629,640,443	79,182,425,388	78,795,370,998	78,457,105,731
Maluku	31,574,896,703	31,635,207,761	31,684,718,284	31,726,091,055	31,761,180,022	31,791,315,728	31,817,477,843	31,840,403,668
Papua	21,160,915,991	22,046,434,285	22,786,291,510	23,413,454,703	23,951,709,070	24,418,623,547	24,827,445,403	25,188,345,849

LAMPIRAN 6-9 (LANJUTAN)
SIMULASI INDEKS WILLIAMSON PAD+DAU+DBH

Provinsi	PAD+DAU+DBH	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
		0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Maluku Utara	28,081,235,763	27,952,900,822	27,847,858,980	27,760,296,670	27,686,186,248	27,622,649,149	27,567,573,400	27,519,374,368
Banten	4,906,797,436	4,919,767,589	4,930,418,581	4,939,321,376	4,946,873,731	4,953,361,246	4,958,994,292	4,963,931,248
Bangka Belitung	27,546,625,426	27,460,387,837	27,389,756,063	27,330,845,616	27,280,962,397	27,238,179,173	27,201,080,846	27,168,604,942
Gorontalo	32,906,511,311	32,925,317,821	32,940,747,068	32,953,633,827	32,964,558,700	32,973,938,015	32,982,078,083	32,989,209,287
Kepulauan Riau	9,631,401,390	9,354,818,561	9,130,971,121	8,946,127,099	8,790,932,123	8,658,796,461	8,544,945,396	8,445,835,402
Papua Barat	23,291,421,946	23,642,068,048	23,931,626,106	24,174,768,048	24,381,819,002	24,560,254,978	24,715,621,626	24,852,119,196
Sulawesi Barat	21,974,860,339	21,917,696,570	21,870,866,005	21,831,799,131	21,798,713,139	21,770,332,260	21,745,719,474	21,724,171,080
Jumlah	32,802,235,346,077	32,789,984,413,075	32,780,050,119,536	32,771,833,340,819	32,764,924,845,782	32,759,035,675,318	32,753,956,029,507	32,749,529,925,028
akar	5,727,324	5,726,254	5,725,386	5,724,669	5,724,065	5,723,551	5,723,107	5,722,721
Rata-rata	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502	3,206,502
Indeks Williamson	1.786	1.786	1.786	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785

LAMPIRAN 6-10
SIMULASI INDEKS WILLIAMSON PAD+DAU+DBH+DAK

Provinsi	PAD+DAU +DBH+DAK	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Nanggroe Aceh Darussalam	9,248,242,012	8,755,004,368	8,360,536,493	8,038,107,721	7,769,779,496	7,543,080,730	7,349,080,720	7,181,220,890
Sumatera Utara	79,957,519,687	79,843,364,616	79,749,794,671	79,671,702,352	79,605,540,747	79,548,769,795	79,499,522,692	79,456,396,695
Sumatera Barat	32,476,056,013	32,136,930,561	31,860,106,077	31,629,864,861	31,435,364,696	31,268,884,946	31,124,778,813	30,998,820,973
Riau	20,695,118,267	21,082,671,579	21,403,229,363	21,672,760,004	21,902,536,491	22,100,742,194	22,273,460,507	22,425,307,324
Jambi	44,250,901,109	44,619,169,303	44,922,364,721	45,176,330,645	45,392,154,353	45,577,826,836	45,739,252,937	45,880,890,317
Sumatera Selatan	1,021,174,528	868,285,262	752,134,412	661,531,169	589,286,841	530,603,563	482,174,296	441,655,994
Bengkulu	32,662,510,282	32,603,328,197	32,554,826,681	32,514,353,789	32,480,068,415	32,450,652,404	32,425,137,190	32,402,795,112
Lampung	43,815,897,344	44,045,731,988	44,234,692,826	44,392,791,972	44,527,018,669	44,642,399,976	44,742,644,148	44,830,546,472
DKI Jakarta	19,019,144,351,010	19,002,393,120,108	18,988,659,148,041	18,977,194,579,254	18,967,479,847,004	18,959,142,741,141	18,951,909,626,435	18,945,574,836,227
Jawa Barat	4,841,228,071,423	4,842,319,084,263	4,843,214,032,668	4,843,961,410,917	4,844,594,938,730	4,845,138,789,670	4,845,610,746,034	4,846,024,180,137
Jawa Tengah	941,847,487,387	942,965,691,500	943,883,345,837	944,649,962,952	945,299,996,275	945,858,160,768	946,342,646,614	946,767,139,088
DI Yogyakarta	48,635,281,608	48,613,013,069	48,594,752,059	48,579,506,070	48,566,585,345	48,555,495,613	48,545,873,422	48,537,445,546
Jawa Timur	6,950,933,354,386	6,957,234,219,929	6,962,404,366,378	6,966,723,100,448	6,970,384,736,011	6,973,528,637,551	6,976,257,361,310	6,978,648,054,591
Kalimantan Barat	42,127,160,806	42,861,175,678	43,467,952,309	43,977,900,733	44,412,464,910	44,787,197,294	45,113,650,515	45,400,584,698
Kalimantan Tengah	22,528,553,115	23,042,296,830	23,467,996,639	23,826,456,961	24,132,417,674	24,396,610,109	24,627,031,066	24,829,760,619
Kalimantan Selatan	10,692,645,418	10,801,567,346	10,891,317,930	10,966,547,473	11,030,515,264	11,085,573,350	11,133,461,584	11,175,494,598
Kalimantan Timur	152,754,162,940	149,856,644,923	147,500,790,200	145,547,865,015	143,902,743,773	142,498,035,849	141,284,670,993	140,226,073,715
Sulawesi Utara	41,634,747,992	40,581,549,134	39,727,779,310	39,021,804,268	38,428,371,024	37,922,596,955	37,486,422,028	37,106,422,851
Sulawesi Tengah	47,898,808,096	47,515,458,803	47,202,182,652	46,941,379,385	46,720,886,572	46,532,030,388	46,368,458,656	46,225,412,885
Sulawesi Selatan	4,647,404,566	4,208,332,094	3,864,461,995	3,588,545,279	3,362,677,529	3,174,648,920	3,015,868,941	2,880,130,603
Sulawesi Tenggara	38,434,605,130	38,246,168,504	38,091,957,085	37,963,423,545	37,854,647,771	37,761,399,531	37,680,575,706	37,609,848,357
Bali	27,148,959,210	27,148,714,997	27,148,514,692	27,148,347,431	27,148,205,660	27,148,083,964	27,147,978,362	27,147,885,859
Nusa Tenggara Barat	51,893,855,422	51,900,754,719	51,906,413,914	51,911,139,787	51,915,145,636	51,918,584,365	51,921,568,446	51,924,182,454
Nusa Tenggara Timur	82,026,239,453	81,116,648,467	80,374,381,004	79,757,174,260	79,235,888,584	78,789,782,151	78,403,689,776	78,066,267,198
Maluku	31,348,594,765	31,408,689,409	31,458,022,427	31,499,246,976	31,534,210,308	31,564,238,169	31,590,306,701	31,613,150,551

LAMPIRAN 6-10 (LANJUTAN)
SIMULASI INDEKS WILLIAMSON PAD+DAU+DBH+DAK

Provinsi	PAD+DAU +DBH+DAK	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
		0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Papua	22,343,396,207	23,253,069,630	24,012,739,068	24,656,446,188	25,208,723,296	25,687,674,841	26,106,941,972	26,476,992,070
Maluku Utara	27,760,583,318	27,632,984,034	27,528,545,584	27,441,487,127	27,367,803,775	27,304,633,272	27,249,875,639	27,201,955,264
Banten	4,659,213,128	4,671,852,044	4,682,231,354	4,690,907,284	4,698,267,346	4,704,589,798	4,710,079,609	4,714,891,097
Bangka Belitung	27,854,117,175	27,767,399,228	27,696,373,461	27,637,134,015	27,586,971,935	27,543,949,337	27,506,643,291	27,473,985,434
Gorontalo	33,126,242,911	33,145,112,098	33,160,592,752	33,173,522,438	33,184,483,697	33,193,894,245	33,202,061,416	33,209,216,361
Kepulauan Riau	9,824,722,695	9,545,357,755	9,319,228,408	9,132,478,909	8,975,668,838	8,842,146,786	8,727,092,667	8,626,928,845
Papua Barat	23,193,452,309	23,543,362,938	23,832,317,756	24,074,955,971	24,281,579,962	24,459,649,434	24,614,698,046	24,750,917,028
Sulawesi Barat	21,989,215,418	21,932,032,968	21,885,187,082	21,846,107,413	21,813,010,577	21,784,620,389	21,759,999,526	21,738,444,056
Jumlah	32,789,802,645,129	32,777,658,786,341	32,767,812,315,848	32,759,668,872,611	32,752,822,537,204	32,746,986,724,333	32,741,953,380,060	32,737,567,833,909
akar	5,726,238	5,725,178	5,724,318	5,723,606	5,723,008	5,722,498	5,722,058	5,721,675
Rata-rata	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218	3,243,218
Indeks Williamson	1.766	1.765	1.765	1.765	1.765	1.765	1.764	1.764

LAMPIRAN 7-1
SIMULASI KEBUTUHAN FISKAL

Provinsi	Penduduk	Indeks Penduduk	Luas Wilayah Darat	Luas Wilayah Laut	LW Aktual	Indeks Luas Wilayah	Indeks Kemahalan Konstruksi		PDRB per Kapita	Indeks PDRB per Kapita	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks IPM	Pengali Keb Fiskal	bobot	KbF
Tahun Data / bobot	2010	0.3		0.3		0.15	2010	0.3	2009	0.15		0.1		BEL rata-rata	3,087,413
Nanggroe Aceh Darussalam	4,494,410	0.62	57,956	295,370	146,567	1.64	92.45	0.92	15,979,812	0.82	71.31	0.90	0.83	0.94	2,889,216
Sumatera Utara	12,982,204	1.80	72,981	110,000	105,981	1.19	86.20	0.86	18,201,945	0.93	73.80	1.03	1.12	1.25	3,872,661
Sumatera Barat	4,846,909	0.67	42,013	138,750	83,638	0.94	85.24	0.85	15,838,417	0.81	73.44	1.03	0.72	0.81	2,494,655
Riau	5,538,367	0.77	87,024	235,366	157,633	1.77	96.93	0.97	53,612,009	2.74	75.60	1.06	1.20	1.34	4,150,308
Jambi	3,092,265	0.43	50,058	426	50,186	0.56	89.31	0.89	14,286,974	0.73	72.45	1.01	0.59	0.66	2,047,409
Sumatera Selatan	7,450,394	1.03	91,592	284	91,678	1.03	87.13	0.87	18,442,715	0.94	72.61	1.02	0.87	0.97	3,006,361
Bengkulu	1,715,518	0.24	19,919	53,000	35,819	0.40	87.83	0.88	9,292,001	0.47	72.55	1.02	0.47	0.52	1,616,810
Lampung	7,608,405	1.06	34,624	24,000	41,824	0.47	83.93	0.84	11,564,172	0.59	70.93	0.99	0.73	0.82	2,522,731
Bangka Belitung	1,223,296	0.17	16,424	65,301	36,014	0.40	95.33	0.95	18,790,773	0.96	72.55	1.02	0.54	0.61	1,877,073
Kepulauan Riau	1,679,163	0.23	8,202	241,215	80,566	0.90	101.61	1.02	37,902,956	1.94	74.54	1.04	0.80	0.90	2,775,340
DKI Jakarta	9,607,787	1.33	66,401	6,979	68,495	0.77	90.02	0.90	79,023,879	4.03	77.36	1.08	1.39	1.56	4,821,491
Jawa Barat	43,053,732	5.98	35,378	63,955	54,564	0.61	85.04	0.85	16,034,682	0.82	71.64	1.00	2.26	2.54	7,846,919
Jawa Tengah	32,382,657	4.50	32,801	70,129	53,839	0.60	83.44	0.83	12,288,311	0.63	72.10	1.01	1.78	2.00	6,185,257
DI Yogyakarta	3,457,491	0.48	3,133	9,562	6,002	0.07	83.67	0.84	11,993,735	0.61	75.23	1.05	0.50	0.56	1,723,119
Jawa Timur	37,476,757	5.20	47,800	110,000	80,800	0.91	83.36	0.83	18,327,659	0.94	71.06	1.00	2.09	2.34	7,237,685
Banten	10,632,166	1.48	9,663	11,134	13,003	0.15	84.00	0.84	14,278,416	0.73	70.06	0.98	0.83	0.93	2,864,322
Bali	3,890,757	0.54	5,780	9,500	8,630	0.10	85.53	0.86	15,493,603	0.79	71.52	1.00	0.55	0.62	1,913,293
Nusa Tenggara Barat	4,500,212	0.62	18,572	29,159	27,320	0.31	87.20	0.87	9,431,239	0.48	64.66	0.91	0.57	0.64	1,966,642
Nusa Tenggara Timur	4,683,827	0.65	48,718	200,000	108,718	1.22	97.38	0.97	5,167,201	0.26	66.60	0.93	0.71	0.80	2,460,188
Kalimantan Barat	4,395,983	0.61	147,307	101,538	177,769	1.99	96.61	0.97	12,344,902	0.63	68.79	0.96	0.87	0.97	3,003,586

LAMPIRAN 7-1 (LANJUTAN)
SIMULASI KEBUTUHAN FISKAL

Provinsi	Penduduk	Indeks Penduduk	Luas Wilayah Darat	Luas Wilayah Laut	LW Aktual	Indeks Luas Wilayah	Indeks Kemahalan Konstruksi		PDRB per Kapita	Indeks PDRB per Kapita	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks IPM	Pengali Keb Fiskal	bobot	Kbf
Tahun Data / bobot	2010	0.3		0.3		0.15	2010	0.3	2009	0.15		0.1		BEL rata-rata	3,087,413
Kalimantan Tengah	2,212,089	0.31	153,565	63,462	172,603	1.93	100.83	1.01	16,850,178	0.86	74.36	1.04	0.81	0.91	2,821,561
Kalimantan Selatan	3,626,616	0.50	38,744	18,109	44,177	0.50	90.46	0.90	14,191,530	0.72	69.30	0.97	0.61	0.68	2,099,001
Kalimantan Timur	3,553,143	0.49	204,534	10,539	207,696	2.33	100.00	1.00	80,259,005	4.10	75.11	1.05	1.41	1.59	4,894,776
Sulawesi Utara	2,270,596	0.32	13,852	304,782	105,286	1.18	98.63	0.99	14,578,344	0.74	75.68	1.06	0.68	0.76	2,354,510
Sulawesi Tengah	2,635,009	0.37	61,841	189,480	118,685	1.33	90.81	0.91	12,301,634	0.63	70.70	0.99	0.68	0.76	2,343,440
Sulawesi Selatan	8,034,776	1.12	46,717	266,877	126,781	1.42	85.99	0.86	12,443,692	0.64	70.94	0.99	0.90	1.01	3,124,191
Sulawesi Tenggara	2,232,586	0.31	38,068	114,879	72,531	0.81	92.17	0.92	13,495,896	0.69	69.52	0.97	0.59	0.67	2,062,203
Gorontalo	1,040,164	0.14	11,257	10,500	14,407	0.16	90.74	0.91	6,806,428	0.35	69.79	0.98	0.39	0.44	1,358,750
Sulawesi Barat	1,158,651	0.16	16,787	63,631	35,876	0.40	89.90	0.90	8,118,006	0.41	69.18	0.97	0.44	0.49	1,527,068
Maluku	1,533,506	0.21	46,914	54,185	63,170	0.71	110.00	1.10	4,616,451	0.24	70.96	0.99	0.54	0.60	1,856,361
Maluku Utara	1,038,087	0.14	31,983	113,819	66,128	0.74	110.43	1.10	4,529,857	0.23	68.63	0.96	0.52	0.58	1,804,217
Papua Barat	760,422	0.11	97,024	13,853	101,180	1.13	142.98	1.43	22,624,728	1.16	68.58	0.96	0.80	0.90	2,787,406
Papua	2,833,381	0.39	319,036	228,000	387,436	4.34	210.10	2.10	27,254,064	1.39	64.53	0.90	1.61	1.81	5,576,076
Rata-rata	7,201,252				89,243	1.00			19,586,825		71.40		0.89	1.00	

LAMPIRAN 7-2
BELANJA PNSD dan IKF

Provinsi	Belanja PNSD			IKF	
	langsung	tak langsung	total	Kapasitas Fiskal	
Nanggroe Aceh Darussalam	908,213	270,837	1,179,049	1.83	1.855
Sumatera Utara	643,506	168,042	811,548	0.41	0.411
Sumatera Barat	566,925	85,127	652,053	0.50	0.509
Riau	740,737	220,811	961,547	0.93	0.943
Jambi	380,030	67,037	447,067	0.66	0.665
Sumatera Selatan	519,324	170,138	689,463	0.68	0.690
Bengkulu	369,297	65,481	434,779	0.87	0.880
Lampung	507,303	134,214	641,517	0.34	0.340
Bangka Belitung	204,389	34,225	238,614	0.96	0.970
Kepulauan Riau	211,724	158,382	370,105	1.23	1.243
DKI Jakarta	8,521,389	1,212,460	9,733,849	3.61	3.651
Jawa Barat	1,729,963	325,901	2,055,864	0.32	0.322
Jawa Tengah	1,183,394	206,958	1,390,352	0.27	0.270
DI Yogyakarta	443,440	90,164	533,604	0.48	0.489
Jawa Timur	1,497,005	833,870	2,330,875	0.32	0.327
Banten	345,901	130,439	476,340	0.42	0.427
Bali	644,936	30,565	675,501	0.80	0.815
Nusa Tenggara Barat	452,994	40,506	493,500	0.38	0.387
Nusa Tenggara Timur	422,181	77,936	500,117	0.26	0.267
Kalimantan Barat	413,869	77,004	490,873	0.49	0.501
Kalimantan Tengah	334,906	94,916	429,822	1.13	1.148
Kalimantan Selatan	557,778	120,262	678,041	0.89	0.897
Kalimantan Timur	777,745	302,387	1,080,132	2.41	2.443
Sulawesi Utara	420,523	55,793	476,316	0.61	0.614
Sulawesi Tengah	346,850	69,136	415,986	0.55	0.555
Sulawesi Selatan	627,707	141,765	769,472	0.45	0.456
Sulawesi Tenggara	378,701	40,523	419,224	0.68	0.693
Gorontalo	203,974	30,439	234,413	0.77	0.776
Sulawesi Barat	133,839	58,278	192,118	0.88	0.886
Maluku	342,797	59,092	401,889	0.76	0.768
Maluku Utara	184,827	24,099	208,926	0.83	0.839
Papua Barat	212,126	107,564	319,690	5.04	5.105
Papua	610,573	214,227	824,801	1.83	1.855
	25,838,867	5,718,579	31,557,446	0.99	1.000

LAMPIRAN 7-3
CELAH FISKAL dan ALOKASI DASAR (dalam jutaan Rupiah)

Jumlah Total DAU Provinsi			21,951,716				KpF: Kapasitas Fiskal				
Alokasi Dasar		48.00%	10,536,824	0.045			KbF: Kebutuhan Fiskal				
Alokasi Kesenjangan Fiskal		52.00%	11,414,893	513,670			CF: Celah Fiskal				
Belanja Pegawai		83.10%	8,756,101				AD: Alokasi Dasar				
Provinsi	PAD	DBH	KpF= PAD+DBH	BEL	KbF	0,045 x KbF	CF = KpF-KbF	Gaji PNSD	0.831 x Gaji PNSD	AD	Akhir = CF+AD
Nanggroe Aceh Darussalam	735,206	1,241,551	1,976,757	7,642,847	2,889,216	130,015	912,459	1,179,049	979,790	393,677	1,306,136
Sumatera Utara	2,016,073	1,843,280	3,859,353	3,444,561	3,872,661	174,270	13,308	811,548	674,397	270,971	284,279
Sumatera Barat	739,747	501,354	1,241,101	1,657,404	2,494,655	112,259	1,253,554	652,053	541,856	217,716	1,471,270
Riau	1,352,413	8,171,669	9,524,082	3,757,481	4,150,308	186,764	(5,373,773)	961,547	799,046	321,054	(5,052,719)
Jambi	526,442	1,262,548	1,788,990	1,530,073	2,047,409	92,133	258,419	447,067	371,512	149,273	407,692
Sumatera Selatan	1,054,333	3,871,475	4,925,808	2,341,327	3,006,361	135,286	(1,919,446)	689,463	572,943	230,207	(1,689,239)
Bengkulu	287,782	254,884	542,666	932,490	1,616,810	72,756	1,074,144	434,779	361,301	145,170	1,219,314
Lampung	860,358	594,830	1,455,188	1,847,108	2,522,731	113,523	1,067,543	641,517	533,101	214,198	1,281,741
Bangka Belitung	246,800	547,445	794,245	854,254	1,877,073	84,468	1,082,828	238,614	198,288	79,672	1,162,500
Kepulauan Riau	381,947	1,527,181	1,909,128	1,848,353	2,775,340	124,890	866,212	370,105	307,558	123,576	989,788
DKI Jakarta	10,601,058	9,369,659	19,970,717	19,500,312	4,821,491	216,967	(15,149,226)	9,733,849	8,088,828	3,250,068	(11,899,158)
Jawa Barat	5,577,589	4,621,777	10,199,366	8,193,614	7,846,919	353,111	(2,352,447)	2,055,864	1,708,423	686,440	(1,666,007)
Jawa Tengah	4,000,736	2,488,695	6,489,431	5,200,113	6,185,257	278,337	(304,173)	1,390,352	1,155,383	464,229	160,056
DI Yogyakarta	645,146	341,936	987,082	1,327,488	1,723,119	77,540	736,038	533,604	443,425	178,167	914,204
Jawa Timur	5,708,030	4,445,767	10,153,797	7,602,039	7,237,685	325,696	(2,916,112)	2,330,875	1,936,957	778,264	(2,137,849)
Banten	1,687,721	1,534,109	3,221,830	2,420,821	2,864,322	128,894	(357,509)	476,340	395,839	159,047	(198,462)
Bali	1,163,948	583,627	1,747,575	1,811,099	1,913,293	86,098	165,718	675,501	561,342	225,545	391,264
Nusa Tenggara Barat	471,989	405,683	877,672	1,100,538	1,966,642	88,499	1,088,970	493,500	410,098	164,776	1,253,746
Nusa Tenggara Timur	255,675	400,216	655,891	1,025,446	2,460,188	110,708	1,804,297	500,117	415,597	166,986	1,971,283
Kalimantan Barat	579,576	702,480	1,282,056	1,627,012	3,003,586	135,161	1,721,530	490,873	407,915	163,899	1,885,429
Kalimantan Tengah	382,020	919,471	1,301,491	1,471,278	2,821,561	126,970	1,520,070	429,822	357,182	143,515	1,663,585
Kalimantan Selatan	1,021,456	1,807,402	2,828,858	2,105,293	2,099,001	94,455	(729,858)	678,041	563,452	226,393	(503,464)

LAMPIRAN 7-3 (LANJUTAN)

CELAH FISKAL dan ALOKASI DASAR (dalam jutaan Rupiah)

Jumlah Total DAU Provinsi				21,951,716			KpF: Kapasitas Fiskal						
Alokasi Dasar		48.00%	10,536,824	0.045			KbF: Kebutuhan Fiskal						
Alokasi Kesenjangan Fiskal		52.00%	11,414,893	513,670			CF: Celah Fiskal						
Belanja Pegawai		83.10%	8,756,101					AD: Alokasi Dasar					
Provinsi	PAD	DBH	KpF= PAD+DBH	BEL	KbF	0.045 x KbF	CF = KpF-KbF	Gaji PNSD	0.831 x Gaji PNSD	AD	Akhir = CF+AD		
Kalimantan Timur	2,208,309	10,937,411	13,145,720	6,309,259	4,894,776	220,265	(8,250,944)	1,080,132	897,590	360,649	(7,890,295)		
Sulawesi Utara	331,084	340,794	671,878	1,034,428	2,354,510	105,953	1,682,633	476,316	395,819	159,039	1,841,672		
Sulawesi Tengah	275,191	346,190	621,381	1,059,732	2,343,440	105,455	1,722,059	415,986	345,684	138,895	1,860,954		
Sulawesi Selatan	1,242,766	1,041,384	2,284,150	2,122,192	3,124,191	140,589	840,041	769,472	639,431	256,922	1,096,963		
Sulawesi Tenggara	223,128	337,036	560,164	1,119,700	2,062,203	92,799	1,502,039	419,224	348,375	139,976	1,642,015		
Gorontalo	102,626	135,626	238,252	619,328	1,358,750	61,144	1,120,498	234,413	194,797	78,269	1,198,767		
Sulawesi Barat	64,445	161,344	225,789	590,164	1,527,068	68,718	1,301,279	192,118	159,650	64,147	1,365,426		
Maluku	146,189	372,187	518,376	1,015,808	1,856,361	83,536	1,337,984	401,889	333,970	134,188	1,472,173		
Maluku Utara	73,292	503,479	576,771	759,516	1,804,217	81,190	1,227,446	208,926	173,618	69,759	1,297,205		
Papua Barat	369,727	1,068,065	1,437,792	5,294,199	2,787,406	125,433	1,349,613	319,690	265,662	106,742	1,456,356		
Papua	73,618	2,564,820	2,638,438	2,719,349	5,576,076	250,923	2,937,638	824,801	685,409	275,396	3,213,033		
			Rata-rata	3,087,413	Jumlah	4,584,808	(8,767,168)	31,557,446	26,224,237	10,536,824	1,769,656		

LAMPIRAN 8-1

**SIMULASI KONTRIBUSI DAU BERDASARKAN APBD 2011
(dalam milyar Rupiah) (1)**

Daerah	PAD	DP	DBH	DAU	DAK	LLPS	PDPTN	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
								0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Nanggroe Aceh Darussalam	797	1,747	979	717	51	4,545	7,089	736	751	764	775	784	793	800
Sumatera Utara	3,182	1,271	347	895	29	28	4,481	894	893	892	892	891	891	891
Sumatera Barat	1,087	895	89	765	41	5	1,987	771	777	781	785	788	791	794
Riau	1,502	2,683	2,209	380	94	90	4,276	389	396	402	407	412	415	419
Jambi	571	828	314	489	25	-	1,399	481	475	470	465	462	458	455
Sumatera Selatan	1,564	1,860	1,316	512	32	12	3,435	498	486	477	469	462	456	450
Bengkulu	422	695	51	607	37	30	1,146	609	611	612	613	614	615	616
Lampung	1,085	988	252	708	28	89	2,162	705	703	700	699	697	696	695
DKI Jakarta	16,023	8,910	8,700	210	-	1,147	26,079	200	193	186	180	176	172	168
Jawa Barat	6,316	2,096	869	1,182	46	12	8,425	1,182	1,183	1,183	1,183	1,184	1,184	1,184
Jawa Tengah	4,183	1,690	491	1,169	30	-	5,872	1,170	1,172	1,173	1,174	1,174	1,175	1,176
DI Yogyakarta	700	715	74	621	19	5	1,419	621	622	622	622	622	622	623
Jawa Timur	7,615	2,267	865	1,348	55	25	9,907	1,351	1,353	1,355	1,357	1,358	1,360	1,361
Kalimantan Barat	733	1,001	117	845	38	5	1,739	832	822	813	805	799	793	788
Kalimantan Tengah	665	1,023	175	796	52	18	1,706	778	764	752	741	733	725	718
Kalimantan Selatan	1,392	1,014	506	483	25	46	2,452	479	476	473	470	468	466	465
Kalimantan Timur	2,641	3,798	3,709	51	38	10	6,450	21	(4)	(25)	(43)	(58)	(71)	(82)
Sulawesi Utara	452	704	55	620	29	104	1,260	646	668	686	702	715	726	736
Sulawesi Tengah	326	839	57	744	38	3	1,168	752	759	765	769	774	777	780
Sulawesi Selatan	1,782	1,090	232	817	42	-	2,872	835	849	862	872	881	889	896
Sulawesi Tenggara	422	799	64	701	34	-	1,221	706	710	713	716	719	721	723
Bali	1,249	706	124	561	21	188	2,144	561	561	561	561	561	561	561
Nusa Tenggara Barat	710	878	156	647	75	12	1,600	647	646	646	646	646	646	646
Nusa Tenggara Timur	343	860	66	752	42	-	1,203	763	773	780	787	793	798	802
Maluku	222	817	68	704	45	65	1,104	702	700	699	697	696	696	695
Papua	304	1,570	421	1,149	-	3,495	5,369	1,121	1,099	1,080	1,064	1,050	1,038	1,027
Maluku Utara	81	642	50	540	51	2	725	546	551	555	558	561	564	566
Banten	2,079	841	336	460	45	4	2,925	460	460	459	459	459	459	458
Bangka Belitung	317	600	95	482	24	50	967	485	488	491	493	495	496	498
Gorontalo	123	514	25	461	28	-	637	460	460	459	459	458	458	458
Kepulauan Riau	500	1,245	827	396	22	-	1,745	417	435	449	462	473	482	490
Papua Barat	99	1,333	592	700	41	1,954	3,386	687	676	666	658	652	646	641
Sulawesi Barat	110	512	34	442	36	70	692	445	448	450	452	454	455	457
Total	59,597	47,429	24,266	21,952	1,212	12,013	119,040	21,952	21,952	21,952	21,952	21,952	21,952	21,952

LAMPIRAN 8-2

SIMULASI KONTRIBUSI DAU BERDASARKAN APBD 2011
(dalam milyar Rupiah) (2)

	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Daerah	PDPTN	PDPTN	PDPTN	PDPTN	PDPTN	PDPTN	PDPTN
Nanggroe Aceh Darussalam	7,108	7,124	7,137	7,148	7,157	7,165	7,172
Sumatera Utara	4,480	4,479	4,479	4,478	4,478	4,477	4,477
Sumatera Barat	1,993	1,999	2,003	2,007	2,010	2,013	2,016
Riau	4,285	4,292	4,298	4,303	4,307	4,311	4,315
Jambi	1,391	1,385	1,380	1,375	1,372	1,368	1,365
Sumatera Selatan	3,421	3,410	3,400	3,392	3,385	3,379	3,374
Bengkulu	1,148	1,149	1,151	1,152	1,153	1,154	1,154
Lampung	2,159	2,157	2,154	2,153	2,151	2,150	2,149
DKI Jakarta	26,070	26,062	26,055	26,050	26,045	26,041	26,037
Jawa Barat	8,425	8,426	8,426	8,427	8,427	8,427	8,427
Jawa Tengah	5,874	5,875	5,876	5,877	5,878	5,879	5,879
DI Yogyakarta	1,420	1,420	1,421	1,421	1,421	1,421	1,421
Jawa Timur	9,910	9,912	9,915	9,916	9,918	9,919	9,920
Kalimantan Barat	1,726	1,715	1,706	1,698	1,692	1,686	1,681
Kalimantan Tengah	1,688	1,673	1,661	1,651	1,642	1,635	1,628
Kalimantan Selatan	2,448	2,444	2,441	2,439	2,437	2,435	2,433
Kalimantan Timur	6,419	6,394	6,373	6,356	6,340	6,327	6,316
Sulawesi Utara	1,286	1,308	1,326	1,342	1,355	1,366	1,376
Sulawesi Tengah	1,177	1,183	1,189	1,194	1,198	1,202	1,205
Sulawesi Selatan	2,890	2,905	2,917	2,928	2,937	2,945	2,951
Sulawesi Tenggara	1,226	1,230	1,233	1,236	1,238	1,241	1,242
Bali	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144	2,144
Nusa Tenggara Barat	1,600	1,600	1,600	1,599	1,599	1,599	1,599
Nusa Tenggara Timur	1,215	1,224	1,232	1,238	1,244	1,249	1,253
Maluku	1,102	1,100	1,098	1,097	1,096	1,095	1,094
Papua	5,342	5,319	5,300	5,284	5,270	5,258	5,248
Maluku Utara	730	735	739	743	745	748	750
Banten	2,924	2,924	2,924	2,923	2,923	2,923	2,923
Bangka Belitung	971	974	976	978	980	982	983
Gorontalo	636	635	635	634	634	634	633
Kepulauan Riau	1,766	1,784	1,799	1,811	1,822	1,831	1,839
Papua Barat	3,372	3,361	3,352	3,344	3,337	3,331	3,326
Sulawesi Barat	695	698	700	702	704	705	707
Total	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040	119,040

LAMPIRAN 8-3
SIMULASI STRUKTUR DAU BERDASARKAN APBD 2011 (%)

Provinsi	Komposisi Luas Wilayah Lautan																						
	PAD	DP	DBH	DAU	DAK	LLPS	PDP TN	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	
Nanggroe Aceh Darussalam	11.25	24.64	13.81	10.11	0.71	64.12	100	10.35	10.54	10.71	10.84	10.96	11.06	11.15	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sumatera Utara	71.01	28.37	7.75	19.96	0.65	0.62	100	19.95	19.93	19.92	19.90	19.90	19.89	19.88	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sumatera Barat	54.70	45.03	4.49	38.49	2.05	0.26	100	38.82	39.10	39.33	39.52	39.68	39.83	39.95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Riau	35.14	62.75	51.67	8.89	2.20	2.11	100	9.09	9.26	9.40	9.52	9.62	9.71	9.79	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jambi	40.83	59.17	22.44	34.96	1.77	-	100	34.41	33.96	33.58	33.27	32.99	32.76	32.55	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sumatera Selatan	45.52	54.14	38.30	14.91	0.94	0.34	100	14.50	14.16	13.88	13.64	13.44	13.26	13.11	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bengkulu	36.78	60.61	4.42	53.00	3.19	2.60	100	53.17	53.31	53.42	53.52	53.61	53.68	53.74	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Lampung	50.20	45.69	11.67	32.75	1.28	4.11	100	32.61	32.49	32.40	32.31	32.24	32.18	32.13	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DKI Jakarta	61.44	34.16	33.36	0.80	-	4.40	100	0.77	0.74	0.71	0.69	0.67	0.66	0.64	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jawa Barat	74.97	24.88	10.31	14.02	0.54	0.14	100	14.03	14.04	14.04	14.05	14.05	14.05	14.06	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jawa Tengah	71.23	28.77	8.37	19.90	0.50	-	100	19.93	19.95	19.97	19.99	20.00	20.01	20.02	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DI Yogyakarta	49.34	50.34	5.23	43.74	1.37	0.32	100	43.76	43.79	43.81	43.83	43.84	43.85	43.86	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Jawa Timur	76.87	22.88	8.73	13.60	0.56	0.25	100	13.63	13.66	13.68	13.70	13.71	13.72	13.73	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kalimantan Barat	42.18	57.56	6.73	48.63	2.21	0.26	100	47.88	47.26	46.74	46.31	45.93	45.61	45.32	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kalimantan Tengah	38.99	59.96	10.25	46.66	3.04	1.06	100	45.63	44.78	44.07	43.47	42.95	42.51	42.12	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kalimantan Selatan	56.78	41.35	20.62	19.71	1.02	1.87	100	19.54	19.40	19.28	19.18	19.09	19.02	18.95	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kalimantan Timur	40.95	58.89	57.50	0.80	0.59	0.16	100	0.33	(0.06)	(0.39)	(0.66)	(0.89)	(1.10)	(1.28)	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sulawesi Utara	35.86	55.89	4.37	49.20	2.33	8.25	100	51.30	53.03	54.48	55.70	56.75	57.67	58.47	100	100	100	100	100	100	100	100	100

LAMPIRAN 8-3 (LANJUTAN)

SIMULASI STRUKTUR DAU BERDASARKAN APBD 2011 (%)

Provinsi	PAD	DP	DBH	DAU	DAK	LLPS	PDP TN	Komposisi Luas Wilayah Lautan																
								0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0		
Sulawesi Tengah	27.87	71.84	4.90	63.67	3.27	0.29	100	64.38	64.97	65.45	65.87	66.22	66.53	66.80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sulawesi Selatan	62.04	37.96	8.06	28.43	1.46	-	100	29.06	29.57	30.00	30.36	30.67	30.94	31.18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sulawesi Tenggara	34.53	65.47	5.28	57.42	2.77	-	100	57.83	58.16	58.44	58.67	58.88	59.05	59.21	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bali	58.29	32.94	5.79	26.16	0.99	8.77	100	26.16	26.16	26.16	26.16	26.16	26.16	26.16	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nusa Tenggara Barat	44.37	54.88	9.75	40.42	4.70	0.75	100	40.41	40.41	40.40	40.40	40.40	40.39	40.39	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Nusa Tenggara Timur	28.53	71.47	5.50	62.51	3.47	-	100	63.45	64.22	64.87	65.41	65.88	66.29	66.65	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Maluku	20.12	74.04	6.21	63.79	4.05	5.84	100	63.60	63.44	63.31	63.20	63.10	63.02	62.95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Papua	5.67	29.24	7.85	21.40	-	65.09	100	20.88	20.46	20.11	19.81	19.55	19.33	19.14	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Maluku Utara	11.13	88.55	6.90	74.58	7.07	0.32	100	75.38	76.03	76.58	77.05	77.44	77.79	78.09	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Banten	71.09	28.77	11.48	15.74	1.54	0.14	100	15.73	15.71	15.70	15.70	15.69	15.68	15.68	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Bangka Belitung	32.75	62.08	9.81	49.80	2.47	5.17	100	50.17	50.48	50.74	50.96	51.14	51.30	51.45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Gorontalo	19.28	80.72	3.88	72.43	4.41	-	100	72.31	72.22	72.14	72.07	72.01	71.96	71.92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepulauan Riau	28.66	71.34	47.41	22.68	1.26	-	100	23.91	24.92	25.76	26.47	27.08	27.62	28.08	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Papua Barat	2.92	39.36	17.47	20.69	1.20	57.72	100	20.29	19.96	19.68	19.45	19.25	19.07	18.92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Sulawesi Barat	15.91	73.97	4.95	63.83	5.18	10.12	100	64.32	64.73	65.07	65.35	65.60	65.81	66.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Total	50.07	39.84	20.38	18.44	1.02	10.09	100	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	18.44	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kep	28.77	68.32	12.85	51.85	3.62	2.91	100	52.60	53.22	53.73	54.17	54.54	54.87	55.15	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Non-Kep	44.45	46.90	14.82	30.41	1.67	8.64	100	30.36	30.32	30.28	30.25	30.22	30.20	30.18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata	41.13	51.45	14.40	34.96	2.08	7.43	100	35.08	35.17	35.26	35.32	35.38	35.43	35.48	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

LAMPIRAN 8-4

SIMULASI DISTRIBUSI DAU DALAM PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BERDASARKAN APBD 2011 (%) (1)

				0.3				Komposisi Luas Wilayah Lautan						
								0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Provinsi	PAD	DP	DBH	DAU	DAK	LLPS	PDPTN	DAU	DAU	DAU	DAU	DAU	DAU	DAU
Nanggroe Aceh Darussalam	1.34	3.68	4.04	3.26	4.18	37.84	5.96	3.35	3.42	3.48	3.53	3.57	3.61	3.64
Sumatera Utara	5.34	2.68	1.43	4.08	2.40	0.23	3.76	4.07	4.07	4.07	4.06	4.06	4.06	4.06
Sumatera Barat	1.82	1.89	0.37	3.48	3.36	0.04	1.67	3.51	3.54	3.56	3.58	3.59	3.60	3.62
Riau	2.52	5.66	9.10	1.73	7.76	0.75	3.59	1.77	1.80	1.83	1.85	1.87	1.89	1.91
Jambi	0.96	1.75	1.29	2.23	2.04	-	1.18	2.19	2.16	2.14	2.12	2.10	2.09	2.07
Sumatera Selatan	2.62	3.92	5.42	2.33	2.66	0.10	2.89	2.27	2.22	2.17	2.14	2.10	2.08	2.05
Bengkulu	0.71	1.46	0.21	2.77	3.02	0.25	0.96	2.78	2.78	2.79	2.79	2.80	2.80	2.81
Lampung	1.82	2.08	1.04	3.23	2.28	0.74	1.82	3.21	3.20	3.19	3.18	3.18	3.17	3.16
DKI Jakarta	26.88	18.79	35.85	0.96	-	9.55	21.91	0.91	0.88	0.85	0.82	0.80	0.78	0.76
Jawa Barat	10.60	4.42	3.58	5.38	3.78	0.10	7.08	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39	5.39
Jawa Tengah	7.02	3.56	2.02	5.32	2.44	-	4.93	5.33	5.34	5.34	5.35	5.35	5.35	5.36
DI Yogyakarta	1.18	1.51	0.31	2.83	1.61	0.04	1.19	2.83	2.83	2.83	2.83	2.83	2.84	2.84
Jawa Timur	12.78	4.78	3.56	6.14	4.54	0.21	8.32	6.15	6.16	6.17	6.18	6.19	6.19	6.20
Kalimantan Barat	1.23	2.11	0.48	3.85	3.17	0.04	1.46	3.79	3.74	3.70	3.67	3.64	3.61	3.59
Kalimantan Tengah	1.12	2.16	0.72	3.63	4.28	0.15	1.43	3.54	3.48	3.42	3.38	3.34	3.30	3.27
Kalimantan Selatan	2.34	2.14	2.08	2.20	2.06	0.38	2.06	2.18	2.17	2.15	2.14	2.13	2.12	2.12
Kalimantan Timur	4.43	8.01	15.28	0.23	3.15	0.08	5.42	0.10	(0.02)	(0.11)	(0.19)	(0.26)	(0.32)	(0.38)
Sulawesi Utara	0.76	1.48	0.23	2.82	2.42	0.87	1.06	2.94	3.04	3.13	3.20	3.26	3.31	3.36
Sulawesi Tengah	0.55	1.77	0.24	3.39	3.15	0.03	0.98	3.43	3.46	3.48	3.51	3.52	3.54	3.56
Sulawesi Selatan	2.99	2.30	0.95	3.72	3.46	-	2.41	3.80	3.87	3.93	3.97	4.01	4.05	4.08
Sulawesi Tenggara	0.71	1.68	0.27	3.19	2.79	-	1.03	3.22	3.23	3.25	3.26	3.27	3.28	3.29
Bali	2.10	1.49	0.51	2.55	1.75	1.57	1.80	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
Nusa Tenggara Barat	1.19	1.85	0.64	2.95	6.21	0.10	1.34	2.95	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94	2.94
Nusa Tenggara Timur	0.58	1.81	0.27	3.43	3.44	-	1.01	3.48	3.52	3.56	3.59	3.61	3.63	3.65
Maluku	0.37	1.72	0.28	3.21	3.69	0.54	0.93	3.20	3.19	3.18	3.18	3.17	3.17	3.16
Papua	0.51	3.31	1.74	5.23	-	29.09	4.51	5.11	5.00	4.92	4.85	4.78	4.73	4.68
Maluku Utara	0.14	1.35	0.21	2.46	4.23	0.02	0.61	2.49	2.51	2.53	2.54	2.56	2.57	2.58
Banten	3.49	1.77	1.38	2.10	3.73	0.03	2.46	2.10	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09
Bangka Belitung	0.53	1.27	0.39	2.19	1.97	0.42	0.81	2.21	2.22	2.24	2.24	2.25	2.26	2.27
Gorontalo	0.21	1.08	0.10	2.10	2.32	-	0.53	2.10	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09	2.09
Kepulauan Riau	0.84	2.62	3.41	1.80	1.81	-	1.47	1.90	1.98	2.05	2.10	2.15	2.20	2.23
Papua Barat	0.17	2.81	2.44	3.19	3.35	16.27	2.84	3.13	3.08	3.04	3.00	2.97	2.94	2.92
Sulawesi Barat	0.18	1.08	0.14	2.01	2.96	0.58	0.58	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.07	2.08
Total	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Kep	4.40	12.11	5.43	18.86	23.76	1.94	7.23	19.16	19.41	19.62	19.80	19.95	20.08	20.19
Non-Kep	95.60	87.89	94.57	81.14	76.24	98.06	92.77	80.84	80.59	80.38	80.20	80.05	79.92	79.81

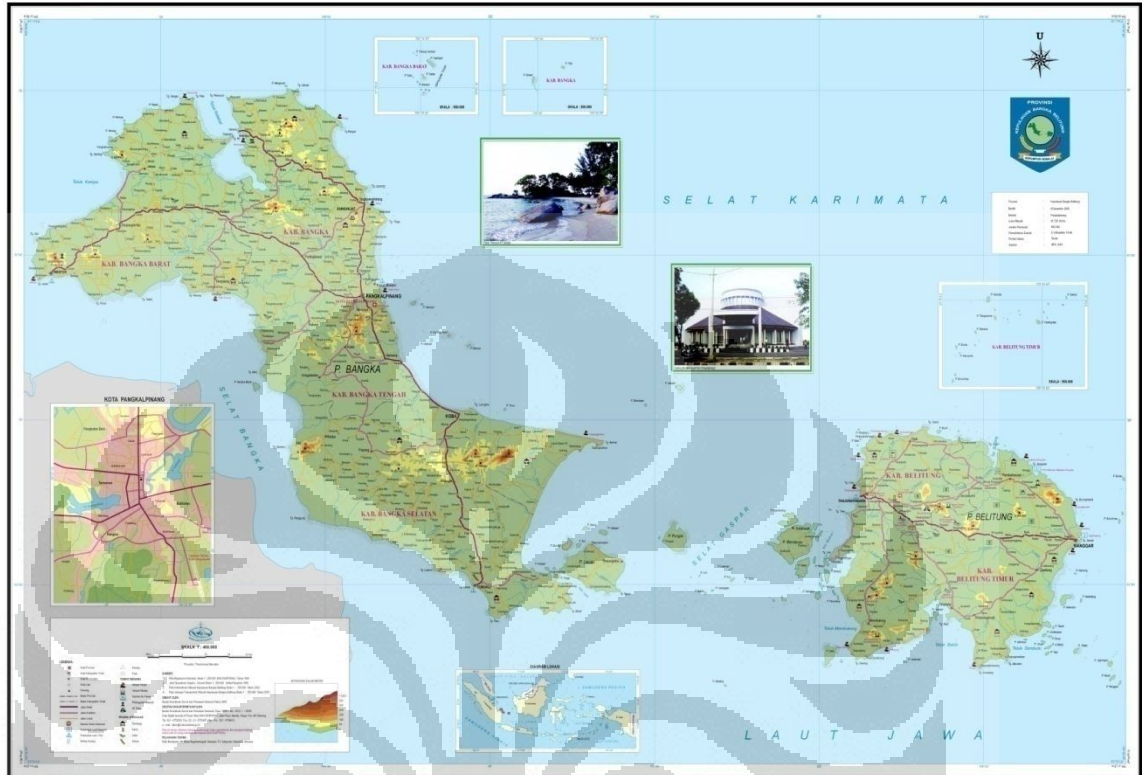
LAMPIRAN 8-5

SIMULASI DISTRIBUSI DAU DALAM PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BERDASARKAN APBD 2011 (%) (2)

	Komposisi Luas Wilayah Lautan						
	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
Provinsi	PDPTN	PDPTN	PDPTN	PDPTN	PDPTN	PDPTN	PDPTN
Nanggroe Aceh Darussalam	5.97	5.98	5.99	6.00	6.01	6.02	6.02
Sumatera Utara	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	3.76
Sumatera Barat	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
Riau	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59	3.59
Jambi	1.18	1.18	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
Sumatera Selatan	2.89	2.89	2.88	2.88	2.88	2.88	2.88
Bengkulu	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96
Lampung	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82	1.82
DKI Jakarta	21.90	21.90	21.90	21.90	21.90	21.89	21.89
Jawa Barat	7.08	7.08	7.07	7.07	7.07	7.07	7.07
Jawa Tengah	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93	4.93
DI Yogyakarta	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19
Jawa Timur	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32	8.32
Kalimantan Barat	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46	1.46
Kalimantan Tengah	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43	1.43
Kalimantan Selatan	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06
Kalimantan Timur	5.42	5.42	5.42	5.42	5.41	5.41	5.41
Sulawesi Utara	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06
Sulawesi Tengah	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98
Sulawesi Selatan	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41	2.41
Sulawesi Tenggara	1.03	1.03	1.02	1.02	1.02	1.02	1.02
Bali	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80
Nusa Tenggara Barat	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34	1.34
Nusa Tenggara Timur	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01
Maluku	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93
Papua	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51	4.51
Maluku Utara	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61	0.61
Banten	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46	2.46
Bangka Belitung	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81
Gorontalo	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
Kepulauan Riau	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.46	1.46
Papua Barat	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84	2.84
Sulawesi Barat	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
Total	100	100	100	100	100	100	100
Kep	7.23	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22	7.22
Non-Kep	92.77	92.78	92.78	92.78	92.78	92.78	92.78

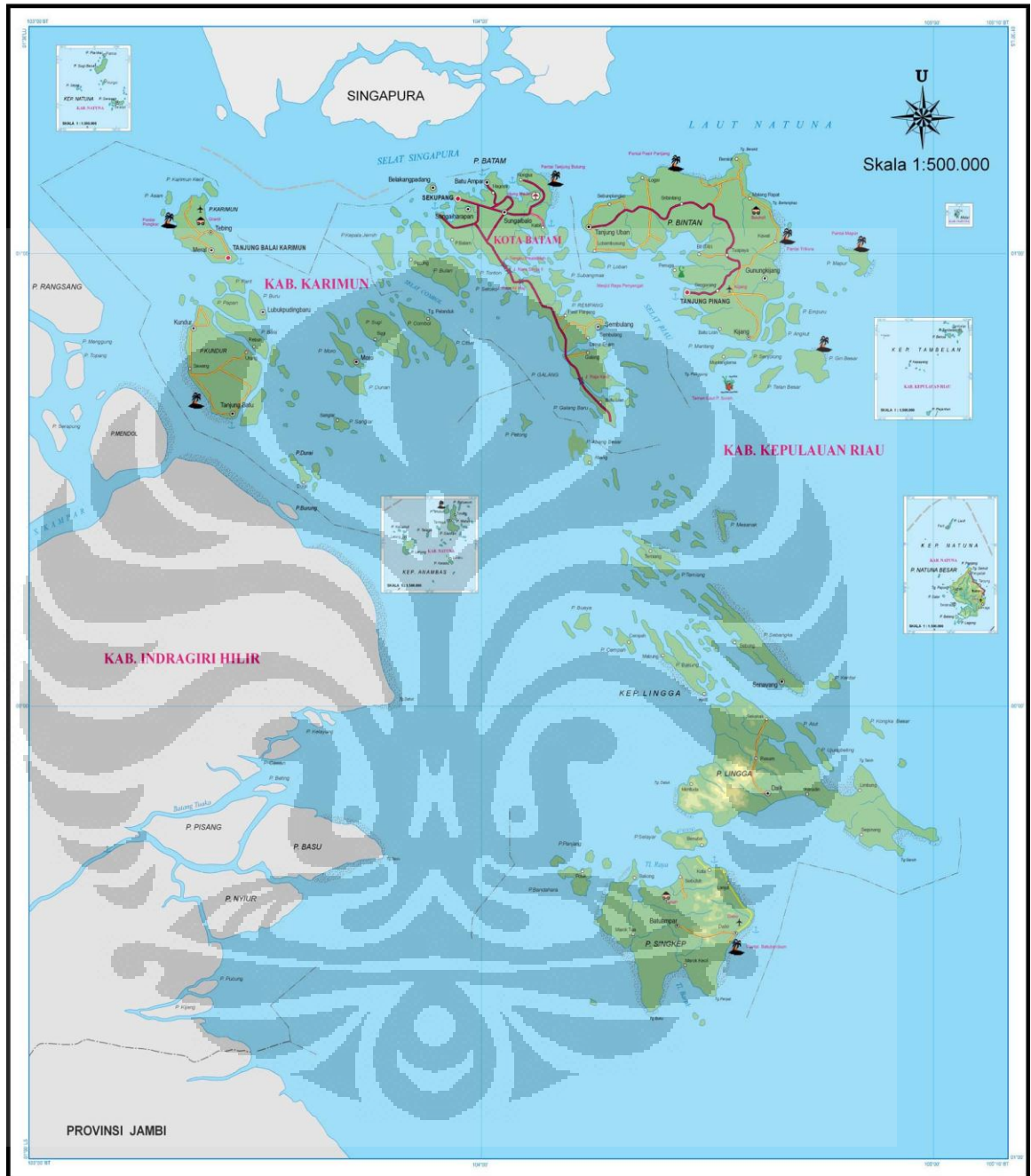
LAMPIRAN 9-1

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Sumber: Bakosurtanal

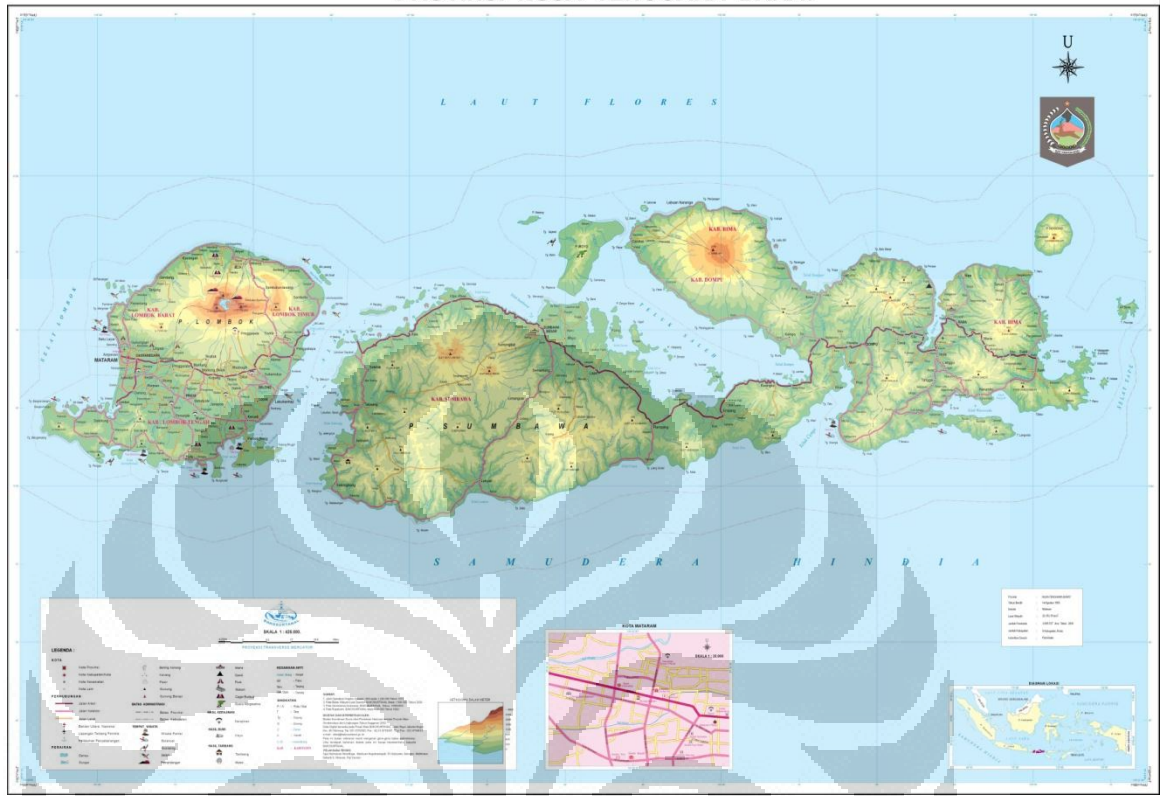
LAMPIRAN 9-2
PROVINSI KEPULAUANRIAU



Sumber: Bakosurtanal

LAMPIRAN 9-3

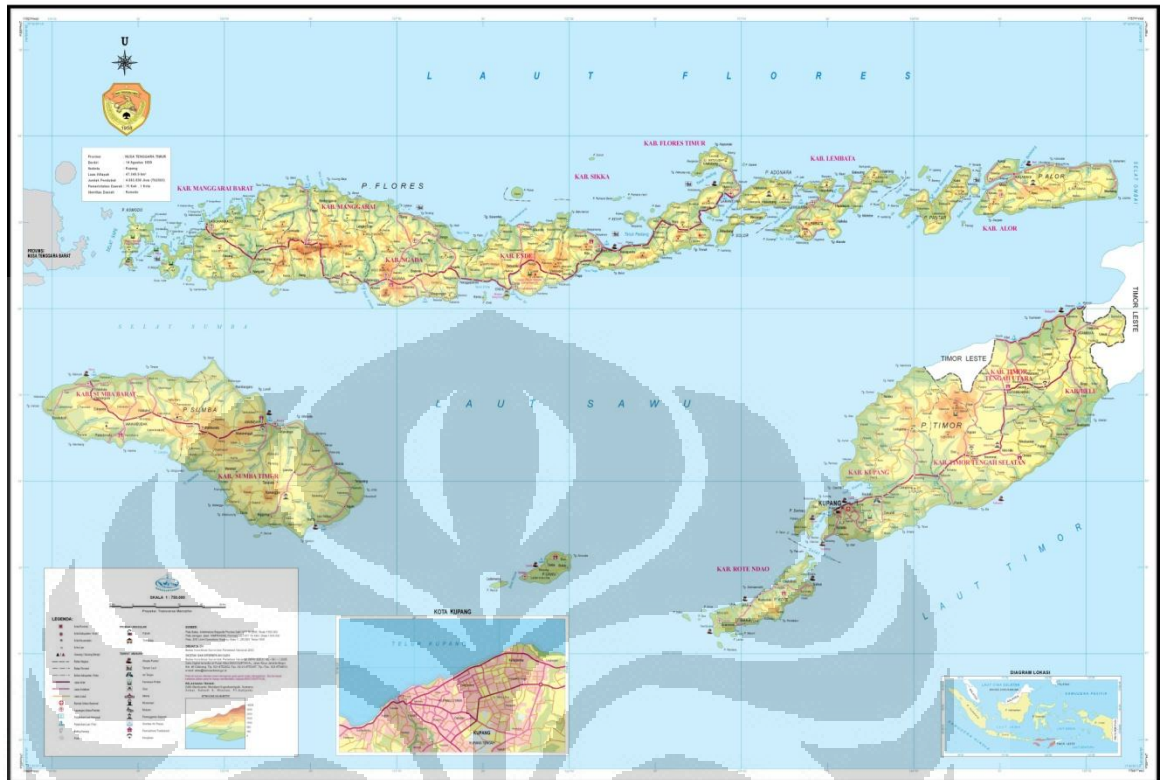
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



Sumber: Bakosurtanal

LAMPIRAN 9-4

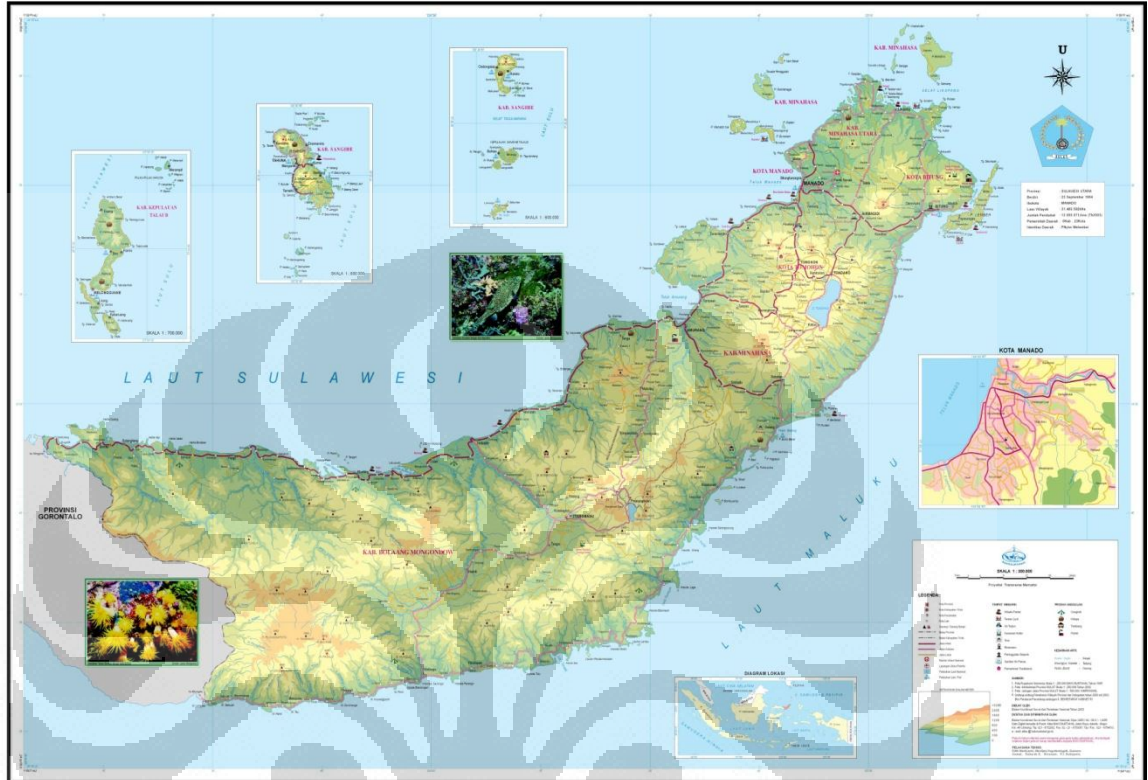
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



Sumber: Bakosurtanal

LAMPIRAN 9-5

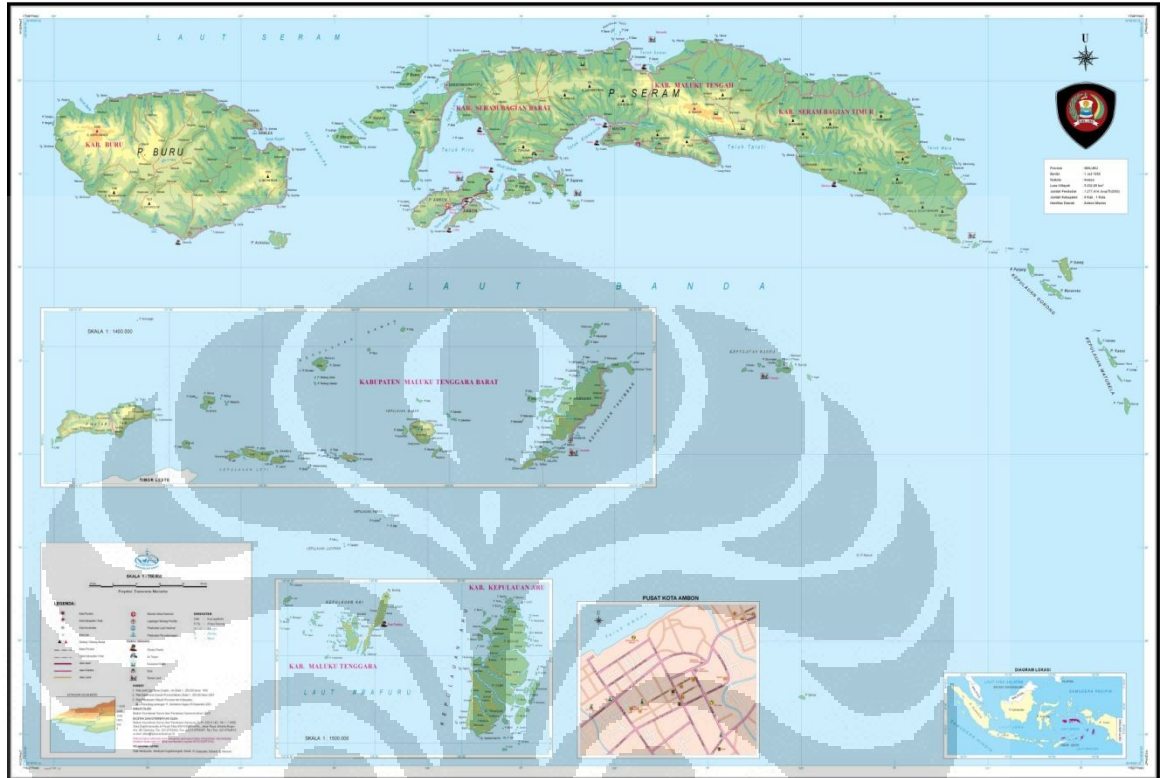
PROVINSI SULAWESI UTARA



Sumber: Bakosurtanal

LAMPIRAN 9-6

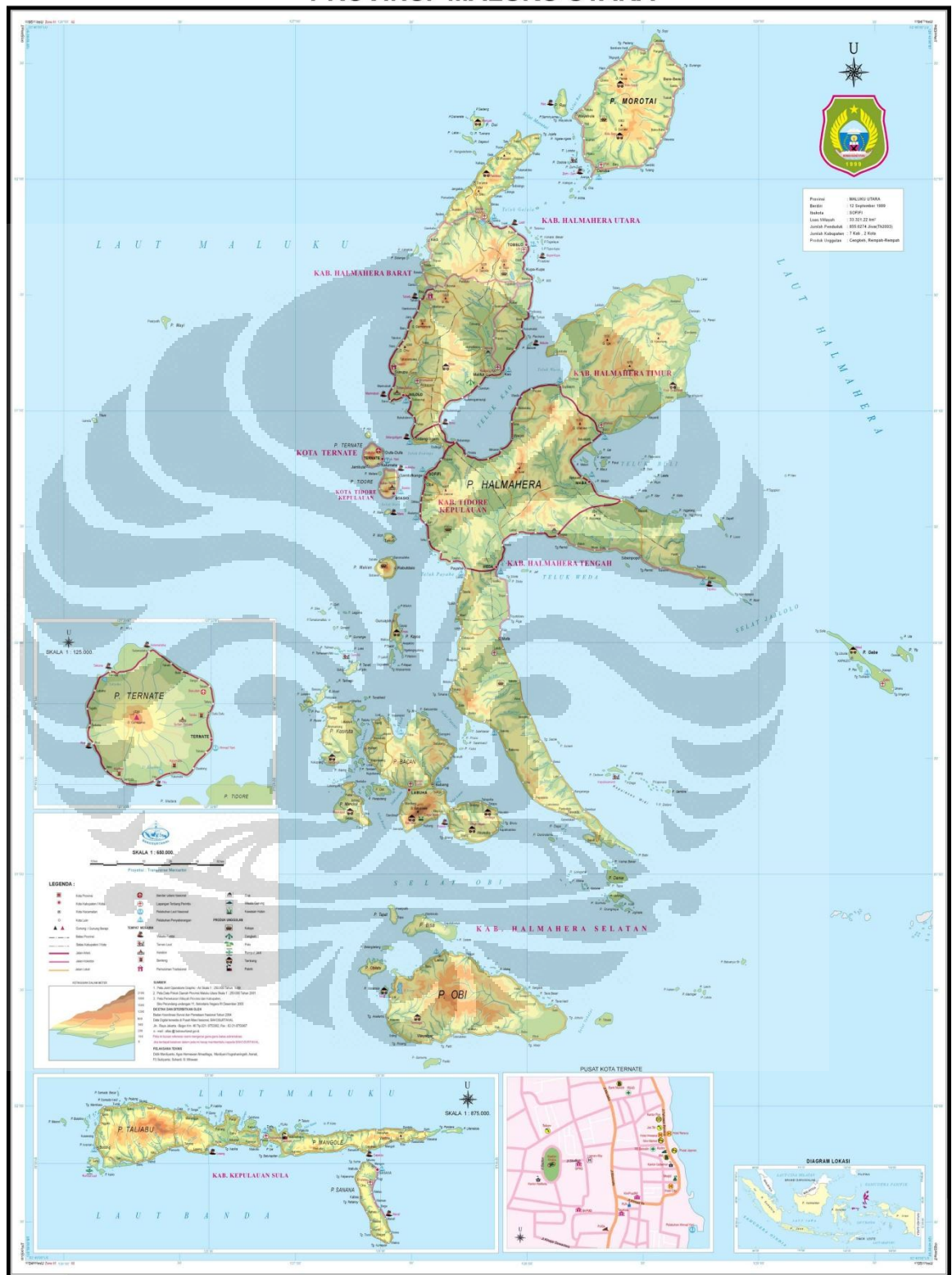
PROVINSI MALUKU



Sumber: Bakosurtanal

LAMPIRAN 9-7

PROVINSI MALUKU UTARA



Sumber: Bakosurtanal